



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 - 2023



SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik....

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

14. Peraturan....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 – 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Dewan....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.

12. Rencana....

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan Rencana Kerja suatu Perangkat Daerah.
23. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

24. Kajian....

24. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan, dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Belitung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a. penyusunan RKPD; dan
b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 memperhatikan dan berpedoman pada:

a. RPJMN;
b. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. RPJPD Kabupaten Belitung; dan
d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung.

Pasal 5

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih Tahun 2018.

(2) Penjabaran....

(2) Penjabaran visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, program Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH memuat realisasi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah.

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH memuat strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

g. BAB....

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH memuat seluruh progam yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan Standar Pelayanaan Minimal yang disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan, serta kerangka pendanaan.

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH memuat ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

i. BAB IX : PENUTUP memuat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan.

(4) Tata....

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati terpilih berikutnya.

BAB....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

M.Z. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.3/2019)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018– 2023

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Belitung untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Belitung dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu – isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 - 2023

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 5
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 29
2.3 Aspek Pelayanan Umum 78
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 142

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 167
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 167
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 194
3.3 Kerangka Pendanaan 200

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 211
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 211
4.2 Isu Strategis 221

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 245
5.1 Visi 245
5.2 Misi 247
5.3 Tujuan 249
5.4 Sasaran 250

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 255
6.1 Strategi 255
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan 265
6.3 Program Pembangunan Daerah 280

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 295

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 341
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah 341

BAB IX PENUTUP 353

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup berbagai perubahan dari struktur sosial dengan tetap mengejar pertumbuhan ekonomi dalam penanganan ketimpangan pendapatan, serta dalam penanganan kemiskinan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya diawali dengan penyusunan perencanaan melalui siklus perencanaan pembangunan. Pada perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan dan hakekat dari pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat terwujud, diperlukan suatu perencanaan yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya

dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif, serta program perangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan diharapkan terjalin kolaborasi yang intens antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Belitung menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan Perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan Teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan Atas-Bawah (*Top* Down) dan Bawah-Atas (*Bottom* Up)** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, antara lain:

a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.

1) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan

faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3) Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

   Penyusunan RPJMD mempedomani RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan bidang dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kabupaten Belitung. Selain itu memperhatikan juga Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 yang sedang disusun.

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

   Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahap terakhir dari perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.

   Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2014-2034 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

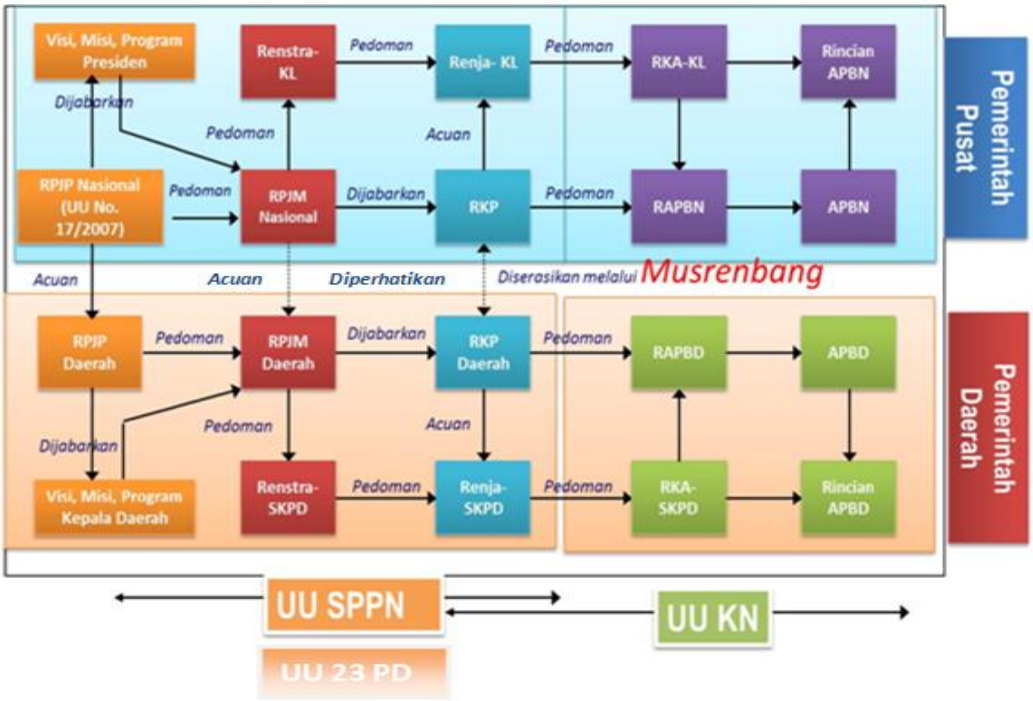
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target pagu indikatif program dalam RPJMD masih bersifat indikatif, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

e. Rencana Strategis Perangkat Daerah

   RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.

Dalam diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1.



1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud sebagai arah pembangunan dan pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak terkait lainnya) dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi;
3. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terintegrasi, terarah, terinci, terpadu dan terukur dalam periode waktu 5 (lima) tahun;
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
5. Merumuskan indikator program beserta indikator kinerja untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan serta menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat penjelasan tentang realisasi kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Belitung.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang disertai indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan, serta

kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran wajib dan mengikat.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini menyampaikan harapan pencapaian dari Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD sesuai peraturan perundangan berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², terdiri dari daratan dengan luas 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan yaitu 6.363 km². Luas wilayah daratan berdasarkan letak wilayah di tiap kecamatan, yaitu a) Kecamatan Membalong dengan luas wilayah 909,55 km²; b) Kecamatan Tanjungpandan dengan luas wilayah 378,45 km²; c) Kecamatan Badau dengan luas wilayah 458,20 km²; d) Kecamatan Sijuk dengan luas wilayah 413,99 km²; dan e) Kecamatan Selat Nasik dengan luas wilayah 133,50 km². Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08'-107°58' BT dan 02°30'-03°15' LS, dengan batas wilayah meliputi :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 100 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau di setiap kecamatan digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1

Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Jumlah Pulau (Buah)
(1)	(2)	(3)
1.	Membalong	36
2.	Tanjungpandan	5
3.	Sijuk	25
4.	Badau	8
5.	Selat Nasik	26
	Jumlah	**100**

Sumber data : Belitung Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan kondisi topografi, daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Daerah pedalaman Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit yang kemudian membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai, sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungai yang berbentuk seperti pohon. Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865,0 ha atau 56,98 % dari luas Kabupaten Belitung.

Batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km² atau 5,82 % dari luas Kabupaten Belitung. Daerah aliran sungai yang dimiliki Kabupaten Belitung meliputi :

a. Sebelah Utara oleh Daerah Aliran Sungai Buding;
b. Sebelah Selatan oleh Daerah Aliran Sungai Pala dan Kembiri;
c. Sebelah Barat oleh Daerah Aliran Sungai Brang dan Cerucuk.

Kabupaten Belitung memiliki iklim tropis dan basah dengan variasi hujan bulanan antara 0,00 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai dengan 25 hari setiap bulannya.

Mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, maka rencana pola ruang Kabupaten Belitung meliputi :

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Lindung

   Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan ini terdiri atas kawasan hutan lindung

dengan luas kurang lebih 39.306 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam) hektar dan terletak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

   Kawasan Perlindungan setempat terdiri dari :

   a. Sempadan pantai, sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai tersebar di wilayah Kabupaten.
   b. Sempadan sungai.
   c. Sempadan sekitar kolong dan/atau waduk yang diperuntukkan sebagai sumber air baku dan/atau kawasan mata air.
   d. Ruang terbuka hijau pantai terdapat di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk.

3. Kawasan Hutan Konservasi

   Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan ini terdiri atas kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Gunung Lalang seluas kurang lebih 2.590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh) hektar.

4. Kawasan Cagar Budaya

   Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan ini terdiri dari : Bangunan Gedung Eks. Kantor Pusat PT. Timah (Jam Gede); Wisma Bougenville (Bekas Rumah *Hoofadministratur*); Eks *Chineesche Hospital*; RSUD Kab. Belitung (Eks *Europeesch Kliniek*); Rumah Tipe Kolonial I; Rumah Tipe Kolonial II; Museum Pemerintah Kabupaten Belitung; Wisma Pantai; Bekas Kapel Regina Pacis; Eks *Societeit*; Rumah Kapiten Pang Tjong-Toen; Kelenteng Hok Tek Che; Kian Sien; SMPN 1 Tanjungpandan (Eks *Holland Indisch School*); Kantor Dinas P dan K Kabupaten Belitung; Gedung PWRI (Eks *Tuindienst*); Eks. Kantor Asisten Residen (Dinas P dan K); Kantor Kodim 0414 Garuda Dempo; Galangan Kapal (*Dockyard*); Wisma Dian (Benteng Kuehn); Gedung Nasional; Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung); *Kherkhof* (Pemakaman Belanda); Situs Makam KA. Rahat; Situs Bukit Luday; Mercusuar Pulau Sumedang; Situs Lempak Tuk Layang; Museum Badau; Makam Datuk Mayang Geresik; Situs Kota Tanah Cerucuk (Cakraningrat X); Makam Tuk Kundo;

Struktur Gerbang Bentek Kenupuk; Situs Gunung Tajam (Makam Syech Abubakar Abdullah); Situs Mentikus; Masjid Al Ikhlas; Kelenteng Hok Tek Che; Mercusuar Pulau Lengkuas; Situs Padang Kelarin; Situs Padang Pendam; Kelenteng Piet Tie Miauw; dan Mercusuar Tanjung Lancur.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

   Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi :

   a. Banjir, terdapat di Kelurahan Parit, Kelurahan Kampung Damai, Desa Air Raya, Desa Badau, Desa Membalong, dan Desa Sijuk.
   b. Angin puting beliung, terdapat di Desa Padang Kandis, Desa Pelepak Putih, Desa Kacang Butor, Desa Perawas, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Juru Seberang, dan Desa Pegantungan.
   c. Banjir rob, tersebar di sekitar muara sungai Desa Cerucuk, sepanjang pantai Air Saga, Desa Juru Seberang, Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan, Desa Padang Kandis, Desa Mentigi, Desa Tanjung Rusa, Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Pulau Gersik, Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Sumedang
   d. Abrasi/erosi, tersebar di sepanjang pantai Air Saga, Juru Seberang, Sungai Samak, Pegantungan, Dudat, Padang Kandis, Mentigi, Tanjung Rusa, Keciput, Tanjungtinggi, Pulau Gersik, Pulau Sumedang, Pulau Buntar, Suak Gual dan Pulau Kuil.
   e. Badai laut tropis, tersebar di perairan utara pulau Belitung, pemukiman pulau-pulau dan kawasan pesisir pantai yang *mangrove* dan karang rusak.
   f. Petir, terdapat di Desa Tanjung Rusa, laut sekitar Desa Pegantungan, Batu Itam, Tanjung Binga, Keciput dan Sijuk.
   g. Kebakaran, tersebar di Kecamatan Tanjungpandan dan Desa Suak Gual (daerah gambut).

6. Kawasan Lindung Geologi

   Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang memiliki keunikan alam batuan, fosil, bentang alam, dan proses geologi yang perlu dilindungi.

7. Kawasan Lindung Lainnya

   Kawasan Lindung Lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah, yang meliputi :

a. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Pohon Kruing di Air Batu Buding, pohon Blangeran (*Shorea belangeran*) di hutan produksi Batu Itam Air Gelarak, dan pohon Bulin di Petaling; dan
b. Kawasan Habitat Satwa Tupai Selat Nasik di Selat Nasik, Pelile'an (*Tarsius Bancanus Saltator*) di Kecamatan Badau.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, termasuk di dalamnya diperuntukan sebagai hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah seluas kurang lebih 41.530 (empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdiri atas :
   a) Pertanian lahan basah terdiri atas :
      i. Budidaya tanaman pangan kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar dengan luas lahan sawah 2.000 (dua ribu) hektar dan luas lahan palawija 1.000 (seribu) hektar yang tersebar di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Membalong dengan irigasi sepanjang 40 km (40.000 m);
      ii. Budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong, dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) hektar.
   b) Pertanian lahan kering, terdiri atas :
      i. Kawasan budidaya tanaman pangan hotikultura dan palawija seluas 3000 (tiga ribu) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Selat Nasik, dan Kecamatan Membalong. dengan rincian luas lahan pekarangan 1.000 (seribu) hektar dan luas lahan non pekarangan 1.000 (seribu) hektar.
      ii. Perkebunan besar swasta dengan luas kurang lebih 35.000 (tiga puluh

lima ribu) hektar yang terdiri dari perkebunan besar swasta komoditas kelapa sawit 30.000 (tiga puluh ribu) hektar dan perkebunan besar swasta komoditas non sawit 5000 (lima ribu) hektar terletak di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Sijuk.

iii. Kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 31.090 (tiga puluh satu ribu sembilan puluh) hektar terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.

3. Pengembangan kegiatan peternakan, terdiri atas :
   a) Budidaya peternakan skala sedang dan besar menurut jenis ternak tersebar di Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Selat Nasik.
   b) Rumah Pemotongan Hewan Terpadu seluas lebih kurang 5 (lima) hektar terletak di Desa Juru Seberang.
4. Kawasan Peruntukan Perikanan.
   a) Kawasan perikanan tangkap, terletak di perairan umum daratan tersebar di seluruh kecamatan.
   b) Kawasan budidaya perikanan, terdiri atas :
      i. Kawasan budidaya perikanan air payau dengan luas lebih kurang 249,78 (dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan.

      ii. Kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luas kurang lebih 179,7 (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh) Hektar dengan pengembangan potensi tersebar di seluruh kecamatan
   c) Kawasan pengolahan hasil perikanan, terletak di Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.
5. Kawasan Minapolitan, terdiri dari :
   a) Zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan; dan
   b) Zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Badau.
6. Kawasan Peruntukan Pertambangan :
   a) Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan, luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) hektar meliputi wilayah darat terdapat di Kecamatan

Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik.

b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang meliputi mineral logam, non logam, dan batuan, luas kurang lebih 40.464 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari yang berada di luar kawasan hutan seluas kurang lebih 29.900 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar dan potensi yang berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 10.564 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat) hektar.

7. Kawasan Peruntukan Industri terdiri dari :
   a) Kawasan industri, dengan luas kurang lebih 1.414 (seribu empat ratus empat belas) hektar terletak di Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan Kecamatan Badau, dan Desa Bantan Kecamatan Membalong.
   b) Area industri berbasis produksi, terletak di seluruh kecamatan.
   c) Pengembangan industri kecil dan menengah, tersebar diseluruh kecamatan.
   d) Pengembangan industri rumah tangga, tersebar diseluruh kecamatan.
8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

   Kawasan Peruntukan Pariwisata memiliki luas kurang lebih 11. 602 (sebelas ribu enam ratus dua) hektar, meliputi:
   a) Kawasan Pariwisata Alam, terdiri atas :
      i. Pariwisata alam pantai, meliputi : Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Binga, Pantai Secupak, Pantai Mabai, Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Pendaunan Indah, Pantai Penyaeran, Pantai Batu Rakit, Pantai Marina, Pantai Bebilai, Pantai Siantu, Pantai Batu Bukit, Pantai Sengkelik, Pantai Batu Bedil, Pantai Tanjung Genting, Pantai Tanjung Rusa, Pantai Mentigi, Pantai Tanjungpendam, Pantai Cawat, Pantai Cepun, Pantai Tanjung Kiras, Pantai Teluk Gembira, Pantai Penyabong, Pantai Batu Lubang, Pantai Awan Mendung, Pantai Pulau Bayan, Pantai Pegantungan, Pantai Pasir Panjang, Pantai Tanah Tinggi, dan Pantai Gilang.
      ii. Pariwisata alam pulau, meliputi : Pulau Kera, Pulau Burung, Pulau Pasir, Pulau Kelayang, Pulau Lengkuas, Pulau Aji, Pulau Siantu, Pulau Buluh/ Mempalik, Pulau Kemulutan Besar, Pulau Kemulutan Kecil, Pulau Kambing, Pulau Rengit, Pulau Naduk, Pulau Batu Dinding, Pulau Kalamoa, Pulau Lima, Gugusan Pulau di Desa Juru Seberang, Pulau Mentikus, Pulau Seliu, Pulau Gersik, Pulau Kalimambang, Pulau

Sekupuk, Pulau Sekudang, Pulau Kampak, Pulau Katan, Pulau Kepayang, Pulau Batu Layar, Pulau Gusong Are, Pulau Bayan, Pulau Emperut, Pulau Genting, Pulau Pelema Besar, Pulau Pelema Kecil, Pulau Tupai, Pulau Seribu, Pulau Kapak, pulau Betangan, pulau Liak Besar, Pulau Liak Kecil, Pulau Belatuk, Pulau Sebongkok, Pulau Sepindang, Pulau Sekutai, Pulau Piling, Pulau Punai dan pulau-pulau lainnya.

iii. Pariwisata alam sungai, meliputi: Sungai Petaling, Sungai Cerucuk, Sungai Padang, dan Sungai Brang.

iv. Pariwisata alam lainnya, meliputi : Bukit Batu Baginde, Bukit Batu Telaga Bulan, Goa Nek Santen, Bukit Paramont, Air Terjun Gurok Beraye, Hutan Kemasyarakatan Desa Juru Seberang, Hutan Kemasyarakatan Munsang, Hutan Produksi Konversi Tanjung Siantu, Goa di Juru Seberang, Pemandian Alam Jerry, Pemandian Tirta Marundang Indah, Pemandian Suci Indah, Batu Siang, Air Terjun Gunung Kubing, Air Lembung Dalam dan Air Terjun**,** Batu Mentas *Sanctuary*, Danau Kaolin Kolong Murai**,** Taman Hiburan Kolong Keramik,Desa Wisata Tanjung Tinggi, Kampong Oranye, Rindu Kampung, Mercusuar Tanjung Lancur.

b) Kawasan Pariwisata Budaya, terdiri atas :

i. Kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Membalong meliputi: Situs Ai' Labu (makam KA Rahat/Depati Tjakraningrat VIII), Situs Luday dan Membalong (makam Raja Belantu dan keturunan), Situs Lempak Tuk Layang, Mercusuar Pulau Sumedang.

ii. Kawasan pariwisata budaya di Kecamatan Badau meliputi : Situs Kota Tanah Cerucuk (makam KA Hatam/Depati Tjakraningrat VII dan makam KA Muhammad Saleh/Depati Tjakraningrat IX), Kawasan Situs Gunung Lilangan (makam Raja Badau/Datuk Mayang Geresik) dan Museum Badau, Situs Gunung Tajam (makam Syech Abu Bakar Abdullah) dan Situs Parit Gunong (makam Tuk Kundo).

iii. Pariwisata budaya di Kecamatan Sijuk meliputi : Desa Balitung, Situs Mentikus Air Selumar, Mesjid Tua Sijuk (Al Ikhlas), Kelenteng Sijuk, Mercusuar Pulau Lengkuas, Situs Padang Kelaring Sungai Padang.

iv. Pariwisata budaya di Kecamatan Selat Nasik meliputi Mercusuar Pulau Mendanau (Tanjung Lancur).

v. Pariwisata budaya di Kecamatan Tanjungpandan meliputi Museum Pemkab Belitung, Rumah Adat Belitung, Kawasan Kota Tua Tanjungpandan meliputi Eks. *NV GMB* Jam Gede, Rumah tipe kolonial I dan tipe kolonial II, Benteng Penutuk Perawas, Rumah Kapiten Phang Tjong-toen, *Kian Sien*, Kelenteng Hok Tek Che, Eks. *Societeit* Toapekong Ho A Joen, Rumah Tuan Kuase, Hotel Pantai (Mess KJUB Pertim), Eks. *Europeesche Kliniek*, Museum Tanjungpandan, eks Gereja Regina Pacis, Gedung Nasional, Eks *Tuindienst*, Eks *Landraad*, Eks *Holland Indisch-School* (SMPN 1 Tanjungpandan), Eks. Kantor Asisten Residen (Kantor KODIM), Eks. *Districthoofd* (Rumah Dinas Kapolres Belitung), Situs Benteng Kuehn, Situs Dockyard, Kerkhof Tanjungpandan (pekuburan Belanda), Mesjid Al Mabrur, Eks Kantor Asisten Residence, Gedung Nasional Padang Miring.

c) Kawasan Pariwisata Buatan, tersebar di seluruh kecamatan.

d) Kawasan Agrowisata, meliputi kebun durian Dusun Aik Gede, Kebun Buah Badau, Taman Kehati Aik Selumar, Taman Kehati Desa Lassar.

9. Kawasan Peruntukan Permukiman, terdiri atas :
   a) kawasan permukiman perkotaan, dengan luas kurang lebih 9.170 (sembilan ribu seratus tujuh puluh) hektar, terletak di kawasan perkotaan Tanjungpandan yang merupakan *Central Bussines District.*
   b) kawasan permukiman perdesaan, dengan luas kurang lebih 20.020 (dua puluh ribu dua puluh) hektar terletak di Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik.
10. Kawasan Peruntukan Lainnya, adalah kawasan latihan tempur *Air Weapon Range (AWR)* TNI Angkatan Udara Republik Indonesia mendukung pertahanan dan keamanan seluas lebih kurang 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Hektar di Desa Buding Kecamatan Badau dan Kawasan Radar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia di Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk.

c. Kawasan Strategis

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:

1. Kawasan strategis provinsi sebagaimana pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, terdiri atas:

a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Selat Nasik,
b. Kawasan pengembangan ekonomi secara khusus Suge, meliputi pelabuhan Laut Regional Tanjung Batu dan Kawasan Industri Terpadu Suge sebagai simpul transportasi barang dan orang skala nasional serta kegiatan industri yang berpotensi sebagai pemicu ekonomi wilayah provinsi.
c. Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk.
d. Kawasan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan.
e. Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk.
f. Kawasan Museum Nasional Maritim di Kecamatan Sijuk.
g. Cagar alam Gunung Lalang di Kecamatan Tanjungpandan.
h. Taman Kehati di Kecamatan Sijuk.

2. Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri atas :
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.

   Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai telah dijelaskan di atas, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Tanjungpandan sebagai *Central Bussines District (CBD);*
   b. Kawasan Wisata Kecamatan Sijuk dan Membalong;
   c. Kawasan Industri Suge dan Kawasan Pelabuhan Regional Tanjung Batu sebagai kawasan pengembangan ekonomi secara khusus;
   d. Kawasan agropolitan Kecamatan Membalong;
   e. Kawasan minapolitan yang terdiri dari zona inti terletak di Kecamatan Tanjungpandan dan zona pengembangan terletak di Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Membalong, Kecamatan Sijuk dan Kecamatan Badau;
   f. Kawasan strategis cepat tumbuh Kecamatan Sijuk, Badau dan Membalong;
   g. Kawasan pengembangan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin;
   h. Kawasan pariwisata.

   Sebagai pengejawantahan dari penentuan sebagai kawasan wisata sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pemerintah pusat menetapkan kawasan strategis nasional, antara lain sebagai berikut:
   a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kecamatan Sijuk;

b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kecamatan Sijuk;
c. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik;
d. Geopark Nasional.

Substansi pengembangan Geopark adalah suatu kawasan yang dapat memberikan perlindungan geologi dan geomorfologi secara berkelanjutan. Hal tersebut merupaan faktor utama dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

Adapun Struktur Ruang Kabupaten Belitung meliputi:

a. Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKW, sistem prasarana wilayah di Tanjungpandan; PKL di Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik; dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di pusat-pusat desa/kelurahan sebagai pusat pelayanan bagi desa/kelurahan itu sendiri atau beberapa desa/kelurahan di sekitarnya. Adapun Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat nasik mempunyai pusat pelayanan lingkungan yang berada di Desa nya masing-masing yaitu Kecamatan Sijuk yang dilayani oleh Desa Sijuk, Kecamatan Badau oleh Desa Badau, Kecamatan Membalong oleh Desa Membalong dan Kecamatan Selat Nasik oleh Desa Selat Nasik. Jadi keempat kecamatan tersebut selain Pusat Kegiatan Lokal, Kecamatan tersebut diatas juga menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani beberapa desa disekitarnya.
b. Rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang meliputi:
    1. Sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas sistem jaringan jalan, jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
    2. Sistem jaringan prasarana energi, terdiri atas jaringan batubara, minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan prasarana kelistrikan.
    3. Jaringan telekomunikasi terdiri atas penyelenggaraan jaringan tetap, penyelenggaraan jaringan bergerak.
    4. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air terdiri atas sistem wilayah sungai, sistem daerah irigasi dan sistem jaringan air baku.

    Sistem prasarana lainnya, terdiri atas sistem pengelolaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan limbah,

pengembangan prasarana perikanan, dan pengembangan prasarana pemakaman umum.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Belitung terletak di sebelah timur pulau sumatera. Secara geografis dan kondisi geologi, Kabupaten Belitung bukan berada pada gugusan lempeng bumi yang rawan gempa, namun tidak dipungkiri bahwa Kabupaten Belitung juga berpotensi terkena bencana yang lain seperti banjir, angin puting beliung, maupun banjir rob. Berikut diuraikan kajian resiko bencana dan titik-titik rawan bencana di Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah Serta Database Peta Potensi Bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

Tabel 2.2
Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jenis Bahaya	Bahaya				
			Luas Bahaya (HA)			Total Luas	Kelas
			Rendah	Sedang	Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	MEMBALONG	Banjir	73.010	14.845	648	88.503	Rendah
		Cuaca Ekstrim	3	84.349	5	84.357	Tinggi
		Epidemi Dan Wabah Penyakit	2.841	-	-	2.841	Rendah
		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	4.032	-	4.032	Sedang
		Gempa Bumi	97.714	-	-	97.714	Rendah
		Kebakaran Hutan dan Lahan	-	24.924	7.407	32.331	Tinggi
		Kekeringan	-	97.707	-	97.707	Sedang
		Tanah Longsor	1.968	1.020	2.184	5.172	Tinggi
2.	TANJUNGPANDAN	Banjir	12.809	3.911	293	17.013	Sedang
		Cuaca Ekstrim	-	16.581	14	16.595	Sedang
		Epidemi Dan Wabah Penyakit	189	-	-	189	Rendah
		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	621	-	621	Sedang
		Gempa Bumi	17.546	-	-	17.546	Rendah
		Kebakaran Hutan dan Lahan	-	946	952	1.898	Tinggi
		Kegagalan Teknologi	-	463	-	463	Sedang
		Kekeringan	-	17.546	-	17.546	Sedang
		Tanah Longsor	159	-	-	159	Rendah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	BADAU	Banjir	35.131	5.590	320	41.041	Rendah
		Cuaca Ekstrim	-	38.863	3	38.866	Sedang
		Epidemi Dan Wabah Penyakit	3	-	-	3	Rendah
		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	1.271	-	1.271	Sedang
		Gempa Bumi	48.761	-	-	48.761	Rendah
		Kebakaran Hutan dan Lahan	-	15.422	5.262	20.684	Tinggi
		Kekeringan	-	48.754	-	48.754	Sedang
		Tanah Longsor	1.096	370	1.184	3.350	Tinggi
4.	SIJUK	Banjir	42.738	2.743	13	45.494	Rendah
		Cuaca Ekstrim	-	41.383	4	41.387	Sedang
		Epidemi Dan Wabah Penyakit	576	-	-	576	Rendah
		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	1.733	-	1.733	Sedang
		Gempa Bumi	48.213	-	-	48.213	Rendah
		Kebakaran Hutan dan Lahan	-	10.726	8.714	19.440	Tinggi
		Kekeringan	-	48.217	-	48.217	Sedang
		Tanah Longsor	246	198	-	444	Sedang
5.	SELAT NASIK	Banjir	12.527	1.073	6	13.606	Rendah
		Cuaca Ekstrim	2	10.002	44	10.048	Sedang
		Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	3.734	-	3.734	Sedang
		Gempa Bumi	17.127	-	-	17.127	Rendah
		Kebakaran Hutan dan Lahan	-	6.821	1.430	8.251	Tinggi
		Kekeringan	-	17.137	-	17.137	Sedang
		Tanah Longsor	-	306	-	306	Sedang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Disamping tabel kajian resiko bencana diatas, berikut diuraikan titik-titik yang menjadi lokasi rawan bencana di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.3
Titik-Titik Rawan Bencana Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Kelurahan/Desa	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanjungpandan	Banjir	Desa Perawas, Kelurahan Parit, Kelurahan Kampung Damai, Desa Air rayak, Air Merbau, Kelurahan Pangkal Lalang	
		Putting Beliung	Desa Pelempang Jaya, Desa Perawas, Desa Juru Seberang	
		Abrasi	Desa Air Saga, Kelurahan Tanjung Pendam, Desa Juru Seberang	
		Kebakaran	Tanjungpandan	
		DBD dan Cikungunya	Seluruh Desa	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Membalong	Banjir	Desa Bantan, Desa Lasar, Desa Padang Kandis, Desa Mentigi, Desa Membalong	
		Putting Beliung	Desa Padang Kandis	
		Banjir Rob dan Abrasi	Desa Padang Kandis, Desa Pulau Seliu, Desa Pulau Sumedang, Desa Mentigi, Desa Tanjung Rusa, Desa Lassar	
		Petir	Desa Tanjung Rusa	
		Gelombang Pasang	Desa Padang Kandis, Desa Pulau Sumedang	
		DBD dan Cikungunya	Seluruh Desa	
3	Badau	Banjir	Desa Cerucuk, Desa Badau, Desa Buding, Desa Kacang Butor	
		Angin Putting Beliung	Desa Kacang Butor, Desa Pegantungan	
		Banjir Rob	Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan	
		Abrasi	Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan	
		Petir	Desa Pegantungan	
4	Sijuk	Banjir	Desa Air Seru, Desa Selumar, Desa Pelepak Pute, Desa Keciput	
		Angin Putting Beliung	Desa Pelepak Pute, Desa Batu Itam, Desa Air Seru	
		Petir	Desa Batu Itam, Desa Tanjung Binga, Desa Keciput, Desa Sijuk	
		Kebakaran	Desa Keciput	
5	Selat Nasik	Banjir Rob	Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Desa Pulau Gersik	
		Abrasi	Desa Selat Nasik, Desa Suak Gual, Desa Pulau Gersik	
		Kebakaran	Desa Suak Gual	
		Gelombang Pasang	Desa Suak Gual, Desa Pulau Gersik	
		DBD dan Cikungunya	Seluruh Desa	

2.1.3 Aspek Demografi

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tahun 2018 Kabupaten Belitung memiliki jumlah penduduk sebesar 165.466 jiwa. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung masih lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih 1,50 persen dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 83.976 jiwa (50,75%) dan penduduk perempuan sebesar 81.490 jiwa (49,25%), terlihat bahwa komposisi penduduk didominasi oleh penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari *sex ratio* total penduduk Kabupaten Belitung sebesar 103,05. Senada dengan total penduduk, jika dilihat berdasarkan kelompok umur,

sex ratio laki-laki terhadap perempuan penduduk Kabupaten Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di atas 100 persen. *Trend* pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk	152.257	152.853	156.892	161.706	165.466
2	Komposisi menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-laki	78.023	78.086	79.704	82.197	83.976
	Perempuan	74.234	74.767	77.188	79.509	81.490
3	Sex ratio	105,10	104,44	103,26	103,38	103,05
4	Pertumbuhan(%)	0,50	0,39	2,64	3,07	2,33
5	Tingkat Kepadatan (km2)	66,38	66,64	68,40	70,50	72,14

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung cenderung mengalami peningkatan dari 0,50 % di tahun 2014 menjadi 3,07 % pada tahun 2017. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 2,32%. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Belitung dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor tingginya angka kelahiran yang disebabkan karena tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas / kelahiran maupun mortalitas / kematian penduduk Kabupaten Belitung dan faktor demografis yang menyebabkan tingginya arus migrasi yang masuk ke Kabupaten Belitung. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan risiko bagi munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan tindak kriminal. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan hidup dari berbagai aspek.

Kepadatan penduduk Kabupaten Belitung rata-rata mencapai 72,14 jiwa/ km^2 dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Tanjungpandan (243,677 jiwa/km^2) Sedangkan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Membalong 27,091 jiwa/km^2).

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daerah (km^2)	Penduduk (jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa / km^2)
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Membalong	12	909,550	12.697	11.944	24.641	27,091
2	Tanjungpandan	16	378,448	46.328	45.891	92.219	243,677
3	Badau	7	458,200	7.134	6.672	13.806	30,131
4	Sijuk	10	413,992	13.770	14.131	28.901	69,811
5	Selat Nasik	4	133,500	3.047	2.852	5.899	44,187
	Jumlah	**49**	**2.293,690**	**83.976**	**81.490**	**165.466**	**72,140**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2019

Penduduk Kabupaten Belitung tersebar di 49 Desa/Kelurahan, kondisi persebaran penduduk di Kabupaten Belitung masih belum merata, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk disetiap kecamatan sangatlah bervariasi, hal ini disebabkan oleh penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah kecamatan yang berbeda-beda, namun permukiman penduduk terpadat terkonsentrasi di Tanjungpandan, Hal ini terjadi karena Tanjungpandan merupakan ibu kota Kabupaten dan merupakan pusat pusat perdagangan, perhotelan, rumah makan/restoran dan juga pusat pendidikan.

Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Belitung adalah kecamatan Tanjungpandan sebesar 55,73 %, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Belitung secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Selat Nasik sebesar 3,57% di karenakan Kecamatan Selat Nasik berada di pulau tersendiri yang terpisah dari Pulau Belitung dan dengan luas wilayah yang juga tidak terlalu besar. Distribusi pertumbuhan Penduduk kabupaten Belitung per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Distribusi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung Per Kecamatan Tahun 2014- 2018

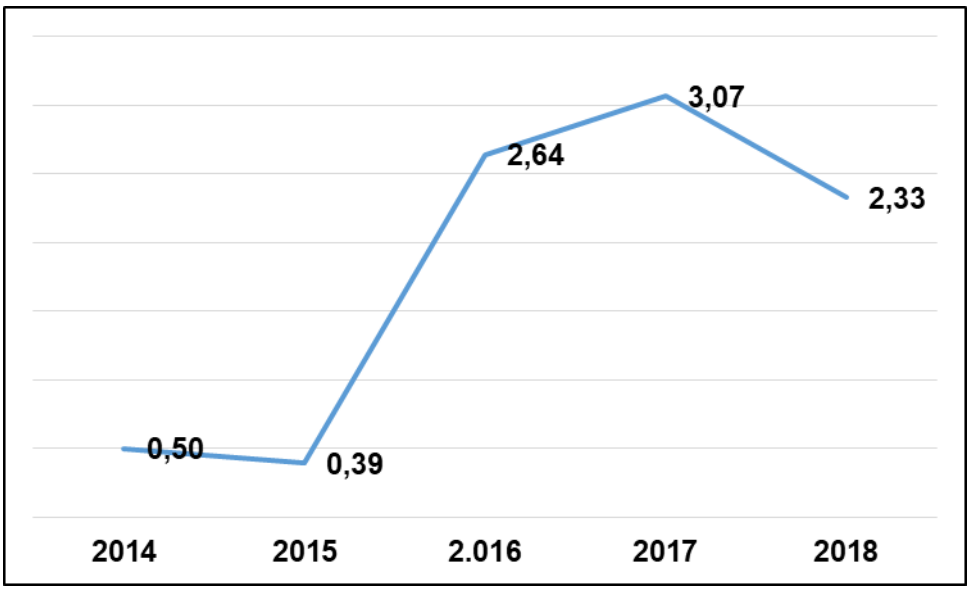
No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tanjungpandan	82.761	83.538	86.539	89.889	92.219
2.	Membalong	23.462	23.263	23.537	23.904	24.641

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Selat Nasik	5.948	5.869	5.867	5.893	5.899
4.	Sijuk	27.368	27.410	27.805	28.559	28.901
5.	Badau	12.718	12.774	13.144	13.461	13.806
	Jumlah	**152.257**	**152.854**	**156.892**	**161.706**	**165.466**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2019

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kelahiran, tingkat kematian serta migrasi atau mobilitas.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2019 (diolah)

Grafik diatas menyatakan bahwa penduduk di Kabupaten Belitung pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,33% dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 3,07% . Di tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung sempat turun sebesar 0,11% dari semula 0,50% menjadi 0,39%. Dengan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 2% selama tiga tahun terakhir, maka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung dapat dikategorikan “cepat”dengan kecenderungan peningkatan yang melambat.

Adapun komposisi penduduk Kabupaten Belitung memiliki karakteristik piramida penduduk muda yang berarti sebagian besar berada pada kelompok muda, tingkat kelahiran bayi yang tinggi, kelompok balita dan remaja masih sangat besar serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2014-2018

No	Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0-4	10.932	10.999	12.381	11.185	12.239
2	5-9	12.896	13.085	13.417	13.833	14.394
3	10-14	13.995	13.682	13.715	13.707	13.712
4	15-19	13.053	13.281	11.852	13.589	12.823
5	20-24	12.644	12.578	12.856	13.472	13.489
6	24-29	12.173	12.107	12.713	13.264	13.405
7	30-34	13.925	13.526	13.795	13.418	13.537
8	35-39	12.968	13.190	13.807	14.803	15.337
9	40-44	11.467	11.483	12.440	12.844	12.969
10	45-49	9.768	9.889	10.306	11.193	11.603
11	50-54	8.510	8.605	9.060	8.965	9.229
12	55-59	6.805	7.105	7.223	7.617	7.856
13	60-64	5.357	5.282	5.559	5.683	5.944
14	65-69	3.435	3.498	3.576	3.859	4.105
15	70-74	2.154	2.245	2.242	2.200	2.418
16	>75	2.175	2.298	1.950	2.074	2.406
	JUMLAH	**152.257**	**152.853**	**156.892**	**161.706**	**165.466**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Belitung memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja segala sektor. Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan usianya pada tahun 2018, proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,22%, usia muda (0-14 tahun) ada 24,38%, dan usia lanjut (65 tahun keatas) sebesar 5,39%.

Struktur penduduk dilihat dari aspek tingkat pendidikan, selama periode 2014-2018 menunjukkan peningkatan. Perbandingan persentase tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.8
Data Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2014 – 2018

No	Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Tidak/Belum Sekolah	30.319	30.820	30.532	28.354	29.184
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	25.062	24.506	23.938	26.124	26.801
3.	Tamat SD/Sederajat	42.816	41.893	41.733	42.752	43.544
4.	SLTP/Sederajat	21.275	21.786	22.858	24.013	24.323
5.	SLTA/Sederajat	26.753	27.383	30.387	32.127	32.860
6.	Diploma I/II	1.195	1.178	1.184	1.139	1.125
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.894	2.028	2.332	2.560	2.675
8.	Diploma IV/Strata I	2.859	3.166	3.820	4.486	4.788
9.	Strata II	82	92	107	150	164
10.	Strata III	2	2	1	1	2
Jumlah		**152.257**	**152.854**	**156.892**	**161.706**	**165.466**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Belitung dengan ijazah tertinggi berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung kecuali untuk penduduk yang pendidikannya tidak/belum tamat SD dan Tamat SD/MI/Sederajat, sedangkan penduduk yang berijazah SLTP/MTs/Sederajat, SMU/MA/Sederajat dan perguruan

tinggi terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebagian besar masyarakat dengan tingkat pendidikan SD/sederajat yaitu sebesar 26,32 %, SLTP/ sederajat sebesar 14,70% dan SLTA/sederajat 19,86%. Jika dilihat dari tingkat pendidikan SLTA/sederajat mengalami peningkatan hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Belitung semakin tinggi dan kesadaran penduduk untuk mengakses layanan pendidikan sudah baik.

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Penduduk yang besar dengan tingkat SDM yang rendah hanya akan menjadi beban bagi pembangunan disuatu wilayah. Oleh sebab itu, penanganan masalah penduduk sebaiknya tidak hanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertambahannya akan tetapi lebih dititik beratkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir yang ingin dicapai daerah dari pelaksanaan keseluruhan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu, terarah dan terintegerasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, pembahasan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat terbagi kedalam 3 fokus pembahasan, yaitu 1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; 2) kesejahteraan sosial; dan 3) seni budaya dan olah raga. Gambaran tingkat keberhasilan berikut capaian indikator dari masing-masing fokus kesejahteraan tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat diukur dan digambarkan melalui capaian beberapa indikator ekonomi makro daerah seperti perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Mengacu kepada capaian indikator ekonomi makro yang dicapai daerah tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat berada dalam kategori baik.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berguna untuk melihat struktur perekonomian, sehingga akan tergambar sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian wilayah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan aktivitas ekonomi dan produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000, melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar ini mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Implikasi perubahan ini, salah satunya adalah berubahnya struktur ekonomi yang semula hanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan besaran PDRB ADHK relatif stabil. Berikut adalah tabel dan diagram besaran PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2012 – 2016.

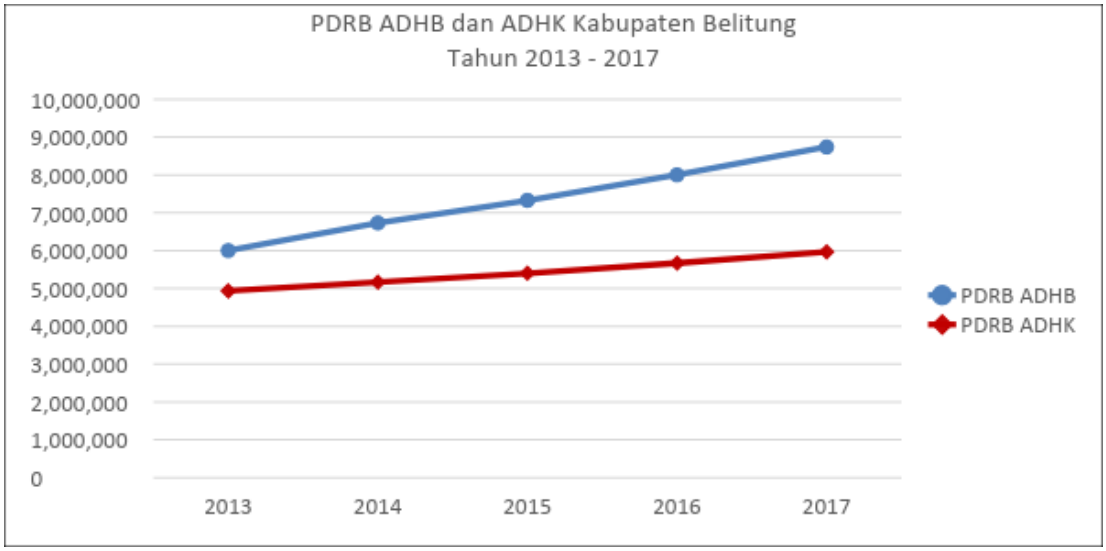
Tabel 2.9
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung Tahun 2013 - 2017 (dalam juta)

Tahun	PDRB ADHB	Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK	Pertumbuhan (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2013	6.000.332	12,49	4.934.002	5,96
2014	6.731.136	12,18	5,167,069	4,72
2015	7.328.169	8,87	5.400.941	4.53
2016	8.001.861	9,19	5.669.543	4,97
2017	8.738.186	9,20	5.969.543	5,29

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

Grafik 2.2

PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung Tahun 2013 - 2017 (dalam juta)



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

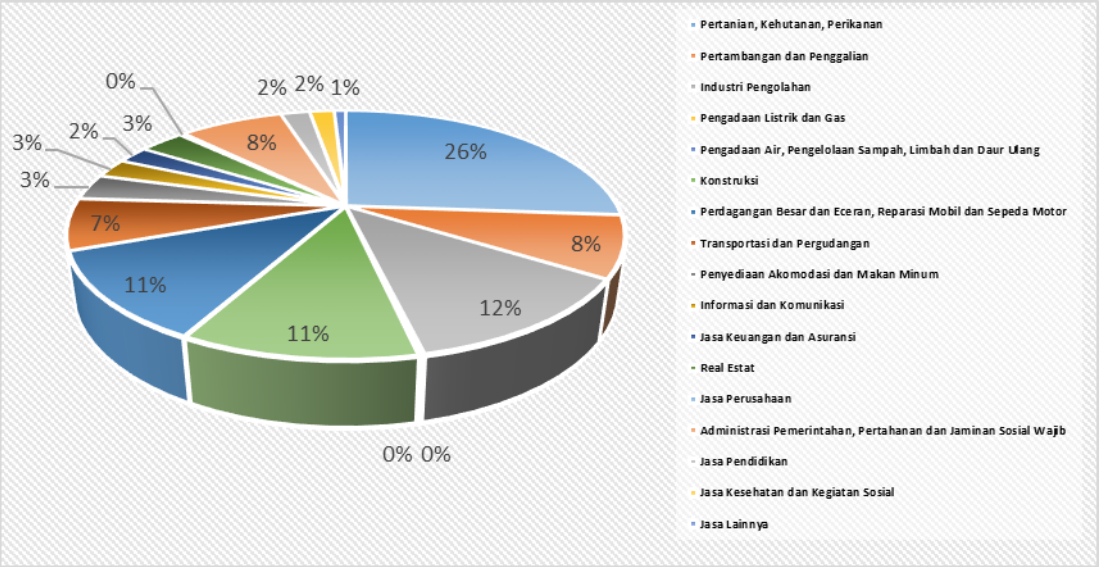
Berdasarkan tabel dan diagram di atas terlihat adanya peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang cukup signifikan, dari Rp. 6,0 trilliun pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 8,7 trilliun pada tahun 2017, yang berarti struktur perekonomian Kabupaten Belitung terus meningkat. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada besaran yang relatif stabil, yaitu Rp. 4,93 trilliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 5,97 trilliun pada tahun 2017, yang berarti pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Belitung cenderung berjalan lambat.

Berdasarkan strukturnya, kategori yang menjadi *leading sector* dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung dari tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 27,00%. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2013-2017 adalah kategori industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,90%. Tingginya kontribusi kategori industri pengolahan didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan setengah jadi. Kontribusi terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Belitung adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,86%. Tingginya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut selaras dengan prioritas

pembangunan Kabupaten Belitung yang salah satu prioritasnya adalah pada sektor perikanan. Berikut adalah diagram *pie* kontribusi sektor pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Belitung Tahun Tahun 2017.

Grafik 2.3

Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Belitung Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

Nilai dan kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2013 – 2017 (dalam juta Rupiah) dijabarkan secara lebih detil dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Tahun 2013 – 2017 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.608.246	26,80	1.822.512	27,08	2.003.599	27,34	2.207.368	27,59	2.288.449	26,19
B	Pertambangan dan Penggalian	602.469	10,04	649.269	9,65	657.318	8,97	671.930	8,40	698.006	7,99
C	Industri Pengolahan	818.551	13,64	904.493	13,44	941.726	12,87	986.077	12,32	1.070.851	12,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.496	0,09	8.036	0,12	9.981	0,14	13.372	0,17	15.931	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.789	0,03	2.019	0,03	2.219	0,03	2.436	0,03	2.784	0,03
F	Konstruksi	609.296	10,15	674.996	10,03	747.310	10,20	832.897	10,41	975.977	11,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	637.730	10,63	717.930	10,67	779.209	10,63	871.713	10,89	1.001.626	11,46
H	Trasportasi dan Pergudangan	370.385	6,17	420.596	6,25	481.594	6,57	522.523	6,53	587.040	6,72
I	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	**190.164**	**3,17**	**216.964**	**3,22**	**235.892**	**3,22**	**263.766**	**3,30**	**295.483**	**3,88**
J	Informasi dan Komunikasi	154.543	2,58	168.668	2,51	182.935	2,50	203.922	2,55	222.279	2,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	131.854	2,20	150.353	2,23	167.074	2,26	184.981	2,31	198.440	2,27
L	Real Estat	194.781	3,25	221.781	3,29	240.012	3,28	259.610	3,24	282.157	3,23

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	405.633	6,76	468.398	6,96	530.754	7,24	590.741	7,38	657.535	7,52
P	Jasa Pendidikan	102.317	1,71	117.415	1,74	140.982	1,92	163.935	2,05	183.792	2.10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.378	1,71	114.378	1,70	126.366	1,72	138.352	1,73	155.514	1,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	44.222	0,74	50.652	0,75	56.341	0,77	64.327	0,80	73.028	0,84
	TOTAL	**6.000.332**	**100**	**6.731.136**	**100**	**7.328.169**	**100**	**8.003.005**	**100**	**8.738.186**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2013 – 2017 seri Tahun Dasar 2010 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.298.385	26,32	1.388.651	26,88	1.476.450	27,34	1.556.409	27,45	1.565.386	26,22
B	Pertambangan dan Penggalian	519.869	10,54	528.012	10,22	531.503	9,84	536.216	9,46	540.625	9,06
C	Industri Pengolahan	684.085	13,86	691.355	13,38	695.871	12,88	709.116	12,51	738.528	12,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.400	0,13	6.751	0,13	7.710	0,14	8.884	0,16	9.315	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.499	0,03	1.569	0,03	1.662	0,03	1.761	0,03	1.933	0,03
F	Konstruksi	521.096	10,56	541.096	10,47	565.631	10,47	608.999	10,74	682.968	11,44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	552.430	11,20	575.566	11,14	598.621	11,08	628.087	11,08	685.710	11,49
H	Trasportasi dan Pergudangan	281.748	5,71	297.108	5,75	313.817	5,81	332.619	5,87	365.029	6,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155.134	3,14	165.509	3,20	175.235	3,24	185.699	3,28	201.154	3,37
J	Informasi dan Komunikasi	145.590	2,95	153.599	2,97	161.395	2,99	172.073	3,04	186.413	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	102.087	2,07	114.131	2,21	124.855	2,31	134.200	2,37	137.903	2,31
L	Real Estat	157.881	3,20	167.881	3,25	177.157	3,28	184.144	3,25	193.975	3,25
M, N	Jasa Perusahaan	17.288	0,35	18.388	0,36	19.302	0,36	19.780	0,35	20.694	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	282.533	5,73	299.801	5,80	318.270	5,89	340.035	6,00	365.242	6,12
P	Jasa Pendidikan	82.907	1,68	87.983	1,70	96.718	1,79	104.705	1,85	113.935	1,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88.268	1,79	91.868	1,78	96.997	1,80	104.983	1,85	114.272	1,91
R,S,T,U	Jasa Lainnya	36.802	0,75	37.802	0,73	39.747	0,74	41.833	0,74	46.461	0,78
	TOTAL	**4.934.002**	**100**	**5.167.069**	**100**	**5.400.941**	**100**	**5.669.543**	**100**	**5.969.543**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2018

Berdasarkan tabel nilai dan kontribusi PDRB ADHK di atas, terlihat bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, namun kontribusinya bersifat fluktuatif dari 26,32% tahun 2013 menjadi 26,22% pada tahun 2017, yang berarti hal ini mengalami perlambatan aktivitas ekonomi. Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori Industri Pengolahan dan kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang berarti terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Belitung. Namun, jika melihat perkembangan PDRB ADHK sebagaimana dijabarkan pada tabel di atas, peningkatan tersebut cenderung lambat dan bahkan ada beberapa kategori yang kontribusinya mengalami perlambatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Beberapa kategori yang mengalami perlambatan adalah kategori Industri Pengolahan yang kontribusinya 13,86% pada tahun 2013 melambat menjadi 12,37% pada tahun 2017. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan aktivitas dari 11,20% tahun 2013 menjadi 11,49% pada tahun 2017. Demikian juga halnya dengan kategori Jasa lainnya juga mengalami peningkatan dari 0,75% tahun 2013 menjadi 0,78% pada tahun 2017. Adanya perlambatan kontribusi PDRB ADHK beberapa kategori tersebut di atas menandakan bahwa terjadi perlambatan aktivitas ekonomi pada kategori tersebut, yang juga berarti lambatnya jumlah produksi pada kategori tersebut.

Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Belitung diharapkan mampu menjadi daya ungkit *(multiplier effect)* bagi aktivitas ekonomi lapangan usaha lainnya. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa aktivitas Sektor pertambangan dan penggalian juga masih berkontribusi cukup besar, walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2013 sebesar 10,54% menjadi 9,06% pada tahun 2017. Mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak *sustainable*, maka perlu dipikirkan strategi-strategi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya sebagai sektor utama untuk meningkatkan kontribusi PDRB ADHK.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perekonomian daerah tersebut. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terlihat pertumbuhan kategori pembentuk PDRB tumbuh secara bervariasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017 berdasarkan Tahun Dasar 2010

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,16	6,95	6,32	5,42	0,58
B	Pertambangan dan Penggalian	0,60	1,57	0,66	0,89	0,82
C	Industri Pengolahan	6,52	1,06	0,65	1,90	4,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,25	5,48	14,21	15,23	4,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,15	4,67	5,93	5,96	9,77
F	Konstruksi	8,81	3,84	4,53	7,67	12,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,76	4,19	4,01	4,92	9,17
H	Transportasi dan Pergudangan	6,67	5,45	5,62	5,99	9,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,01	6,69	5,88	5,97	8,32
J	Informasi dan Komunikasi	5,81	5,50	5,08	6,62	8,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,38	11,80	9,40	7,48	2,76
L	Real Estat	8,52	6,33	5,53	3,94	5,34
M, N	Jasa Perusahaan	4,92	6,36	4,97	2,48	4,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	5,45	6,11	6,16	6,84	7,41
P	Jasa Pendidikan	5,06	6,12	9,93	8,26	8,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,41	4,08	5,58	8,23	8,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,69	2,72	5,15	5,25	11,06
	Laju Pertumbuhan	**5,96**	**4,72**	**4,53**	**4,97**	**5,29**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami fluktuatif pada hampir seluruh lapangan usaha, terutama pada kategori Jasa Lainnya yang tumbuh menjadi 11,06% pada tahun 2017 dari hanya sebesar 2,69% pada tahun 2013. Tingginya pertumbuhan kategori Jasa Lainnya ini kemungkinan

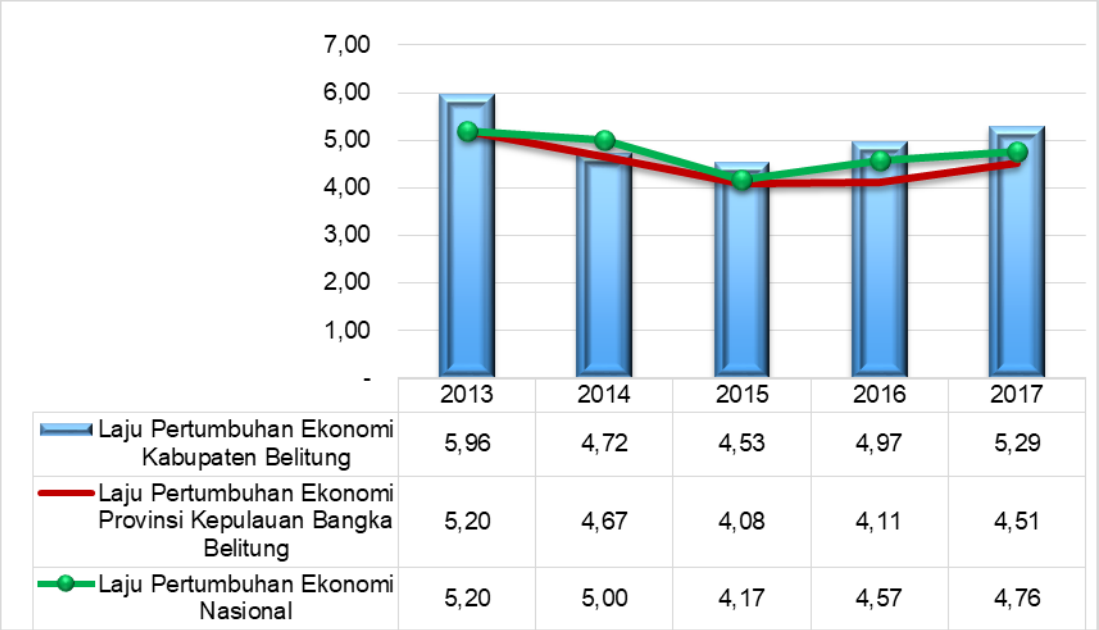
merupakan dampak perkembangan pariwisata yang memberikan dampak ikutan terhadap perkembangan usaha jasa lainnya. Kategori lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,17%, yang tumbuh selaras dengan meningkatnya pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga jasa perantara keuangan.

Di sisi lain, beberapa kategori mengalami perkembangan ekonomi yang melambat, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Real Estat; Jasa Perusahaan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi global. Selain itu juga disebabkan melemahnya tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh dampak inflasi yang belum bisa terkendali menyebabkan upah yang diperoleh menjadi tergerus. Meskipun harga pangan relatif stabil, namun berbanding terbalik dengan tarif dasar listrik, bahan bakar dan elpiji yang terus naik dan membuat inflasi juga makin meningkat.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan daya ungkit bagi sektor lapangan usaha lainnya. Meski mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Tren perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tingkat provinsi maupun nasional. Berikut adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional.

Grafik 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 – Tahun 2017 (dalam persen)



	2013	2014	2015	2016	2017
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung	5,96	4,72	4,53	4,97	5,29
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,20	4,67	4,08	4,11	4,51
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional	5,20	5,00	4,17	4,57	4,76

Sumber : BPS, 2018

Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Kepulauan Bangka Belitung maupun di Indonesia.

c. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai alat ukur. Secara umum, kinerja tersebut diukur dengan besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Kenaikan PDRB per kapita mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang ke arah yang baik dan terjadi peningkatan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung, menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita setiap tahunnya. Berikut adalah tabel dan grafik

yang menggambarkan tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung tahun 2013 hingga tahun 2017.

Tabel 2.13

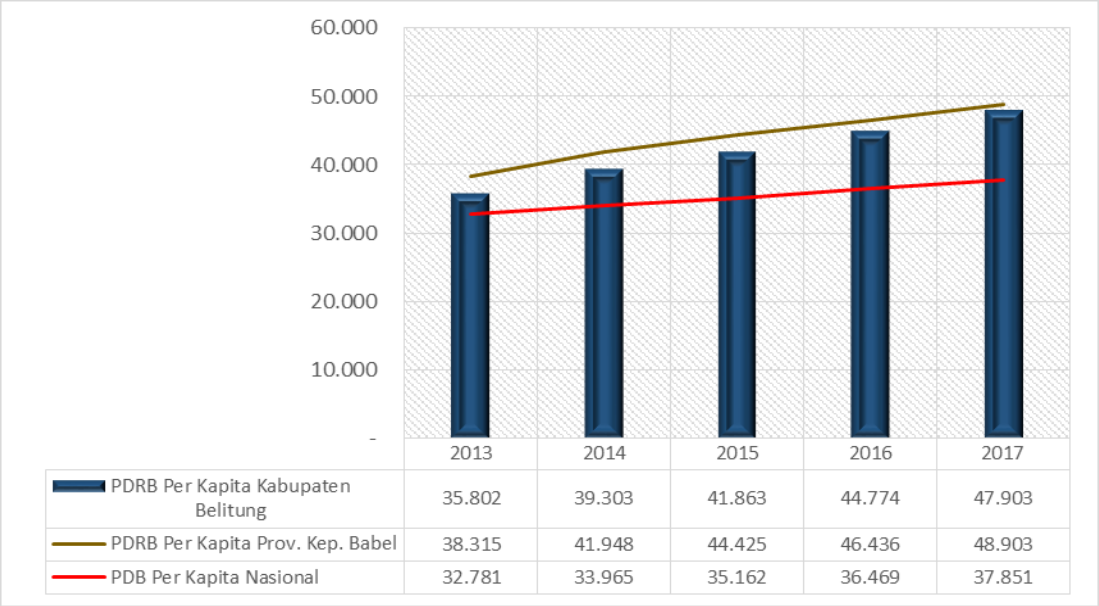
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Tahun 2013 – Tahun 2017 (dalam ribu rupiah)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.596	10.641	11.446	12.351	12.545
B	Pertambangan dan Penggalian	3.595	3.791	3.755	3.760	3.826
C	Industri Pengolahan	4.884	5.281	5.380	5.517	5.870
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33	47	57	75	87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11	12	13	14	15
F	Konstruksi	3.635	3.941	4.269	4.660	5.350
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.805	4.192	4.451	4.878	5.491
H	Transportasi dan Pergudangan	2.210	2.456	2.751	2.925	3.218
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.135	1.267	1.348	1.476	1.620
J	Informasi dan Komunikasi	922	985	1.045	1.118	1.219
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	787	878	954	1.034	1.088
L	Real Estat	1.162	1.295	1.371	1.453	1.088
M, N	Jasa Perusahaan	**122**	**132**	**142**	**149**	**161**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	2.420	2.735	3.032	3.305	3.605
P	Jasa Pendidikan	610	686	805	913	1.008
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	611	668	722	794	853
R,S,T,U	Jasa Lainnya	264	296	322	352	400
	PDRB Per Kapita	**35.802**	**39.303**	**41.863**	**44.774**	**47.903**

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

Grafik 2.5

PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (dalam ribu rupiah)



	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Per Kapita Kabupaten Belitung	35.802	39.303	41.863	44.774	47.903
PDRB Per Kapita Prov. Kep. Babel	38.315	41.948	44.425	46.436	48.903
PDB Per Kapita Nasional	32.781	33.965	35.162	36.469	37.851

Sumber : BPS, 2018 (diolah)

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan menjadi Rp. 47.903.000,- pada tahun 2017 dari Rp. 32.803.000,- pada tahun 2013. Rata-rata peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung adalah 8,33% per tahun. Peningkatan tersebut cukup menjadi dasar bahwa dalam lima tahun ke depan pendapatan per kapita Kabupaten Belitung akan terus meningkat. Jika dibandingkan dengan nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Belitung masih lebih baik dibandingkan tingkat nasional. Namun berada di bawah level provinsi. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk supaya tujuan pembangunan untuk mencapai masyarakat sejahtera dapat terwujud.

d. Indeks Spesialisasi

Dalam pengembangan ekonomi wilayah atau pembangunan daerah, ada berbagai indikator dan beragam analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Pembangunan ekonomi seyogyanya dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada dalam daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan

analisis mengenai beragam sektor unggulan yang ada pada suatu daerah, untuk menyusun rencana pembangunan daerah kedepannya.

Analisis Indeks Spesialisasi (SI) merupakan salah satu cara untuk mengukur perilaku dinamika kegiatan ekonomi secara keseluruhan untuk menganalisis tingkat konsentrasi sektor kegiatan secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (provinsi). Berikut adalah tabel Indeks Spesialisasi Kabupaten Belitung.

Tabel 2.14

Indeks Spesialisasi *(Specialization Index)* Kabupaten Belitung

Kategori	Uraian	SI 2013	SI 2014	SI 2015	SI 2016	SI 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,043	0,041	0,042	0,042	0,040
B	Pertambangan dan Penggalian	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
C	Industri Pengolahan	0,051	0,049	0,049	0,049	0,052
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
F	Konstruksi	0,012	0,012	0,011	0,012	0,015
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,013	0,014	0,014	0,015	0,015
H	Transportasi dan Pergudangan	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
J	Informasi dan Komunikasi	0,006	0,006	0,006	0,005	0,006
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
L	Real Estat	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001
M, N	Jasa Perusahaan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005
P	Jasa Pendidikan	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
	Nilai SI	**0,175**	**0,173**	**0,173**	**0,175**	**1,80**

Sumber : BPS, 2018 (diolah)

Skala interval nilai Indeks Spesialisasi antara 0 -100, atau pada skala maksimal 1, maka nilai spesialisasi antara 0 sampai dengan 1. Oleh karena itu, apabila nilai SI = 0 atau mendekati 0, maka tidak terjadi konsentrasi sektor i disuatu kabupaten, jika dibandingkan dengan tingkat provinsinya. Begitupun

sebaliknya apabila nilai SI = 1 atau mendekati 1, maka disimpulkan terjadi konsentrasi pada wilayah tersebut.

Berdasarkan data hasil analisis di atas, nilai SI disetiap sektor cenderung mendekati 0 bahkan beberapa sektor = 0 dan total nilai SI hanya sebesar 0,180 pada tahun 2017, yang berarti juga mendekati 0. Dari hasil analisis di atas bisa diinterpretasi atau disimpulkan bahwa belum terjadi fokus pembangunan yang terkonsentrasi pada sektor tertentu di Kabupaten Belitung. Walaupun analisis SI ini masih bersifat sangat makro, namun bisa menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dapat lebih fokus berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.

e. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ merupaan suatu metode analisis yang sederhana, namun cukup bermanfaat untuk mengidentifikasi sektor basis dari suatu daerah. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor basis suatu daerah yang mampu mengekspor (ke luar daerah maupun ke luar negeri) sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah. Dengan mengetahui sektor basis tersebut, maka pemerintah daerah bisa menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah ke depannya. Berikut adalah tabel Location Quotient Kabupaten Belitung.

Tabel 2.15
Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Belitung

Kategori	Uraian	LQ 2013	LQ 2014	LQ 2015	LQ 2016	LQ 2017	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.47	1.44	1,44	1,44	1,44	**Sektor basis**
B	Pertambangan dan Penggalian	0.71	0,71	0,70	0,70	0,68	Sektor non basis
C	Industri Pengolahan	0.58	0,58	0,57	0,56	0,54	Sektor non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,74	1,62	1,69	1,72	1,70	**Sektor basis**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.75	1,75	1,74	1,73	1,72	**Sektor basis**
F	**Konstruksi**	**1,30**	**1,30**	**1,28**	**1,28**	**1,35**	**Sektor basis**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	Sektor non basis

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H	Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,62	1,61	1,61	1,60	**Sektor basis**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,42	1,41	1,44	1,45	1,44	**Sektor basis**
J	Informasi dan Komunikasi	1,68	1,66	1,62	1,60	1,57	**Sektor basis**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,20	1,27	1,32	1,32	1,32	**Sektor basis**
L	Real Estat	1,03	1,02	1,05	1,04	1,04	**Sektor basis**
M, N	Jasa Perusahaan	1,37	1,36	1,36	1,39	1,39	**Sektor basis**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	1,20	1,19	1,16	1,15	1,16	**Sektor basis**
P	Jasa Pendidikan	0,78	0,78	0,78	0,77	0,78	Sektor non basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,57	1,55	1,54	1,58	**Sektor basis**
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,21	1,15	1,11	1,07	1,06	**Sektor basis**

Sumber : BPS, 2018 (diolah)

Interpretasi nilai LQ terhadap suatu sektor dilihat dari seberapa besar nilai hasil analisis LQ. Semakin tinggi nilai LQ, maka semakin tinggi *comparative advantage* suatu daerah dalam mengembangkan sektor tersebut. Dilihat dari hasil analisis pada tabel di atas, terlihat bahwa ada beragam sektor di Kabupaten Belitung yang menjadi sektor basis untuk dapat dikembangkan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor-sektor basis tersebut mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah Kabupaten Belitung. Berikut akan ditampilkan tabel mengenai standar interpretasi Analisis LQ.

Tabel 2.16
Interpretasi Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Nilai LQ	Sektor Basis/Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ>1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ<1	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak tersepesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar negeri
LQ=1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama dengan wilayah acuan	Non eksport, hanya mampu melayani pasar dalam wilayah

Sumber : Muta'ali, 2015

f. Laju Inflasi

Laju Inflasi menggambarkan persentase kenaikan harga dari beberapa indeks kelompok pengeluaran yang dapat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Perubahan indeks harga dari waktu ke waktu memperlihatkan fluktuasi harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan data Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator ekonomi makro penting yang dapat menggambarkan laju inflasi sekaligus pola konsumsi masyarakat di suatu daerah.

Tabel 2.17

Inflasi Bulanan Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Bulan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Januari	3,60	1,39	-0,02	1,71	0,44
2	Februari	0,44	-1,94	1,02	-0,29	-0,29
3	Maret	-1,03	-1,97	-1,22	-1,49	-0,05
4	April	-0,65	0,32	-0,66	0,93	-0,27
5	Mei	0,56	0,85	1,30	0,90	0,32
6	Juni	0,83	0,69	1,46	1,83	1,28
7	Juli	2,24	-0,48	2,34	-0,12	0,85
8	Agustus	1,98	2,29	-0,58	-0,70	0,50
9	September	-0,12	1,20	-0,68	-0,87	-1,12
10	Oktober	-0,12	-1,95	0,31	0,29	0,60
11	Nopember	1,59	-0,63	0,70	0,26	-0,38
12	Desember	3,21	1,23	0,90	1,50	0,84

Sumber : Badan Pusat Statistik

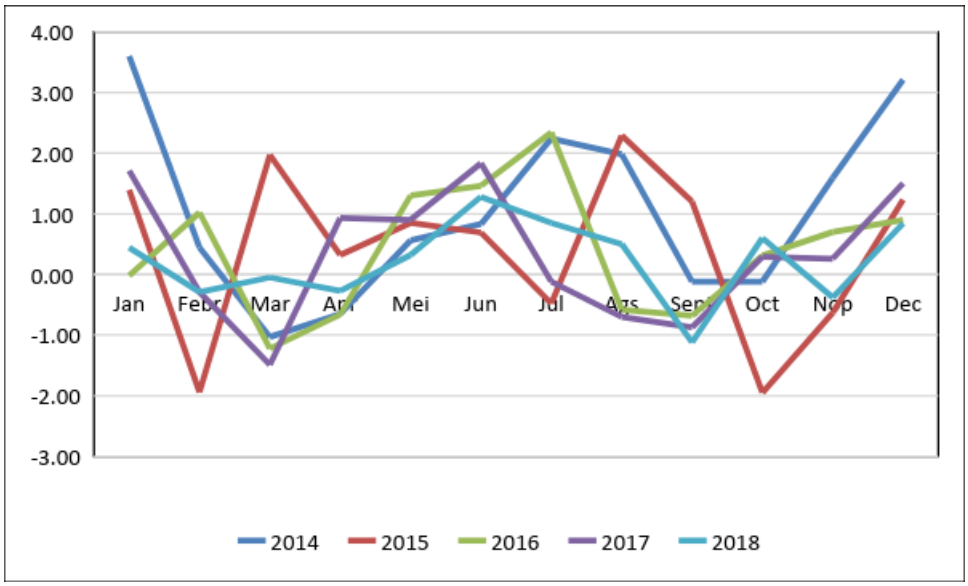
Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam kurun lima tahun terakhir telah terjadi perubahan secara fluktuatif terhadap laju inflasi bulanan di Kabupaten Belitung, dalam hal ini kota Tanjungpandan. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2014, yaitu sebesar 3,60, dan inflasi terendah di bulan Maret 2015, yaitu -1,97. Terlihat bahwa pada bulan-bulan tertentu terjadi inflasi setiap tahunnya. Inflasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bulan Juni dan Desember, sementara pada bulan Maret cenderung deflasi dalam kurun 2014-2018.

Rata-rata inflasi bulanan di Kabupaten Belitung masih tergolong inflasi “ringan”atau dibawah 10% per tahun yang berarti inflasi tersebut masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi daerah, meskipun pada tahun 2014

Kabupaten Belitung sempat mengalami inflasi “sedang” karena mencapai 13,14 persen, atau berada di rentang 10% - 30% per tahun. Inflasi yang bersifat “sedang” ini memang belum sampai membahayakan kegiatan ekonomi namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap.

Grafik 2. 6

Inflasi Bulanan Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara umum, Tanjungpandan mengalami kenaikan inflasi pada bulan-bulan tertentu sepanjang tahun 2014-2018. Walaupun masih bersifat *seasonal*, tindakan nyata pemerintah dalam mengendalikan inflasi tetap diperlukan meskipun inflasi di Kabupaten Belitung masih berada di bawah inflasi nasional yang pada tahun 2018 sebesar 2,72% dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 3,45% sebagaimana diperlihatkan oleh tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.18

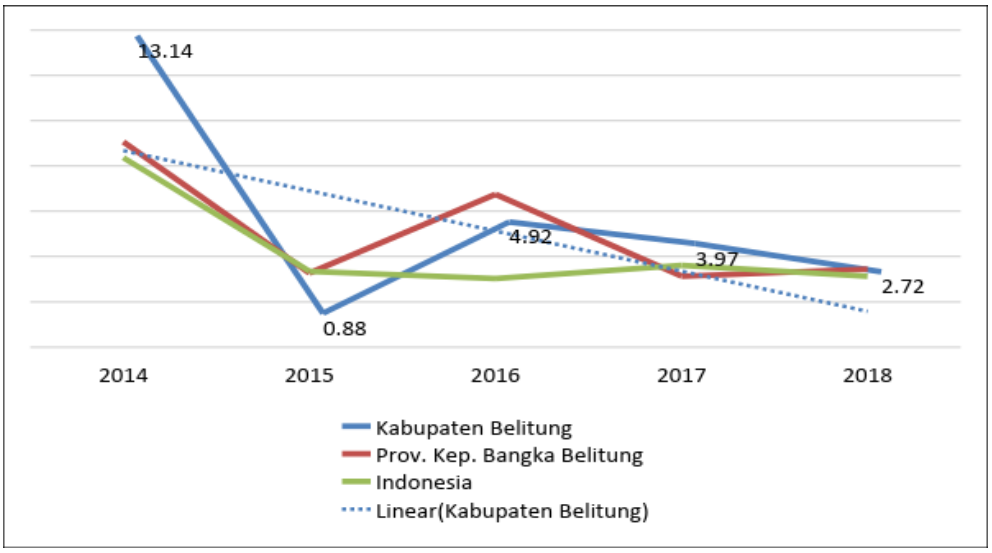
Perbandingan Laju Inflasi di Tanjungpandan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018

No	Uraian		Tahun			
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	13,14	0,88	4,92	3,97	2,72
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9,06	3,27	6,75	3,13	3,45
3	Indonesia	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2.7

Perbandingan Laju Inflasi di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Perhitungan inflasi di Kabupaten Belitung diperoleh dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup tujuh kelompok pengeluaran sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19

Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018

No.	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bahan Makanan	21,36	-4,52	7,92	1,25	-1,35
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,91	4,63	10,25	6,58	3,43
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6,87	2,91	0,72	6,35	3,53
4	Sandang	12,03	1,26	2,15	2,44	4,62
5	Kesehatan	4,11	3,87	2,33	6,34	4,58
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15,35	8,07	3,31	3,58	5,87
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	20,47	0,42	0,43	1,75	6,73
	Umum	13,14	0,88	4,92	3,97	2,72

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap kelompok pengeluaran memiliki andil yang bervariasi setiap tahunnya. Pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau, dan kelompok Kesehatan, mengalami penurunan inflasi yang cukup signifikan di tahun 2018 bila dibandingkan empat tahun sebelumnya yang cenderung tidak stabil.

Kenaikan yang agak tajam terjadi pada kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan, yaitu dari 1,75 di tahun 2017, menjadi 6,73 di tahun 2018. Selanjutnya terjadi dua kali deflasi pada kelompok pengeluaran Bahan Makanan, yaitu di tahun 2015 dan 2018.

Berikut andil inflasi menurut kelompok barang dan jasa dan penyumbang komoditi inflasi terbesar tahun 2014-2018 di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.20

Andil / Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Umum	13,14	0,88	4,92	3,97	2,72
1	Bahan Makanan	21,36	-1,36	2,26	0,37	-0,39
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,91	0,88	2,01	1,36	0,73
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6,87	0,66	0,17	1,42	0,81
4	Sandang	12,03	0,08	0,15	0,16	0,30
5	Kesehatan	4,11	0,16	0,10	0,27	0,20
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15,35	0,41	0,18	0,19	0,31
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	20,47	0,05	0,05	0,20	0,76

Sumber : Badan Pusat Statistik

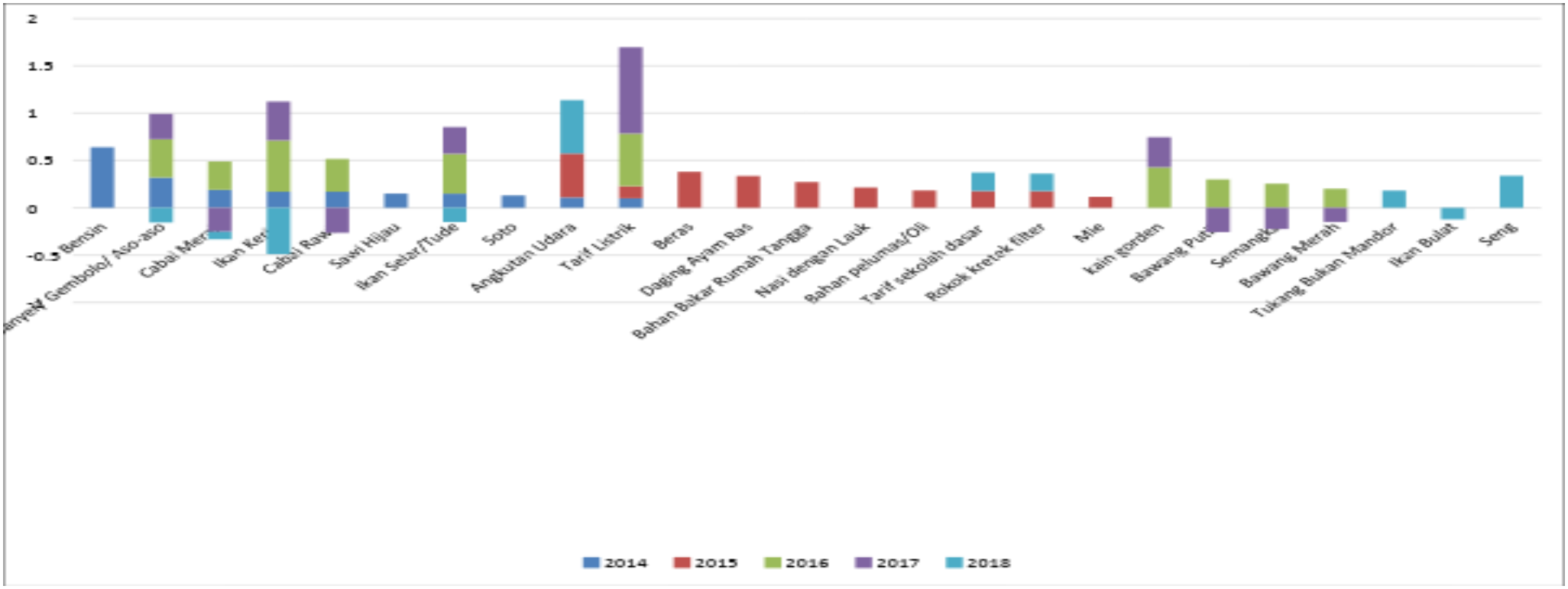
Tabel 2.21

Sepuluh Komoditas Terbesar Penyumbang Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018

No.	Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)	Barang/Jasa	Andil dalam Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bensin	0,64	Angkutan Udara	0,464	Tarif Listrik	0,556	Tarif Listrik	0,912	Angkutan Udara	0,5641
2	Ikan Kembung/ Gembung/Banyer/ Gembolo/ Aso-aso	0,32	Beras	0,380	Ikan Kerisi	0,543	Ikan Kerisi	0,410	Seng	0,3384
3	Cabai Merah	0,19	Daging Ayam Ras	0,336	Kain Gorden	0,429	Kain Gorden	0,317	Sekolah Dasar	0,1941
4	Ikan Kerisi	0,17	Bahan Bakar Rumahtangga	0,272	Ikan Selar/Tude	0,421	Ikan Selar/Tude	0,282	Rokok Kretek Filter	0,1839
5	Cabai Rawit	0,17	Nasi dengan Lauk	0,214	Ikan Kembung/ Gembung/Banyer/ Gembolo/ Aso-aso	0,405	Ikan Kembung/ Gembung/Banyer/ Gembolo/ Aso-aso	0,268	Tukang Bukan Mandor	0,1819
6	Sawi Hijau	0,15	Bahan Pelumas/Oli	0,183	Cabai Rawit	0,346	Cabai Rawit	-0,265	Ikan Kerisi	-0,4901
7	Ikan Selar/Tude	0,15	Tarif Sekolah Dasar	0,178	Bawang Putih	0,300	Bawang Putih	-0,257	Ikan Kembung	-0,1558
8	Soto	0,13	Rokok Kretek Filter	0,177	Cabai Merah	0,299	Cabai Merah	-0,253	Ikan Selar	-0,1508
9	Angkutan Udara	0,11	Tarif Listrik	0,129	Semangka	0,255	Semangka	-0,224	Ikan Bulat	-0,1230
10	Tarif Listrik	0,10	Mie	0,116	Bawang Merah	0,201	Bawang Merah	-0,150	Cabai Merah	-0,0800
	Laju Inflasi Tahunan	13,14		0,88		4,92		3,97		2,72

Sumber : BPS (diolah)

Grafik 2.8
Sepuluh Komoditi Terbesar Penyumbang Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di Kabupaten Belitung selain faktor harga yang diatur oleh pemerintah pusat, seperti BBM dan tarif listrik, faktor penyebab inflasi lainnya adalah tarif angkutan udara dan ikan segar. Pada tabel 2.3 terlihat bahwa kelompok Bahan Makanan berperan sebagai penyumbang inflasi terbanyak selama tahun 2014-2018. Hal itu ditunjukkan oleh mendominasinya antara lain ikan segar, beras, cabai merah dan daging ayam ras sebagai komoditi penyumbang inflasi terbesar dalam kurun lima tahun terakhir.

Sebenarnya besaran inflasi akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat bergantung pada komponen penyebab inflasi itu sendiri. Jika komponen penyumbang inflasi tidak banyak terkait dengan hajat hidup sebagian besar penduduk, maka tidak perlu dikhawatirkan. Demikian juga sebaliknya, jika faktor penyebab inflasi terkait dengan masyarakat banyak maka perlu dilakukan pengendalian terhadap inflasi tersebut.

Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun.

Jadi, meskipun inflasi di Kabupaten Belitung tergolong “ringan”dan fluktuatif, namun tetap perlu ada pengendalian dari pemerintah daerah terkait pengambilan kebijakan dalam stabilisasi harga.

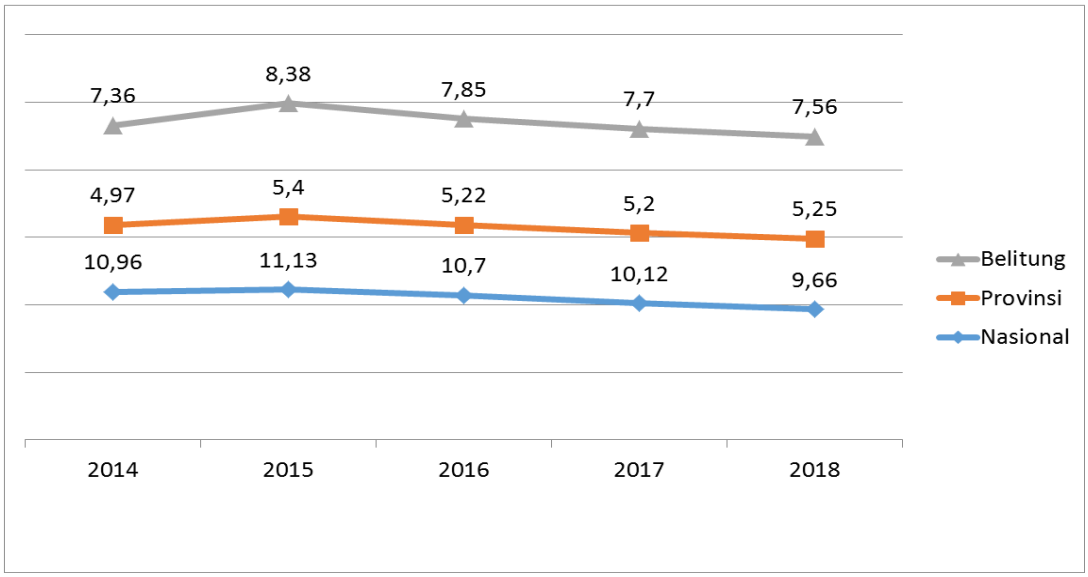
g. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Belitung sesuai dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun tertentu atau persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir dinyatakan dalam grafik berikut :

Grafik 2.9

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

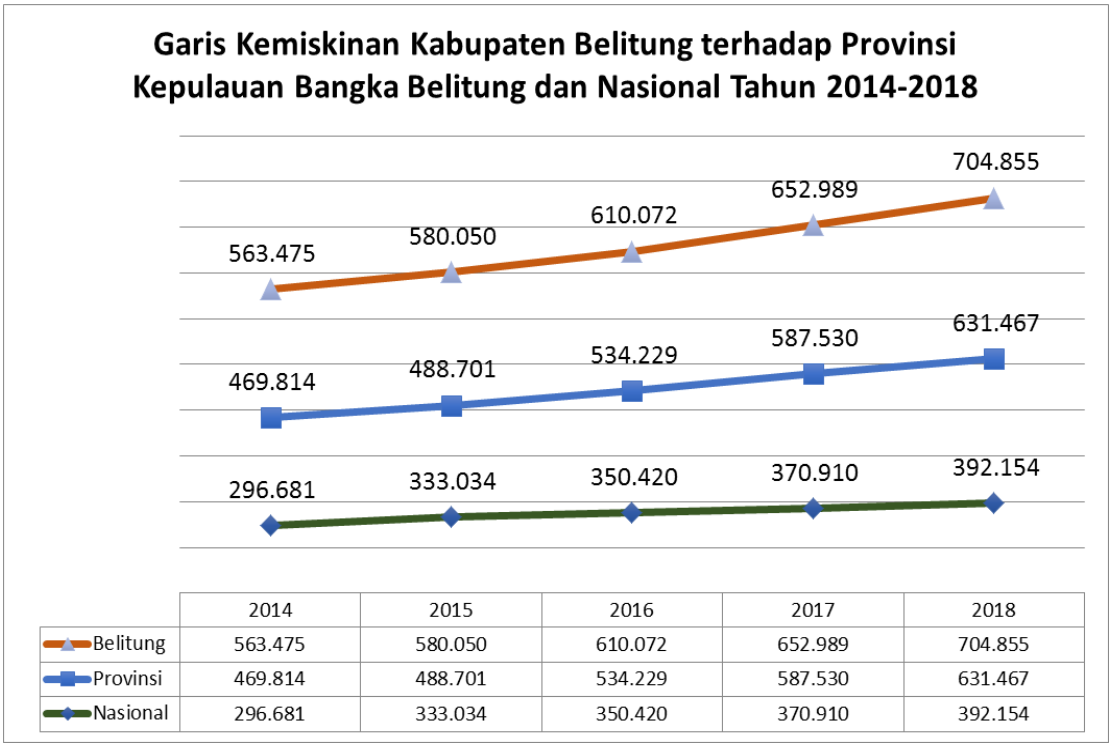
Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah, persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Besaran persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2014-2018 menggambarkan data persentase kemiskinan berdasarkan data SUSENAS yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun jika dibandingkan dengan capaian persentase kemiskinan Nasional, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah persentase kemiskinan nasional. Persentase penduduk miskin di suatu wilayah dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen

yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dimana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dengan diwakili oleh paket kebutuhan dasar sebanyak 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain-lain), sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018 dinyatakan sebagaimana pada grafik berikut :

Grafik 2.10



	2014	2015	2016	2017	2018
Belitung	563.475	580.050	610.072	652.989	704.855
Provinsi	469.814	488.701	534.229	587.530	631.467
Nasional	296.681	333.034	350.420	370.910	392.154

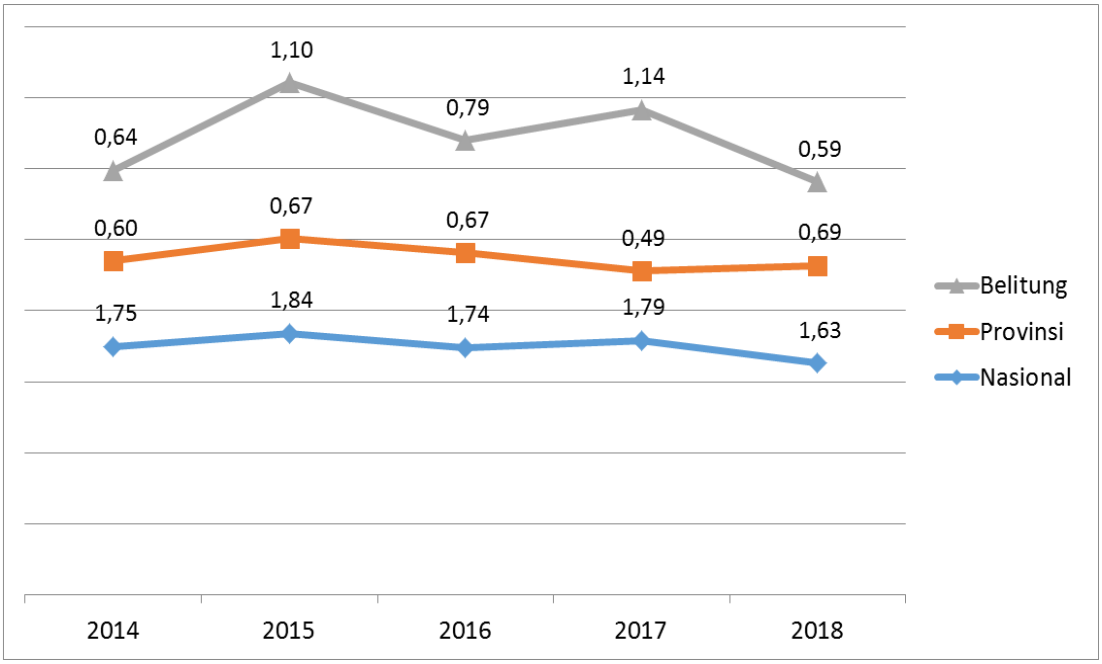
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sama halnya dengan garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, namun garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2014-2018 masih berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat Belitung untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan masih cukup tinggi sehingga penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai ***Penduduk Miskin***.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2018 sebagaimana pada grafik :

Grafik 2.11

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

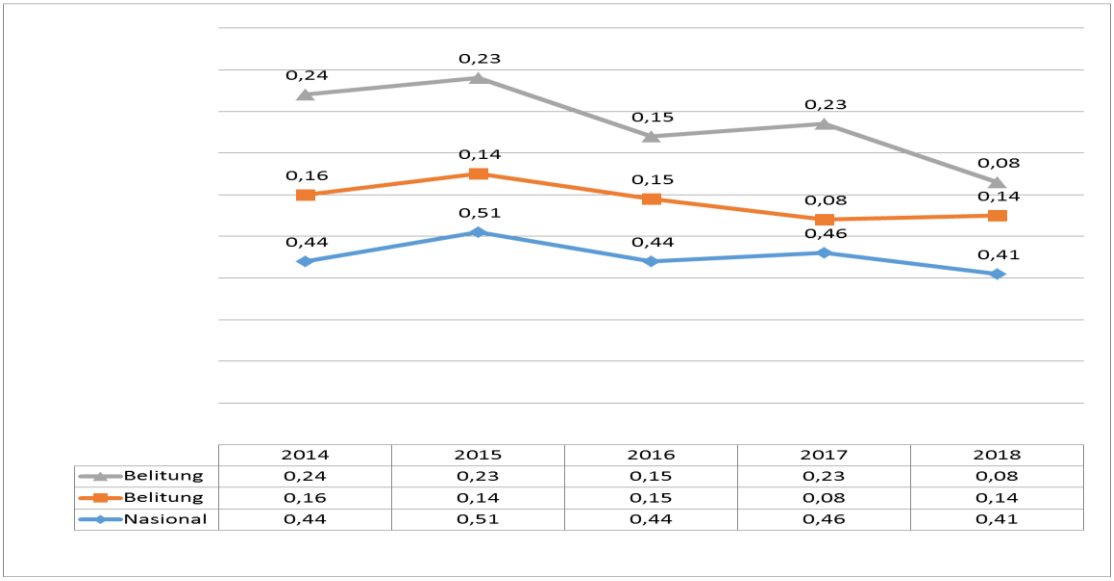
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada grafik di atas menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin semakin meluas.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana pada grafik:

Grafik 2.12

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

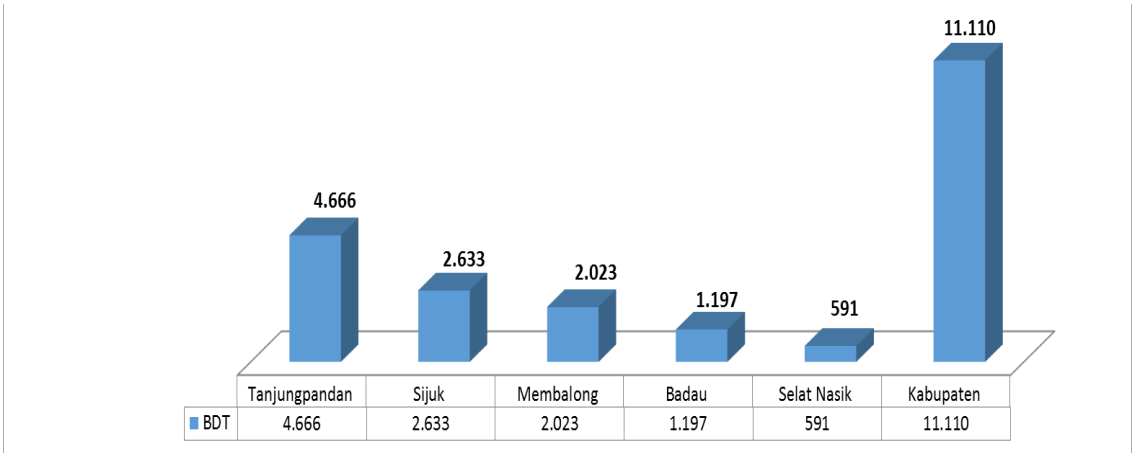


	2014	2015	2016	2017	2018
Belitung	0,24	0,23	0,15	0,23	0,08
Belitung	0,16	0,14	0,15	0,08	0,14
Nasional	0,44	0,51	0,44	0,46	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Jumlah penduduk miskin berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional merupakan data hasil pendataan BPS yang bersifat makro, sedangkan untuk mengetahui penduduk miskin di suatu wilayah perlu dilakukan pendataan secara rinci atau bersifat data mikro yang sesuai dengan kriteria kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dan divalidasi Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) pada tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 2.13
Data Basis Data Terpadu Kabupaten Belitung Tahun 2018



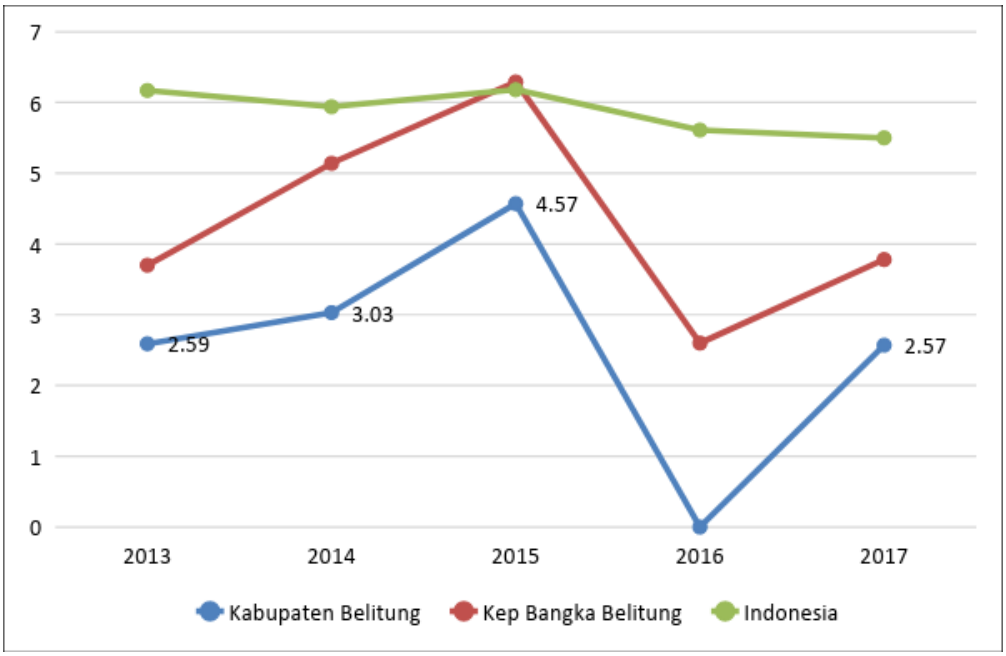
Sumber : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung Tahun 2019

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Belitung cenderung menurun dalam kurun lima tahun terakhir, meskipun data TPT tahun 2016 tidak diketahui nilainya dikarenakan Badan Pusat Statistik tingkat kabupaten tidak melakukan Survey Angkatan Kerja di tahun tersebut.

Berikut data mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Kabupaten Belitung beserta perbandingannya dengan Provinsi Kep. Bangka Belitung dan nasional.

Grafik 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka KabupatenBelitung,
Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2013-2017



Dari grafik 2.14 diatas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung masih berada di bawah provinsi dan nasional, dengan peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2013-2015, dari 2,59 menjadi 4,57. Pola serupa terjadi di provinsi Kep. Bangka Belitung yang juga mengalami kenaikan di tiga tahun pertama. Khusus TPT tahun 2016 tidak ada datanya dikarenakan BPS Kabupaten Belitung tidak melakukan Survey Angkatan Kerja seperti tahun sebelumnya. Namun di tahun berikutnya dilakukan pendataan sehingga didapat nilai TPT sebesar 2,57 di tahun 2017. Jadi bisa disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan TPT dari tahun 2015.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka salah satunya dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun yang merupakan angkatan kerja. Indikator ini bisa dilihat dari jenis kelamin maupun tingkat pendidikan pekerja tersebut. Di Kabupaten Belitung sendiri memiliki TPAK yang cenderung tidak stabil dalam kurun lima tahun terakhir sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.22

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No	Kab/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Bangka	64.40	65.46	63.88	-	65.75
2	Belitung	67.81	63.48	67.64	-	69.29
3	Bangka Barat	69.17	67.12	65.47	-	68.17
4	Bangka Tengah	62.13	62.48	66.48	-	69.26
5	Bangka Selatan	64.53	67.08	70.32	-	64.70
6	Belitung Timur	64.85	68.79	68.11	-	68
7	Pangkalpinang	64.68	64.90	67.41	-	63.42
8	Provinsi Kep. Bangka Belitung	65.32	65.45	66.71	68.93	66.72

Sumber : BPS Prov. Kep. Bangka Belitung

Hal yang serupa juga ternyata terjadi di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Memang diharapkan dengan kenaikan TPAK ini maka akan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, khususnya di Kabupaten Belitung. Tentunya dari nilai TPAK yang tinggi maka dapat memicu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang berarti semakin sedikit angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja yang ada.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga dilihat dari kesehatan dan pendidikan . pada sub bab ini akan dilihat analisis kinerja kesejahteraan sosial yang dilakukan pada indiaktor-indikator yang relevan.

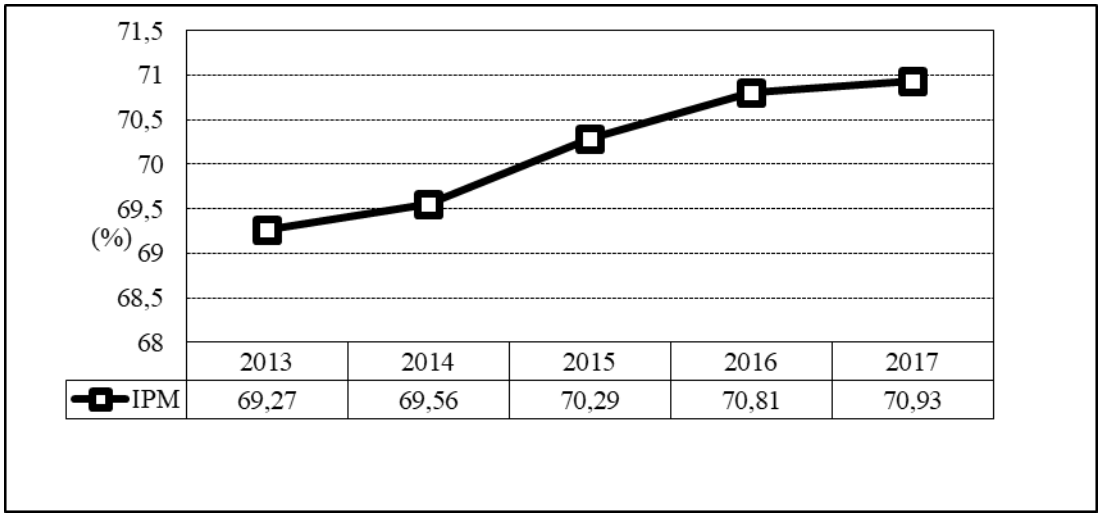
a. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Satistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2017 mencapai 70,93 dengan capaian pertumbuhan 0,17%. Angka ini jelas lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 70,81. Dengan capaian IPM tersebut maka Kabupaten Belitung berada pada

kelompok status pembangunan manusia “tinggi” bersama-sama dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2013-2017 disajikan sebagaimana Grafik 2.13 berikut :

Grafik 2.15

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017



	2013	2014	2015	2016	2017
IPM	69,27	69,56	70,29	70,81	70,93

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, IPM Kabupaten Belitung berada di peringkat ketiga tertinggi setelah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka yang masing-masing memiliki nilai IPM 76,86 dan 71,09. Sementara itu untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami peningkatan IPM yang semula 69,55 pada tahun 2016 menjadi 69,99 di tahun 2017. Nilai IPM kabupaten Belitung juga berada diatas nilai IPM nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 70,18 menjadi 70,81 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,90%. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2013-2017:

Tabel 2.23

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belitung	69,27	69,56	70,29	70,81	70,93
Belitung Timur	67,71	68,10	68,83	69,70	69,57
Bangka	69,34	69,79	70,03	70,43	71,09
Bangka Tengah	67,67	68,09	68,66	68,36	68,99
Bangka Barat	65,85	66,43	67,23	67,60	67,94
Bangka Selatan	62,96	63,54	63,89	64,57	65,02
Pangkalpinang	76,14	76,28	76,61	76,73	76,86
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67,92	68,27	69,05	69,55	69,99
Indonesia	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), dimensi pendidikan (pengetahuan) dan dimensi ekonomi (standar hidup layak). Indikator dari umur panjang dan hidup sehat adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH adalah umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Selanjutnya pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Adapun Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Kemudian indikator untuk standar hidup layak adalah pengeluaran per kapita. Berikut ini diuraikan masing-masing komponen yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung sebagaimana tertera pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24

Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2013-2017

1) Umur Harapan Hidup

No.	Uraian	Umur Harapan Hidup				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	70,20	70,22	70,32	70,38	70,44
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	69,64	69,72	69,90	69,92	69,95
3	Indonesia	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06

2) Harapan Lama Sekolah

No.	Uraian	Harapan Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	10,60	10,77	11,32	11,47	11,51
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	10,96	11,18	11,60	11,71	11,83
3	Indonesia	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85

3) Rata-rata Lama Sekolah

No.	Uraian	Rata-rata Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	8,02	8,07	8,09	8,10	8,11
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	7,32	7,35	7,50	7,62	7,78
3	Indonesia	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10

4) Pengeluaran per Kapita

No	Uraian	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Belitung	12.344	12.375	12.443	12.865	12.910
2	Provinsi Kep. Bangka Belitung	11.657	11.691	11.781	11.960	12.066
3	Indonesia	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664

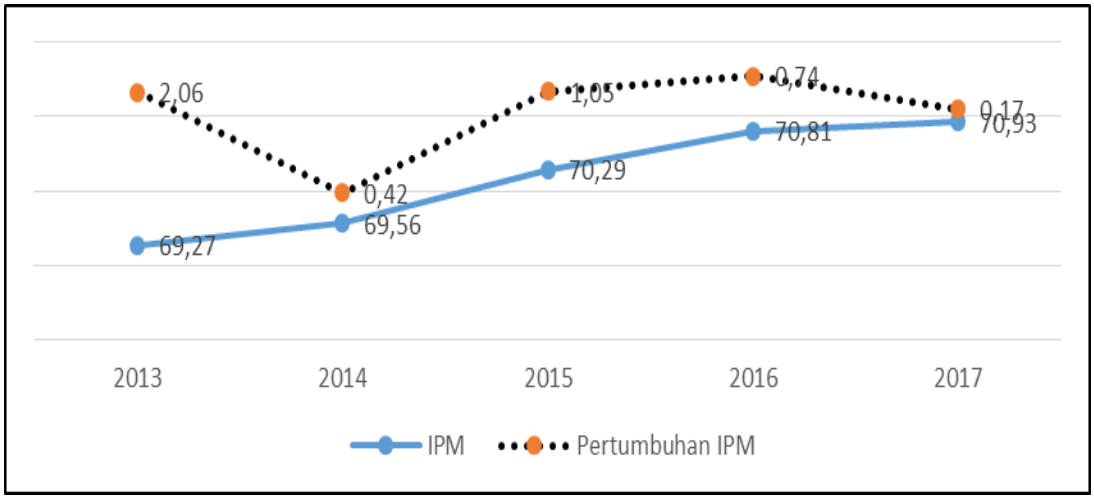
Sumber : Badan Pusat Statistik,2018

Berdasarkan komponen penyusunan IPM tersebut di atas, dapat diketahui bahwa semua komponen penyusun IPM mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran perkapita meskipun meningkat, namun persentase peningkatan untuk harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita mengalami perlambatan dibandingkan kondisi pertumbuhan tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pada urusan pendidikan dan urusan yang terkait dibidang ekonomi.

Berdasarkan nilai setiap komponen penyusun IPM Kabupaten Belitung di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Belitung cenderung naik melambat. Jadi, meskipun nilai IPM meningkat setiap tahunnya, tapi capaian pertumbuhan IPM itu sendiri justru mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan IPM yang hanya 0,17% pada tahun 2017, kemudian 0,74% di tahun 2016 dan 1,05% di tahun 2015. Demikian juga perbandingan nilai setiap komponen penyusun IPM yang meningkat namun tidak terlalu signifikan.

Grafik 2.16

IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Umur Harapan Hidup terkait erat dengan angka kematian bayi di suatu daerah. Semakin tinggi angka kematian bayi, maka nilai UHH akan semakin rendah dan demikian juga sebaliknya. UHH akan naik secara signifikan jika pemerintah dapat menurunkan angka kematian bayi yang berarti meminimalisir

faktor yang mempengaruhi kematian bayi, seperti usia kawin muda, sanitasi/jamban dan kebersihan lingkungan rumah, cakupan kunjungan ibu hamil, bidan yang memiiliki standar kompetensi, pola pengasuhan dan pemberian makanan bayi dan sebagainya. Selain itu fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu dimaksimalkan, salah satunya dengan membentuk rumah tunggu bersalin.

Di bidang pendidikan, pemerintah dapat lebih mengaktifkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), pengawasan dan pencegahan siswa putus sekolah, pemberian beasiswa atau bantuan lainnya bagi anak berprestasi yg ingin melanjutkan sekolah lebih tinggi namun terkendala ekonomi, pemberian kursus bagi masyarakat miskin dan pendirian PAUD (dalam hal ini pendirian PAUD dan pengelolaannya dapat menggunakan dana desa). Jadi, dana desa juga punya peran dalam meningkatkan IPM khususnya di Kabupaten Belitung.

Selanjutnya di sektor ekonomi, peningkatan pengeluaran perkapita diperolah dari daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan produktivitas. Salah satu upaya tersebut dapat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan peningkatan investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

a. Aspek pendidikan

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

Investasi pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumberdaya manusia yang handal dengan tingkat kompetensi yang tinggi sangatlah dibutuhkan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kualitas layanan pendidikan Kabupaten Belitung tergambarkan melalui capaian beberapa indikator di bawah ini:

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf selama tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang memuaskan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25

Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017

Angka Melek Huruf (%)	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
	97,65	98,68	98,86	97,35	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik

Peningkatan capaian Angka Melek Huruf tahun 2013-2016 di atas menunjukkan semakin baiknya kualitas kinerja pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait didalam peningkatan kualitas pendidikan daerah, Angka melek huruf di Kabupaten Belitung tahun 2016 sebesar 97.35 % yang artinya masyarakat di Kabupaten Belitung hampir semua dapat membaca dan menulis selain itu indikator di atas juga menunjukkan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat didalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Berikut ini tabel perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2014-2018 :

Tabel 2.26

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SM
Tahun 2014-2018

No	APM Jenjang Pendidikan (%)	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD	98,65	99,80	107,34	108,95	99,59
2.	SMP	88,33	87,77	100,15	81,69	79,92

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2019

Data tabel 4.1 di atas memperlihatkan bahwa angka APM jenjang SD mengalami peningkatan.

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 99,59 % dari 108,95% pada tahun 2017, hal tersebut disebabkan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan usia anak sekolah untuk duduk sekolah jenjang SD yaitu usia 7 tahun sampai dengan usia 12 tahun, namun masih terdapat anak SD yang berusia lebih dari usia yang telah ditetapkan tersebut.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Belitung selama periode 2014-2018.

Tabel 2.27

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD dan SMP
Tahun 2014-2018

No	Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan (%)	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD	98,65	99,79	98,89	99,64	99,59
2.	SMP	86,16	71,82	97,86	82,63	97,41

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tahun 2019

4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Kualitas modal manusia juga dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif (15 tahun ke atas). Semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik sehingga produktivitas perekonomian daerah juga bisa meningkat. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk

mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Belitung selama periode 2013-2017 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Lama Sekolah	8,02	8,07	8,09	8,10	8,11

Sumber : BPS Provinsi Babel 2018

Upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung terus dilakukan setiap tahunnya seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia.

b. Aspek kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2018 tercatat 12,1 perseribu kelahiran hidup atau 37 bayi dari 3.048 kelahiran hidup lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelahiran hidup pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.887, sebagaimana digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.29

Angka Kematian Bayi Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kasus Kematian Bayi	AKB Kab Belitung per 1.000 KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	3.332	43	13
2.	2015	3.100	35	11
3.	2016	3.155	33	10
4.	2017	2.887	29	10
5.	2018	3.048	37	12,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Penyebab kematian terbesar dari tahun ke tahun adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), *asfiksia* (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas dengan teratur dan spontan), yang disebabkan karena *prematuritas* sehingga organ belum matang atau belum siap bertahan hidup serta kematian disebabkan kelainan kongenital dan kelainan bawaan. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan Angka kematian bayi antara lain memberikan Pemberian Makanan Tambahan kepada ibu hamil KEK agar tidak terlahir bayi dengan kondisi BBLR. Selain itu dilakukan sosialisasi tentang cara perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif dan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan (bidan dan dokter) dalam penanganan kasus kegawatdaruratan dan komplikasi pada bayi.

2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 sebesar 196 per 100.000 KH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 208 per 100.000 Kelahiran Hidup, namun hal tersebut menggambarkan masih terjadi kasus kematian ibu yang disebabkan karena kasus pendarahan dan *eklampsi* pada ibu hamil, Hamil di luar kandungan serta adanya risiko tinggi ibu hamil seperti penyakit hipertensi. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Belitung selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.30

Angka Kematian Ibu Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kasus Kematian Ibu	AKI Kab. Belitung per 100.000 KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2014	3.332	4	**120**
2.	2015	3.100	3	**97**
3.	2016	3.155	4	**127**
4.	2017	2.887	6	**208**
5	2018	3.048	6	**196**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2019

3. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Usia Harapan Hidup)

Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, angka ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir kabupaten mengalami peningkatan, semula 70,20 tahun pada tahun 2013 menjadi 70,44 tahun pada tahun 2017, sebagaimana terlihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.31

Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
(1)	(2)	(3)
1.	2013	**70,20**
2.	2014	**70,22**
3.	2015	**70,32**
4.	2016	**70,38**
5.	2017	**70,44**

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2018

Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

4. Status Gizi Balita

Status gizi balita diukur berdasarkan indikator umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB/PB). Variabel BB dan TB/PB balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Penilaian status gizi balita diperoleh dengan melakukan konversi angka berat badan dan tinggi badan setiap balita ke dalam nilai terstandar (*Zscore*), menggunakan baku antropometri balita WHO 2005. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/U terbagi menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berdasarkan indeks TB/U terbagi menjadi sangat pendek, pendek, normal, dan berdasarkan indeks BB/TB terbagi menjadi gemuk, normal, kurus, sangat kurus. Untuk menentukan masalah gizi di suatu wilayah digunakan istilah *underweight* (gabungan gizi buruk dan gizi kurang), *stunting* (gabungan sangat pendek dan pendek), dan *wasting* (gabungan sangat kurus dan kurus). Data status gizi balita di Kabupaten Belitung berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tahun 2015 – 2017 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32
Status Gizi Balita di Kabupaten Belitung
Tahun 2015 – 2017

No	Masalah Gizi	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Underweight	14.4	7.3	15.7
2	Stunting	23.3	18.9	27.6
3	Wasting	5.8	4.0	7.7

Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah dikatakan kategori baik bila prevalensi balita stunting kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%. Karakteristik masalah gizi di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 yaitu akut-kronis. Masalah gizi akut-kronis adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalah gizi akut dan kronis. Masalah gizi bersifat kronis berdasarkan indikator TB/U sebagai akibat dari keadaan berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak bersih dan sehat, dan asupan makanan kurang dalam jangka waktu yang lama sejak usia bayi, bahkan semenjak janin sehingga menyebabkan anak menjadi pendek.Sedangkan masalah gizi bersifat akut berdasarkan indikator BB/U sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kelaparan yang mengakibatkan anak menjadi kurus.

Kejadian balita *stunting* (pendek) merupakan masalah gizi utama yag dihadapi Kabupaten Belitung. Prevalensi balita stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi kurang dan gizi kurus. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 18,9% menjadi 27,6% pada tahun 2017. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor, yaitu: kondisi kesehatan dan gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, kurangnya asupan gizi pada bayi serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan.

Kondisi sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Penyakit infeksi disebabkan oleh buruknya higiene sanitasi yang buruk (misalnya diare dan kecacingan) dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan maka dapat mengakibatkan stunting.

Data indikator kesehatan lingkungan di Kabupaten Belitung selama tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.33

Data Indikator Kesehatan Lingkungan
Di Kabupaten Belitung Tahun 2015 -2017

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rumah Tangga ber-PHBS	55,4	36,3	75,6
2	Rumah Sehat	67,2	68,8	75,9
3	Akses Air Minum Berkualitas	84,46	74,29	76,08
4	Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak	81,47	75,36	77,96
5	Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TUPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan	80,09	71,50	84,09

Rumah tangga yang yang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2017 sebanyak 75,6%, itu artinya hanya 75,6% masyarakat yang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bila dibandingkan dengan target PHBS dari Renstra Kesehatan RI tahun 2014-2019 sebesar 80%, angka yang rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Belitung masih dibawah target nasional. Perilaku hidup bersih dan sehat seseorang sangat berkaitan dengan peningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

c. Kesejahteraan sosial

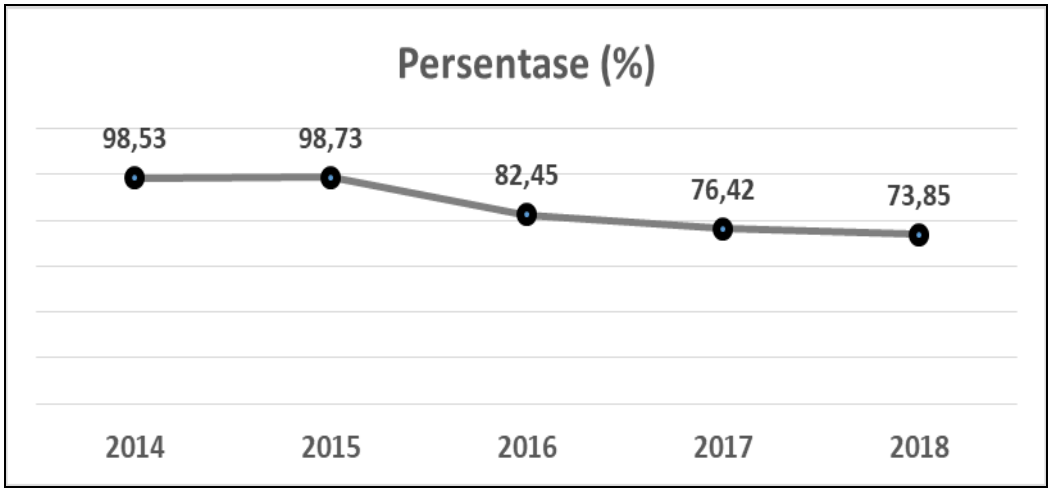
1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah indikator yang menunjukkan jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun tersebut. Persentase penanganan PMKS di Kabupaten Belitung selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 2.17
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial
Tahun 2014-2018



Sumber data : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung Tahun 2019

Penanganan PMKS pada tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan oleh terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung sehingga penanganan korban pasca bencana banjir di Kabupaten Belitung yang mempengaruhi jumlah PMKS yang harus ditangani belum terdata sebagai korban bencana banjir pada PMKS Kabupaten Belitung.

Data jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Belitung terhadap Jumlah PMKS yang ada sebagai berikut :

Tabel 2.34
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial
Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penyandang Masalah Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Sosial yang Tertangani	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	9.041	8.908	98,53
2015	9.722	9.599	98,73
2016	9.656	7.961	82,45

(1)	(2)	(3)	(4)
2017	14.618	11.171	76,42
2018	13.534	9.995	73,85

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung

2. Jumlah Sarana Sosial

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin satu diantranya adalah tersedianya panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. Sarana sosial di Kabupaten Belitung terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Panti Asuhan dan Panti Lansia dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.35

Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Sarana Sosial	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Panti Asuhan (Unit)	4	4	3	3	3
2.	Panti Lansia (Unit)	1	1	1	1	1
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)	2	2	2	2	2
	Jumlah	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana panti sosial selama 5 (lima) tahun terakhir tetap tanpa ada penambahan dan pengurangan jumlah sarana dan prasarana panti. Semua sarana dan prasarana panti di Kabupaten Belitung telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak terlantar dan lanjut usia terlantar sehingga dapat ditangani dan dibina sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan salah satu kebutuhan dasar yang layak.

2.2.3 Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera Dalam pembangunan daerah, bidang seni, budaya dan olahraga merupakan bidang strategis yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini terutama terkait tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal, serta keberlanjutan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dalam berbagai pertandingan atau *event* olahraga yang diikuti oleh daerah.

1. Seni Budaya

Kabupaten Belitung mempunyai potensi yang cukup besar dibidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang berkembang di Kabupaten Belitung seperti upacara adat, benda cagar budaya dan kesenian tradisional. Keragaman seni dan budaya tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dimasa yang akan. Selain sebagai upaya pelesetarian agar bisa menjadi daya tarik wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik.

Jenis Kesenian dan Group Kesenian di Kabupaten Belitung dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu Tradisi, Kreasi dan Campuran (Tradisi dan Kreasi). Kesenian Tradisi adalah kesenian yang tidak merubah ciri khas kesenian tersebut dari zaman dahulu sampai saat ini masih orisinil, sedangkan kesenian kreasi adalah kesenian yang memodifikasi kesenian yang sudah ada yang bersifat kontemporer, adapun kesenian campuran merupakan pembauran atau gabungan dua jenis kesenian tersebut.

Jumlah sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Belitung berjumlah 50 buah, Gedung kesenian sebanyak 1 (satu) buah dan musiam Kabupaten Belitung ada 2 (dua) buah, sedangkan jumlah Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36

Jumlah Cagar Budaya dan Museum

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Benda Cagar Budaya	88	88	88	88	88
2.	Bangunan Cagar Budaya	21	21	21	21	21
3.	Struktur Cagar Budaya	15	15	15	15	15
4.	Situs Cagar Budaya	12	12	12	12	12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2019

2. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah.

Jumlah pemuda yang mendapatkan pelayanan kepemudaan sebanyak 400 orang untuk seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Belitung, yang terpilih sebanyak 32 orang untuk Paskibraka ringkat Kabupaten (16 putra dan 16 putri). Pemerintah Kabupaten Belitung melalui PD terkait memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi kepemudaan yang diimplementasikan dengan program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan peningkatan kompetensi kepemudaan, yang salah satunya pada kegiatan pengemblengan Paskibraka Tahun 2018 dari mulai seleksi telah menghasilkan prestasi antara lain :

1. Pengiriman Paskibraka Tingkat Nasional 1 Orang (Putri).
2. Pengiriman Paskibraka Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 orang (1 Putri dan 3 Putri).

Peningkatan prestasi olah raga diupayakan oleh daerah melalui perangkat daerah terkait dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga serta melakukan pembinaan terpadu terhadap para atlet dan pelatih pada cabang-cabang olah raga.

Untuk meningkatkan motivasi masyarakat akan gemar berolah raga maka dilaksanakan beberapa program yang nantinya diterjemahkan kedalam

beragam kegiatan berupa penyelenggaraan kejuaraan serta pembinaan terhadap cabang olah raga termasuk olah raga tradisional.

Sebanyak 60 prestasi olahraga telah diraih Kabupaten Belitung di tahun 2018 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Berikut capaian perolehan medali kejuaraan olahraga di tingkat provinsi.

Tabel 2.37

Capaian Perolehan Medali Tingkat Provinsi Kabupaten Belitung Tahun 2018

No	Event	Perolehan Medali			Juara	Cabang Olahraga	Ket
		Emas	Perak	Perunggu			
1	Pekan Olahraga Provinsi IV (Bangka Tengah)	39	39	64		Sebanyak 23 Cabang Olahraga	Tingkat Provinsi

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Untuk gedung olahraga Kabupaten Belitung memiliki 1 (satu) buah yaitu gedung olahraga yaitu Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan sedangkan sarana prasarana olah raga yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38

Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olah Raga per Tahun (Unit)						
		2014	2015	2016	2017	2018		
						Standar	Tidak Standar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sepak bola	160	114	44	45	15	31	46
2.	Tenis lapangan	8	6	6	6	6	-	6
3.	Bola voli	102	72	72	72	35	37	72
4.	Bola basket	8	7	7	7	7	-	7
5.	Bulu tangkis	73	47	47	47	17	19	36
6.	Sepak takraw	36	47	37	37	6	31	37
7.	Atletik	4	1	1	1	1	-	1
8.	Tenis meja	43	43	43	43	43	-	43
9.	Taekwondo	2	2	2	2	2	-	2

No	Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olah Raga per Tahun (Unit)						
		2014	2015	2016	2017	2018		
						Standar	Tidak Standar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	Karate	2	2	2	2	2	-	2
11.	Pencak silat	12	10	3	3	3	-	3
12.	Panjat tebing	1	1	1	1	1	-	1
13.	Kolam renang	5	5	5	5	-	5	5

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung, Tahun 2019

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah daerah berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, hal ini diterjemahkan kedalam bentuk pelayanan umum/publik yang diberikan kepada masyarakat yang berorientasikan kepada kualitas pelayanan yang baik. Secara umum, pelayanan ini terbagi kedalam dua kelompok kecil, yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Adapun gambaran perkembangan dan keberhasilan indikator kinerja dari kedua layanan tersebut, sebagai berikut:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Kualitas layanan urusan wajib yang dilaksanakan daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat diukur dengan mempergunakan indikator kinerja penyelenggaraan beberapa urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu urusan a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; f) sosial.

Sementara urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar antara lain : a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) lingkungan hidup; e) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; f) pemberdayaan masyarakat dan desa; g) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; h) perhubungan; i) komunikasi dan informatika; j) koperasi, usaha kecil dan menengah; k) penanaman modal; l) kepemudaan dan olahraga; m) statistik; n) kebudayaan; o) perpustakaan dan r) kearsipan. Berikut ini gambaran pencapaian indikator dari setiap urusan wajib tersebut:

2.3.1.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

a. Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar menjadi salah satu urusan prioritas pemerintah Kabupaten Belitung. pemerintah telah berupaya memenuhi berbagai kriteria dasar dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung. Sebagai tolok ukur capaian kinerja di bidang pendidikan dapat diperhatikan dari berbagai indikator yang dipergunakan untuk menunjukkan kualitas layanan pendidikan. Berikut hasil kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Belitung selama periode 2014-2018:

Tabel 2.39

Hasil Kinerja urusan Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Kasar					
	- PAUD	70,61	72,01	77,84	61,36	62,19
	- SD/MI/Paket A	106,09	120,78	122,53	119,17	117,88
	- SMP/MTs/Paket B	102,54	101,82	111,07	100,10	98,52
2	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI/Paket A	98,65	99,80	107,34	108,95	99,59
	- SMP/MTs/Paket B	88,33	87,77	100,15	81,69	79,92
3	Angka Partisipasi Sekolah					
	- SD/MI/Paket A	98,65	99,79	98,89	99,64	99,59
	- SMP/MTs/Paket B	86,16	71,82	97,86	82,63	97,41
4	Angka Putus Sekolah					
	- SD/MI/Paket A	0,15	0,11	0,61	0,11	0,14
	- SMP/MTs/Paket B	0,08	0,05	0,44	0,74	0,17
5	Angka Kelulusan					
	- SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100
6	Angka Melanjutkan					
	- SD/MI/Paket A	99,72	99,74	97,29	97,34	96,59
	- SMP/MTs/Paket B	93,84	93,86	96,51	94,06	n/a
7	Rasio Ketersediaan Sekolah					
	- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	56,35	60,67	59,83	61,26	62,46
8	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- SD/MI/Paket A	643,42	624,32	605,32	561,14	559,31
	- SMP/MTs/Paket B	512,18	503,61	481,28	453,08	464,79
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	71,06 %	74,67 %	79,56 %	82,36 %	82,84 %
10	Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,07	8,09	8,10	8,11	8,58
11	Persentase SD/MI berakreditasi Minimal B	46,77	46,77	98,39	98,39	98,39
12	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	73,08	73,08	93,33	93,33	93,33

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun 2019

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara umum dapat dikatakan baik.

Peningkatan capaian APK dan APM pada 5 (lima) tahun terkhir untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sudah melebihi target hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, APK menunjukkan peningkatan hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat dan upaya keras pemerintah Kabupaten Belitung terhadap peningkatan sarana prasarana pendidikan dan fasilitas publik cukup memadai, selain itu karena adanya program bantuan pendidikan salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat membantu pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Perkembangan kecenderungan usia masuk SD/MI makin muda (kurang dari 7 tahun) maka APM makin lama makin menurun. Hal ini disebabkan anak yang berusia 6 tahun yang berada di SD/MI dan anak yang berusia 12 tahun yang telah berada di SMP/MTs tidak terhitung dalam menentukan APM. Trend ini terjadi hampir di semua wilayah Indonesia, yang mana anak yang belum cukup umur sudah dimasukkan pada pendidikan formal, dengan demikian kecenderungan Angka Partisipasi Murni (APM) akan menurun.

Khusus Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2013-2016. Namun pada tahun 2017 nilainya mengalami penurunan sebesar 16,48 persen, dari 77,84 % menjadi 61,36%. Hal ini berarti bahwa baru

sekitar 61,36% dari jumlah penduduk usia 3 sampai dengan 6 atau penduduk yang mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Belajar di Kabupaten Belitung. Tapi secara rata-rata nilai APK PAUD Kabupaten Belitung sudah baik.

Angka kelulusan juga telah melebihi target yang ditetapkan. Angka Kelulusan untuk jenjang SD selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan angka kelulusan sempurna yaitu 100%, sedangkan untuk prosentase kelulusan tingkat SMP sama dengan tahun sebelumnnya yaitu sebesar 100%. Dalam hal pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal pada tahun 2017 mendapat perhatian yang cukup besar, terutama sekali dalam penyelenggaraan paket A, B dan C.

Dengan meningkatnya angka kelulusan baik di SD dan SMP maka peserta paket dari peserta gagal formal semakin sedikit. Namun bukan berarti perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan paket A,B, dan C di Kabupaten Belitung menjadi berkurang, tetapi sebaliknya akan berusaha meningkatkan sehingga menjadi sebuah lembaga yang berkualitas.

Pada tahun 2013, capaian angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI Kabupaten Belitung sebesar 98,52% dan 99,64% pada tahun 2017. Itu artinya partisipasi masyarakat pada umur sekolah dasar sangat tinggi terhadap pendidikan. Secara umum Nilai APS pada tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan sebesar 0,75 persen sedangkan pada jenjang pendidikan SLTP terjadi penurunan sebesar 15,23 persen.

Persentase angka putus sekolah (DO) pada semua jenjang pendidikan merupakan salah satu sasaran yang menjadi prioritas dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia sekolah untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Angka DO untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Belitung mengalami penurunan. Kondisi ini cukup menggembirakan dan tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan persuasif serta pemberian bantuan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu agar keinginan siswa untuk tetap bersekolah dapat terwujud. Namun hal ini masih menjadi perhatian pemerintah agar angka putus sekolah (DO) segera tuntas sehingga anak usia sekolah benar-benar bersekolah sesuai jenjang pendidikannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya siswa yang putus sekolah di tingkat SD,

SMP, yaitu faktor sosial ekonomi masyarakat, dan perlunya peningkatan dukungan dan motivasi orang tua, terutama di daerah-daerah pedesaan tertentu. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menjamin anak-anak usia wajib belajar untuk bersekolah melalui pendidikan gratis, namun kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi perkembangan sosial dan motivasi belajar siswa sehingga dengan alasan ikut meringankan beban keluarga mereka harus bekerja.

Pemerintah Kabupaten Belitung melalui program wajib belajar 9 tahun berusaha mencapai target angka melanjutkan (AM) 100%. Persentase Angka melanjutkan SD (dari SD ke SMP) Kabupaten Belitung meningkat sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan sepanjang tahun 2017 telah dilakukan dimulai dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa melalui pelatihan dan Lomba. serta melengkapi sarana prasarana dalam upaya peningkatan mutu baik guru maupun siswanya.

Jumlah guru yang berpendidikan S1/DIV mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Dilihat dari capaian lima tahun terakhir dimana pada tahun 2013 persentase guru yang memiliki kualifikasi S-1/D.IV sebesar 65,62 % dan 82 ,36% pada tahun 2017. Penyebab guru belum berpendidikan S-1/DIV diantaranya karena faktor usia, dimana untuk guru yang berusia lebih dari 50 Tahun enggan melanjutkan jenjang pendidikan ke D4 atau S1 dengan pertimbangan sudah mendekati pensiun.

b. Kesehatan

Disamping pelayanan publik di bidang pendidikan, bidang kesehatan juga perlu mendapatkan gambaran yang proporsional dari sisi ketersediaan, penyebaran, dan kualitas pelayanan. Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2017 telah memiliki Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 1 unit, puskesmas sebanyak 9 unit, puskesmas pembantu 32 unit, puskesmas keliling 12 unit, Rumah sakit umum swasta 2 unit, balai pengobatan/klinik swasta 7 unit.

Puskesmas sebagai unit layanan kesehatan tingkat dasar di Kabupaten Belitung belum 100% memiliki status terakreditasi madya, sehingga diperlukan

upaya untuk meningkatkan status layanan tersebut. Adapun data akreditasi puskesmas sebagai berikut:

Tabel 2.40
Data Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Belitung

Tahun	2018								
Puskesmas	Tanjungpandan	Air Saga	Perawas	Badau	Sijuk	Tanjung Binga	Membalong	Simpang Rusa	Selat Nasik
Status Akredutasi	Madya	Madya	Dasar	Utama	Madya	Dasar	Madya	Dasar	Dasar

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2018

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono pada tahun 2016 masih berstatus Akreditasi Perdana dengan 4 pokja yang terpenuhi dari 15 pokja yang harus terpenuhi diantaranya adalah :

1. Standar keselamatan pasien;
2. Pengendalian pencegahan infeksi
3. Hak dan kewajiban pasien
4. Kualifikasi pendidikan staf

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berkualitas tidaknya sumberdaya manusia, oleh karena itu daerah sangat memperhatikan pembangunan kesehatan melalui pembangunan urusan kesehatan berikut hasil kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Belitung selama periode 2014-2018:

Tabel 2.41
Hasil kinerja urusan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek/ Fokus/ Bidang urusan/Indkator Kinerja pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran Hidup	13	11	10	10	12,1
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran Hidup	120	97	127	208	196
3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	70,22	70,32	70,38	70,38	Belum tersedia
4	Rasio Posyandu per satuan Balita	11,79	13,42	12,63	17,17	13,1
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	69,09	95,70	98,31	95,63	117,1
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,52	90,73	82,07	91,18	96,10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	93,88	93,88	73,47	95,92	95,92
8	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	9,10	100	100	100
11	Cakupan kunjungan bayi	91,22	96,62	88,83	91,77	98,69
12	Angka kejadian malaria	0,25	0,10	0,01	0,05	0
13	Cakupan Puskesmas	180	180	180	180	180
14	Prevalensi gizi kurang	0,51	0,57	0,63	0,49	0,53
15	Cakupan pelayanan kasus HIV	-	-	-	50,33	60,96
16	Cakupan pelayanan kasus diabetes mellitus	-	-	-	74	20
17	Cakupan pelayanan kasus hipertensi	-	-	-	30,45	32,79
18	Cakupan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	-	-	98	100
19	Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	-	-	-	-	98%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2019

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan pada tahun 2018, yaitu sebesar 12,1 per 1000 kelahiran hidup. Dari observasi umum dan pendataan unit layanan kesehatan, kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Belitung disebabkan oleh Asfiksia, kelainan congenital dan kelaianan bawaan, dan kematian yang disebabkan BBLR.

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kematian ibu melahirkan adalah meningkatkan peran bidan. Dalam hal ini, bidan di desa benar-benar difungsikan sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB dan AKI.

Rasio Posyandu per satuan Balita Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sudah memenuhi target dan sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan, dimana standarnya adalah 12–50 posyandu per 1.000

balita. Pada Tahun 2018 rasio posyandu per satuan balita sebesar 13,1 per satuan Balita.

Terkait ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat di Kabupaten Belitung terdapat 9 unit Puskesmas dengan tiga puskesmas rawat inap dan enam puskesmas non rawat inap. Untuk cakupan puskesmas di Kabupaten Belitung sudah mencapai 180%, kecamatan Tanjungpandan terdapat tiga Puskesmas, kecamatan Sijuk sebanyak dua puskesmas, Kecamatan Membalong dua puskesmas, Kecamatan Selat Nasik dan Badau masing-masing satu puskesmas, begitu pula dengan puskesmas pembantu dimana jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu disetiap kecamatan telah tersedia.

Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Belitung selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Pada tahun 2014 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 69,09%, dan kemudian meningkat menjadi 117,1 % di tahun 2018.

Perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Belitung selama periode 2014-2018 telah mencapai 95,92% pada tahun 2018. Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di kabupaten Belitung sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2014 hingga 2018 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah faktor penting didalam menunjang menunjang perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Belitung, yang mana menggambarkan dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Berikut hasil kinerja urusan Pekerjan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2014-2018.

Tabel 2.42

Hasil kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pekerjaan Umum:					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	76,66	79,09	67,69	73,68	76,46
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah Ada (%)	59,48	62,43	58,85	61,23	66,75
3	Persentase Pengendalian daya rusak air (%)	3,43	6,02	13,20	20,01	26,24
4	Rasio Jaringan Irigasi	33,55	34,01	38,01	53,79	68,57
	Penataan Ruang:					
5	Ketaatan terhadap RTRW1)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 2)	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Program Pemanfaatan Ruang.2)	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya.2)	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota.2)	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	30%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018

Kabupaten Belitung memiliki jalan sepanjang 864.47 Km dan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung sepanjang 628,67 Km . Kondisi jalan kabupaten sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 umumnya baik, ini menunjukan bahwa kecepatan rata-rata kendaraan bermotor bisa melebihi 40 Km /jam , walaupun masih terdapatnya kondisi jalan yang kurang baik tetapi kondisnya hanya rusak ringan dan masih dapat mendukung aksesiblitas masyarakat, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya menjamin aksesibiltas transportasi dan keselamatan transportasi di Kabupaten Belitung . Dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Belitung baru terdapat 25 % atau 157,17 KM yang memenuhi standar dilihat dari segi lebar jalan, meningkatnya jumlah kendaraan membutuhkan lebar jalan yang memenuhi standar, untuk menjaga keselamatan lalu lintas.

Terkait irigasi , jaringan irigasi primer yang ada pada saat ini sepanjang 9.158,62 m telah mengairi sawah seluas 862 hektar dimana ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada tahun 2018 sudah mencapai 83,69%, kondisi air irigasi dikabupaten Belitung sangat dipengaruhi oleh air tadah hujan.

Tingkat ketaatan tata ruang di kabupaten Belitung sangat baik hal ini terlihat tidak adanya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melanggar RTRW Kabupaten Belitung yang sesuai dengan peraturan daerah .Partisipasi masyarakat dalam penyusunan tata ruang yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten Belitung dan RDTR kecamatan Tanjungpandan dan program program penataan ruang lainnya, cukup baik dengan menghadiri setiap forum konsultasi publik yang berkaitan dengan program tata ruang. Pemerintah daerah juga telah menyediakan informasi terkait RTRW kabupaten melalui peta analog dan peta digital, serta terlayaninya seluruh masyarakat dalam pengurusan izin tata ruang yang mana permohonnya langsung ditujukan kepada sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan persyaratan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk tentunya akan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan perumahan yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman. Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam

kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Kinerja atas layanan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Belitung mengacu pada cakupan rumah dan permukiman layak huni, permukiman kumuh, air bersih, air limbah dan drainase. Berikut hasil kinerja urusan Perumahan dan Permukiman selama tahun 2014-2018.

Tabel 2.43

Hasil kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman:					
1	Rasio permukiman layak huni	0.99	0.99	0.99	0.99	0,99
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	98.61	99.09	99.23	99,97	100
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	N/A	N/A	N/A	83,22	51,27
4	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Hektar)	N/A	N/A	N/A	17,31	32,96
5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	N/A	N/A	N/A	5,42	
7	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	82,30	63,00	65,10	67,43	
8	Persentase pelayanan air bersih (%)	14,13	15,54	17,75	19,57	37,93
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (%)	73,04	74,28	81,32	81,60	81,81

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penetapan Basis Data Pemetaan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Belitung telah memutuskan bahwa rumah tidak layak huni yang harus dituntaskan dalam periode 2013-2018 adalah sebanyak 914 rumah. Ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Belitung di tahun 2017 telah mencapai 99,97%. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat 0,03% rumah tidak layak huni atau 27 unit rumah yang belum selesai dituntaskan dan hal inipun

telah dianggarkan pada akhir perode tahun 2018 untuk dapat menyelesaikan sebanyak 10 unit.

Luas areal kawasan kumuh di Kabupaten Belitung adalah 0.04% dari seluruh luas Kabupaten Belitung dimana dari luas tersebut luas permukiman kumuh adalah 0,27 %. Sesuai dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/190.A/KEP/BAPPEDA/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/605/KEP/BAPPEDA/2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Belitung, target penyelesaian permukiman kumuh pada tahun 2017 adalah 103,17 Hektar sementara luasan permukiman kumuh di Kabupaten Belitung yang tertangani pada tahun 2017 baru mencapai 17,31. Ini menunjukkan bahwa masih luasnya kawasan kumuh yang perlu ditangani.

Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan sedikit demi sedikit selama periode 2014-2018. Pada tahun 2014 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 60,60%, dan 67,43% pada tahun 2018 dengan peningkatan presentase pertahun relatif sama atau jika dirata-ratakan sebesar 1,71% per tahun. Sedangkan persentase pelayanan air bersih Kabupaten Belitung masih sangat rendah yaitu 12,45% pada tahun 2013 dan 19,57 % pada tahun 2017, dengan peningkatan persentase pelayanan yang relatif kecil yaitu rata-rata 2,03% per tahun. Sedangkan untuk indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai semakin baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dimulai pada tahun 2013 sebesar 72,56%, meningkat menjadi 73,04% pada tahun berikutnya, meningkat kembali menjadi 74,28%, 81,32%, dan menjadi 81,60% pada tahun 2017.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Berikut hasil kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2014-2018:

Tabel 2.44

Hasil Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) *	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penegakan PERDA dan Perkada *	83%	95%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota *	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%
4	persentase (%) korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi pasca bencana 2)**	NA	NA	100	100	100%
5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan selama masa tanggap bencana 2)**	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat.2)**	83,33%	Tidak ada bencana skala besar	100%	100%	100%

*Sumber: * Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung*
*** DPPPAS Kabupaten Belitung*

Hasil Kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan kepada masyarakat. Dilihat dari pelayanan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran menunjukan kinerja yang baik, namun dalam upaya meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran pemerintah baru membentuk 1 Wilayah Manajemen Kebakaran dengan cakupan pelayanan baru mencapai 7,68%

Pemerintah melakukan upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melakukan penertiban dan melakukan penegakan peraturan daerah. Peningkatan pelayanan dilakukan dan dapat dari seluruh laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran Peraturan daerah telah dapat dilayani oleh pemerintah.

Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Belitung yang dalam kurun terakhir ini terjadi yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017, terjadi bencana banjir di sejumlah tempat, pemerintah berupaya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

f. Sosial

Perkembangan pada urusan Sosial dapat terlihat pada Tabel Hasil Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014-2018 :

Tabel 2.45

Hasil kinerja urusan Sosial
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah PMKS	9.041	9.722	9.656	14.618	13.534
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	98,53	98,73	82,45	76,42	73,85
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap(%)	83,33	Tidak ada bencana skala besar	100	100	100
5	Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	98,53	98,73	82,45	76,42	73,85

Sumber : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung, 2019

Hasil kinerja pemerintah melalui urusan Sosial ditunjukkan melalui beberapa indikator sebagaimana pada tabel di atas, persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan diakibatkan pendataan PMKS yang kurang valid dan terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Belitung sehingga berakibat dalam pendataan PMKS yang terdampak bencana banjir belum terdata sebagai PMKS dalam hal penanganan PMKS untuk memperoleh bantuan dan hal tersebut berpengaruh dalam mengoptimalkan kinerja penanganan PMKS pada aurusan sosial, sehingga diperlukan peran serta swadaya masyarakat melalui program *Corporate Sosial Responsibility*

(CSR) atau bantuan Badan Amil Zakat (BAZ) dan partisipasi swadaya masyarakat dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung.

2.3.1.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

a. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung secara makro dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran yang jelas sampai berapa jauh sebenarnya penduduk yang termasuk usia kerja (15 tahun ke atas) benar-benar aktif didalam bekerja maupun tidak aktif bekerja. TPAK Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sebesar 66,05 % dan 69,29 % pada tahun 2017 ini artinya artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 69 orang sampai 70 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja. Semakin tinggi TPAK mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Belitung Tahun 2015 sebesar 4,57 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 4 sampai 5 orang yang merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Belitung dari tahun 2013 hingga 2015 rata-rata peningkatan sebesat 0,99 persen, dimana pada tahun 2013 TPT Kabupaten Belitung sebesar 2,59 persen, tahun 2014 sebesar 3,26 persen dan 4,57 persen pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017, angka TPT mengalami penurunan bila dibandingkan TPT pada tahun 2015, yaitu menjadi sebesar 2,57%. Berikut adalah kinerja Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2014 -2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46

Hasil kinerja urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (%)	67.08	67.64	NA	69,29	Belum tersedia
2	Tingkat Pengangguran Kerja (%)	3.26	4.57	NA	2,57	Belum tersedia
3	Jumlah Pencari Kerja (Orang)	1.090	310	1.123	562	246
4	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	677	50	180	120	49
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	62,11	16,13	16,03	21,35	30%
6	Penyelesaian perselesaian hubungan industrial/PHK (kasus)	13	11	16	14	12
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	74,50	73,86	73,94	73,96	79,35

Sumber : Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung tahun 2019

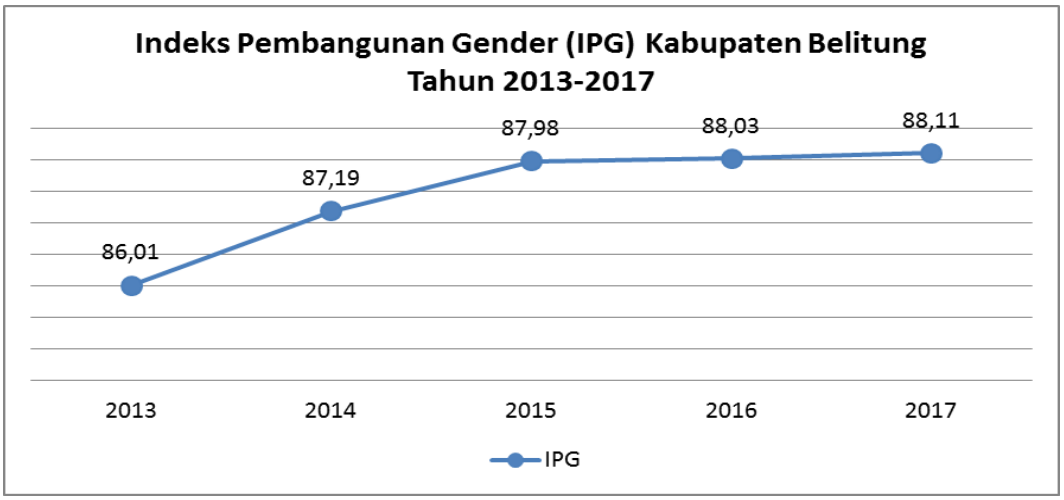
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Konsep dan Definisi BPS adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dnegan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPM memberikan gambaran pembangunan kapabilitas dasar manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sedangkan IPG mengukur kapabilitas dasar manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi terfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan membandingkan kedua indicator tersebut dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Lebih rendahnya pencapaian IPG dibandingkan IPM menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender pada ketiga bidang pembangunan tersebut, sehingga kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut data capaian IPG di Kabupaten Belitung tahun 2013-2017:

Grafik 2.18

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Belitung
Tahun 2013-2017



Sumber Data : Publikasi BPS Kabupaten Belitung Tahun 2017

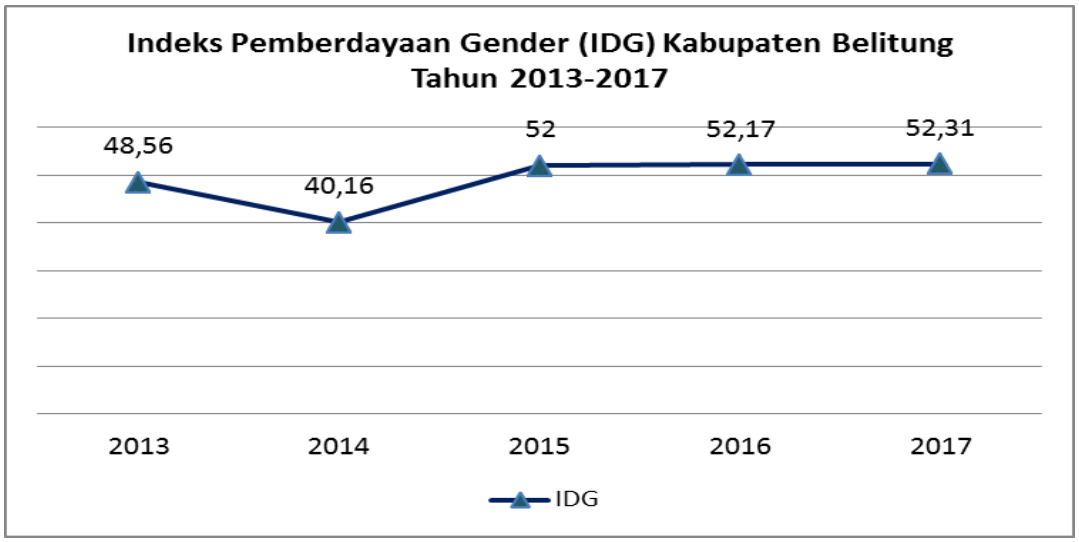
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dimanfaatkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender, sehingga kesetaraan gender terjadi apabila nila IPM sama dengan IPG.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan Indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi, IDG digunakan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. Interpretasi IDG adalah semakin tinggi maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, meskipun secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun peranan perempuan dalam pengambilan keputusan terus menunjukan perkembangan yang dapat dilihat dari pencapaian IDG yang terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Sebagaimana data pada grafik dibawah ini merupakan capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Belitung pada Tahun 2013-2017.

Grafik 2.19



Sumber Data : Publikasi BPS Kabupaten Belitung

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Belitung selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47

Hasil kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	0	0	0	0	1
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	39,8	40,1	40,8	NA	NA
3	Jumlah kekerasan dalam rumah tangga	37	43	77	88	51
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	34,2	35,7	35,9	NA	NA
5	Persentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (%)	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung, 2018

Berdasarkan data capaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Belitung selama tahun 2014-2018 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan belum terpilihnya wakil perempuan untuk menjadi perwakilan masyarakat di lembaga legislatif, namun Partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukan peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2014-2018.

Jumlah kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami penurunan menjadi 51 kasus di tahun 2018 bila dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 88 kasus. Peningkatan data rasio KDRT tersebut menunjukkan peran masyarakat akan keperdulian dalam menanganai Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga jika dilihat dalam penyampaian informasi ke lembaga terkait.

c. Pangan

Peningkatan urusan pangan dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Peningkatan ketersediaan pangan, dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang,

Tabel 2.48

Hasil Kinerja Urusan Pangan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pangan					
1	Pengawasan dan pembinaan keamanan	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan pangan Utama	122.03	142.5	115.53	115.72	Data belum tersedia
3	Ketersediaan Enargi dan protein perkapita	187.21	131.86	181.49	162.85	Data belum tersedia
4	Penguatan cadangan pangan	50	50	50	60	5.59
5	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.31	85.52	83.73	86.98	82,09
6	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	50%	50%	60%	60%	5.59

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Ketersedian pangan utama di Kabupaten Belitung terus meningkat. Ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh penyediaan dalam negeri, dan perubahan stok pada tahun 2014 ketersediaan pangan di Kabupaten Belitung sejumlah 122,03 % dan terus meningkat sampai dengan tahun 2017 ketersediaan pangan mencapai 115,72%

Berdasarkan data Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pangan masyarakat terhadap ketiga kelompok pangan di atas masih cukup rendah yaitu untuk konsumsi 1) umbi-umbian, 2) kacang-kacangan; 3) gula sedangkan untuk 6 (enam) kelompok pangan, yaitu 1) padi-padian; 2) pangan hewan; 3) minyak dan lemak; 4) buah/biji berminyak; 5) sayur dan buah 6) lain-lain, dimana tingkat konsumsi pangan masyarakat (Gram/Kapita/Hari) sudah memenuhi standar Pemerintah Pusat yang ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012. Sedangkan 3 (tiga) kelompok pangan yang lainnya, yaitu, belum memenuhi standar WNPG XTahun 2012.

d. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan, yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Namun memang di Kabupaten Belitung masih mengalami kesulitan untuk pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur terkait layanan masyarakat.

Capaian layanan urusan pertanahan di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49

Hasil Kinerja Urusan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pertanahan					
1	Izin lokasi yang dikeluarkan	10	16	8	10	-
	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan					
2	Hak Milik	2.366	1.685	2.037	4.017	9.095
3	Hak Guna Bangunan	9	56	14	50	17
4	Hak Guna Usaha	0	0	4	64	5
5	Hak Pakai	26	11	9	17	9

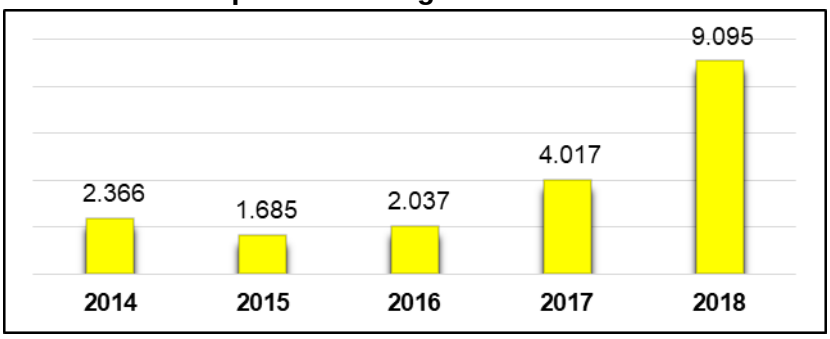
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Mulai pertengahan tahun 2017 hingga saat ini, izin lokasi sepenuhnya dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung setelah sebelumnya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. Total SHM yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung adalah sebanyak 19.200 SHM selama periode 2014-2018 dengan kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 9.095 SHM yang dikeluarkan bila dibandingkan dengan tahun 2014 dengan hanya menerbitkan 2.366 SHM. Berikut grafik jumlah SHM yang telah dikeluarkan selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.20

Jumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tahun 2014-2018

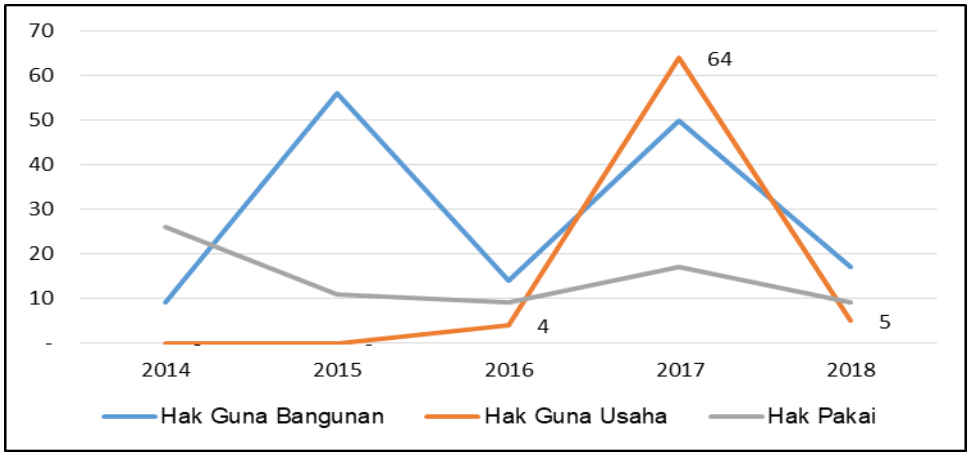


Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2019 (diolah)

Adapun perkembangan jumlah sertifikat terkait Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai selama periode 2014-2018 masih berfluktuasi sebagaimana dinyatakan dalam grafik berikut.

Grafik 2.21

Perkembangan Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Tahun 2014-2018



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2019 (diolah)

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dari grafik 2.21 diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan yang sangat tajam pada tahun 2017 dengan jumlah sertifikat HGU yang dikeluarkan mencapai 64 buah setelah di tahun sebelumnya hanya 4 buah. Ini dapat diartikan bahwa perkembangan usaha, terutama di bidang pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dengan banyaknya pengajuan sertifikat HGU. Hal tersebut diharapkan dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal dan peningkatan di sektor usaha lainnya.

e. Lingkungan Hidup

Tidak dapat dipungkiri bahwa besar ataupun kecil pengaruh negatif pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap kualitas lingkungan tetap terjadi. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan sangat perlu untuk memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperkecil pengaruh negatif yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga upaya untuk selalu mengindahkan aspek kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selain itu, aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari terkait dengan aspek sosial ekonomi juga sangat ikut berperan dalam penciptaan degradasi kualitas lingkungan. Berkaitan dengan permasalahan di atas maka urusan lingkungan hidup

berkewajiban untuk menjaga dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. Secara umum indeks kualis lingkungan hidup Kabupaten Belitung masih dalam belum baik yaitu pada tahun 2018 sebesar 58,18 sementara Pemerintah pusat menargetkan IKLH tahun 2019 antara 66,5-68,5.

Tabel 2.50

Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lingkungan Hidup					
1	Kualitas Lingkungan Hidup	60,22	60,51	57,44	62,53	58,18
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	61,30	62,05	62,05	66,25	57,34
3	Hasil Pengukuran indeks kualitas Udara	90,39	90,61	80,40	94,97	89,40
4	Hasil Pengukuran indeks kualitas Tutupan Lahan	36,77	36,77	36,77	35,40	35,40
5	Timbulan sampah yang ditangani (Ton/Tahun)	27.718,39	24.166,21	25.269,39	28.984,80	26.092,17
6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	68,33%	68,77%	98,52%	80,00%	30,84%
7	Jumlah TPS 3R yang ada	5	5	8	10	11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2019

Terjadi penurunan jumlah sampah yang ditangani pada tahun 2018 disebabkan oleh perbedaan cara perhitungan yang dilakukan untuk tahun 2017 menggunakan komponen timbulan sampah yang ditangani dihitung berdasarkan areal yang dilayani sedangkan pada tahun 2018 perhitungannya berdasarkan timbulan sampah berskala kabupaten.

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif. Ini terlihat dari hasil pengukuran indeks kualitas air dimana pada tahun 2014 indeks kualitas air sebesar 61,30 terus menurun menjadi 57,34 atau tercemar ringan di tahun 2018. Penurunan indeks kualitas air di Kabupaten Belitung lebih disebabkan karena adanya perubahan bentang alam akibat aktifitas penambangan dan perkebunan, sehingga terjadi sedimentasi terhadap sungai. Kualitas Udara di Kabupaten Belitung juga cenderung mengalami penurunan yang terlihat dari Indeks Kualitas Udara dimana pada tahun 2014 sebesar 90,39

yang selanjutnya menjadi 89,40 pada tahun 2017 juga masih kategori tercemar ringan. Menurunnya kualitas udara di Kabupaten Belitung lebih disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.

Indeks kualitas tanah diukur dari besarnya tutupan hutan, dimana tutupan hutan di Kabupaten Belitung terus menurun dimana pada tahun 2014 sebesar 36,77 dan pada tahun 2018 menjadi 35,40.

Ketersediaan informasi mengenai status lingkungan hidup dapat dilihat dari dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah, dan akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang. Pada saat ini cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Belitung tidak mengalami perubahan , yaitu baru mencapai 0,785 % dari luas kabupaten Belitung artinya baru sebagian wilayah kecamatan Tanjungpandan yang dapat ditanggani. Dari jumlah area pelayanan sampah di tanjungpandan jumlah sampah yang ditangani terus meningkat.

Pada tahun 2018 target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum sampai ke TPA adalah sebesar 18% dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 73%. Adapun wilayah penanganan sampah sampai dengan tahun 2018 meliputi tujuh kelurahan dan enam desa di Kecamatan Tanjungpandan.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung yang memiliki KTP dari tahun ke tahun semakin bertambah, dari tahun 2014 sebesar 83 % hingga tahun 2018 sebesar 96,96%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mengurus KTP. Namun masih ada penduduk yang sering menunda-nunda untuk mengurus KTP, terutama wajib KTP pemula, sehingga pada tahun 2018 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk belum bisa mencapai angka 100%. Berikut adalah tabel indikator kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014 - 2018.

Tabel 2.51

Hasil Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk (%)	83	87	88	93	96,96
2	Rasio bayi berakte kelahiran	99,27	99,78	98,01	100	100
3	Rasio pasangan berakte nikah	35	41	58	61	63
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	99,27	99,78	98,01	100	100
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	62,41	68,21	79,61	93,27	88,28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2019

Rasio bayi berakta Kelahiran (0-1 th) telah mencapai 100% atau dengan kata lain penerbitan Akta Kelahiran untuk bayi usia 0-1 th sudah terlayani 100%. Hal ini berkat kerjasama yang baik dengan bidan desa maupun dengan perangkat desa, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta kelahiran putra putrinya. Pemanfaatan Akta Kelahiran untuk berbagai kepentingan, khususnya persyaratan masuk sekolah juga membawa dampak positif atas kepemilikan Akta Kelahiran.

Cakupan penerbitan kartu Tanda Penduduk mengalami fluktuasi yang sukup besar terutama pada tahun 2015 dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 12,67 menjadi 7,03 pada tahun 2015, hal ini disebabkan oleh karena tahun 2015 pencetakan KTP-el mulai diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Sebelumnya pada Tahun 2013 dan 2014 pencetakan KTP-el dilakukan di Pusat dan Dinas masih melakukan pencetakan KTP Nasional sehingga angka yang tertera pada tabel tersebut yaitu untuk Tahun 2013 dan 2014 adalah jumlah KTP Nasional dan Tahun 2015 dan seterusnya adalah jumlah Pencetakan KTP-el. Namun karena masih barunya pencetakan KTP-el di Kabupaten maka pada tahun 2015 cakupan penerbitan KTP mengalami penurunan, juga karena masyarakat masih banyak yang memiliki KTP Nasional yang masih cukup panjang masa berlakunya sehingga

masyarakat belum merasa perlu memiliki KTP-el. Pada tahun 2016 cakupan penerbitan KTP mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 24,79, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah mulai tinggi akan pentingya KTP-el, banyak masyarakat yang menukarkan KTP Nasionalnya dengan KTP-el, sehingga Tahun 2016 Dinas Tidak terlalu banyak lagi melakukan penukaran KTP Nasional ke KTP-el, dan lebih fokus kepada pencetakan KTP-el untuk wajib KTP pemula dan penduduk-penduduk yang mengalami perubahan Biodata.

Rasio pasangan berakta nikah juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2014 hanya sebesar 35% tahun 2015 sebesar 41% tahun 2016 sebesar 56 % dan tahun 2018 sebesar 63% kepemilikan Akta Perkawinan yang dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil (non muslim). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup sadar akan pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Namun untuk pernikahan-pernikahan yang telah dilangsungkan sudah cukup lama, masih banyak yang belum dilaporkan, baik itu pernikahan muslim di KUA atau pernikahan non muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana selama tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52

Hasil kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014– 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80%	80%	85%	85%	85%
2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	NA	NA	0%	0%	0%
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	NA	NA	98	98	98

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
3	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	76,27%
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80%	80%	80%	80%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2019

Pemberdayaan masyarakat dan Desa selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, hal tersebut dipengaruhi oleh pemanfaatan dana desa yang langsung dipergunakan untuk pembangunan masyarakat di desa dengan mengikutsertakan elemen masyarakat di desa melalui prioritas pembangunan desa, namun untuk pencapaian desa dengan status swasembada di Kabupaten Belitung dari 47 Desa yang ada belum mencapai status tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang digunakan sebagai indicator capaian sasaran pembangunan desa dan status kemandirian desa.

Indeks Desa Membangun adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Sehingga untuk mewujudkan desa Mandiri diperlukan upaya lebih baik dalam pemanfaatan potensi desa dan pembinaan yang harus terus dilakukan untuk kemajuan desa menuju masyarakat desa yang sejahtera.

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung pada tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.53

Jumlah Desa dengan Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2017

Status IDM	Tanjung Pandan		Membalong		Selat Nasik		Sijuk		Badau	
Tahun	2016	2017	2016	2017	2016	2016	2016	2017	2016	2017
Sangat Tertinggal	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Tertinggal	1	0	5	1	3	0	5	0	5	0
Berkembang	6	6	6	10	1	4	4	5	1	6
Maju	2	3	0	1	0	0	0	5	0	1
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas DPPKBPMD Kabupaten Belitung, 2019

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana selama tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Hasil kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)*	2,19	2,21	2,10	2,07	2,05
2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,28	2,08	2,08	2,08	2,08
3	Ratio Akseptor KB	90,47	89,93	88,49	89,53	82,03
4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	90,47	89,93	88,49	89,53	82,03
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	4,25	5,14	5,69	5,05	5,04
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,25	2,26	2,26	2,26	2,26

*Sumber data : Dinas DPPKBPMD Kabupaten Belitung, 2019 *Badan Pusat Statistik*

Di tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung meningkat menjadi 2,32%. Dengan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 2% selama lima tahun terakhir, maka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung dapat dikategorikan “cepat” dengan kecenderungan peningkatan yang melambat.

Sejak tahun 1970-an pemerintah sudah berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Sampai saat ini memang peningkatan jumlah penduduk masih terus terjadi setiap tahunnya di tiap daerah termasuk di Kabupaten Belitung. Meskipun begitu, angka fertilitas per perempuan cenderung turun dan stabil dalam kurun lima tahun terakhir.

Total Fertility Rate (TFR) didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.

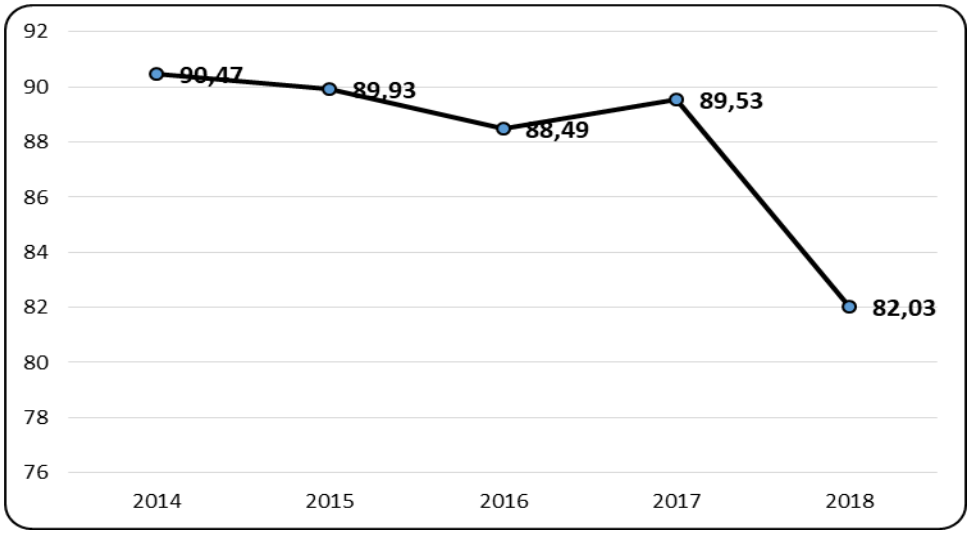
Angka Fertilitas Total cenderung stabil, yaitu 2,08%. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata kelahiran anak per perempuan usia subur di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 adalah sebesar 2,08 anak, jauh dibawah target nasional yang sebesar 2,40 anak.

Angka Fertilitas Total atau TFR dipengaruhi oleh ratio akseptor KB. Semakin rendah TFR, maka ratio akseptor KB akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sudah ada upaya optimalisasi Program Keluarga Berencana di daerah.

Ratio Akseptor KB merupakan persentase dari jumlah akseptor KB terhadap jumlah Pasangan Usia Subur setiap tahunnya. Dari tabel 7.2 terlihat bahwa jumlah akseptor KB di Kabupaten Belitung mengalami perubahan sepanjang tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 jumlah Pasangan Usia Subur mengalami penurunan dan diikuti oleh turunnya pula jumlah akseptor KB bila dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun Ratio Akseptor KB di tahun 2014 adalah yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun, yaitu 90,47%, namun hal tersebut dipengaruhi juga oleh ketidakstabilan jumlah akseptor KB dan pasangan usia subur di tahun yang sama.

Grafik 2.22

Ratio Akseptor KB Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018



Sumber : BPS (diolah)

Selama kurun 2013-2017, rata-rata Ratio Akseptor KB di Kabupaten Belitung mencapai lebih dari 85%. Pola naik turun yang tidak merata setiap tahunnya berhubungan dengan TFR dan faktor lain, seperti jumlah akseptor KB yang berubah setiap tahun meskipun jumlah Pasangan Usia Subur dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

i. Perhubungan

Sebagai wilayah kepulauan tentunya urusan perhubungan sangat memegang peranan penting didalam menjaga keterhubungan daerah dengan daerah lain terkait dengan kelancaran arus orang, barang dan jasa sebagai akibat interaksi sosial ekonomi masyarakat sehari-hari. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang baik maka distribusi barang dan jasa dari sentra produksi ke daerah konsumen dapat berjalan dengan baik dan lancar, selain itu dampak positif lain yang dapat dicapai adalah terbukanya daerah-daerah yang terisolir serta mobilitas penduduk pun ikut meningkat. Berikut ini penjelasan capaian indikator keberhasilan pembangunan urusan perhubungan dalam mendukung aspek pelayanan umum selama tahun 2014-2018 adalah:

Tabel 2.55

Hasil kinerja urusan Perhubungan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Arus Penumpang angkutan umum					
A	Tiba	24,456	17,628	12,755	9,451	563,080
B	Berangkat	26,218	20,726	16,092	12,487	564,165
2	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas penumpang	49%	55%	77%	80%	
3	Jumlah Uji KIR angkutan umum	391	337	350	380	400
4	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	0%	87.03%	86.63%	89.23%	
5	Pemasangan Rambu-Rambu	1,852	1,942	2,140	2,144	2,298
6	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	2,228	2,632	2,655	2,765	3,108

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik jumlah penumpang tiba maupun penumpang berangkat penumpang yang menggunakan angkutan umum pada tahun 2014 adalah sebanyak 24,456 orang datang dan sebanyak 26,218 orang berangkat dari terminal Tanjungpandan dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 9,451 orang datang dan sebanyak 12,487 orang berangkat dari Terminal Tanjungpandan. Penurunan jumlah penumpang angkutan darat, bisa disebabkan karena adanya kecenderungan ke penggunaan kendaraan pribadi sehingga mengurangi minat masyarakat menggunakan angkutan umum menurun.

j. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan seiring dengan tuntutan diera globalisasi saat ini. Dalamsetiap lini lapisan masyarakat membutuhkan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Penyampaian informasi publik

sebagai wujud keterbukaan informasi publik pemerintah dilakukan dengan berbagai media desiminasi informasi publik . Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.belitungkab.go.id*. Pada tahun 2018 terdapat 19 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sejak terbentuk tahun 2017, persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi sampai dengan 2018 sebesar 25 %. Berikut capaian kinerja :

Tabel 2.56

Hasil kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Komunikasi dan Informatika					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 2)	3	3	4	4	6
2	Web site milik pemerintah daerah	6	9	9	17	19
3	Persentase Terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	15%	25%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2019

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemberdayaan KUKM terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung, antara lain melalui program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Tabel 2.57

Hasil kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	132	135	140	128	129
2	Jumlah Koperasi (Unit)	201	204	209	183	183
3	Persentase koperasi aktif	65,67	66,17	66,98	69,94	70,49
4	Pertumbuhan Koperasi	3.03%	2.22%	3.57%	- 9.38%	9.38%
5	Jumlah Usaha Mikro	-	9.158	16.139	16.559	17.596
6	Pertumbuhan Usaha mikro	-	-	42.2	2.53	5,47%
7	Usaha Kecil Menengah	2927	3172	3437	3860	4132
8	Jumlah sarana pemasaran usaha mikro	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2018

Perkembangan koperasi di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2014-2018 mengalami capaian peningkatan yang melambat. Hal ini terlihat dari Tabel 2.59 yang menggambarkan bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Belitung tahun 2018 hanya meningkat sebesar 5% dari tahun 2014, yaitu dari semula 64,9% menjadi 69,9%. Meskipun melambat, peningkatan persentase koperasi aktif setiap tahunnya itu sudah cukup menunjukkan ada upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi.

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Belitung bervariasi setiap tahunnya dengan kecenderungan meningkat, meskipun memang dari segi jumlah ada penurunan bila dibandingkan tahun 2016 yang semula 209 unit menjadi 183 unit di tahun 2017. Adapun koperasi tidak aktif masih menunggu proses pembubaran oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dengan adanya aturan tentang perkoperasian sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 46 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 1994 dinyatakan bahwa pemerintah bisa membubarkan koperasi selain dengan Rapat Anggota, apabila koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Koperasi, kegiatan koperasi itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan, dan koperasi itu dinyatakan pailit

Penambahan jumlah koperasi aktif ternyata juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi. Pada tahun 2018, jumlah anggota koperasi sebanyak 15.815 orang, atau bertambah sebanyak 664 orang dari semula 15.151 di tahun 2017. Hal ini terjadi sebagai akibat penurunan aktivitas dalam mengelola dan melayani anggota/masyarakat pada sektor usaha simpan pinjam, sembako, dan jasa lainnya .Berikut ini perkembangan jumlah anggota koperasi tahun 2014-2018.

Tabel 2.58

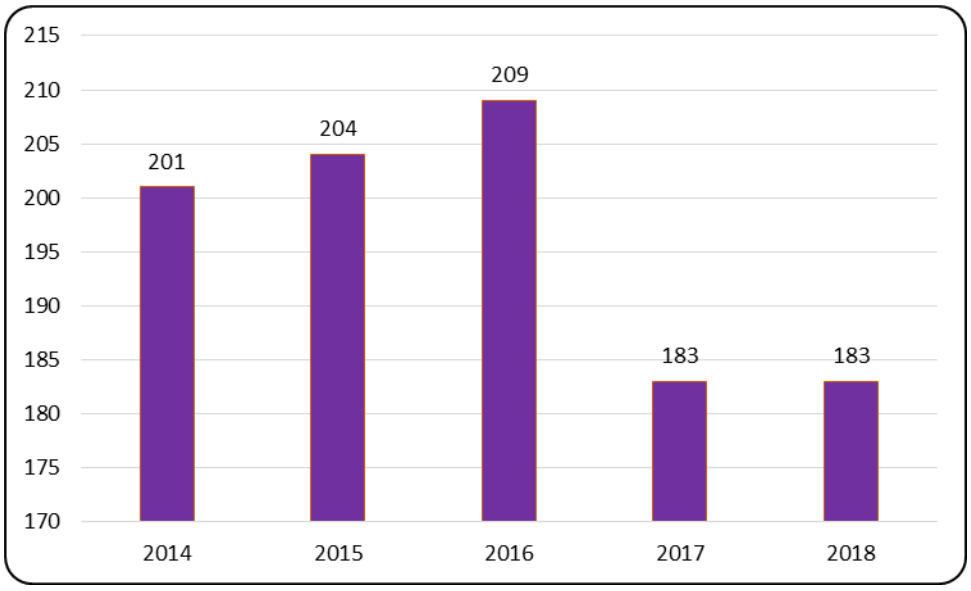
Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	2014	16.395
2.	2015	16.594
3.	2016	16.754
4.	2017	15.151
5.	2018	15.815

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2019

Grafik 2.23

Pertumbuhan Koperasi di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018 (Unit)



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2019

Volume usaha koperasi mengalami penurunan sebesar Rp. 2.123.324.000,- yaitu dari semula Rp. 64.804.294.000,-di tahun 2016 menjadi Rp 62.680.970.000,-pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi belum terlalu baik meski terdapat dukungan pemerintah daerah. tetapi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan usaha koperasi masih belum optimal.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah menggalakkan Reformasi Koperasi yang dapat dicapai melalui tiga upaya, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan usaha. Salah satu tindakan nyata dari rehabilitasi adalah pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan *Online Base Data System* sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi. (Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2017, BPS).

Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa koperasi adalah salah satu penggerak pembangunan. Maka hendaknya perlu peningkatan kualitas koperasi baik secara kelembagaan maupun partisipasi aktif masyarakat . Selain itu koperasi hendaknya tidak terbatas di bidang simpan pinjam saja, tapi juga lebih bersifat produktif dan merambah berbagai sektor, terutama sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, sehingga nantinya dapat memberi *multiplier effect* terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung. Jadi perlu adanya upaya peningkatan produktivitas koperasi.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria antara lain memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-, sedangan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak

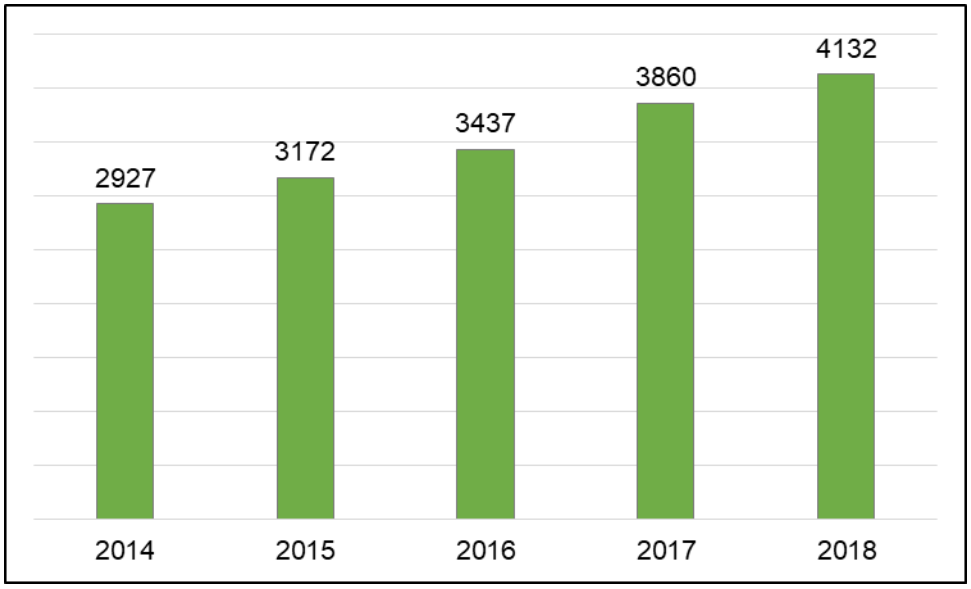
termasuk tanah dan tempat bangunan usaha, dan hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-.

Pertumbuhan usaha mikro kecil mengalami penurunan sebesar 2,53 % di tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat mencapai 42,2%. Jadi usaha mikro hanya bertambah 420 unit dari semula 16.139 unit di tahun 2016 menjadi 16.559 unit pada tahun 2017. Penurunan pertumbuhan usaha mikro ini disebabkan antara lain belum optimalnya pengelolaan usaha mikro kecil di Kabupaten Belitung. Pengelolaan disini mencakup masih rendahnya produksi, kualitas sumber daya manusia maupun manajemen dan tata kelola usaha mikro tersebut. Selain itu, dengan semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung hendaknya benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi kewirausahaan mereka dalam memajukan produk dan pertumbuhan usaha mikro daerah.

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam laju perekonomian suatu daerah karena erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Selama kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah usaha kecil menengah di Kabupaten Belitung, yaitu dari semula 2.927unit di tahun 2014 menjadi 4.132 unit pada tahun 2018. Adapun peningkatan tersebut disebabkan antara lain adanya pelatihan pengembangan bisnis usaha kecil menengah dan pemberian fasilitasi peningkatan permodalan usaha kecil menengah melalui PUKK BUMN, perusahaan dan perbankan.

Grafik. 2.24

Perkembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, 2019 (diolah)

I. Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal kini amat dirasakan penting karena kapasitas fiskal pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota amat terbatas sehingga sulit bila selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. Dampak pengganda atau *multiplier effect* yang terjadi dari peningkatan investasi suatu daerah adalah meningkatnya pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, terserapnya tenaga kerja yang berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan hidup yang layak.

Tabel 2.59

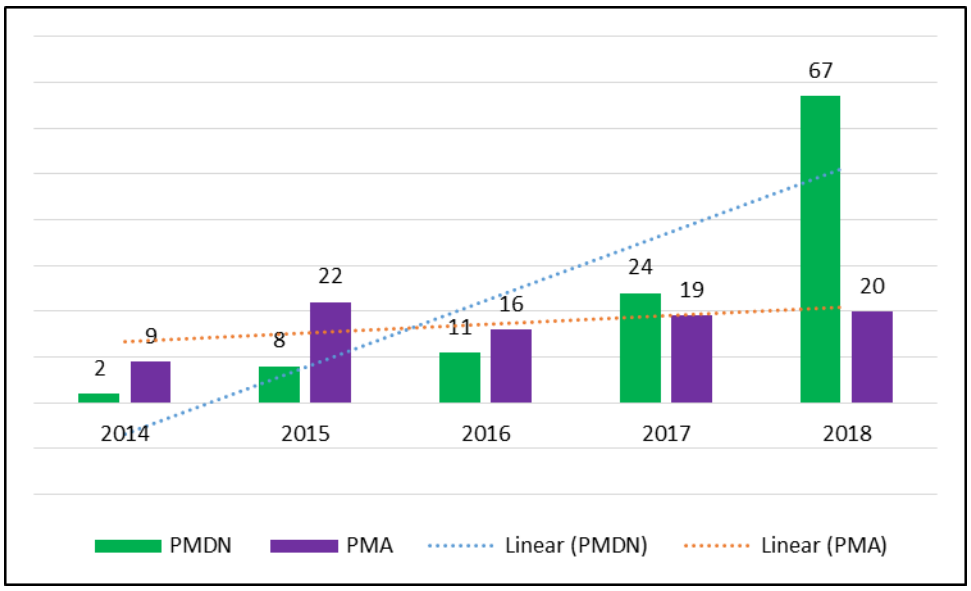
Hasil kinerja urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Belitung
Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penanaman Modal					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
a	PMDN	2	8	11	24	67
b	PMA	9	22	16	19	20
2	Jumlah Investasi berskala nasional.					
a	PMDN (Juta Rp)	132.337,0	62.485,1	468.573,2	640.675,5	1.047.840,4
b	PMA (US $)	13.674,8	4.418,0	1.820,7	16.834,0	5.676,5
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta rupiah)					
a	PMDN (Juta Rp)	66.431,1	-69.851,9	406.088,1	172.102,3	407.164,9
b	PMA (US $)	-9.335,5	-9.256,8	-2.597,3	15.013,3	-11.157,5
4	Persentase kenaikan/ penurunan realisasi investasi					
a	PMDN (Persen)	100,80	-52,78	649,90	36,73	63,55
b	PMA (Persen)	-40,57	-67,69	-58,79	824,57	-66,28
5	Meningkatnya jumlah investor					
a	PMDN	1	6	3	13	43
b	PMA	-5	13	-6	3	1
6	Survey Kepuasan Masyarakat	83,28	78,60	62,52	62,68	87,21

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2019

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) umumnya dilakukan dalam bentuk langsung maupun berupa portofolio surat berharga. Berikut jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Belitung periode 2014-2018.

Grafik 2.25
Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2019 (diolah)

Jumlah investor berskala nasional untuk penanaman modal dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 terdapat 67 investor dalam negeri dengan total investasi lebih dari 1 trilyun rupiah. Jumlah ini meningkat pesat bila dibandingkan dengan investasi tahun 2016 yang hanya sebesar 468 milyar rupiah. Peningkatan jumlah investor dalam negeri juga terjadi cukup pesat di tahun 2018 dengan kenaikan lebih dari 100% atau penambahan jumlah investor sebesar 43 investor dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan efek positif dari perkembangan pariwisata di Kabupaten Belitung karena rata-rata para investor lebih banyak menanamkan modal mereka di sektor tersebut.

Jumlah investor yang masuk di tahun 2017 sebanyak 56 investor, 20 diantaranya berinvestasi di sektor pariwisata, atau sekitar 33,90% dari total investor pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 37 investor atau sekitar 21% menanamkan modalnya untuk pariwisata Kabupaten Belitung.

Penanaman modal asing atau PMA di tahun 2018 tercatat sebanyak 20 investor asing yang melakukan investasi sebesar US $ 5.676,5 Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan investasi tahun 2014 sebesar US $ 13.674,8 dengan jumlah investor asing sebanyak 9 investor. Memang dalam kurun lima tahun terakhir jumlah investor asing di Kabupaten Belitung tidak banyak mengalami perubahan. Demikian pula dengan nilai investasi setiap tahunnya yang cenderung menurun.

Pada tahun 2018 kenaikan realisasi investasi dalam negeri sebesar Rp 1.047.840.400.000,- atau 63,55 % dari tahun sebelumnya. Dari tabel 2.62 di atas terlihat bahwa dalam kurun empat tahun terakhir nilai investasi dalam negeri di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan meskipun kenaikan realisasinya cenderung melambat dan persentase kenaikan pertahunnya juga menurun.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 tidak mengalami peningkatan, yaitu 34 organisasi, hal tersebut disebabkan karena ketentuan pembatasan usia (Undang-Undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan), ketentuan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), kurangnya kaderisasi kepengurusan yang berkelanjutan, sehingga Organisasi Kelompok Kepemudaan (OKP) kurang berkembang.

Jumlah Organisasi Olah Raga keadaan sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 24 organisasi mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2013 untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60

Hasil kinerja urusan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah organisasi pemuda	34	34	34	34	23
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	9	10	10	7	4
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	76,47	79,41	82,35	85,29	85
4	Jumlah organisasi olahraga	12	12	15	14	20
5	Cakupan pembinaan olahraga (%)	22	24	24	24	24
6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	44	48	48	48	48
7	Cakupan pembinaan atlet muda	80	80	80	80	80
8	Jumlah lapangan olahraga	104	104	104	104	104
9	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelayanan kepemudaan	200	200	200	200	200

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Tahun 2019

n. Statistik

Kewenangan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja. Penyediaan data tersebut dilakukan dengan penyediaan sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dari KEbutuhan data SIPD Kabupaten Belitung, baru terpenuhi sebesar 70%. Selain itu Ketersediaan data statistik Kabupaten Belitung didukung juga dengan tersedianya Buku Belitung Dalam angka dan PDRB Kabupaten Belitung yang diterbitkan setiap tahunnya oleh BPS Kabupaten Belitung.

o. Persandian

Kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penerapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah. Dengan demikian untuk mengantisipasi kebebasan dalam mengakses berbagai kebutuhan informasi dengan berbagai macam teknologi yang semakin canggih sehingga memerlukan pengamanan terhadap informasi Pemerintah Daerah. Perkembangan terhadap kinerja persandian semakin meningkat, hal tersebut tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61

Hasil kinerja urusan Persandian
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	6,30	9,70	12,90	16,10	20
2	Rasio Pelayanan Persandian	8	12	16	19,97	24,8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Tahun 2019

p. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Belitung selama ini telah melaksanakan berbagai event atau kegiatan festival kesenian, perwatan dan pelestarian terhadap benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Belitung seperti Festival seni dan Budaya daerah, pertunjukan seni pada Maras taun, Muang jong, pertunjukan seni pada HJKT, HUT RI dan pertunjukan pada Sail Indonesia . Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal setempat. Untuk pelestarian terhadap benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 38 buah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.62

Hasil kinerja urusan Kebudayaan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
2	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah	38 buah
5	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah	7 buah
6	Cakupan potensi kebudayaan daerah	91 %	91 %	91 %	91 %	91%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2019

q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat sumber belajar dan informasi yang menyimpan mengelola dana memberikan layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku keberadaan perpustakaan mempunyai peran penting dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat.

Tabel 2.63

Hasil kinerja urusan Perpustakaan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	80.045	95.171	101.241	305.713	355.713
2	Jumlah buku yang dipinjam	6.779	10.000	34.441	26.536	89.811

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya meningkatkan akses terhadap perpustakaan kepada masyarakat dimana jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah pada tahun 2017 berjumlah 225 perpustakan meningkat sebanyak 15 perpustakaan dari tahun 2013. Bertambahnya jumlah perpustakaan tentunya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan dimana pada tahun 2018 tercatat pengunjung perpustakaan sebanyak 355.713 orang peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan tentunya juga dipengaruhi oleh jumlah koleksi buku perpustakaan dimana pada tahun 2018 koleksi perpustakaan umum Kabupaten Belitung yang dipinjam mengalami trend yang meningkat secara signifikan pada tahun 2018 berjumlah 89.811.

r. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 2.64

Hasil kinerja urusan Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	70%	70%	75%	80%	80%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung tahun 2019

Kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Belitung telah baik hal ini ditunjukan dari semua perangkat daerah telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya dari pemerintah untuk meningkatkan SDM pengelola kearsipan yang pada tahun 2018 sudah memenuhi 80% kebutuhan pemerintah daerah.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Perikanan Merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung, letak geografis kabupaten Belitung yang luas wilayahnya didominasi lautan merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara baik. Perkembangan pembangunan Perikanan di kabupaten Belitung dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dapat terlihat dari kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.65

Hasil kinerja urusan Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	50,134,49	44.560,27	67.189,18	68.197,01	65.723
2	Produksi perikanan Budidaya (ton)	95,79	152,62	154,84	142,09	207,2
3	Jumlah Produksi pengelolaan hasil perikanan (ton)	3.618,66	5.315,69	7.262	7.925,76	8.452
4	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun	46,5	47,52	47,65	48,15	50,13
5	Jumlah Ekspor Hasil Perikanan (ton)	470,8	748,55	1.582,97	2.011,62	2.783,35
6	Jumlah Benih yang dihasilkan (ekor)	1.074.346	1.579.352	1.737.385	1.823.450	1.999.268
7	PDRB Sektor perikanan atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	874.403	960.403	1.049.672	-	-
8	Jumlah Kelompok pembudidaya ikan (POKdakan)	70	75	82	88	88
9	Jumlah Kelompok usaha bersama (KUB)	250	270	230	241	241
10	Jumlah jenis produk olahan yang diversifikasi (jenis produk)	32	34	36	38	38

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2019

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 sejumlah 50.134,49 Ton mengalami trend yang terus meningkat dari tahun ketahun sehingga pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap mencapai 65.723 Ton. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dengan menyediakan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan alat tangkap. Walaupun Kabupaten Belitung mempunyai

potensi perikanan tangkap yang besar, Pengembangan perikanan budidaya terutama budi daya ikan laut maupun darat terus didorong perkembangannya. Pada tahun 2014 jumlah produksi perikanan budi daya sebesar 95,79 ton dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 207,2 ton Pengembangan perikanan budi daya , terutama ikan kerapu sangat dipengaruhi oleh harga, dan kebijakan serta permintaan pasar yang terus berubah. Dan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan budi daya dikembangkan kelompok pembudidaya ikan yang sampai dengan tahun 2018 berjumlah 88 kelompok dengan hasil benih yang dihasilkan terus meningkat dari tahun ketahun pada tahun 2014 berjumlah 1.579.352 ekor pada tahun 2017 dapat diproduksi 1.823.450 ekor.

Untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi perikanan pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap Kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan hasil perikanan dimana hasil produk olahan perikanan terus meningkat dari tahun ketahun. Pada Tahun 2014 produksi pengolahan hasil perikanan berjumlah 3.618,66 ton dan terus meningkat pada tahun 2018 berjumlah 8.452 ton.

b. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan di Kabupaten Belitung. Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Belitung sangat didukung dengan ditetapkannya Kawasan Wisata Tanjung Kelayang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Pertumbuhan sektor pariwisata di kabupaten Belitung semakin berkembang yang dapat dilihat dari semakin banyaknya kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di nusantara, dan dari mancanegara:

Tabel 2.66

Hasil kinerja urusan Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pariwisata					
1	Kunjungan wisata	199,823	251,44	292,885	380,941	467.571
2	PAD sektor pariwisata	1.488.502.700	1.452.055.200	1.454.609.000	1.543.952.000	2.218.845.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Jumlah Hotel dan penginapan	39	43	50	56	58
4	Jumlah Kamar	1201	1414	1654	1965	2072
5	Jumlah daya tarik wisata layak dikunjungi	52	53	61	66	67
6	Jumlah Desa Wisata	11	12	13	13	15
7	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	1891	1986

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2019

Dengan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pembangunan sarana prasarana infrastruktur dalam mendukung kepariwisataan memicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung. Jumlah hotel dan penginapan dalam pada tahun 2014 tercatat ada 39 akomodasi yang terdiri dari klasifikasi hotel bintang dan non bintang atau penginapan dengan jumlah kamar 1201 kamar hotel, meningkat pada tahun 2018 menjadi 58 hotel dengan jumlah kamar 2072 kamar meningkat pertumbuhan hotel dan penginapan tersebut juga dikarenakan meningkatnya kunjungan wisatawan . Pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 199.823 orang wisatawan menjadi 467.571 orang atau meningkat lebih dari seratus persen. Peningkatan aksesibilitas dan amenitas kepariwisataan di kabupaten Belitung semakin berkembang dengan mulainya wisatawan melihat Belitung sebagai destinasi baru yang menarik, bertambahnya jumlah penerbangan ke Tanjungpandan dari beberapa maskapai penerbangan, pertumbuhan operator wisata yang membuat paket-paket wisata Belitung, terbukanya beberapa destinasi wisata sebagai daya tarik wisata baru yang layak dikunjungi Pada tahun 2016 pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung semakin berkembang dengan ditetapkannya Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sehingga aksesibilitas dan amenitas untuk mendukungnya pun terus ditingkatkan. Atraksi wisata dengan pelaksanaan *event* nasional dan internasional dilaksanakan di Kawasan Wisata Tanjung Kelayang. Promosi wisata Belitung sebagai destinasi wisata unggulan terus dilakukan dengan mengikuti *event expo* berskala nasional di beberapa kota besar di Indonesia dan bekerja sama dalam hal promosi dengan beberapa operator wisata luar negeri. Kabupaten Belitung dengan Tanjung kelayang telah terpilih dan ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Nasional.

Dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk menambah dan memperbaiki Daerah Tujuan Wisata, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta. Pada tahun 2014 jumlah daerah tujuan wisata berjumlah 52 dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 67 daerah tujuan wisata walaupun dari jumlah tersebut terdapat objek wisata yang belum terkelola dengan baik.

Pembentukan desa wisata merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pada tahun 2014 terdapat 11 Desa wisata pembentukan desa wisata diawali dengan program PNPM mandiri pariwisata. Dan terus berkembang sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk 15 desa wisata.

Dengan meningkatnya kunjungan pariwisata mempunyai damapak terhadap meningkatnya PAD sektor pariwisata pada tahun 2014 PAD sektor pariwisata sebesar Rp.1.488.502.700 terus meningkat dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.218.845.500.

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung sejalan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Belitung, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif dalam pengembangannya baik dari segi Arsitektur,Desain Interior,Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film, Animasi dan Video, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Aplikasi dan Game Developer, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, Seni Pertunjukkan, Seri Rupa.

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung pada tahun 2018 terdata 1.986 orang. Meningkatnya jumlah orang kreatif ini merupakan akibat dari semakin berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai Industri Kreatif sehingga mendorong peningkatan permintaan produk kreatif. Walaupun jumlah orang kreatif sudah meningkat, namun ketersediaan dan kualitas orang kreatif masih belum memadai untuk dapat meningkatkan skala produksi Industri Kreatif. Peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu Pendidikan Kreatif dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kreatif.

c. Pertanian

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, Kontribusi sektor pertanian / perkebunan cenderung melambat dimana pada tahun 2013 sebesar 26,8% meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 27,60%, namun selanjutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 26,19%.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sektor pertanian Pemerintah Kabupaten Belitung pemerintah berupaya meningkatkan pruduksi tanaman pangan. Peningkatan produksi pangan tersebut dilakukan dengan memperluas dan melakukan cetak sawah baru dan memperbaiki jaringan irigasi. Luas lahan sawah yang berpotensi ditanami di Kabupaten Belitung adalah 1.151 hektar dan baru memiliki irigasi seluas 1.061 hektar Meskipun demikian produksi padi terus mengalami penurun yang disebabkan gagal panen yang disebabkan faktor gangguan kondisi cuaca/anomali iklim dan cuaca. Pada tahun 2014 luas lahan padi seluas 371 Ha dengan produksi Gabah Kering Giling sebesar 1.986 ton dan pada tahun 2018 lahan padi seluas 806 Ha dengan Produksi Gabah Giling Kering 2.458 Ton.

Perkebunan rakyat yang dikembangkan di Kabupaten Belitung yaitu Lada, Karet, Kelapa, dan Kelapa sawit.

Peningkatan tanaman Hortikultura di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi tanaman sayuran, buah-buahan dan biofarmaka mempunyai kecenderung terus menurun baik luas areal maupun jumlah produksinya pada tahun 2014 produksi tanaman holtikultura sebesar 50.525 ton dengan luas lahan 1892 Ha, dan pada tahun 2018 produksi tanaman hortikultura sebesar 3529 ton dengan luas lahan 914 ha.

Tabel 2.67

Hasil kinerja urusan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	27,1	27,34	27,60	26,19	belum release
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,25	4,13	3,17	2,99	3,03
3.	Cakupan bina kelompok petani	41,88	42,68	36,84	36,77	26,32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Persentase (%) peningkatan produksi pertanian					
A	- Perkebunan Rakyat	2,01	30,92	27,47	51	60.58
B	- Tanaman Pangan	28,44	30,85	34,94	44	37.47
C	- Tanaman Hortikultura	290,32	2,07	0	67	146.71
D	- Peternakan	0,72	5,52	3,71	4	8.30
5	Persentase (%) penanganan kasus penyakit hewan menular.	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2019

Tabel 2.68

Perkembangan Areal dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2014-2018

No	Komoditi	Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Padi, terdiri dari :	371	1.986	556	2.297	737	2.340	823	2.415	806	2.458
	a. Sawah	461	1.971	545	2.280	708	2.280	800	2.371	786	2.420
	b. Ladang	10	15	11	17	29	60	23	44	20	38
2.	Palawija, terdiri dari :	210	2.234	220	2.504	231	2.696	146	1.788	206	2.050
	a. Jagung	56	224	52	211	63	265	29	122	67	281
	b. Ubi Kayu	107	1.873	125	2.185	130	2.340	90	1.620	93	1.674
	c. Ubi Jalar	12	84	7	47	5	35	0	0	3	21
	d. Kacang Tanah	35	53	36	60	33	56	27	46	43	73
3.	Hortikultura, terdiri dari :	1.892	50.525	1.104	10.658	1.086	4.852	587	2.856	914	3.529
	a. Sayur-Sayuran	508	6.116	479	5.637	423	2.209	382	1.578	442	1.825
	b. Buah-Buahan	567	9.186	617	5.008	662	2.614	202	1.277	471	1.698
	c. Biofarmaka	817	35.223	8	12	1	28	3	51	0,4	4,9

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Tahun 2019

d. Perdagangan

Kabupaten Belitung memiliki posisi strategis dan berpotensi mengembangkan ekonomi wilayah meskipun sebagian besar barang dan jasa yang didatangkan dari luar daerah. Pengembangan dan pembinaan terhadap sektor perdagangan ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin lancarnya pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya ke seluruh wilayah Kabupaten Belitung. Saat ini ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Belitung sudah cukup stabil dengan persentase 100% selama lima tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung tahun 2018.

Tabel 2.69

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok (%)	100	100	100	100	100
2	Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya	-	-	-	-	1750
3	Jumlah pasar sesuai standar	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas KUKMPTK Kabupaten Belitung Tahun 2019

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung menurut Lapangan Usaha, dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan yang mencakup perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 2.70

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

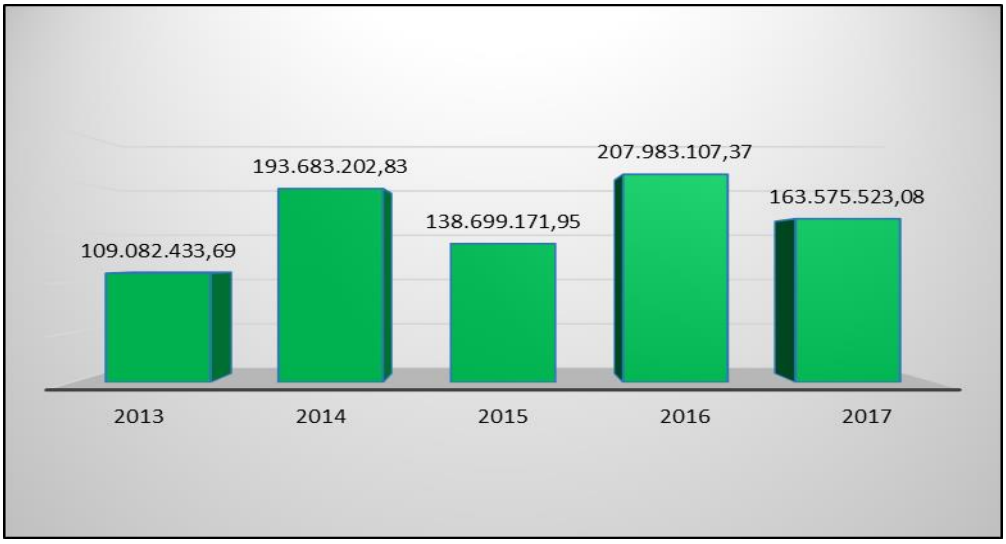
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (juta Rupiah)	637.730	717.930.	779.209.	871.713.	1.001.626
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,63	10,67	10,63	10,89	11,46

Sumber : Badan Pusat Statistik

PDRB sektor perdagangan mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir dengan nilai kontribusi rata-rata diatas 10%. Pada tahun 2017, nilai tambah yang dihasilkan meningkat menjadi lebih dari 1 triliun rupiah dibandingkan tahun 2015 yang hanya 779,2 miliar rupiah. Sementara itu kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kenaikan dari 10,63% di tahun 2015 menjadi 11,46 % pada tahun 2017.Sektor ini juga menempati urutan ketiga setelah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung periode tahun 2013-2017. Selanjutnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.26

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Belitung
Tahun 2013-2017 (USD)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2018

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhi. Dari semula 109.082.433,69 USD di tahun 2013 naik menjadi 193.683.202,83 USD pada tahun 2014. Namun tiga tahun berikutnya justru mengalami penurunan sebesar 44.407.584,29 USD, dari semula 207.983.107,37 USD di tahun 2016 menjadi 163.575.523,08 USD di tahun 2017. Hal ini disebabkan penurunan ekspor timah di Kabupaten Belitung. Dan memang sejak pertengahan tahun 2015, ekspor timah tidak lagi melalui pelabuhan Tanjungpandan, tapi sudah lewat Pangkalpinang karena disana terdapat gudang BGR.

Adapun BGR atau Bhanda Ghara Reksa (Persero) adalah suatu perusahaan penyedia jasa logistik yang berada di bawah Kementerian BUMN dan sudah berdiri sejak tahun 1977. Perusahaan ini merupakan penyelenggara jasa penyewaan dan pengelolaan ruangan (gudang) serta proses pengiriman barang yang memiliki jaringan infrastruktur hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini BGR sudah memiliki 24 kantor cabang, yang salah satunya berada di kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain belum tersedianya gudang BGR, pembinaan dan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha juga perlu dilakukan guna peningkatan kualitas ekspor daerah.

e. Perindustrian

Pada dasarnya industri berperan sebagai sektor pemimpin (*leading sectors*), maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Demikian juga dengan sektor jasa yang berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga pemasaran/perikanan. Hal tersebut akan mendukung pertumbuhan industri yang pada akhirmya akan menyebabkan meluasnya peluang kerja yang ada sehingga berakibat positif dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa perekonomian di suatu daerah itu tumbuh. Tolok ukur peran industri di daerah terhadap perekonomian antara lain dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB, serapan tenaga kerja dan sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa.

Tabel 2.71

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Belitung
Tahun 2013-2017

	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Sektor Industri (Industri Pengolahan) (juta Rupiah)	818.551.	904.493.	943.502.	986.077	1.070.851
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	13,64	13,44	12,87	12,32	12,25

Sumber : Badan Pusat Statistik

Total nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri mencapai lebih dari 1 triliun rupiah di tahun 2017 dan mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir. Justru peran sektor ini terhadap total PDRB yang mengalami penurunan secara melambat dari semula 13,64% di tahun 2013 menjadi 12,25% di tahun 2017, atau turun sebesar 1,39%. Adapun subsektor terbesar penyumbang PDRB di sektor Industri adalah industri makanan dan minuman, dan industri barang galian bukan logam.

Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Belitung cenderung menurun dalam kurun lima tahun terakhir. Demikian juga

dengan pertumbuhan jumlah pelaku IKM. Pada tahun 2018 pertumbuhan IKM mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,08%.

Tabel 2.72

Hasil kinerja urusan Perindustrian
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Jumlah Indutri Kecil Menengah 2)	5,03	2,08	2,83	1,83	2,08
2	Pertumbuhan Jumlah pelaku industri kecil menengah 2)	5,03	2,08	2,83	1,83	2,08
3	Produksi transaksi penjualan IKM (ribu rupiah)	919.625,83	924.266.25	939.266,26	952.046,76	956.874.119
4	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	31,25	15,79	30	15	15
5	Industri Kreatif (KUB)	16	19	20	20	20

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2019

Industri kecil tersebar di beberapa jenis usaha yaitu pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, kerajinan dan umum, serta logam dan jasa. Berikut perkembangan industri kecil di Kabupaten Belitung tahun 2014-2018 :

Tabel 2.73

Perkembangan Jumlah Industri Kecil Tahun 2014-2018 (Unit)

No	Jenis Usaha Industri Kecil	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pangan	1.158	1.205	1.258	1.293	1.331
2.	Sandang	59	59	59	59	59
3.	Kimia dan Bahan Bangunan	361	361	361	366	366
4.	Kerajinan dan Umum	144	146	147	148	160
5.	Logam dan Jasa	239	239	239	239	239
	Jumlah	**1.961**	**2.016**	**2.073**	**2.111**	**2.155**

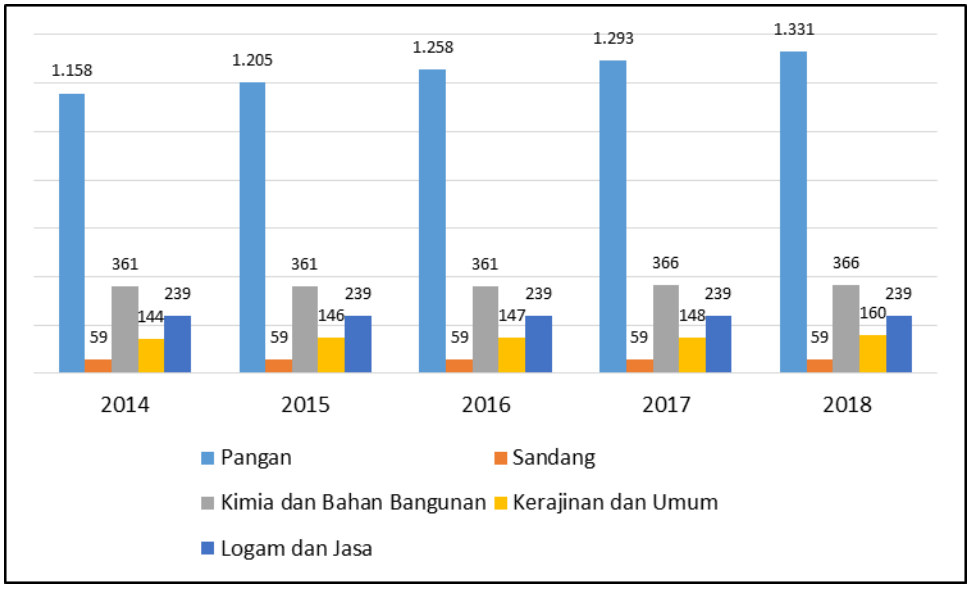
Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2019

Jumlah industri kecil di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir. Bila pada tahun 2014 industri kecil masih berjumlah 1.961 unit, maka di tahun 2018 naik menjadi 2.155 unit. Adanya

peningkatan unit usaha pada sektor industri kecil pada tahun 2018 merupakan akibat pertumbuhan industri kecil, terutama pada sub kelompok pangan sebagaimana diperlihatkan Grafik 2.26 berikut.

Grafik 2.27

Perkembangan Jumlah Industri Kecil Tahun 2014-2018 (Unit)



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2019 (diolah)

Usaha industri kecil sub kelompok pangan mengalami peningkatan yang cukup pesat bila dibandingkan dengan jenis usaha lainnya seperti sub kelompok sandang, logam dan jasa, kimia dan bahan bangunan, dan sub kelompok kerajinan dan umum yang cenderung stabil dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 industri kecil sub kelompok pangan telah bertambah dari semula 1.158 unit usaha menjadi 1.331 unit usaha pada tahun 2018. Hal ini merupakan dampak positif dari mulai berkembangnya pariwisata di Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir. Industri kecil pangan dan produk olahannya atau biasa disebut industri kuliner akan tumbuh subur seiring dengan banyaknya wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik yang berkunjung ke Kabupaten Belitung. Wisata kuliner memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena sudah diakui sebagai ekspresi identitas dan budaya daerah.

Selain berkembangnya industri kecil olahan pangan, usaha makanan dan minuman juga mengalami peningkatan. Sebagaimana sudah dinyatakan diatas bahwa subsektor penyumbang PDRB terbesar di sektor industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman. Dan sekali lagi, ini merupakan *multiplier effect* dari pengembangan pariwisata daerah.

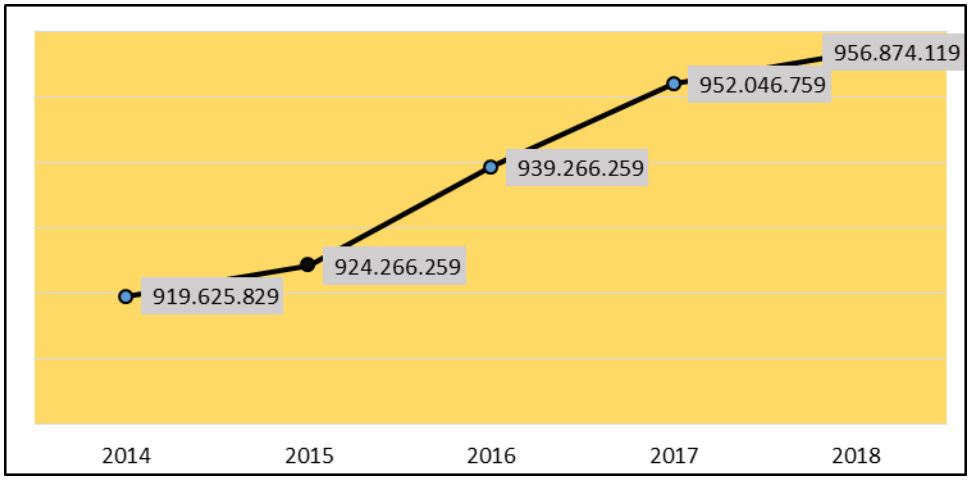
Selanjutnya dengan adanya peningkatan jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Belitung, maka pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung secara berkala mengadakan pembinaan dan monitoring terhadap para pelaku usaha dan kelompok pengrajin. Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Belitung berfluktuasi selama kurun empat tahun terakhir. Pada tahun 2017 hanya terdapat 15% kelompok pengrajin yang mendapatkan binaan. Padahal di tahun sebelumnya cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 30%. Kondisi yang serupa juga terlihat di tahun 2014 yang sempat mencapai 31,25% meski kemudian turun menjadi 15,79% di tahun 2015.

Kebalikan dari persentase cakupan bina kelompok pengrajin yang mengalami fluktuasi, maka industri kreatif, terutama industri kecil/ *home industry* mengalami perkembangan yang agak sedikit menggembirakan. Terdapat peningkatan meski agak melambat terhadap jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) di kabupaten Belitung selama kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah KUB hanya 16 unit, tetapi di tahun 2018 telah bertambah menjadi 20 unit. Pemerintah daerah seharusnya lebih gencar lagi melakukan pembinaan, monitoring, pendampingan sampai penciptaan iklim usaha yang kondusif demi berkembangnya kelompok usaha industri kecil tersebut.

Khusus kelompok pengrajin keramik di Kabupaten Belitung telah berkembang sampai ke tahap produksi keramik hias meski masih menggunakan alat pemutar manual dan peningkatannya juga tidak terlalu signifikan. Sejak tahun 2015, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian telah memberikan subsidi bantuan bahan baku/penolong, pemeliharaan mesin dan honor petugas produksi, pemasaran dan penjaga malam. Untuk mengoptimalkan bantuan mesin yang diberikan dari Kementerian Perindustrian Tahun 2015 maka perlu dibuatkan program Up-Grade Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Kaolin sebagai bahan baku keramik di tahun 2020.

Grafik 2.28

Perkembangan Produksi Penjualan IKM Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018 (Rp.000)



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2019 (diolah)

Produksi penjualan IKM di Kabupaten Belitung meningkat dalam periode 2014-2018 dengan lambat seiring dengan penambahan jumlah IKM di periode yang sama sebagaimana yang sudah disajikan pada Tabel 5.3 diatas. Pada tahun 2018 jumlah produksi penjualan IKM meningkat sebesar 956.874.119 milyar rupiah bila dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2014 yang masih berada dibawah 950 milyar rupiah.

2.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan strategis yang baik dan berkualitas merupakan Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung. Berikut Kinerja Urusan penunjang Perencanaan

Tabel 2.74

Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	89,14%	85,14%	91,43%	73,71%	78%
5	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung Tahun 2019

Pada tahun 2014, RPJMD Kabupaten Belitung Untuk Periode 2013-2018 yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2013-2018 RPJMD Kabupaten Belitung tersebut merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025

Sebagai Penjabaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2013 -2018 Pemerintah Kabupaten Belitung menuangkannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah, yaitu Perkada Nomor 17 Tahun 2014, Perkada Nomor 18.A Tahun 2015, Perkada Nomor 23 Tahun 2016, dan Perkada Nomor 15 Tahun 2017.

Dalam melaksanakan RPJMD ke dalam RKPD tingkat konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD terus meningkat. Pada tahun 2013 tingkat konsistensi antara program RPJMD sebesar 77,70 % dan pada tahun 2016 tingkat konsistensi mencapai 91,42% dan pada tahun 2017 tingkat konsistensi turun menjadi 73,71%.

Untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2013-2018, pada tahun 2017 RPJMD Kabupaten Belitung dilakukan Perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten nomor 12 tahun 2017.

b. Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat, hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, dimana pemerintah berusaha untuk penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.75

Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum tersedia
2	Persentase SILPA terhadap APBD	19.16	12.71	9.62	18.16	20,46
3	Perbandingan antara belanja langsung terhadap Total APBD	54.25	55.9	55.52	53.3	51,81
4	Perbandingan antara belanja tidak langsung terhadap Total APBD	45.75	44.1	44.48	46.7	48,19
5	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	80.41	85.15	89.5	85.32	81,49
6	Peningkatan PAD (%)	13.88%	74%	8%	42%	0,46%
7	Persentase belanja pendidikan (20%)	34.11	30.13	26.2	26.67	26,09
8	Persentase belanja kesehatan (10%)	16.13	13.84	16.49	18.79	20,17
9	Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan terkait	100	100	100	100	100
10	Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen data dan informasi barang milik daerah sesuai dengan aturan terkait	100	100	100	100	100
11	Persentase (%) peningkatan penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya	9.19	7.61	5.78	5,98	2,32

Sumber : BPKAD dan BPPRD Kabupaten Belitung Tahun 2019

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaaan dengan penataan aset di perangkat daerah, terutama pengelolaan aset tanah bawah jalan yang masih belum memiliki sertifikat dan masalah legalitas bangunan gedung, yang merupakan salah satu penyebab belum memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kinerja Pendapatan daerah menunjukan trend yang positif dimana rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Belitung sebesar 16,43% walaupun jumlah peningkatan setiap tahunnya cenderung menurun.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan pelatihan di Kabupaten Belitung memerlukan perhatian yang cukup hal ini terlihat dari kinerja yang terus menurun.

Tabel 2.76

Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	3,31	2,56	1,38	0	0
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	72,44	27,36	18,33	90,05	1,25
3	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	62
4	Persentase (%) tingkat pelayanan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2018

Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dari tahun 2014– 2018 persentasenya cenderung menurun, bahkan pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural. Untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal fluktuatif dari tahun 2014-2016, bahkan di tahun 2018 jauh menurun menjadi 1,25%.

d. Pengawasan

Pelaksanaan urusan penunjang pengawasan mempunyai kinerja yang semakin baik, peningkatan terus dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifias pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.77

Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase tindak lanjut temuan	68%	61%	62%	n/a	n/a
3	Jumlah temuan BPK	27	22	27	12	19
4	Persentase penurunan jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan	10%	10%	15%	15%	
5	Persentase nilai evaluasi SAKIP PD minimal BB	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	10%
6	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	60%	60%	70%	70%	70%
7	Level Kapabilitas APIP	2	2	2		

Sumber : Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2019

Menurunnya temuan BPK di Kabupaten Belitung menunjukan bahwa kinerja pengawasan telah berjalan dengan baik dimana pada tahun 2014 temuan BPK sebanyak 27 temuan yang menurun di tahun 2018 menjadi sebanyak 19, selain itu jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan terus menurun, dilihat dari persentase penurunan jumlah rekomenasi temuan hasil pengawasan dimana pada tahun 2014 tingkat penurunan 10% dan pada tahun 2018 terus menurun sebanyak 15 %. Peningkatan terjadi juga untuk penyelesaian tindak lanjut rekondasi hasil pengawasan dimana pada tahun 2014 sebanyak 50% rekomendasi yang ditindaklanjuti terus meningkat menjadi 70% pada tahun 2018.

Dilihat dari kinerja dan akuntabilitas Perangkat daerah, yamg dinilai dari laporan LAKIP Perangkat daerah terus menunnjukan perbaikan dimana dari hasil evalusi LAKIP Perangkat Daerah yang mempunyai skor diatas 50 terus meningkat dari tahun ketahun. Pada Tahun 2013 LAKIP Perangkat daerah yang bernilai 50 sebanayk 45% dari jumlah Perangkat Daerah, dan Pada tahun 2017 meningkat menjadi 75%. Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan kategori diatas 50 ini perlu menjadi perhatian karena secara keseluruhan nilai akuntabilitas Kabupaten Belitung masih rendah dan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang mempunyai nilai Laporan Kinerja dengan nilai C.

Perlu peningkatan level kapabilitas APIP yang berada di level 2 (dua) dan level maturitas SPIP yang pada saat ini berada di level 3 (tiga) dalam upaya meningkatkan kenerja pemerintah daerah.

e. Penelitian dan pengembangan

Untuk menguatkan fungsi perencanaan pembangunan daerah perlu dikuatkan dengan dukungan perencanaan dan kajian strategis pembangunan daerah. Sampai dengan saat ini kinerja hasil penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan belum dapat dioptimalkan. Kerja sama membangun jejaring/network dengan pemerintah lain/swasta/akademisi masih belum dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan secara optimal.

Tabel 2.78

Hasil kinerja urusan Pemerintahan Urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	0	0	0	0
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	0	0
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	0	0	0	0	0
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	0	0	0	0

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Belitung Tahun 2019

f. Unsur Penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang lainnya

Fungsi unsur pendukung ditangani oleh beberapa perangkat daerah yaitu Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD dan Kesbangpol.

Tabel 2.79

Hasil kinerja urusan Pemerintahan fungsi penunjang lainnya Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Aspek / Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD * Provinsi/Kab/Kota	100	100	100	100	100
2	Persentase (%) tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*	85	85	90	90	90
3	RAPERDA yang disetujui DPRD (%)*	100	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP**	C	C	C	CC	Belum tersedia
5	Nilai LPPD	NA	3,1523	3,1628	3,0409	Belum tersedia
6	Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel**	100	100	100	90	100
7	Produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat**	828	592	694	583	457
8	Persentase (%) tingkat kesesuaian penataan struktur organisasi daerah terhadap hasil analisis penataan kelembagaan berbasis kebutuhan daerah dan aturan hukum yang berlaku**	100	100	100	100	100
9	Persentase penyelesaian penanganan masalah hukum di daerah	100	100	100	100	90
10	Jumlah sarana prasarana publik (mess dan asrama) dalam kondisi baik (unit)					6
11	Persentase (%) terciptanya stabilitas daerah yang kondusif***	100	100	100	100	100
12	Persentase (%) penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik sosial***.	22.5	20	25	88.8	100

* *Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2019*
** *Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019*
*** *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2019*

Dari data diatas dapat dilihat kinerja Sekretariat DPRD sudah baik hal ini ditunjukan dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan untuk aktifitas Anggota DPRD dengan tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang mencapai 100%. Dari indikator Tingkat kelancaran operasional pelaksanaan tugas DPRD setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya kebutuhan untuk operasional pelaksanaan tugas DPRD.

Dari data diatas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori C atau bernilai dalam range 40-50, yang dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah, dan diindikasikan berpotensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan, kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kemudian terkait kondisi keamanan dan ketentraman di Kabupaten Belitung sangat kondusif, dimana hampir setiap konflik dapat di redam dengan baik.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten / kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari a) kemampuan ekonomi daerah; b) fasilitas wilayah atau infrastruktur; c) iklim berinvestasi; dan d) sumberdaya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

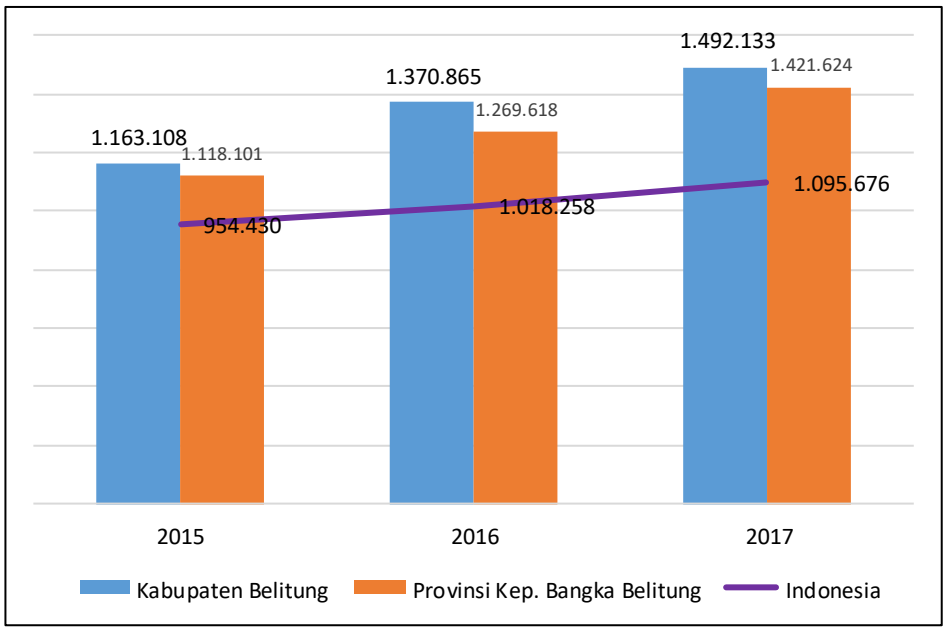
Kemampuan ekonomi suatu daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi baik yang sudah berada di dalam daerah maupun yang akan masuk ke daerah itu yang kemudian dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2015-2017 :

Grafik 2.29

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (dalam rupiah) Penduduk Di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2015-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun terakhir. Dengan capaian sebesar Rp. 1.492.133,- pada tahun 2017, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung berada di atas pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia, yang berturut-turut hanya sebesar Rp 1.421.624,- dan Rp 1.095.676,-. Meskipun begitu, jika dibandingkan tahun sebelumnya, proporsi persentase kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitung cenderung menurun dari semula 15% di tahun 2016 menjadi 8,12% di tahun 2017.

Selanjutnya akan diperlihatkan perbandingan pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (dalam rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	822.072,61	869.657,45	997.357,48	1.205.227,52	1.366.384
2	Belitung	998.187,63	1.009.022,52	1.163.107,72	1.370.865,03	1.492.133
3	Bangka Barat	890.153,73	994.185,46	1.067.338,69	1.118.833,62	1.196.786
4	Bangka Tengah	1.101.941,68	1.101.010,99	1.073.928,52	1.034.887,34	1.160.921
5	Bangka Selatan	869.277,03	907.681,22	1.094.535,91	1.046.885,92	1.155.676
6	Belitung Timur	857.909,58	939.473,54	1.091.157,71	1.206.380,05	1.492.306
7	Pangkalpinang	1.173.169,91	1.401.174,79	1.391.368,89	1.499.317,26	1.707.168

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Tabel diatas menyatakan bahwa dalam kurun 2013-2017 terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita pada kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khusus Kabupaten Belitung, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menduduki peringkat dua tertinggi setelah kota Pangkalpinang pada tahun 2015-2016. Namun pada tahun 2017 masuk peringkat ketiga tertinggi setelah kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur. Hal ini tentunya tidak lepas dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa biaya hidup masyarakat di Pulau Belitung cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran sebulan masyarakat Pulau Bangka meskipun kota Pangkalpinang masih menjadi yang tertinggi untuk besaran pengeluaran per kapita tersebut karena posisi strategis sebagai kawasan ibukota provinsi dan pusat aktivitas masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun yang dimaksud dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut BPS adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (non pangan). Kelompok makanan antara lain padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, telur, sayur-sayuran,

makanan dan minuman jadi dan rokok. Sementara kelompok bukan makanan terdiri atas perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Tabel 2.81

Rata-rata Pengeluaran (Rupiah) Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan per Kapita di Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun					
		2015		2016		2017	
		Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kabupaten Belitung	547.456	615.652	652.098	718.767	779.678	712.455
2	Prov. Kep. Bangka Belitung	634.396	483.705	666.549	603.069	742.230	679.394
3	Indonesia	478.062	476.368	525.523	492.735	554.631	541.045

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp 1.492.133,- pada tahun 2017, penduduk di Kabupaten Belitung mengeluarkan uang untuk keperluan konsumsi makanan sebesar Rp 779.678,- dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp 712.455,-. Bila dibandingkan dua tahun sebelumnya, terdapat kenaikan pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap pengeluaran konsumsi bukan makanan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Belitung. Dan memang jika dilihat pada Tabel 2.4.1.1 diatas, nampak bahwa Kabupaten Belitung memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi tertinggi melampaui Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hanya sebesar Rp 1.421.624,- per bulan per orang dan terhadap nasional yang sebesar Rp 1.095.676,- per orang per bulan dengan berturut-turut nilai rata-rata pengeluaran konsumsi makanan sekitar Rp 742.230,- dan Rp 554.631,-..

Rata-rata penduduk di Kabupaten Belitung cenderung lebih banyak mengeluarkan uang untuk konsumsi bukan makanan pada kurun tiga tahun terakhir, terutama untuk belanja perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa dan barang tahan lama sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 2.4.1.2.

Khusus pengeluaran konsumsi makanan, termyata rata-rata masyarakat di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 lebih banyak membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar Rp 308.734,- per bulan per orang untuk kuintil 5 pengeluaran, ketimbang sayur-sayuran dan telur dan susu yang hanya dibelanjakan berturut-turut sebesar Rp 109.160,- dan Rp 68.964,- per bulan per orang di kelompok kuintil 5 pengeluaran. Demikian juga dengan kelompok kuintil 1 yang merupakan kelompok termiskin dengan pengeluaran per kapita terkecil. Kelompok ini juga relatif lebih banyak membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli makanan dan minuman jadi daripada bahan makanan. Yang menarik, ternyata konsumsi rokok dan tembakau melebihi konsumsi buah-buahan dan kacang-kacangan bahkan untuk level kuintil 1.

Adapun kuintil pengeluaran adalah pengelompokan pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan ke dalam lima kelompok yang sama besar dan sudah diurutkan mulai dari pengeluaran terkecil hingga yang terbesar. Dalam hal ini, kuintil 1 merupakan kelompok penduduk dengan pengeluaran per kapita terkecil. Semakin tinggi kuintil pengeluaran, maka semakin sejahtera penduduk tersebut.

Tabel 2.82

Rata-rata Pengeluaran (Rupiah) per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Kuintil Pengeluaran Tahun 2017

No	Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
		Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Makanan					
1	Padi-padian	64.674	71.937	77.035	82.069	89.009
2	Umbi-umbian	4.594	6.294	5.612	8.353	10.220
3	Ikan/Udang/ Cumi/Kerang	55.261	81.071	90.124	123.257	171.697
4	Daging	19.019	29.875	29.165	47.645	76.878
5	Telur dan Susu	28.459	38.029	56.642	58.101	68.964
6	Sayur-sayuran	51.103	57.360	70.574	80.974	109.160
7	Kacang-kacangan	5.646	6.395	7.631	8.983	14.976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Buah-buahan	19.253	31.523	34.094	48.253	81.808
9	Minyak dan Kelapa	13.058	14.355	16.536	18.660	24.480
10	Bahan Minuman	14.352	18.086	22.678	28.551	29.983
11	Bumbu-bumbuan	12.661	12.955	16.237	16.938	19.824
12	Konsumsi Lainnya	11.813	14.903	20.141	21.639	28.392
13	Makanan dan Minuman Jadi	112.621	165.309	188.687	227.916	308.734
14	Rokok dan Tembakau	47.687	68.409	100.395	124.032	157.386
	Jumlah Makanan	**460.201**	**616.501**	**735.551**	**895.371**	**1.191.511**
	Bukan Makanan					
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	179.307	259.309	340.381	434.837	736.753
16	Aneka barang dan jasa	63.961	70.520	94.710	138.018	308.732
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	24.641	33.581	38.501	49.547	69.183
18	Barang tahan lama	6.422	14.802	32.818	36.091	278.500
19	Pajak pungutan dan asuransi	34.529	26.918	32.659	47.685	141.397
20	Keperluan pesta dan upacara /kenduri	4.622	9.710	6.813	9.473	39.164
	Jumlah Bukan Makanan	**313.482**	**414.840**	**545.882**	**715.651**	**1.573.729**
	Total	**773.683**	**1.031.341**	**1.281.433**	**1.611.022**	**2.765.240**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Gaya hidup serba instan diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi makanan dan minuman jadi di Kabupaten Belitung. Apalagi sebagian besar bahan makanan masih banyak yang didatangkan dari luar daerah sehingga harganya menjadi mahal dan akhirnya membuat masyarakat lebih memilih mengkonsumsi makanan dan minuman jadi daripada memasak atau mengolah sendiri bahan makanan tersebut.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Belitung. Ketersediaan fasillitas wilayah / infrastruktur Kabupaten Belitung meliputi ketersediaan aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air minum, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Belitung dalam meningkatkan daya saing daerah.

Perhubungan

Dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka perhubungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memperlancar arus barang dan jasa dari sentra produksi ke tempat konsumen baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Untuk menjangkau wilayah di Kabupaten Belitung, pada tahun 2018 tersedia ruas jalan dengan rincian sebagai berikut :

a. Jalan Negara = 103,37 Km;
b. Jalan Propinsi = 132,43 Km;
c. Jalan Kabupaten = 628,67 Km.

Tabel 2.83

Persentase (%) Jalan Berkondisi Baik Tahun 2014-2018

Tahun	Prosentase (%) Jalan Kondisi Baik
(1)	(2)
2014	76,66
2015	79,09
2016	67,69
2017	73.68
2018	76,45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Tabel 2.84

Profil kondisi jalan di Kabupaten Belitung tahun 2014-2018

Perkecamatan

Keadaan	Panjang Jalan (Km)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jenis Permukaan					
a. Aspal	582,36	588,54	585,56	595,26	647,56
b. Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tanah/Puru	46,31	40,13	43,11	33,41	16,36
Jumlah	**628,67**	**628,67**	**628,67**	**628,67**	**666,02**
2. Kondisi Jalan					
a. Baik	481,95	497,21	425,56	463,178	509,19
b. Sedang	70,37	70,57	104,77	65,30	76,62
c. Rusak	76,35	60,89	98,34	100,193	80,21
Jumlah	**628,67**	**628,67**	**628,67**	**628,67**	**666,02**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Sebagai salah satu sarana penghubung dari suatu daerah ke daerah lain yang terpisah dibutuhkan adanya suatu jembatan. Pada tahun 2018 tersedia 108 (seratus delapan) buah jembatan dengan panjang 1.017 (seribu tujuh belas) meter. Rincian jumlah dan panjang jembatan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung tahun 2014-2018 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.85

Jumlah dan Panjang Jembatan Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

Keadaan	Jumlah dan Panjang Jembatan per Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)	Jumlah (Buah)	Panjang (Meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tipe/Jenis Jembatan										
a. Beton	104	777	104	777	104	777	104	777	104	777
b. Baja	2	240	2	240	2	240	2	240	2	240
c. Kayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**106**	**1.017**	**106**	**1.017**	**106**	**1017**	**106**	**1017**	**106**	**1017**
Kondisi Jembatan										
a. Baik	106	1.017	106	1.017	106	1017	106	1017	106	1017
b. Sedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Rusak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**106**	**1.017**	**106**	**1.017**	**106**	**1017**	**106**	**1017**	**106**	**1017**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Bandar udara yang melayani angkutan udara di Kabupaten Belitung saat ini adalah Bandar Udara H.AS Hanandjoeddin yang saat ini telah berstatus Bandara Internasional. Khusus untuk bandara tersebut sampai dengan saat ini masih dibawah kendali dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Antara tahun 2013-2017 terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat maupun tiba/berangkat melalui Bandar Udara H.AS Hananjoeddin Tanjungpandan. Tahun 2013 pesawat yang tiba dan berangkat sebanyak 2.863 pesawat dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 4.418 pesawat. Penumpang yang tiba dan berangkat mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2017. Penumpang yang okum tahun 2013 sebanyak 267.526 orang meningkat menjadi 489.121 orang pada tahun 2017. Sedangkan penumpang yang berangkat juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 267.635 orang menjadi 489.948 orang pada tahun 2017. Berikut ini tabel mengenai data perkembangan jumlah pesawat dan jumlah penumpang pesawat tiba di Kabupaten Belitung tahun 2014-2017:

Tabel 2.86

Arus Lalu lintas angkutan Udara Bandara Udara H.AS HANANDJOEDIN

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pesawat Datang (kali)	2863	2.763	3.147	3.912	4.418
2	Pesawat Berangkat (orang)	2863	2.763	3.147	3.912	4.418
3	Penumpang Datang (orang)	267.526	316.643	350.010	434.361	489.121
4	Penumpang Berangkat Orang)	267.635	317.141	354.435	434.435	489.949
5	Bagasi Bongkar (Kg)	2.187.950	2.345.712	2.478.251	2.584.321	2.451.250
6	Bagasi Muat (Kg)	2.250.321	2.150.375	2.284.950	2.421.430	2.331.501
7	Barang Bongkat (Kg)	1.456.320	1.556.353	1.424.473	1.612.895	1.843.335
8	Barang Muat(Kg)	1.453.490	1.065.835	1.281.500	1.376.724	1.253.660

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Jumlah pengguna angkutan laut mengalami penurunan pada periode waktu tahun 2013 -2017. Pada tahun 2013 jumlah kapal penumpang yang tiba dan berangkat dari pelabuhan LASKAR PELANGI Kabupaten Belitung sebanyak 246 kapal dan pada tahun 2017 turun menjadi 147 kapal . Penurunan jumlah kapal yang tiba dan berangkat dari pelabuhan tentunya berpengaruh terhadap jumlah

penumpang yang tiba dan berangkat dari Kabupaten Belitung. Penumpang baik jumlah penumpang tiba maupun berangkat antara tahun 2014 dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara umum, penurunan jumlah kapal dan penumpang sangat dipengaruhi oleh bertambahnya armada dan kelancaran angkutan udara dimana masyarakat memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menggunakan jasa layanan pesawat udara.Berikut ini tabel data perkembangan jumlah kapal penumpang dan jumlah penumpang tiba di Kabupaten Belitung tahun 2013-2017:

Tabel 2.87

Arus lalu lintas Pelabuhan Penumpang Laskar Pelangi Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapal Datang	246	267	214	163	147
2	Kapal Berangkat	246	267	214	163	147

Sumber Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Terminal bus Tanjungpandan melayani angkutan bus di dalam kota dan antar kota, jumlah penumpang di terminal bus Tanjungpandan cenderung menurun. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, dan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi membuat jumlah penumpang terus menurun.

Pada tahun 2013 jumlah penumpang naik bus sebanyak 39.980 orang, terus menurun sebesar 31,23% pada tahun 2017 atau hanya 12.487 orang. Begitu juga untuk penumpang yang turun dari bus mempunyai kecenderung menurun. Pada tahun 2013 jumlah penumpang yang turun sebanyak 35.062 orang dan pada tahun 2017 turun sebesar 26.69 % atau berjumlah 9.451 orang.

Tabel 2.88

Arus Lalu Lintas Penumpang dan Bus yang Masuk Terminal Tanjungpandan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Bus	20	20	20	20	21
2	Naik	39.980	26.218	20.726	16.092	12.487
3	Turun	35.062	24.456	17.628	12.755	9.451

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2018

Perhotelan dan Restoran

Pertumbuhan sektor Pariwisata memilki daya tarik bagi investor untuk investasi dibidang perhotelan perkembangan Pariwisata di Kabupaten Belitung, memerlukan fasilitas hotel, penginapan, yang cukup dan memadai. Pada tahun 2018 jumlah hotel di Kabupaten Belitung yang telah berdiri sebanyak 60 hotel. Peningkatan Pariwisata juga meningkatkan peningkatan jumlah restoran/rumah makan. Berikut Perkembangan Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/hotel di Kabupaten Belitung tahun 2014-2018 dan jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017.

Tabel 2.89

Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hotel Bintang 4					
	Jumlah Hotel	3	3	3	4	5
	Jumlah Kamar	365	365	365	475	552
2	Hotel Bintang 3					
	Jumlah Hotel	3	4	5	6	7
	Jumlah Kamar	169	259	335	478	615
3	Hotel Bintang 2					
	Jumlah Hotel	3	5	6	6	7
	Jumlah Kamar	119	232	296	296	356
	Jumlah Tempat Tidur	-	-	-	-	-
4	Hotel Bintang 1					
	Jumlah Hotel	4	4	4	4	4
	Jumlah Kamar	107	107	107	107	107

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Hotel Melati					
	Jumlah Hotel	26	27	32	36	37
	Jumlah Kamar	441	451	551	609	652
	Total Hotel	39	43	50	56	60
	Total kamar	1201	1414	1654	1965	2282

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2019

Tabel 2.90

Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah makan
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Restoran	14	19	25	32	35
2	Rumah Makan	27	36	41	48	52

Sumber : BPS

Air Bersih

Sumber- air baku di Kabupaten Belitung didapatkan dari sumur dangkal dan air permukaan, keberadaan kolong- kolong eks tambang menjadi sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih. Kondisi Pengeloaan air baku pada saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Berikut data perkembangan penyediaan air bersih oleh PDAM.

Tabel 2.91

Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakai dan Penjualan Air Minum PDAM di Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pelanggan	2.194	2.422	2.393	2.435	2.375
2	Pemakaian air (m3)	355.701	374.010	340.012	290.988	291.698
3	Penjualan air (Juta Rp)	922.510.640	969.329.035	970.580.620	886.704.325	1.584.004.195

Sumber : BPS

Selain penyediaan air bersih oleh PDAM pemerintah telah membangun 9 (okumme) SPAM yang berada di kecamatan-kecamatan dengan jumlah pelanggan sebanyak 4.125 Sambungan Rumah dan di tambah dengan 17 hidran umum berikut data perkembangan SPAM di kabupaten Belitung.

Tabel 2.92

Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian dan Penjualan Air SPAM di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2017

SPAM	Jumlah Pelanggan		Jumlah Pemakaian Air		Jumlah Penjualan Air	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SPAM Sijuk	666	666	7.306	26.728	26.845.720	87.755.000
SPAM Membalong	496	496	1.630	18.588	10.541.310	56.460.120
SPAM Teluk Dalam	42	42				
SPAM Selumar	50	50				
SPAM Perpat	120	120				-
SPAM Kembiri	150	150				
SPAM Terong	80	80				
SPAM Ibul	255	255				
SPAM Bantan	250	250				
SPAM Juru Seberang	295	157	3.180	5.799	9.887.900	28.709.425
Jumlah	2.404	2.266	12.116	51.115	47.274.930	172.924.545

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018

Energi Listrik

PLN Wilayah Belitung Belitung (termasuk Kabupaten Belitung Timur) tahun 2017 mengelola kapasitas pembangkit listrik yang tersambung sebesar 160 072 KVA dengan daya terpasang sebanyak 101 090 KW. Jumlah pembangkit listrik yang ada adalah sebanyak 11 unit. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan listrik mencapai 94 039 pelanggan, dengan 83 215 rumah tangga yang dilayani.

Tabel 2.93

Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung Listrik di Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pelanggan (pelanggan)		77.360	82.230	53.443	94.039
2	Daya Terpasang (KW)		22.322	54.840	67.150	101.090
3	Rumah tangga pengguna listrik (pelanggan)		69.627	73.677	47.517	83.215

Sumber : BPS

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang baik dan kondusif merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian, meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja baru yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Situasi yang aman dan kondusif suatu daerah memegang peranan kunci bagi investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas menjadi salah satu parameter kondusif tidaknya suatu daerah. Berikut diuraikan jumlah pidana tahun 2013-2017 di Kabupaten Belitung.

Kriminalitas

Kondisi kemanan dan ketertiban kabupaten Belitung relatif kondusif bagi berlangsungya aktifitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Masih Terjadi berbagai tindak kriminalitas, unjuk rasa yang merugikan dan mengganggu masyarakat.

Tabel 2.94

Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pencurian/Perampokan	49	40	49	46	48
2.	Penganiayaan	10	12	10	2	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Pembunuhan	0	0	0	0	1
4.	Kesusilaan	0	0	0	0	6
5.	Psikotropika	14	8	14	14	12
6.	Perjudian	3	3	3	1	3
7.	Pemerkosaan	10	0	10	7	1
8.	Kelalaian Menyebabkan Kematian/Terluka	0	10	0	0	4
9.	Senjata Tajam	0	0	0	0	0
10.	Kejahatan Lain-Lain	21	0	21	15	31
	Jumlah	**107**	**73**	**107**	**85**	**122**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2013 – 2017 jumlah tindak kasus pidana di Kabupaten Belitung, mempunyai kecenderungan meningkat pada tahun berjumlah 2013 berjumlah 107 kejadian, dan pada tahun 2017 yang berjumlah 122 kejadian. Tindak okumme tertinggi dalam kurun waktu 2013-2017 adalah pencurian dan perampokkan, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain kondisi Kabupaten Belitung termasuk aman.

Perizinan

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung terus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penguatan organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan dan non perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah teknis. Sejak tahun 2007 telah dibentuk perangkat daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh pejabat eselon III. Selanjutnya pada tahun 2013 status organisasi perangkat daerah ini ditingkatkan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh pejabat eselon II. Dan akhirnya di tahun 2017 nomenklatur perangkat daerah tersebut diubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Disamping penguatan organisasi perangkat daerah yang menangani perizinan dan non perizinan, keseriusan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan fokus iklim berinvestasi dapat dilihat juga dari pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, dari sebelumnya pada tahun 2013 – 2014 hanya melayani 6 jenis perizinan, menjadi 37 jenis perizinan pada tahun 2015 – 2016, dan selanjutnya pada pertengahan tahun 2017 meningkat menjadi 100 jenis

perizinan. Hal ini dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Belitung. Berikut 100 (seratus) perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, yaitu:

a. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :
   1. izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masayarakat;
   2. izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
   3. izin membawa cagar budaya ke luar daerah.

b. Bidang Kesehatan, meliputi :
   1. izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
   2. izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
   3. izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optika;
   4. izin usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
   5. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

c. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi :
   1. izin usaha jasa kontruksi;
   2. izin mendirikan bangunan;
   3. izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
   4. izin pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air.

d. Bidang Sosial, meliputi :
   1. izin pengumpulan uang atau barang skala daerah; dan
   2. izin mendirikan taman anak sejahtera.

e. Bidang Tenaga Kerja, meliputi :
   1. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
   2. izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
   3. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

f. Bidang Pertanahan, meliputi :

1. izin lokasi dalam 1 (satu) daerah; dan
2. izin membuka tanah.

g. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi :

1. izin lingkungan;
2. izin pengelolaan limbah B3 kegiatan penyimpanan limbah B3;
3. izin pengelolaan limbah B3 kegiatan pengumpulan limbah B3;
4. izin pengelolaan limbah B3 kegiatan pengangkutan limbah B3 skla kabupaten;
5. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
6. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
7. izin pendaurulangan sampah/peengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

h. Bidang Perhubungan, meliputi :

1. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
3. izin penyelenggaraan taxi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
4. izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;
5. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
6. izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
7. izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan;
8. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
9. izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
10. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul lokal;
11. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
12. izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;

13. izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
14. izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
15. izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
16. izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
17. izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR/DLKP) pelabuhan pengumpan lokal;
18. izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
19. izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah;
20. izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah; dan
21. izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah.
22. Izin Usaha Angkutan;
    a. izin trayek; dan
    b. izin angkutan barang.

i. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
   1. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
   2. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.

j. Bidang Perikanan meliputi :
   1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
   2. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (STPUP), meliputi:
      a. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap;
      b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Budidaya; dan
      c.Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

k. Bidang Pertanian, meliputi :
   1. Izin Usaha Perkebunan, meliputi:

a. Izin usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B); dan
b. Izin usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).

2. izin usaha peternakan;
3. izin usaha Hortikultura;
4. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan;
5. Surat Tanda Daftar Budidaya Hortikultura;
6. Surat Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
7. izin usaha produksi bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong unggas; dan
8. izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

l. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah.

m. Bidang Perdagangan, meliputi:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
3. Tanda Daftar Gudang (TDG), dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
4. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
5. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri;
6. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
7. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; dan
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

n. Bidang Penanaman Modal dan Industri, meliputi:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
9. Izin Gangguan (HO);
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
11. Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
12. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
13. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah;
14. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
15. Izin Hiburan.

o. Bidang Pariwisata, yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/Izin Usaha Pariwisata, meliputi:
1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi pariwisata;
4. jasa perjalanan pariwisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta; dan
13. spa.

Tabel 2.95

Perkembangan Jumlah Ijin Di Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Izin yang menjadi kewenangan	6	6	37	37	100
2.	Jumlah Pengajuan Izin	1.300	1.093	1.519	1.810	1.679
3.	Jumlah izin yang terbit	1.290	1.083	1.499	1.790	1.642

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2018

Berdasarkan tabel 2.97 diatas, terlihat bahwa jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2013 – 2016 terus meningkat, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,27% bila dibandingkan tahun 2016. Dari semua perizinan yang diajukan, terdapat beberapa izin yang tidak dapat diterbitkan atau berkas pengajuan yang dikembalikan dikarenakan pemohon sampai akhir tahun pengajuan belum dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan perizinan tersebut.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah merupakan komponen dalam pembentukan pendapatan daerah Terdapat 11 objek Pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Kabupaten Belitung

Tabel 2.96

Perkembangan Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Hotel	2.293.448.590,00	4.953.931.372,26	7.267.860.473,90	8.545.529.715,77	11.275.358.863,99
2	Pajak Restoran	2.851.781.779,28	3.329.500.369,50	4.540.450.635,76	5.133.797.472,89	6.959.254.135,28
3	Pajak Hiburan	366.977.331,00	462.651.764,53	456.849.814,40	620.655.713,55	672.847.474,79
4	Pajak Reklame	1.570.854.909,00	1.103.719.604,91	1.186.394.261,18	1.395.732.238,46	1.231.383.983,62
5	Pajak Penerangan Jalan	6.607.011.684,00	7.846.261.308,00	8.511.981.678,00	1.017.798.410,00	11.518.244.153,00
6	Pajak Parkir	40.680.775,00	56.419.000,00	70.237.500,00	150.259.500,00	149.340.000,00
7	Pajak Air Tanah	81.934.176,00	85.559.220,00	101.683.920,00	110.396.040,00	115.078.320,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Pajak Sarang Burung Walet	93.582.000,00	85.845.000,00	87.420.000,00	91.320.000,00	105.420.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.660.015.320,00	19.813.625.667,00	24.309.551.474,00	39.091.865.414,01	36.376.972.885,62
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.110.634.822,10	4.906.798.919,00	6.062.828.513,00	5.588.228.093,00	5.882.869.611,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.483.072.685,00	9.012.204.808,73	14.882.864.946,80	25.819.352.578,80	21.337.992.505,00

Sumber : BPPRD Kab Belitung tahun 2018

Peraturan Daerah Pendukung Investasi

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan menarik serta menumbuhkan iklim investasi diperlukan sebuah okumment kebijakan daerah yang sifatnya formal yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya. Berikut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Belitung yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah serta menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Belitung dalam rentang tahun 2014-2018.

Tabel 2.97

Perkembangan jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Perda	-	2	-	2	1	Buah
2	Jumlah Perbub	1	2	1	2	-	Buah

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2019

Berikut penjelasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2014 – 2018:

1. Pada Tahun 2014 terdapat 1 (satu) Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan.

2. Pada Tahun 2015 terdapat 2 (dua) buah Peraturan Daerah dan 2 (dua) buah Peraturan Bupati, yaitu:

   - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan;

   - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;

   - Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung; dan

   - Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Belitung.

3. Pada Tahun 2016 terdapat 1 (satu) buah Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

4. Pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) buah Peraturan Daerah dan 2 (dua) buah Peraturan Bupati, yaitu:

   - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menarik minat investor dalam berinvestasi di Kabupaten Belitung;

   - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan, dalam rangka menyederhanakan proses perizinan dan memenuhi tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business);

   - Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu; dan

- Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, dalam rangka Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan bagi investor yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

5. Pada Tahun 2018 hanya terdapat satu Peraturan Daerah yang diterbitkan yaitu mengenai Pencabutan Izin Gangguan.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu parameter yang sering dijadikan tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu daerah adalah tingkat pendidikan. Di Kabupaten Belitung mayoritas penduduknya menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah Dasar dan Menengah. Untuk lulusan jenjang pendidikan tinggi tahun 2016 sebanyak 3.516 untuk lulusan diploma dan 3.820 untuk lulusan Strata satu (S-1) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel.2.98
Data Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2014 – 2018

No	Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Tidak/Belum Sekolah	30.319	30.820	30.532	28.354	29.184
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	25.062	24.506	23.938	26.124	26.801
3.	Tamat SD/Sederajat	42.816	41.893	41.733	42.752	43.544
4.	SLTP/Sederajat	21.275	21.786	22.858	24.013	24.323
5.	SLTA/Sederajat	26.753	27.383	30.387	32.127	32.860
6.	Diploma I/II	1.195	1.178	1.184	1.139	1.125
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.894	2.028	2.332	2.560	2.675
8.	Diploma IV/Strata I	2.859	3.166	3.820	4.486	4.788
9.	Strata II	82	92	107	150	164
10.	Strata III	2	2	1	1	2
Jumlah		**152.257**	**152.854**	**156.892**	**161.706**	**165.466**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif(penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Belitung 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99

Rasio Ketergantungan Kabupaten Belitung 2014-2018

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penduduk Usia < 15 th	37.823	37.766	39.513	38.725	40.345	Jiwa
2.	Penduduk Usia > 15 th & < 65 th	106.670	107.046	109.611	114.848	116.192	Jiwa
3.	Penduduk Usia > 65 th	7.764	8.041	7.768	8.133	8.929	Jiwa
4.	Jumlah Penduduk	152.257	152.853	156.892	161.706	165.466	Jiwa
5.	Rasio Ketergantungan (%)	42,74	42,79	43,14	40,80	42,41	Persen
a	Rasio ketergantungan muda	35,46	35,28	36,05	33,72	34,72	Persen
b	Rasio Ketergantungan Tua	7,28	7,51	7,09	7,08	7,68	Persen

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas rasio ketergantungan untuk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk tahun 2018 rasio ketergantungan sebesar 42,41 persen yang terdiri dari rasio ketergantungan muda sebesar 34,72% sedangkan rasio ketergantungan tua sebesar 7,68%, artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Belitung mempunyai tanggungan sekitar 42 penduduk usia non produktif, 35 diantaranya dari kelompok usia muda dan 7 lainnya berasal dari kelompok usia lanjut.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalis capaian dan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab, adil, patut dan bermanfaat .

Kondisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Belitung perlu dilakukan analisis baik kinerja masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan dimasa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan

sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) .

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dana perimbangan , dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan dana perimbangan terdiri dari komponen (1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, (2) Dana alokasi umum dan (3) Dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (4) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya (5) Pendapatan Lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung mengalami *trend* meningkatan tiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 10.12 %. Pertumbuhan pada masing-masing pos penerimaan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20.06 %, Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6.99%, dan Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-ain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,08 %.

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Tahun 2013 s.d 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertum buhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Pendapatan**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	46.591.380.670,00	43.990.262.852,98	51.656.517.033,93	67.478.123.217,04	96.725.121.185,48	20,04%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	22.384.119.313,05	8.684.791.021,25	8.877.261.529,75	10.356.540.035,55	9.728.476.519,85	-18,81%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.688.356.084,61	632.656.132,48	3.761.828.038,84	4.534.038.351,59	4.385.139.060,59	13,01%
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	21.306.047.935,44	57.143.705.670,96	61.495.785.198,63	55.858.979.547,00	82.355.120.610,81	40,22%
	Jumlah PAD	**92.969.904.003,10**	**110.451.415.677,67**	**125.791.391.801,15**	**138.227.681.151,18**	**193.193.857.376,73**	20,06%
1.2	**Dana Perimbangan**						
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.563.762.195,00	67.142.876.375,00	73.538.728.710,00	65.586.125.818,00	37.348.052.906,00	-14,09%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	376.540.510.000,00	428.619.259.000,00	442.340.798.000,00	479.789.103.000,00	474.909.929.000,00	5,97%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	41.549.650.000,00	48.319.720.000,00	58.644.650.000,00	130.012.719.028,00	125.395.292.179,00	31,80%
	Jumlah Dana Perimbangan	**486.653.922.195,00**	**544.081.855.375,00**	**574.524.176.710,00**	**675.387.947.846,00**	**637.653.274.085,00**	6,99%
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**						
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	3.796.808.655,00	-	0,00%
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.282.403.996,54	27.992.994.351,16	41.597.962.255,38	21.332.534.965,13	46.850.069.869,46	20,42%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	3.816.863.000,00	74.703.666.000,00	34.530.525.000,00	-	-	-100,00%
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.836.918.950,00	17.338.877.000,00	56.933.571.000,00	43.073.495.500,00	4.679.030.000,00	-30,31%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	946.351.344,00	13.475.988.500,00	29.487.100.000,00	81.654.595.000,00	341,89%
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	**75.936.185.946,54**	**120.981.888.695,16**	**146.538.046.755,38**	**97.689.939.120,13**	**133.183.694.869,46**	15,08%
	Total Pendapatan	**655.560.012.144,64**	**775.515.159.747,83**	**846.853.615.266,53**	**911.305.568.117,31**	**964.030.826.331,19**	10,12%

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung dari tahun ketahun terus meningkat. Pada tahun 2013 sebesar 14,18 meningkat menjadi 20,04 % pada tahun 2017, yang berarti bahwa kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan berkriteria “cukup”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

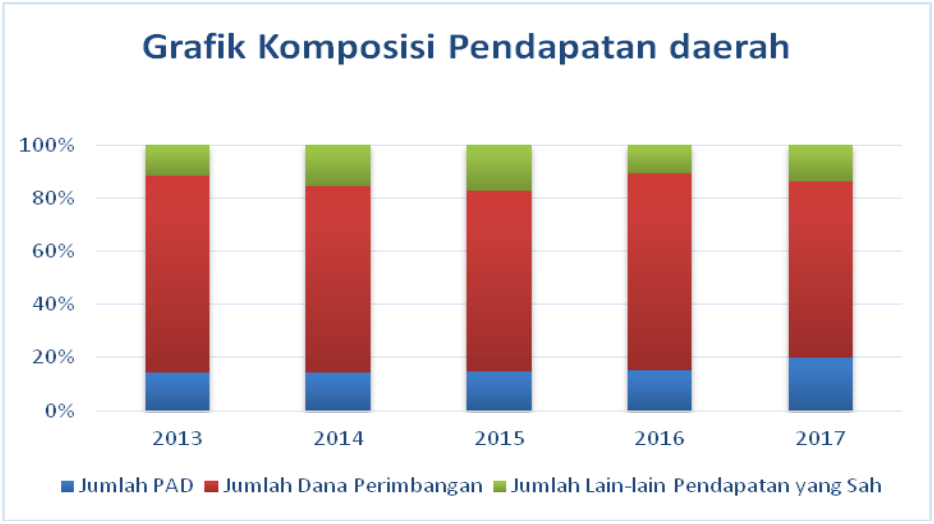
Tabel 3.2

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio derajat Presentase Desentralisasi Fiskal
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	655.560.012.144,64	92.969.904.003,10	14,18
2014	775.515.159.747,83	110.451.415.677,67	14,24
2015	846.853.615.266,53	125.791.391.801,15	14,85
2016	911.305.568.117,31	138.227.681.151,18	15,16
2017	964.030.826.331,19	193.193.857.376,73	20,04

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

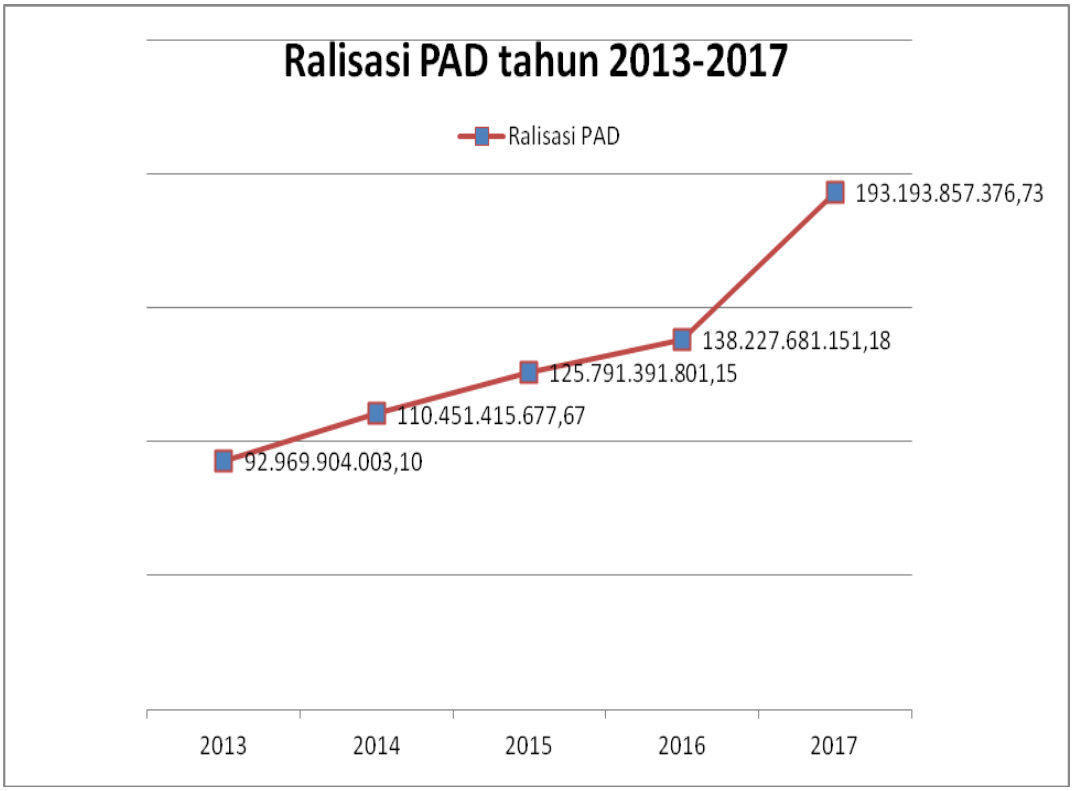
Grafik 3.1



Dari komposisi Pendapatan daerah dikatahui bahwa penerimaan daerah selama periode 2013-2017 terbesar diperoleh dari dana perimbangan yaitu sebesar 74,23 % pada tahun 2013 dan mengalami penurunan menjadi 66,14 % pada tahun 2017, sedangkan komposisi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar 14,18 % mengalami peningkatan menjadi 20,04% pada tahun 2017 dan komposisi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2013 sebesar 11.58 % mengalami meningkat 13,81% tahun 2017

Dari Struktur Pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Angka Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah dari lain –lain Pendapatan Asli daerah sebesar 40,22 % , pertumbuhan yang tinggi ini disebabkan adanya penambahan jenis penerimaan pendapatan yaitu penerimaan dari pendapatan Akademi Keperawatan (AKPER), Pendapatan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono dan Dana Bantuan Operasional Sekolah . Sedangkan pendapatan retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -18,81 %, penurunan ini disebabkan oleh adanya penghapusan penerimaan retribusi di Rumah sakit dr. H. Marsidi Judono.

Grafik 3.2.



Rata-rata pertumbuhan pajak daerah dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 20.04 %. Dari Komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan tertinggi berasal dari pajak hotel sebesar 41,44% dan pajak parkir sebesar 34.41%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah terendah berasal dari pajak sarang burung walet dan PBB. Pajak yang berkontribusi terhadap rasio dan pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah melalui pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak BPHTB ke pemerintah daerah (kab/kota) tahun 2011 dan pelimpahan kewenangan pengelolaaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) ke Pemerintah Daerah (kab/kota) tahun 2013, yang sebelumnya kedua objek pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat melalui skema bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah (kab/kota). Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan 2 (dua) objek pajak tersebut, menyebabkan rasio pajak dan pertumbuhan pajak daerah serta rata-rata pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD meningkat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengindentifikasikan peningkatan desentralisasi fiskal. yang didomimasi oleh pajak daerah

Tabel 3.3

Angka Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata pertum buhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pajak Hotel	1.509.774.624,00	2.293.448.590,00	4.953.931.372,26	7.267.860.473,90	8.545.529.715,77	54,24%
2	Pajak Restoran	2.003.382.401,00	2.851.781.779,28	3.329.500.369,50	4.540.450.635,76	5.133.797.472,89	26,52%
3	Pajak Hiburan	251.838.600,00	366.977.331,00	462.651.764,53	456.849.814,40	620.655.713,55	25,29%
4	Pajak Reklame	1.326.060.266,00	1.570.854.909,00	1.103.719.604,91	1.186.394.261,18	1.395.732.238,46	1,29%
5	Pajak Penerangan Jalan	5.318.700.739,00	6.607.011.684,00	7.846.261.308,00	8.511.981.678,00	10.017.798.410,00	17,15%
6	Pajak Parkir	34.251.500,00	40.680.775,00	56.419.000,00	70.237.500,00	150.259.500,00	44,72%
7	Pajak Air Tanah	81.556.872,00	81.934.176,00	85.559.220,00	101.683.920,00	110.396.040,00	7,86%
8	Pajak Sarang Burung Walet	97.035.000,00	93.582.000,00	85.845.000,00	87.420.000,00	91.320.000,00	-1,51%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.352.254.095,00	17.660.015.320,00	19.813.625.667,00	24.309.551.474,00	39.091.865.414,01	28,47%
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	6.110.634.822,10	4.906.798.919,00	6.062.828.513,00	5.588.228.093,00	-2,94%

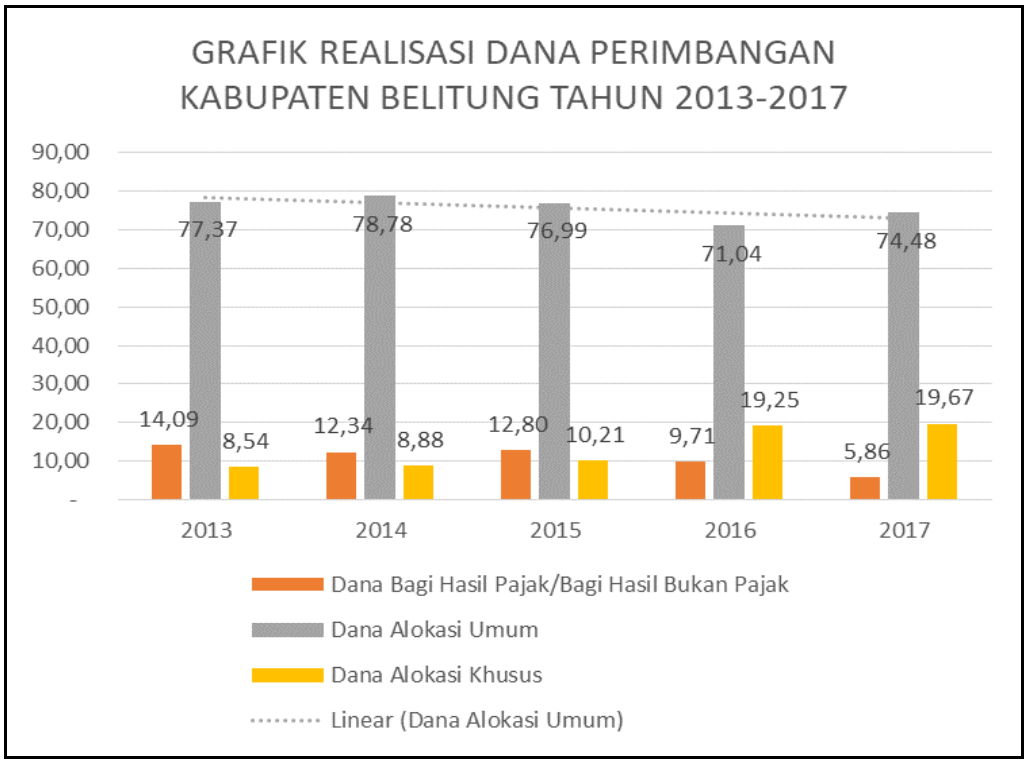
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.619.788.367,00	6.483.072.685,00	9.012.204.808,73	14.882.864.946,80	25.819.352.578,80	4,54%
		46.594.642.464,00	**44.159.994.071.38**	**51.656.517.033,93**	**67.478.123.217.04**	**96.564.935.176,48**	

Sumber : BPPRD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Pendapatan daerah dari dana perimbangan mengalami rata –rata pertumbuhan 6,99% dimana rata-rata pertumbuhan tertinggi bersumber dari dana alokasi khusus, sedangkan pertumbuhan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak cenderung menurun -14,09 % penurunan Dana bagi hasil bukan pajak disebabkan oleh adanya peraturan menteri keuangan nomor 259/PMK.07/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014. Peraturan menteri keuangan nomor 162/PMK.07/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 serta tata cara penyelesaiannya

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Belitung tahun 2013-2017 terbesar bersumber dari dana alokasi umum dengan kecenderungan trend menurun, pada tahun 2013 sebesar 77,37 % terjadi penurunan sebesar 74,48 % pada tahun 2017.

Grafik 3.4



Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari pendapatan hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan lainnya, secara keseluruhan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain penadapatan yang sah cenderung meningkat, dengan rata –rata pertumbuhan 10,12%, Realisasi Pendapatan lain-lain yang sah pada periode tahun 2013 – 2017 berfluktusi naik dan turun .

Tabel 3.4
REALISASI LAIN-LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
TAHUN 2013-2017 (persen)

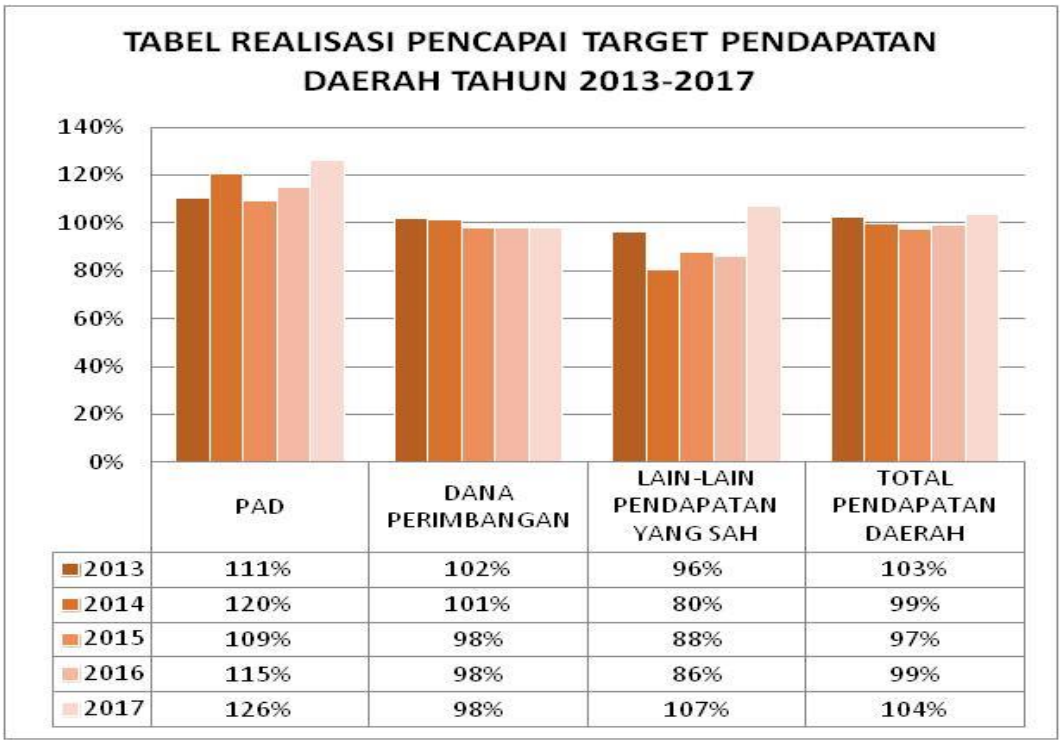
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Hibah	-	-	-	3,89	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	29,34	23,14	28,39	21,84	35,18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44,53	61,75	23,56	-	-
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	26,12	14,33	38,85	44,09	3,51
Pendapatan Lainnya	-	0,78	9,20	30,18	61,31

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Apabila dilihat dari target pendapatan daerah dan realisasi yang dicapai , pendapatan daerah Kabupaten Belitung secara umum cenderung yang mendekati target rencana bahkan pada tahun 2017 realisasi melebihi target sebesar 104% . Target realisasi Pendapatan Asli Daerah menunjukan hal yang positif dimana setiap tahunnya selalu melampaui target hal ini menunjukan bahwa potensi penerimaan sangat tinggi. Penerima yang bersumber dari Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah realiasi nya mengalami pluktuasi naik dan turun, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi terhadap pemerintah daerah

Grafik 3.5



	PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
2013	111%	102%	96%	103%
2014	120%	101%	80%	99%
2015	109%	98%	88%	97%
2016	115%	98%	86%	99%
2017	126%	98%	107%	104%

Tabel .3.5

TABEL APBD KABUPATEN BELITUNG

TARGET DAN REALISASI APBD KABUPATEN BELITUNG

TA. 2013 - TA. 2017

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rupiah)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN**										
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**										
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.085.169.975,00	46.591.380.670,00	34.568.816.090,36	43.990.262.852,98	41.016.906.000,00	51.656.517.033,93	47.846.280.000,00	67.478.123.217,04	66.152.000.000,00	96.725.121.185,48
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.707.436.705,00	22.384.119.313,05	6.399.275.680,00	8.684.791.021,25	8.807.703.082,00	8.877.261.529,75	10.011.020.400,00	10.356.540.035,55	9.603.410.167,00	9.728.476.519,85
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.000.000.000,00	2.688.356.084,61	3.000.000.000,00	632.656.132,48	3.000.000.000,00	3.761.828.038,84	3.000.000.000,00	4.534.038.351,59	4.000.000.000,00	4.385.139.060,59
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	16.306.278.000,00	21.306.047.935,44	47.717.123.977,00	57.143.705.670,96	62.305.921.154,00	61.495.785.198,63	59.136.119.153,00	55.858.979.547,00	73.448.347.488,35	82.355.120.610,81
	Jumlah PAD	**84.098.884.680,00**	**92.969.904.003,10**	**91.685.215.747,36**	**110.451.415.677,67**	**115.130.530.236,00**	**125.791.391.801,15**	**119.993.419.553,00**	**138.227.681.151,18**	**153.203.757.655,35**	**193.193.857.376,73**
1.2	**DANA PERIMBANGAN**						10.660.861.565,15		18.234.261.598,18		39.990.099.721,38
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57.948.516.238,00	68.563.762.195,00	60.345.406.183,00	67.142.876.375,00	85.813.098.909,00	73.538.728.710,00	44.085.482.000,00	65.586.125.818,00	42.702.584.000,00	37.348.052.906,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	376.540.510.000,00	376.540.510.000,00	428.619.259.000,00	428.619.259.000,00	442.340.798.000,00	442.340.798.000,00	479.789.103.000,00	479.789.103.000,00	474.909.929.000,00	474.909.929.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	41.549.650.000,00	41.549.650.000,00	48.319.720.000,00	48.319.720.000,00	58.644.650.000,00	58.644.650.000,00	163.935.385.000,00	130.012.719.028,00	134.186.994.000,00	125.395.292.179,00
	Jumlah Dana Perimbangan	**476.038.676.238,00**	**486.653.922.195,00**	**537.284.385.183,00**	**544.081.855.375,00**	**586.798.546.909,00**	**574.524.176.710,00**	**687.809.970.000,00**	**675.387.947.846,00**	**651.799.507.000,00**	**637.653.274.085,00**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**						(12.274.370.199,00)		(12.422.022.154,00)		(14.146.232.915,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	3.796.810.000,00	3.796.808.655,00	-	-
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21.048.626.600,00	22.282.403.996,54	28.098.257.275,00	27.992.994.351,16	29.119.786.452,00	41.597.962.255,38	31.819.746.000,00	21.332.534.965,13	37.700.000.000,00	46.850.069.869,46
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.970.265.948,00	33.816.863.000,00	99.885.032.000,00	74.703.666.000,00	61.868.701.000,00	34.530.525.000,00	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	24.703.560.000,00	19.836.918.950,00	21.571.020.000,00	17.338.877.000,00	62.199.100.000,00	56.933.571.000,00	48.350.100.000,00	43.073.495.500,00	4.908.000.000,00	4.679.030.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	1.079.132.200,00	946.351.344,00	13.625.722.000,00	13.475.988.500,00	29.474.775.000,00	29.487.100.000,00	81.646.368.000,00	81.654.595.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	**78.722.452.548,00**	**75.936.185.946,54**	**150.633.441.475,00**	**120.981.888.695,16**	**166.813.309.452,00**	**146.538.046.755,38**	**113.441.431.000,00**	**97.689.939.120,13**	**124.254.368.000,00**	**133.183.694.869,46**
	Total Pendapatan	**638.860.013.466,00**	**655.560.012.144,64**	**779.603.042.405,36**	**775.515.159.747,83**	**868.742.386.597,00**	**846.853.615.266,53**	**921.244.820.553,00**	**911.305.568.117,31**	**929.257.632.655,35**	**964.030.826.331,19**

Sumber :BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

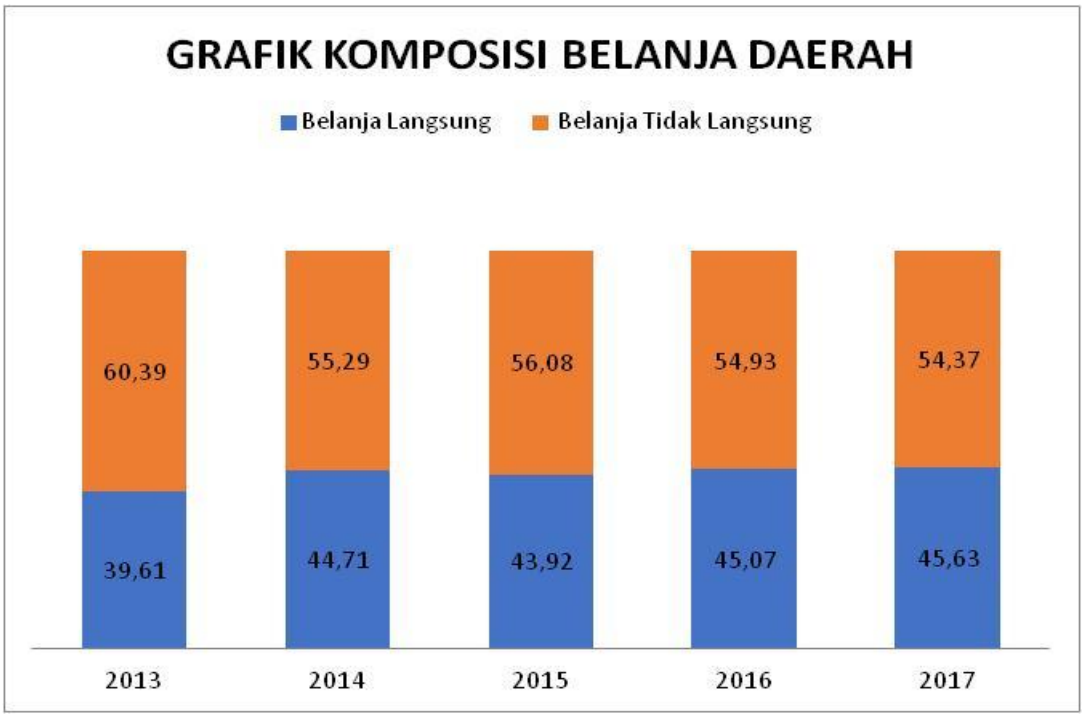
B. Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsisi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Belanja Daerah Kabupaten Belitung mengalami tren meningkatan tiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan. Rrata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 6.17 %. Pertumbuhan pada masing-masing pos penerimaan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif, Belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9.99 %, dan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3.42%.

Dari komposisi belanja daerah diketahui bahwa selama periode 2013-2017 belanja terbesar terdapat pada belanja langsung yaitu antara 60.4 % - 54.4 % dan belanja tidak langsung yaitu antara 45.6 % - 39.6%

Grafik 3.6



Belanja Tidak Langsung

Belanja daerah yang bersumber dari belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi , belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan politik dan belanja tidak terduga.

Secara keseluruhan belanja daerah yang bersumber dari belanja tidak langsung cenderung meningkat pada kurun waktu 2013-2017 dengan rata –rata pertumbuhan 9.99%.

Realisasi belanja pegawai Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4.66%. Realisasi belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2013-2017 tertinggi terjadi di tahun 2014 yang tercatat sebesar 88.32% sedangkan realisasi terendah pada tahun 2017 sebesar 72.12%. dari komposisi belanja tidak langsung belanja pegawai merupakan pengeluaran terbesar dari belanja tidak langsung lainnya tetapi cenderung menurun dari tahun ketahun.

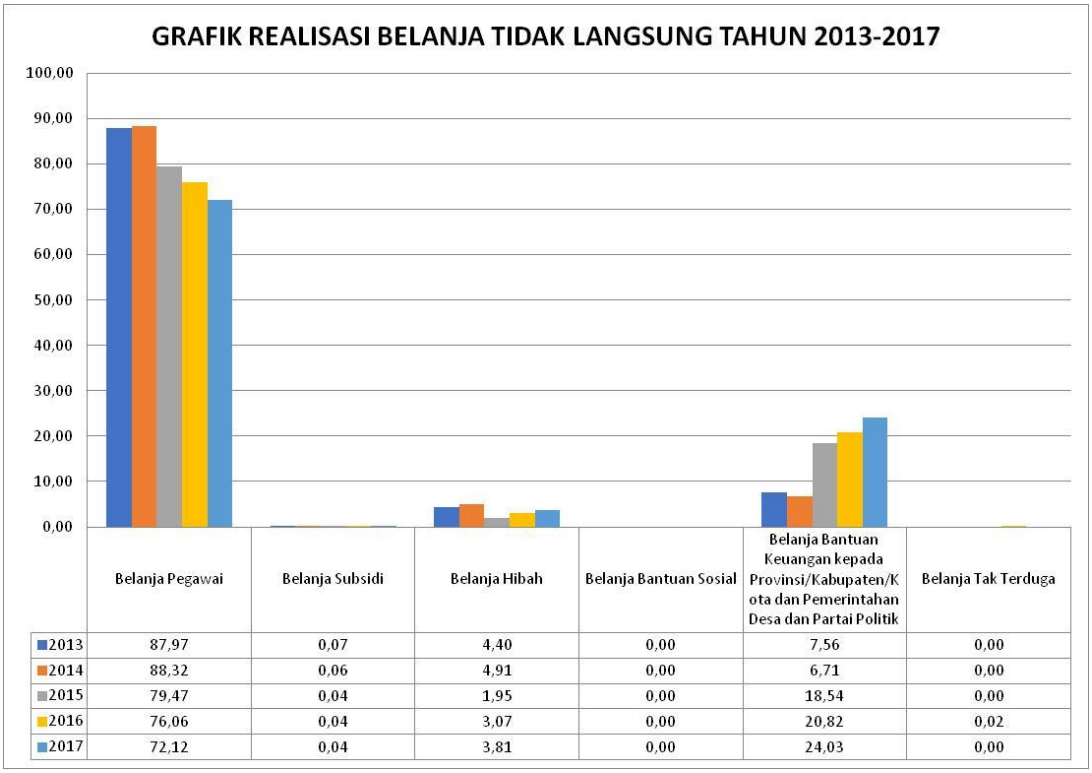
Realisasi belanja subsidi Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2017

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2.36%. Realisasi belanja subsidi terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2013-2017 tertinggi terjadi di tahun 2013 yang tercatat sebesar 0.07% sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belanja subsidi cenderung tidak meningkat diangka 0.04%

Realisasi belanja hibah Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6.12%. Realisasi belanja hibah terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2014-2017 tertinggi terjadi di tahun 2014 yang tercatat sebesar 4.91% sedangkan realisasi terendah pada tahun 2015 sebesar 1.95%.

Realisasi belanja bantuan keuangan Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 46.87%. Realisasi belanja bantuan keuangan terhadap total belanja tidak langsung pada kurun waktu 2013-2017 tertinggi terjadi di tahun 2017 yang tercatat sebesar 24.03%, sedangkan realisasi terendah pada tahun 2014 sebesar 6.71%. semangkin meningkatnya belanja bantuan keuangan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang bantuan kepada pemerintah desa. Realisasi belanja tidak terduga Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2017 hanya tercatat pada tahun 2016 dengan realisasi belanja tidak terduga terhadap total belanja tidak langsung sebesar 0.02%

Grafik. 3.7



	Belanja Pegawai	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tak Terduga
2013	87,97	0,07	4,40	0,00	7,56	0,00
2014	88,32	0,06	4,91	0,00	6,71	0,00
2015	79,47	0,04	1,95	0,00	18,54	0,00
2016	76,06	0,04	3,07	0,00	20,82	0,02
2017	72,12	0,04	3,81	0,00	24,03	0,00

Tabel 3.6

Rata - Rata Pertumbuhan anggaran Belanja Daerah
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertum buhan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Belanja**						
2.1	**Belanja Tidak Langsung**						
2.1.1	Belanja Pegawai	240.942.044.972,50	280.827.465.214,64	305.319.589.171,07	320.460.324.251,00	289.128.376.394,00	4,66%
2.1.3	Belanja Subsidi	195.615.000,00	181.315.000,00	155.665.000,00	169.255.000,00	177.775.000,00	-2,36%
2.1.4	Belanja Hibah	12.040.692.720,00	15.628.069.950,00	7.500.101.900,00	12.938.166.575,00	15.268.378.298,00	6,12%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	20.700.977.409,00	21.339.331.042,00	71.225.363.567,00	87.710.917.594,00	96.323.019.594,00	46,87%
2.1.8	Belanja Tak Terduga	-	-	-	74.467.909,00	-	0,00%
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**273.879.330.101,50**	**317.976.181.206,64**	**384.200.719.638,07**	**421.353.131.329,00**	**400.897.549.286,00**	9,99%
2.2	**Belanja Langsung**						
2.2.1	Belanja Pegawai	59.247.143.254,00	56.920.202.025,00	57.843.322.725,00	68.583.437.079,00	64.555.579.570,00	2,17%
2.2.2	Belanja Barang	148.389.069.495,00	184.753.135.011,50	185.344.232.862,67	202.507.381.565,67	202.023.787.943,00	8,02%

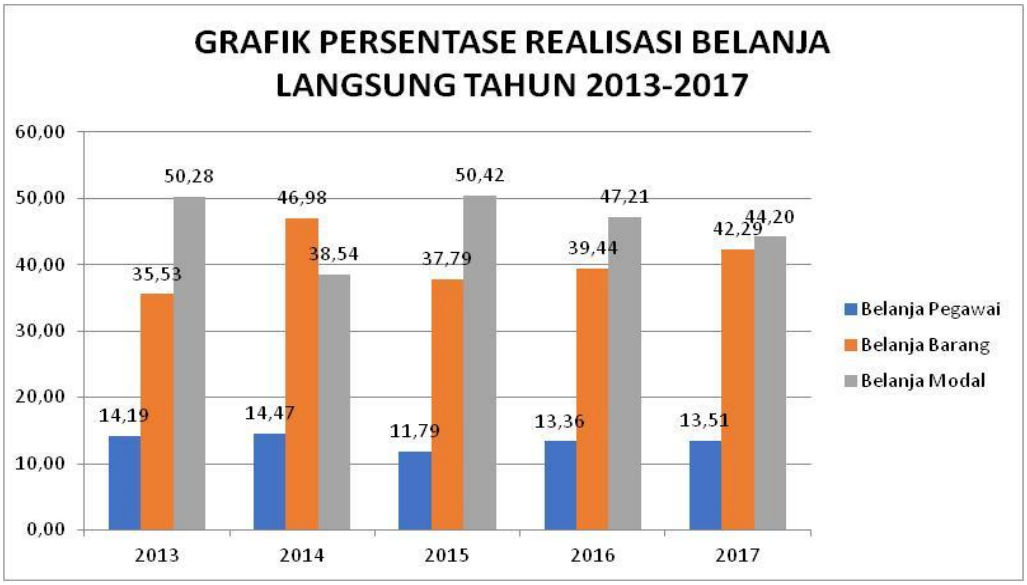
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3	Belanja Modal	209.986.564.240,00	151.570.498.436,00	247.314.185.946,17	242.389.803.935,38	211.153.077.500,40	0,14%
	Jumlah Belanja Langsung	**417.622.776.989,00**	**393.243.835.472,50**	**490.501.741.533,84**	**513.480.622.580,05**	**477.732.445.013,40**	3,42%
	Jumlah Belanja	**691.502.107.090,50**	**711.220.016.679,14**	**874.702.461.171,91**	**934.833.753.909,05**	**878.629.994.299,40**	6,17%

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Belanja Langsung

Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung, belanja pegawai, belanja modal cenderung berfluktuasi pada kurun waktu 2013-2017 dengan rata–rata pertumbuhan 3.42%. Rata-rata belanja pegawai dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung menurun , tertinggi pada tahun 2013 sebesar 14,19% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 14,19 % . Rata –rata belanja barang dalam kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat , tertinggi pada tahun 2014 sebesar 46.98 % dan terendah 35.53 % dan Belanja Modal cenderung menurun tertinggi 50,28% dan terendah 38.54 %

Grafik 3.8



Kinerja Belanja Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 dilihat dari target realisasi anggaran belanja , menunjukan bahwa serapan anggaran belanja yang belum optimal tetapi secara umum telah memadai. Target dan realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 90% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 80% . belum optimalnaya penyerapan anggaran belanja:

Tabel 3.7

TABEL APBD KABUPATEN BELITUNG
TARGET DAN REALISASI APBD KABUPATEN BELITUNG
TA. 2013 - TA. 2017

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rupiah)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
2	**BELANJA**										
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**										
2.1.1	Belanja Pegawai	253.762.585.000,38	240.942.044.972,50	363.718.382.404,88	280.827.465.214,64	370.328.876.213,66	305.319.589.171,07	361.401.115.015,83	320.460.324.251,00	364.971.561.869,65	289.128.376.394,00
2.1.3	Belanja Subsidi	288.000.000,00	195.615.000,00	274.858.000,00	181.315.000,00	288.000.000,00	155.665.000,00	200.000.000,00	169.255.000,00	200.000.000,00	177.775.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.014.921.750,00	12.040.692.720,00	15.766.415.000,00	15.628.069.950,00	7.837.410.000,00	7.500.101.900,00	13.590.256.500,00	12.938.166.575,00	16.177.776.434,00	15.268.378.298,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	75.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	20.700.986.000,00	20.700.977.409,00	21.725.360.000,00	21.339.331.042,00	71.291.527.599,10	71.225.363.567,00	87.710.918.000,00	87.710.917.594,00	96.323.020.000,00	96.323.019.594,00
2.1.8	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	1.500.000.000,00	74.467.909,00	3.000.000.000,00	-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**293.841.492.750,38**	**273.879.330.101,50**	**404.685.015.404,88**	**317.976.181.206,64**	**452.945.813.812,76**	**384.200.719.638,07**	**464.602.289.515,83**	**421.353.131.329,00**	**480.872.358.303,65**	**400.897.549.286,00**
2.2	**BELANJA LANGSUNG**										
2.2.1	Belanja Pegawai	70.580.313.067,00	59.247.143.254,00	70.946.319.200,00	56.920.202.025,00	67.240.428.047,87	57.843.322.725,00	75.650.147.485,00	68.583.437.079,00	72.316.705.693,00	64.555.579.570,00
2.2.2	Belanja Barang	188.904.776.168,00	148.389.069.495,00	230.910.440.960,00	184.753.135.011,50	236.773.413.970,13	185.344.232.862,67	248.958.430.213,00	202.507.381.565,67	250.350.971.956,35	202.023.787.943,00
2.2.3	Belanja Modal	228.515.914.480,00	209.986.564.240,00	177.923.105.365,00	151.570.498.436,00	270.236.369.474,59	247.314.185.946,17	255.280.512.940,00	242.389.803.935,38	226.238.695.260,00	211.153.077.500,40
	Jumlah Belanja Langsung	**488.001.003.715,00**	**417.622.776.989,00**	**479.779.865.525,00**	**393.243.835.472,50**	**574.250.211.492,59**	**490.501.741.533,84**	**579.889.090.638,00**	**513.480.622.580,05**	**548.906.372.909,35**	**477.732.445.013,40**
	Jumlah Belanja	**781.842.496.465,38**	**691.502.107.090,50**	**884.464.880.929,88**	**711.220.016.679,14**	**1.027.196.025.305,35**	**874.702.461.171,91**	**1.044.491.380.153,83**	**934.833.753.909,05**	**1.029.778.731.213,00**	**878.629.994.299,40**

Sumber : BPKAD tahun 2018 data diolah Tim RPJMD)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran dari kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah pembiayaa daerah terdiri dari penerimaan daerah yaitu berupa Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA), berdasarkan dari data SilPA Kabupaten Belitung dari tahun 2013-2017 angka pertumbuhannya cenderung negatif, sebesar -10,40 % hal ini menunjukan bahwa ada upaya untuk menekan SilPA dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Masih tingginya SiLPA adaya SiLPA merupakan akibat dari adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan, sisa lelang ataupun lelang yang tidak bisa dilaksanakan. Namun secara keseluruhan realisasi fisik dapat dipenuhi 100%

Grafik. 3 9



Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan daerah, selama tahun 2013-2017 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dipergunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah dimana angka pertumbuhannya cenderung negatif

hal ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak dilakukannya penyertaan modal pemerintah daerah, tetapi dalam kurun waktu tahun 2013-2017peningkatan penyertaan modal mengalami pluktuasi naik dan turun dan penyertaan modal tertingi terjadi pada tahun 2015

Selama kurun waktu lima tahun terakhir penyertaan modal dilakukan pada perusahaan daerah yaitu

1. Bank Sumsel Babel
2. PDAM
3. Bank Syariah Babel
4. BUP Tanjung Batu
5. PT. Belitung Mandiri

Perusahaan daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Grafik 3.10



Tabel 3.8

Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Tahun.2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertum buhan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Pembiayaan**						
3.1	**Penerimaan Daerah**						
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)	157.545.064.416,38	113.404.269.470,52	169.500.712.539,21	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00	-10,40%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**157.545.064.416,38**	**113.404.269.470,52**	**169.500.712.539,21**	**130.604.793.003,83**	**101.562.337.458,00**	-10,40%
3.2	**Pengeluaran Daerah**						
3.1.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.198.700.000,00	8.198.700.000,00	11.047.073.630,00	6.555.508.655,00	-	-100,00%
3.1.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-			-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**8.198.700.000,00**	**8.198.700.000,00**	**11.047.073.630,00**	**6.555.508.655,00**	**-**	-100,00%
	Pembiayaan Neto	**149.346.364.416,38**	**105.205.569.470,52**	**158.453.638.909,21**	**124.049.284.348,83**	**101.562.337.458,00**	-9,19%
	Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (Silpa)	**113.404.269.470,52**	**169.500.712.539,21**	**130.604.793.003,83**	**100.521.098.557,09**	**186.963.169.489,79**	13,31%

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.Analisis Neraca daerah disusun bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Unsur yang dicakup oleh sebuah neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Belitung tahun 2013-2017 dan rata-rata pertumbuhannya terlihat di tabel 3.26. Aset Kabupaten Belitung dari kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu rata-rata -2.32 % Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Belitung yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Belitung memiliki total aset sebesar Rp 1.684.792.135.074,57 ,-atau turun sebesar 11.07 % dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 1.894.649.421.110,39,- jumlah aset terbesar berupa aset tetap yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 1.264.607.130.698,77 atau sebesar 75,06 % dari jumlah aset Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2017. Penurunan jumlah aset di Kabupaten Belitung terjadi karena adanya hibah ke provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa tanah jalan dan jembatan, penyerahan Personil ,sarana dan prasarana serta dokumen P2D akibat adanya perubahan dan penyerahan kewenanganke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adanya lelang umum atas kendaraan dinas operasional, penghaspusan akibat banjir, pemusnahan obat-obatan karena rusak dan kadulwarsa.

Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang pemerintah daeah dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi 2, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2013 -2017 tidak memeiliki kewjiban jangka panjang . pada tahun 2017, Kabupaten Belitung memiliki jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp 7.834.492.415,00 Angka ini meningkat 25.97% dibanding kewajiban tahun 2013 sebesar Rp 5.799.773.608,53 Ekuitas dana adalah selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Di tahun 2013, nilai ekuitas dana Kabupaten Belitung

mencapai Rp 1.888.849.647.501,86 dan menurun 12.63 % dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 1.676.957.642.659,57

Tabel 3.9

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013-2017

Uraian	rata-rata pertumbuhan
(1)	(2)
Kas di Kas Daerah	-6,65%
Kas di Bendahara Penerimaan	-100,00%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-100,00%
Kas di BLUD	-19,18%
Kas yang dibatasi penggunaannya	26,75%
Kas Lainnya	79,89%
Setara Kas	-6,17%
Investasi Jangka Pendek	
Piutang Pajak	92,50%
Penyisihan Piutang Pajak	9,97%
Piutang Pajak Netto	64,38%
Piutang Retribusi	0,39%
Penyisihan Piutang Retribusi	50,90%
Piutang Retribusi Netto	-13,15%
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	0,00%
Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	0,00%
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Netto	-100,00%
Bagian lancar tuntutan ganti rugi	0,00%
Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti rugi	0,00%
Bagian lancar tuntutan ganti rugi Netto	-100,00%
Piutang Transfer	118,74%
Piutang Lainnya	91,36%
Penyisihan Piutang Lainnya	2,33%
Piutang Lainnya Netto	89,86%
Beban Dibayar Dimuka	-90,45%
Persediaan	30,58%
JUMLAH ASET LANCAR	17,81%
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
Investasi dalam Obligasi	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	

(1)	(2)
Dana Bergulir	
Deposito Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen Lainnya	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7,58%
Investasi Permanen Lainnya	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	7,58%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7,58%
ASET TETAP	
Tanah	3,49%
Peralatan dan Mesin	6,35%
Gedung dan Bangunan	3,84%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8,06%
Aset Tetap Lainnya	5,76%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,90%
Akumulasi Penyusutan	16,70%
JUMLAH ASET TETAP	-5,66%
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
JUMLAH DANA CADANGAN	
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00%
Aset Tidak Berwujud	21,76%
Amortisasi Aset Tak Berwujud	16,91%
Aset Tidak Berwujud Netto	-14,60%
Aset Lain-lain	28,75%
JUMLAH ASET LAINNYA	17,09%
JUMLAH ASET	-2,32%
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8,51%
Utang Bunga	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Pendapatan Diterima Dimuka	33,82%
Utang Beban	-2,87%
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00%
Utang Pajak	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,20%

(1)	(2)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Lainnya	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
JUMLAH KEWAJIBAN	6,20%
EKUITAS	
EKUITAS	-2,35%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-2,32%

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Gambaran kondisi neraca daerah tersebut lebih lanjut dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio, dimana terdapat 2 jenis rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas sebagaimana terjabarkan sebagai berikut:

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pandek. Data rasio likuiditas tahun terakhir 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Belitung Tahun 2017

Rasio	Rumus		2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Ratio Lancar	Aset Lancar / Kewajiban Jangka Panjang	310.413.712.497,32 / 7.862.583.148,15	39,48
Rasio Quick (*Quick Ratio*)	Aset Lancar - Persediaan / Kewajiban Jangka Pendek	310.413.712.497,32 (75.152.283.841,29) / 7.862.583.148,15	29,92
Rasio total hutang terhadap total asset	Total Hutang / Total Aset	7.862.583.148,15 / 1.684.922.790.035,24	0,0047

Hasil analisis diatas menunjukan bahwa Kabupaten Belitung memiliki kondisi pendanaan yang cukup kuat (likuid) dilihat dari hasil analisis ratio lancar, quick ratio dan rasio total hutang terhadap total asset juga bernilai sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Kabupaten Belitung cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

b) Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas tahun 2017 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.11
Rasio Solvabilitas Kabupaten Belitung Tahun 2017

Rasio	Rumus		2017
(1)	(2)		(3)
Rasio Kewajiban terhadap Aset	Kewajiban / Aset	7.862.583.148,15 / 1.684.922.790.035,24	0,0047
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban / Ekuitas	7.862.583.148,15 / 1.677.060.206.887,09	0,0047

Rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 sangat rendah, hanya sebesar 0,0047 %. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Kabupaten Belitung masih cukup jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sedangkan pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga sangat rendah, hanya sebesar 0,0047 %. Rasio kewajiban terhadap modal yang tertera di atas menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Belitung.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan masa lalu menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi dalam penggunaan anggaran maupun analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran terutama dalam pembagian porsi belanja langsung dan tidak langsung akan berdampak pada percepatan pembangunan yang sudah direncanakan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam hal ini periode Tahun 2013-2017 perlu dianalisis sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan keuangan untuk periode yang akan datang.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja Kabupaten Belitung selama tahun 2013-2017 untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mempunyai proporsi yang seimbang . Bila dibandingkan dengan pemenuhan untuk belanja langsung yang dalam hal ini diperuntukkan bagi pembangunan, maka alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci analisis proporsi penggunaan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun.2013 s/d Tahun 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Proporsi rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**39,61**	**44,71**	**43,92**	**45,12**	**45,63**	**43.80**
Belanja Pegawai	34,84	39,49	34,91	34,28	32,91	35.28
Belanja Subsidi	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0.02
Belanja Hibah	1,74	2,20	0,86	1,38	1,74	1.58
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2,99	3,00	8,14	9,38	10,96	6.90
Belanja Tak Terduga	-	-	-	0,06	-	0.01
BELANJA LANGSUNG	**60,39**	**55,29**	**56,08**	**54,93**	**54,37**	**56.21**
Belanja Pegawai	8,57	8,00	6,61	7,34	7,35	7.57
Belanja Barang	21,46	25,98	21,19	21,66	22,99	22.66
Belanja Modal	30,37	21,31	28,27	25,93	24,03	25.98

Sumber : BPKAD tahun 2018 (Data diolah Tim RPJMD)

Tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Belitung taun 2013-2017 menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir proporsi belanja langsung terhadap anggaran belanja memiliki proporsi lebih besar dibanding tidak belanja langsung. Proporsi penggunaan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 56,21 % sedangkan belanja tidak langsung rata-rata 43.80 %. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung konsisten dalam mengusung program-program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik . Sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar untuk belanja modal .

Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung, perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Belitung . Kebutuhan belanja aparatur Kabupaten Belitung selama periode tahun 2013-2017 yang berasal dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang meliputi Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH), Belanja pemungutan pajak dan Belanja Langsung untuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran memiliki kondisi fluktuatif dimana proporsi tertinggi di tahun 2014 sebesar 44,55%.

Tabel 3.13

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rupiah)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2013	253.762.585.000,38	840.848.471.506,88	30,18
2.	2014	363.718.382.404,88	816.425.586.149,66	44,55
3.	2015	447.222.160.307,98	1.033.156.100.081,12	43,29
4.	2016	426.125.631.070,00	1.058.883.038.257,88	40,24
5.	2017	390.813.981.744,46	980.192.331.757,40	39,87

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Adapun rincian mengenai total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur Kabupaten belitung sebagaimana tabel Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tahun 2015-2017.

Tabel 3.14

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Belitung

No.	Uraian	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
A	Belanja tidak Langsung			
1	Belanja gaji dan tunjangan	259.509.139.736,00	274.121.640.385,00	245.014.227.876,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	40.348.175.000,00	41.466.497.500,00	37.734.912.500,00
3	Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	2.290.000.000,00	2.289.375.000,00	2.709.240.000,00
4	Belanja pemungutan pajak daerah	2.752.958.632,00	2.231.402.844,00	3.307.599.187,00
B	Belanja Langsung			
1	Belanja honorarium PNS	23.813.983.687,00	25.129.409.383,00	22.848.584.742,00
2	Belanja uang lembur	463.075.000,00	526.400.000,00	660.375.000,00
3	Belanja beasiswa pendidikan PNS	1.661.977.500,00	1.028.062.960,00	686.338.089,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	1.969.021.700,00	968.080.700,00	541.985.900,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	46.415.580,00	63.745.360,00	53.213.160,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	1.696.241.677,00	1.822.565.200,00	1.763.715.450,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	2.025.573.350,00	1.665.226.500,00	1.492.338.300,00
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.365.759.500,00	1.733.304.500,00	1.350.253.500,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	15.376.623.178,00	21.381.486.630,00	26.644.849.412,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-
11	Belanja pemulangan pegawai	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	93.903.215.767,98	51.698.434.108,00	46.006.348.628,46
	Total	447.222.160.307,98	426.125.631.070,00	390.813.981.744,46

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. berikut menyajikan gambaran realisasi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Belitung tahun 2015-2017.

Tabel 3.15

Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Belitung tahun 2015-2017

No.	Uraian	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	846.853.615.266,53	911.305.568.117,31	964.030.826.331,19
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	874.702.461.171,91	934.833.753.909,05	878.629.994.299,40
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.047.073.630,00	6.555.508.655,00	-
A	Defisit Riil	(38.895.919.535,38)	(30.083.694.446,74)	85.400.832.031,79
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	169.500.712.539,21	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
7	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah	169.500.712.539,21	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	130.604.793.003,83	100.521.098.557,09	186.963.169.489,79

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Berdasarkan tabel di atas, terjadinya defisit riil dikarenakan realisasi belanja yang melebihi realisasi pendapatan daerah. Untuk menutupi kondisi tersebut, maka dimanfaatkan pembiayaan penerimaan daerah yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya seperti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Komposisi Penutup Difisit Riil Anggaran
Kabupaten Belitung tahun 2015-2017

No.	Uraian	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Difisit Riil			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	169.500.712.539,21	130.604.793.003,83	101.562.337.458,00
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
4	Penerimaan pinjaman Daerah			
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6	Penerimaan piutang daerah			
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	130.604.793.003,83	100.521.098.557,09	186.963.169.489,79

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, bermanfaat dalam menutupi kondisi defisit riil keuangan daerah. Selama tahun 2013-2017, kondisi SILPA Kabupaten Belitung mengalami nilai yang fluktuatif tergantung pada penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Berikut diuraikan kondisi target dan realisasi SILPA Kabupaten Belitung selama tahun 2015-2017.

Tabel 3.17

Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Belitung

No.	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
(1)	(2)	(3)	(40	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah SILPA	130.604.793.003,83		100.521.098.557,09		186.963.169.489,79	
1	Pelampauan PAD	10.660.861.565,15	8,16%	18.234.261.598,18	18,14%	39.990.099.721,38	21,39%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(12.274.370.199,00)	-9,40%	(12.422.022.154,00)	-12,36%	(14.146.232.915,00)	-7,57%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(20.275.262.696,62)	-15,52%	(15.751.491.879,87)	-15,67%	8.929.326.869,46	4,78%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	152.493.564.134,30	116,76%	110.460.350.992,78	109,89%	152.189.975.813,95	81,40%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
6	Kegiatan lanjutan						

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Tabel 3.18
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kabupaten Belitung

No.	Uraian	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo kas neraca daerah	119.080.296.015,03	91.108.469.584,19	175.391.689.498,79
	dikurangi :			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3.749.339.144,00	4.979.487.993,00	5.013.705.618,00
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-
	Sisa lebih (riil) Pembiayaan Anggaran	115.330.956.871,03	86.128.981.591,19	170.377.983.880,79

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

3.3 Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun

sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain :

1) Indikator ekonomi makro, mencakup:
   - Rata-Rata Inflasi Kabupaten Belitung tahun 2013-2017 sebesar 5.7% pertahun
   - Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung tahun 2013-2017 6.5 % per tahun
2) Kebijakan di bidang keuangan negara

Proyeksi penerimaan pendapatan Kabupaten Belitung tahun 2019 - 2023 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2013-2017 , serta mempertimbangan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10.12 %, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20.06 %, Pos Dana Perimbangan rata-rata sebesar 6.99 % dan Pos Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata sebesar 15.08 %. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah tahun 2014 sampai dengan 2017, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah tahun 2014 sampai dengan 2017, maka penerimaan pendapatan daerah tahun 2019-2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9.40% % per tahunnya. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat kondisinya dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 16.43 % % per tahun. Dana Perimbangan juga akan terus meningkat kondisinya dengan rata-rata pertumbuhan 8.40 % per tahun dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3.72 % per tahun.

Untuk Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak /bukan pajak diprediksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.50 % pertahun. . Dana Alokasi Umum akan meningkat rata-rata

sebesar 6.50 % pertahun dan Dana Alokasi Khusus akan meningkat 12%. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan DAU, maka proyeksi DAU yang ditetapkan dalam RPJMD ini bersifat dinamis atau tidak final, serta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan penerimaan dalam negeri neto.

Sedangkan untuk jenis komponen pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; untuk Pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota akan meningkat rata-rata sebesar 10 % per tahun, Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya rata-rata sebesar 4.50 % per tahun, dan Pos Pendapatan Lainnya akan meningkat 3,72%

B. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja langsung atau belanja program untuk RPJMD. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2014-2017 , prioritas pembangunan serta proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut Proyeksi Belanja daerah Kabupaten Belitung

Berdasarkan Rata-rata pertumbuhan Belanja daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6.17 % pertahun, dengan pos belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 9.99% sedangan untuk belanja langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3.42%

Berdasarkan pertumbuhan rata-rata belanja tahun 2014 sampai dengan 2017 dan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah maka proyeksi Belanja Langsung sebesar 9.40% sedangkan belanja tidak langsung 4.58%

Analisis Proyeksi belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat. Pengeluaran yang bersifat wajib dan

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulannya dalam tahun anggaran yang bersangkutan. seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2019-2023 diproyeksikan sebagai berikut, Besaran belanja pegawai dirata-rata diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 2.50 % per tahun, Belanja Subsidi diproyeksikan tumbuh 1% pertahun, belanja bantuan sosial 5,00% pertahun belanja hibah diproyeksi sebesar 6.12% pertahun, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan Partai politik 20,00 %, dan belanja tak terduga di proyeksikan tumbuh 0%

Belanja langsung untuk berupa Belanja Pegawai diproyeksi tumbuh negarif sebesar 2.17 % dengan adanya pembayaran tunjangan kinerja yang tidak akan memberikan honorarium kepada Aparatur sipil Negara. Pertumbuhan untuk Belanja barang di proyeksikan rata-rata meningkat 8,49% dan unuk belanja modal diproyeksikan tumbuh 2,35 %

Pertumbuhan rata-rata penerimaan Pembiayaan tahun 2019-2023 diproyeksi dengan pertumbuhan negatif sebasar (- 3,00%) sedangan Jumlah pengeluaraan pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diproyeksi akan naik 0 % pertahun.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang. Berikut proyeksi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung :

Tabel 3.19

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

No	Uraian	Pertum-buhan (%)	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Pendapatan**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15,25%	108.938.596.000	125.551.731.890	144.698.371.003,	166.764.872.581	192.196.515.650
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4,90%	15.847.912.000	16.624.459.688	17.439.058.213	18.293.572.065	19.189.957.096
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,50%	4.500.000.000	4.972.500.000	5.494.612.500	6.071.546.813	6.709.059.228
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	20,00%	72.448.347.500	86.938.017.000	104.325.620.400	125.190.744.480	150.228.893.376
	Jumlah PAD	16.24%	**201.734.855.500**	**234.086.708.578**	**271.957.662.116**	**316.320.735.939**	**368.324.425.350**
1.2	**Dana Perimbangan**						
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.14%	42.702.584.000	43.189.393.458	43.681.752.543	44.179.742.522	44.683.373.382
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.50%	512.608.591.000	525.423.805.775	538.559.400.919	552.023.385.942	565.823.970.591
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	11.79%	175.696.520.950	270.302.297.579	271.653.809.067	273.012.078.112	274.377.138.503
	Jumlah Dana Perimbangan	1.32%	**731.007.695.950**	**838.915.496.812**	**853.894.962.529**	**869.215.188.577**	**884.884.482.475**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**						
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.32%	61.685.200.000	61.993.626.000	62.500.000.000		
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.75%	44.243.000.000	46.344.524.500	48.545.908.269	50.851.838.912	53.267.301.260
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	13,51%	39.265.860.000	61.519.868.000	61.600.000.000	62.372.000.000	65.178.740.000
1.3.6	Pendapatan Lainnya	4,00%	48.647.868.000	50.837.022.060	52.124.688.053	54.470.299.015	56.921.462.471
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	6,17%	**193.841.928.000**	**220.695.058.560**	**228.913.944.658**	**237.438.909.601**	**246.281.352.047**
	Total Pendapatan	7,41%	**1.126.584.479.450**	**1.293.697.263.950**	**1.354.766.569.303**	**1.422.974.834.117**	**1.499.490.259.872**
2	**Belanja**						
2.1	**Belanja Tidak Langsung**						
2.1.1	Belanja Pegawai	2.59%	380.946.026.038	390.469.676.689	404.993.160.524	413.242.818.550	421.904.959.477
2.1.3	Belanja Subsidi	3.99%	1.183.288.005	1.195.120.885	1.254.876.929	1.317.620.776	1.383.501.815
2.1.4	Belanja Hibah	37.66%	12.912.130.986	13.702.353.402	14.387.471.072	15.106.844.626	46.375.210.381
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,00%	200.020.000	210.021.000	220.522.050	231.548.153	243.125.560
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	5.67%	113.238.787.377	127.541.755.674	130.918.843.548	134.464.785.630	141.188.024.912
2.1.8	Belanja Tak Terduga	0%	3.000.000.000,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	4.68%	**511.480.252.406**	**536.118.927.650**	**554.774.874.033**	**567.363.617.735**	**614.094.822.145**
2.2	**Belanja Langsung**						
2.2.1	Belanja Pegawai	8.44%	85.650.549.365	110.629.791.433,	111.999.668.195	114.423.655.089	118.423.655.089
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,06%	306.914.468.559	404.481.672.910	407.082.144.365	415.161.889.068	418.465.126.849
2.2.3	Belanja Modal	8,11%	321.189.560.120	420.233.886.947	426.248.755.731	435.085.581.582	438.787.293.214
	Jumlah Belanja Langsung	**8,13%**	**713.754.578.044**	**935.345.351.290**	**945.330.568.291**	**964.671.125.739**	**975.676.075.152**
	Jumlah Belanja	**6,73%**	**1.225.234.830.450**	**1.471.464.278.941**	**1.500.105.442.324**	**1.532.034.743.473**	**1.589.770.897.296**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Surplus /(Defisit)	**-2.19%**	**(98.650.351.000)**	**(177.767.014.991)**	**(145.338.873.021)**	**(109.059.909.356)**	**(90.280.637.424)**
3	**Pembiayaan**						
3.1	**Penerimaan Daerah**						
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)	-2.16%	99.900.351.000	179.017.014.991	146.588.873.021	110.309.909.357	91.530.637.424
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-2.16%	**99.900.351.000**	**179.017.014.991**	**146.588.873.021**	**110.309.909.357**	**91.530.637.424**
3.2	**Pengeluaran Daerah**						
3.1.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0%	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
3.1.3	Pembayaran Pokok Utang		-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0%**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**	**1.250.000.000**
	Pembiayaan Neto	**-2.19%**	**98.650.351.000,00**	**177.767.014.991**	**145.338.873.021**	**109.059.909.357**	**90.280.637.424**
	Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (Silpa)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, kemudian menentukan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.Dari total pendapatan dan penerimaan yang dikurangi total belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menentukan proyeksi kapasitas kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung sebagaimana tabel 3.15. Berdasarkan proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Belitung menunjukkan angka yang semakin meningkat menandakan adanya upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan daerah. Adapun ringkasan alokasi kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan prioritas dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 3.20

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	**1.126.584.479.450**	**1.293.679.263.950**	**1.354.766.569.303**	**1.422.974.834.117**	**1.499.490.259**
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)	99.900.351.000	179.017.014.991	146.588.873.021	110.309.909.357	91.530.637.424
	Total Penerimaan	1.226.484.830.450	1.472.714.278.941	1.501.355.442.324	1.533.284.743.473	1.591.020.897.296
	Dikurangi					
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	380.946.026.038	390.469.676.689	404.993.160.524	413.242.818.550	421.904.959.477
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH					
3	Belanja Bunga					
4	Belanja bagi hasil					
B	Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000,00	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Pembayaran pokok utang					
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	380.946.026.038	390.469.676.689	404.993.160.524	413.242.818.550	421.904.959.477
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**845.538.804.412**	**1.082.244.602.251**	**1.096.362.281.800**	**1.120.041.924.924**	**1.169.115.937.819**

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).Kesehatan 10% Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah,belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel 3.21

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Tahun 2019-2023

Uraian	Alokasi Anggaran (Rupiah)		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Prioritas I	490.412.506.559	627.701.869.306	635.890.123.444
Prioritas II	224.593.203.862	308.893.481.984	310.690.444.847

(1)	(2)	(3)	(4)
Prioritas III	130.533.093.991	145.649.250.961	149.781.713.509
Jumlah	**845.538.804.412**	**1.068.814.179.572**	**1.096.362.281.800**

Tabel lanjutan …

Uraian	**Alokasi Anggaran (Rupiah)**		**Keterangan**
	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(5)
Prioritas I	649.624.316.456	678.087.243.935	
Prioritas II	316.296.809.283	298.838.831.217	
Prioritas III	154.120.799.185	192.189.862.667	
Jumlah	**1.120.041.924.923**	**1.169.115.937.819**	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Permasalahan pembangunan daerah yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pada periode sebelumnya, dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, dengan melihat *trend*, perbandingan antar waktu, atau menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan objek tertentu perbandingan dengan standar yang berlaku dan perbandingan antar daerah/wilayah/kawasan lainnya. Selain itu juga dengan memperhatikan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, yang mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), serta memperhatikan Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2020-2024 dan Standar Pelayanan Minimal.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Belitung dapat dijabarkan dalam 4 (empat) pokok masalah utama yaitu :

- Kualitas Sumber daya manusia
- Tata kelola pemerintahan
- Daya saing potensi ekonomi
- Lingkungan

Identifikasi Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan dari data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Belitung didapat dari gambaran umum pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilihat dari berbagai aspek – aspek pembangunan.

1. Permasalahan Kualitas Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah dengan kualitas yang baik agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan pembangunan daerah disektor-sektor lainya dan hal tersebut secara positif akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari beberapa variabel yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Belitung pada tahun 2017 sebesar 70,93 melebihi capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 69,99 dan IPM Nasional sebesar 70,81, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaian IPM Kabupaten Belitung tahun 2017 berada dibawah capaian IPM Kota Pangkalpinang sebesar 76,86 dan IPM Kabupaten Bangka sebesar 71,09.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Dimensi Kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang bermakna bahwa Harapan Lama Sekolah adalah Lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang (dalam tahun), sedangkan Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dimensi Ekonomi diukur dengan standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 jika dilihat dari tiga dimensi dasar yaitu (1) Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 70,44; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 14,70 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,11 tahun; dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp. 12.910.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus sepuluh rupiah) per tahun.

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung oleh Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh 1) Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat, 2) Rendahnya Derajat Kesehatan, dan 3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat. Kualitas sumber daya manusia Dari ketiga dimensi tersebut kualitas manusia saling berpengaruh saling berkaitan erat Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi penentu kualitas Sumber daya manusia, tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi kualitas SDM adalah masih rendahnya derajat kesehatan, peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya, sedangkan rendahnya pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Belitung walaupun tidak secara sigifikan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia :

1. **Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat**

   Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, belum terpenuhinya pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan Kesehatan, masih kurangnya kualitas layanan rumah sakit, belum optimalnya kualitas tenaga medis dan non medis.

2. **Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat**

   Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikaan dan pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang PHBS dapat membentuk keyakinan seseorang untuk tidak menerapkan berperilaku PHBS sesuai dengan keyakinan yang dipahaminya. Pendidikan formal yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi kemampuan untuk mencerna informasi-informasi yang diterima sekaligus mempertimbangkan apakah informasi tersebut bisa dijadikan dasar bagi perilaku mereka selanjutnya. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunkan jamban yang sehat. Dari 49 desa/kelurahan di Kabupaten Belitung baru terdapat 11 desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa ODF (*Open Defecation Free*) dan belum ada satupun desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Pada tahun 2017 penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Belitung. ISPA dan Diare adalah penyakit berbasis lingkungan yang selalu berada di diurutan teratas 10 penyakit yang paling umum di semua pusat pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Belitung, selain itu, kejadian demam berdarah terus meningkat pada tahun 2017 terjadi 22,5 kasus DBD per 100.000 penduduk. Berbagai penyakit menular yang terjadi pada masyarakat ini dapat dicegah dengan pelaksanaan berbagai indikator yang terdapat dalam Program PHBS pada tatanan rumah tangga. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta rendahnya praktik hidup bersih dan sehat telah berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi *stunting* di Kabupaten Belitung. Perilaku hidup bersih dan sehat juga berpengaruh terhadap kejadian penyakit tidak menular. Pada tahun 2017 penyakit hipertensi dan diabetes melitus berada di urutan 10 penyakit terbanyak berdasarkan kunjungan di Puskesmas Kabupaten Belitung. Penyakit tidak menular disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan indikator PHBS pada tatanan rumah tangga, yaitu makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Upaya PHBS jika tidak dilakukan oleh masing-masing keluarga dan anggota keluarganya akan menjadi faktor risiko untuk timbulnya penyakit, baik infeksi atau penyakit tidak menular.

3. **Kurangnya akses pendidikan**

   Akses pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Belitung. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduudk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung.

4. **Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja**

   Belum seimbangnya antara ketersediaan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja disebabkan oleh tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja serta masih rendahnya kemampuan atau keterampilan tenaga kerja.

5. **Beban pengeluaran masyarakat miskin tinggi**

   Kemiskinan terjadi tidak hanya kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh belum terpenuhinya hak-hak yang diperlukan bagi seseorang atau kelompok. Tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah proporsi penerima jaminan kesehatan yang belum merata dan sesuai peruntukan yang berpengaruh terhadap sulitnya masyarakat miskin mengakses pelayanan kesehatan yang layak, belum optimalnya pelayanan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), upaya perlindungan sosial yang belum tepat sasaran, serta kuantitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum optimal.

6. **Pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan masih kurang**

   Kurangnya Peran pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan dipengaruhi oleh peranan kelembagaan di desa yang belum optimal, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender yang belum optimal, serta masih rendahnya pastisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

2. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3)

Azas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas dan 7) Asas Akuntabilitas.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan, tercermin melalui Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belitung masih berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan Nilai Laporan Akuntabilitas dengan kategori "C".

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan :

1. **Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal**
   Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset dikarenakan pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaanya. Pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal, dan belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
2. **Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah**
   Belum selarasnya perencanaan pembangunan dikarenakan sistem perencanaan berbasis elektornik yang belum diterapkan, dan belum terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran.
3. **Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah**
   Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal, belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.
4. **Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah**
   Rendahnya kualitas dan profesional aparatur disebabkan karena integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya

pengelolaan sistem manajemen aparatur, dan sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

5. **Belum optimalnya Pelayanan publik**

   Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Belitung disebabkan oleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal, keterbukaan informasi publik yang masih kurang, pelayanan publik yang masih kurang, pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang.

3. Permasalahan daya saing potensi ekonomi

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya.

Angka inflasi bulanan di Kabupaten Belitung yang tergolong inflasi ringan atau dibawah 10% pertahun, walaupun belum menggangu perekonomian daerah namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap. Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena ada keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang

berpenghasilan tetap. Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun.

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian menjadi perhatian utama dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global.

Masalah Pokok pembangunan pereknomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1. **Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan**

   Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi dan pengendalian organisme penggangu tanaman, masih rendahnya kompetensi petani dan kelembagaan petani, belum terkelolanya air irigasi dengan baik, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan.

   Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap, masih tingginya tangkapan ikan diluar batas biologis yang aman, belum optimalnya produksi perinanan budidaya, belum optimalnya produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.

2. **Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro**

   Belum Optimalnya pengembangan koperasi dan mikro disebabkan oleh Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi yang masih rendah, masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM

sebagai pendukung kepariwisataan, dan belum optimalnya pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.

3. **Kurangnya daya saing pariwisata**

Kurangnya daya saing pariwisata Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh belum optimalnya amenitas, atraksi, promosi pariwisata, belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, SDM pariwisata yang masih kurang berkualitas, belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

4. **Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan**

Tata kelola penanaman modal dan prizinan yang belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, belum optimalnya perencanaan penanaman modal, belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, belum optimalnya pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya perencanaan kawasan industri.

4. Permasalahan Lingkungan

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, pembangunan tidak lepas dari penggunaaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Dampak negatif dari pembangunan adalah menurunya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran air, tanah dan udara. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah terjadinya pencemaran terhadap air dan kerusakan lingkungan hidup, rendahnya area pelayanan penanganan sampah, rendahnya pengelolaan sampah 3R, rendahnya pastisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, belum optimalnya rencana pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan 4 (empat) permasalahan utama sebagaimana telah dijabarkan di atas, pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai roda

penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi, drainase, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembanguan infrastruktur dapat menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dan memberikan *multiplier effect,* yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Selain itu, pertambahan penduduk serta adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Belitung.

Dengan Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Dukungan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah**

   Aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Belitung masih kurang, hal ini dipengaruhi oleh rencana tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan konektivitas infrastruktur kewilayahan.

2. **Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku**

   Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan air baku, dipengaruhi oleh legalitas dan pengelolaan sumber air baku yang belum optimal.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dianalisis berdasarkan kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah yang dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan dokumen perencanaan lainnya, hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan isu strategis dari perangkat daerah. Isu Strategis harus menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik sekala regional nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka waktu menengah mapun jangka panjang.

Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Perumusan isu strategis merupakan salah satu dasar dalam melakukan perumusan kebijakan pembangunan daerah . Isu strategis diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
7. Untuk segera dilaksnakan

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor pengaruh dari dinamika yang terjadi secara global. Kondisi global terakhir ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan

iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan mengancam terhadap keberlangsungan ketersediaan ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup, maka dunia internasional berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelastarian lingkungan hidup dengan program SDG's (*Sustainable Development Goals)*

SDGs adalah sebuah kesepakatan baru pengganti MDGs. Masa berlaku SDGs dimulai berlaku tahun 2015 – 2030 yang telah disepakati oleh 190 negara yang berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-segara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang dimana tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Program SDGs mempunyai keterkaitan dengan Agenda prioritas Nasional NAWACITA didalam hal membangun manusia dan upaya menurunkan ketimpangan, walaupun harus terdapat penyesuaian-penyesuaian. Beberapa agenda di dalam NAWACITA sesuai dengan SDGs yaitu :

1. Agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi.
2. Kesejahteraan dan pendidikan merupakan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan,kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu focus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses energi yang terjangkau, merupakan fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.

5. Perubahan iklim, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: **Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA).**

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 yang disarikan menjadi Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan Trisakti tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi".

Untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkanpengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup**;**

Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :

1. Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan;
2. Meningkatnya produksi sub sektor perikanan;
3. Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata;
4. Meningkatnya produksi sektor pertambangan;
5. Meningkatnya pembangunan berbasis industry;
6. Terwujudnya kemandirian energi.

Tujuan 2, Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran :

1. Meningkatnya belanja pemerintah Daerah;
2. Menurunnya angka Pengangguran;
3. Menurunnya angka kemiskinan;
4. Menurunnya angka Inflasi;
5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;

Tujuan 3, Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan sasaran :

1. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;
2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Tujuan 4, Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan sasaran :

1. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat

Tujuan 5, Meningkatkan derajat kesehatan dengan sasaran dengan sasaran :

1. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat

Tujuan 6, Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan sasaran :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;

Tujuan 7, Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan sasaran :

1. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi.

Tujuan 8, Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan sasaran :

1. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana

Tujuan 9, Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan sasaran :

1. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Bangka Belitung tahun 2012-2017 sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam, yang ditandai dengan, terjadinya *trend* perlambatan pertumbuhan ekonomi, masih adanya disparitas pembangunan antar daerah, belum berkembangnya kawasan strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, rendahnya daya saing daerah, pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum optimal, tingginya Inflasi, pengembangan pariwisata belum optimal, belum berkembangnya ekonomi kerakyatan dan tingkat ketahanan pangan masih rendah.
2. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang, tingginya tingkat kerusakan lingkungan darat maupun laut, dan belum mantapnya pemanfaatan ruang.
3. Ketersediaan prasarana dan sarana yang belum memadai, yang dipengaruhi oleh konektivitas inter dan intra wilayah belum optimal, pelayanan ketersediaan air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan masih rendah, penyediaan perumahan rakyat masih terbatas, dan rendahnya rasio elektrifikasi.

4. Kualitas SDM dan kependudukan belum mantap, yang dipengaruhi tingginya migrasi penduduk, masih lambannya laju pertumbuhan IPM, tingkat kemiskinan tertinggi berada di desa, masih adanya pengangguran, pengidap HIV/AIDS meningkat, keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih rendah, pembangunan belum responsif gender, dan pengelolaan kawasan transmigrasi belum optimal.
5. Kondisi pemerintahan dan politik yang belum mantap, yang dipengaruhi oleh pelayanan publik belum optimal, masih rendahnya kompetensi aparatur, kapasitas keuangan daerah masih rendah, belum maksimalnya peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan masih terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan.
6. Sosial budaya yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas, masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penanggulangan bencana, dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal.

4.2.4 Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Belitung

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, pemerintah juga wajib melaksanakan KLHS RPJMD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perumusan KLHS ini merupakan tahap awal dari proses penyusunan RPJMD, sehingga kedepannya dapat diperikirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila arah kebijakan dan program pembangunan daerah dilaksanakan. Hasil kajian di KLHS terebut bersifat strategik, sehingga mampu memberikan rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Implementasi dari KLH tersebut diharapkan mampu meminimalisasi permasalahan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung sebagaimana yang diamanatlan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hasil telaah terhadap dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dari total 319 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditapis menjadi 156 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung. Indikator tersebut kemudian dikategorisasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
   a. Kategori 1 (indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional) sebesar 45% atau 70 indikator.
   b. Kategori 2 (indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional) sebesar 29% atau 46 indikator.
   c. Kategori 3 (indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional) sebesar 7% atau 11 indikator.
   d. Kategori 4 (indikator belum memiliki data) sebesar 19% atay 29 indikator.
2. Dua puluh sembilan indikator yang belum memiliki data tersebut menjadi tanggung jawab OPD terkait, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Padahal, ketersediaan data merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap OPD, supaya pengambilan kebijakan pembangunan Kabupaten Belitung sesuai dengan kondisi yang relevan.
3. Isu strategis prioritas yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 46 (empat puluh enam) isu strategis, yang dirumuskan dan diperingkat dari *gap* terbesar hingga terkecil. Perhitungan *gap* tersebut diidentifikasi dari selisih capaian target nasional dan capaian indikator kabupaten, keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), serta keterkaitan dengan wajib pelayanan dasar.
4. Selain identifikasi capaian indikator terhadap target nasional, juga dilakukan identifikasi indikator terhadap pengaruh daya dukung dan dya tampung lingkungan hidup. Terdapat 86 indikator yang belum mencapai target nasional, terdiri atas 46 indikator sudah dilaksanakan, dan 29 indikator belum terdata. Delapan puluh enam indikator tersebut kemudian ditapis dengan pasal 3 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016 menghasilkan 14 indikator yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR, Dinas KUKMPTK, Dinas Pariwisata, Dinas PMPTSPP dan Dinas Lingkungan Hidup.

5. Perangkat Daerah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Indikator yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup tersebut antara lain:
   a. Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan beresiko tinggi.
   b. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
   c. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
   d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
   e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
   f. Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
   g. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
   h. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
   i. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
   j. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah inndustri.
   k. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
   l. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
   m. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
   n. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

4.2.5 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung (RTRW Belitung)

Penalaahan dokumen rencana pembangunan merupakan salah satu bentuk penyelarasan perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan yang perlu dilakukan antara lain adalah penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung.

RTRW Kabupaten Belitung sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, yang bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sector unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan dan pariwisata serta sector penunjang lainnya”.

Kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Belitung, antara lain :

a. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;
b. Pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah;
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
d. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
e. Pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
f. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

Strategi untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh Kabupaten yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Memperlakukan sistem perdesaan sebagai rangkaian dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten;

b. Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta produksi pesisir dan kelautan lainnya, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;

c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi non-pertanianperdesaan (rural non-farm sector), yang bersifat padat karya;

d. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di pedesaan untuk pemerataan pemerataan pertumbuhan wilayah; dan

e. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi untuk pengembangan system pusat wilayah yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Mengembangkan pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan;

b. Menghubungkan antar pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan

c. Menumbuhkan dan mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Mengembangkan kualitas dan keterpaduan jaringan pelayanan sistem prasarana transportasi;

b. Mengembangkan sistem energi baru dan terbarukan serta tak terbarukan secara optimal;

c. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas antar wilayah;

d. Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air; dan

e. Mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air minum, persampahan, drainase dan limbah.

Strategi untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung untuk memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

c. Mengembangkan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; dan

d. Membatasi kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.

Strategi pengoptimalan pemanfaatan kegiatan budidaya agar tidak terlampauai daya dukung dan daya tamping lingkungan yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;

b. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen)dari luas kawasan perkotaan; dan

c. Mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkankegiatan nonpertanian pada kawasan tanah nonproduktif.

Strategi untuk penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten yang menjadi kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

a. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten;

b. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan tersebut; dan

c. Merehabilitasi fungsi kawasan strategis yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis tersebut.

Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 yang telah disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangwa waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun, dengan pentahapan yang dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama 5 (lima) tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis. Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program :

a. perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan; dan

b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan budidaya, Indikasi program perwujudan kawasan strategis mencakup program pembangunan kawasan strategis.

4.2.6 Telaah terhadap RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, tepatnya pada fase ketiga yaitu Tahun 2015-2020. Visi RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 adalah "*Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat"* dengan Misi sebagai berikut :

a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah;
c. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

Pada fase ketiga RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, Fokus pembangunan yang menjadi perhatian adalah Ekonomi dan Pengembangan Kualitas SDM. Guna mendukung pembangunan ekonomi daerah, pada periode waktu ini perhatian daerah ditujukan kepada peningkatan nilai tambah terhadap potensi-potensi ekonomi daerah melalui pengembangan industri pengolahan dasar ke tingkatan yang lebih tinggi. Disamping itu kualitas pembangunan dan pengembangan daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Bertolak dari hal ini maka perhatian lebih diberikan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan penciptaan kepemerintahan yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dengan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi tentunya memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan dan pengembangan daerah.

Mengacu pada fokus fase ketiga RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 yang menekankan pada Ekonomi dan Pengembangan Kualitas

SDM, maka Visi RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Hasil telaahan sasaran pokok, indikator kinerja dan target kinerja RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 sampai dengan Tahun 2018 diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Hasil Telaahan Sasaran Pokok, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 sampai dengan Tahun 2018

No	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Fase Ketiga (2015-2020)	Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2018	Hasil Telaahan
1	Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (*persen*)	6,37	5,29	Realiasi pertumbuhan ekonomi masih dibawah target RPJPD. Untuk itu pada RPJMD diupayakan target yang dicapai tahun 2023 sebesar 5,90
			Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) (*juta rupiah*)	1.694.644	5.969.543	PDRB sudah melampaui target RPJPD
			Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) (*juta rupiah*)	8.087.782	8.738.187	PDRB sudah melampaui target RPJPD
			Rata-rata	6.071.141	9.356.136	PDRB sudah

			pendapatan per kapita (*rupiah*)		(pengeluaran per kapita)	melampaui target RPJPD
			Rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (*persen*)	12,78	20,06	PDRB sudah melampaui target RPJPD
		Meningkatnya Kepariwisataan daerah	Rata-rata peningkatan jumlah wisatawan (*orang*)	12.500	62.349	PDRB sudah melampaui target RPJPD
			Jumlah destinasi wisata (*unit*)	39		
		Meningkatnya pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rata-rata peningkatan jumlah produksi budidaya laut (*ton*)	20,85	6,8	Masih dibawah target RPJPD
			Rata-rata peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap (*ton*)	850	5.812	Sudah melampaui target RPJPD
		Meningkatnya pengembangan perhubungan laut	Persentase pembangunan dan penataan kawasan pelabuhan laut Tanjung Batu (*persen*)	90,00		
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas hidup	indeks pembangunan manusia (IPM)	81,40	70,93	Masih dibawah target RPJPD, mengingat ada penyesuaian angka IPM dari BPS
			Rata-rata angka partisipasi kasar (APK) (*persen*) - SD - SMP	 130,00 110,00	 119,44 102,95	APK sudah mendekati angka 100 dalam upaya pengaturan usia sekolah

			Rata-rata angka partisipasi murni (APM) (*persen*) - SD - SMP	 99,50 89,00	 108,85 81,83	APM sudah melampaui target
			Rata-rata angka kelulusan (*persen*) - SD - SMP	 100,00 90,00	 100 100	Angka kelulusan sudah melampaui target
			Rata-rata lama sekolah (*tahun*)	10,45	8,11	Belum mencapai target
			Rata-rata usia harapan hidup (*tahun*)	73,20	70,38	Belum mencapai target
3	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Persentase penanganan sampah Kabupaten Belitung (*persen*)	70,00	0,21	Penanganan sampah masih dibawah target

4.2.7 Kebijakan pembangunan daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota. Dalam hal ini identifikasi kebijakan yang ditinjau adalah RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021.

Kabupaten Belitung Timur merupakan Kabupaten pemekaran dari Belitung. Kabupaten Belitung Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung yang berada pada satu pulau yang sama yaitu pulau Belitong. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-202, maka dapat diketahui bahwa Visi Kabupaten

Belitung Timur adalah Belitung Timur yang Maju dan Unggul Berbasiskan Sumberdaya Lokal. Adapun misi yang disusun antara lain :

1. Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan.
2. Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan.
3. Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu dasar kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan suatu daerah adalah isu strategis. Beberapa isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Ketergantungan pada sektor primer masih besar;
2. Pertumbuhan ekonomi didorong konsumsi dan investasi;
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
5. Kualitas belanja pemerintah daerah kurang mendukung pertumbuhan;
6. Daya dukung lingkungan berkurang;
7. Belum optimalnya penerapan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menciptakan sinergisitas dan keharmonisan dalam pembangunan.

Memperhatikan Visi, Misi dan Isu strategis Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021, maka pada dasarnya terdapat kesamaan pandangan dan konsep perencanaan antara Belitung dan Belitung Timur yang ingin mengedepankan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian utama guna meningkatkan dan menunjang perkembangan sektor perekonomian daerah. Penanggulangan kemiskinan juga menjadi perhatian daerah guna mendukung kebijakan nasional untuk mengurangi angka kemiskinan.

Untuk mempercepat perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Belitung Timur, fokus prioritas pembangunan menjadi salah satu hal

yang diperhatikan dalam RPJMD. Dalam menjalankan sasaran lima tahunan, maka prioritas pembangunan yang dirumuskan adalah :

1. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
2. Pengembangan kawasan strategis pariwisata, industri dan pelabuhan;
3. Penguatan kapasitas aparatur, tata kelola pemerintahan, dan kerjasama daerah;
4. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan permukiman;
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah dibidang pertanian dan perikanan;
6. Pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
7. Peningkatan investasi daerah, penguatan kapasitas UKM dan koperasi;
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
9. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Memperhatikan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur, maka sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung baik darat maupun laut, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung mempunyai kesamaan pemahaman terhadap prioritas pengembangan wilayah. Hal ini terlihat dari pengembangan pariwisata strategis yang menjadi salah satu prioritas pembangunan lima tahunan Kabupaten Belitung Timur. Hal ini tentunya bersinergi dengan prioritas pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung yang menjadikan pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

4.2.7 Isu Strategis Daerah Kabupaten Belitung

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perbandingan dengan kabupaten sekitar, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Belitung, serta analisis kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, Isu strategis Kabupaten Belitung pada pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 sebagai berikut:

a. Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Transparan dan Bertanggung Jawab

Isu tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan bertangung jawab diangkat dari analisis masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hal ini disebabkan masih kurangnya cakupan pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan berbasis Teknologi Informasi, Masih lemahnya peran kelembagaan membangun jejaring lintas sektor baik secara horisontal dan vertikal, maupun dengan swasta dan masyarakat, Masih lemahnya peran kelembagaan dalam melakukan pengelolaan potensi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan, kurang terkelolanya basis data dan informasi pembangunan daerah secara berkualitas. Kurangnya komitmen pemerintah terhadap konsensus yang ada untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. hal ini disebabkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang masih rendah dan belum berkualitas, masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan regulasi sesuai dengan prioritas pembangunan yang disepakati. Manajemen sumber daya manusia yang tidak terkelola dengan baik sesuai dengan kapabilitasnya yang disebabkan rendahnya kualitas tata kelola aparatur untuk peningkatan kapabilitas dan karir, rendahnya kualitas tata kelola sumber daya manusia untuk pengembangan endogenous development, Masih kurangnya transfer pengetahuan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada.

Isu tata kelola pemerintah yang bersih efektif, transparan dan bertanggung jawab berangkat juga dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, demokratis, dan terpercaya dalam upaya meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua.

b. Infrastruktur dan konektifitas yang mendukung perekonomian

Isu Strategis Infrastruktur dan konektifitas yang mendukung perekonomian diangkat dari berbagai berbagai analisis yaitu kualitas fasilitas publik, infrastruktur dan konektifitas yang mendukung perekonomian dalam menghadapi restrukturisasi global.

Kualitas untilitas pelayanan publik yang belum mumpuni yang disebababkan kondisi belum meratanya utilitas pelayanan publik berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, TPS 3R dan utilitas lainnya dan belum terintegrasinya utilitas sanitasi lingkungan secara terpadu dan efisien, serta belum meratanya tingkat kondisi jalan dan jembatan yang berkualitas.

Kurangnya lahan-milik pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana pemerintah dan sarana publik merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam membangunan infrastruktur dan utilitas daerah. Masih sulitnya konektifitas antar wilayah/pulau yang disebabkan belum meratanya jaringan telekomonikasi/Internet , listrik yang berkualitas. Dan masih kurangnya prasarana transportasi antar wilayah baik itu darat, laut maupun udara.

Isu strategis infrastruktur dan konektifitas untuk mendukung perekonomian berangkat merupakan upaya pemerintah untuk membangunan Indonesia dari pinggiran guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakan sektor-sektor ekonomi domestik. Isu infrastruktur dan konektifitas berangkat juga dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, dan menjamin seluruh penduduk untuk mendapat akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, tersedianya infrastruktur yang tangguh, dan upaya penyediaan permukiman kota dan permukiman manusia yang aman, tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastrutur dan konektifitas akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dimasyarakat.

c. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah

Isu Strategis Peningkatan Ekonomi kerakyatan merupakan perwujudan dari upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak. Peningkatan Ekonomi kerakyatan dengan menggerakan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dalam upaya peningkatan produktifitas masyarakat yang mempunyai daya saing dipasar internasional

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif

Isu Strategis Sumber daya Manusia yang kreatif, inovatif dan produktif diangkat dari analisis rendahnya kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif serta memiliki kearifan lokal baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Masih rendahnya produktivitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan daerah yang disebabkan masih rendahnya penguasaan keterampilan dan iptek oleh masyarakat dan pelaku pembangunan, tenaga kerja kurang berdaya saing/kompetitif sehingga menjadi tidak termanfaatkan (*under utilization*). Masih rendahnya kompetensi fungsional para pelaku pembangunan tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga ahli lainnya, kurangnya integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan urusan pelayanan publik. Masih rendahnya tingkat responsif masyarakat dalam menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan hal ini disebabkan belum terbukanya pola pikir masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang, masyarakat belum sepenuhnya terbuka dalam menerima hasil pembangunan daerah dan partisipasi aktif masyarakat dan kaum perempuan dalam pembangunan masih rendah.

Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia bidang pemerintahan dan pelayanan publik pendukung pembangunan daerah hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah aparatur sebagai pelaku pembangunan (bidang pariwisata, layanan publik dan tenaga ahli lainnya), masih rendahnya jumlah kelompok masyarakat sebagai penggerak sekaligus objek pendukung, masih terbatasnya jumlah kelompok masyarakat sebagai penggerak sekaligus objek pendukung pembangunan

Isu Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif juga berangkat dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat meningkatkan produktifitas rakyat untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat, menjamin pendidikan yang adil dan inklusif, meningkatkan kesempatan belajar, mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, menghapus segala bentuk kemiskinan dan mencapai kesejahtaeraan masyarakat, serta upaya untuk melakukan revolusi karakter bangsa.

e. Kabupaten Belitung sebagai kawasan strategis

Isu Kabupaten Belitung sebagai kawasan Strategis diangkat suatu peluang yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah. Tema Pembangunan wilayah sumatera yang ditetapkan didalam RPJMN yaitu Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan, merupakan suatu peluang yang harus diambil dalam upaya percepatan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Belitung.

f. Lingkungan hidup berkesinambungan

Isu strategis lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2023, yaitu :

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

a. **Ekonomi Berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
b. **Berdaya saing** bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulann dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
c. **Inovatif** mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kabupaten Belitung dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

Penetapan visi kabupaten di atas telah mempertimbangkan, memperhatikan dan mengacu kepada substansi yang terdapat didalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumberdaya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat”. Dari visi tersebut terdapat enam 6 (enam) nilai penting (*value of vision*) yang diharapkan dapat menjadi ruh atau jiwa dari visi yang akan disusun. Keenam nilai penting visi tersebut adalah mandiri, produktif, optimal, terpadu, berkelanjutan dan sejahtera.

Nilai visi “mandiri” berasal dari adanya harapan masyarakat agar sumber daya yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Belitung di masa mendatang, khususnya perikanan dan pariwisata yang ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Selanjutnya visi “produktif” terungkap dari hasil musrenbang RPJPD yang sangat berharap agar keberadaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Belitung dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Kemudian visi ”optimal” berasal dari adanya keinginan masyarakat agar sumber daya alam dan jasa lingkungan Kabupaten Belitung dapat memberikan keuntungan maksimal bagi mereka.

Untuk visi ”terpadu” berasal dari adanya keinginan masyarakat agar pembangunan daerah Kabupaten Belitung adalah menjadi tanggung jawab bersama dan dapat dilakukan secara bersama. Visi ”berkelanjutan” diartikan sebagai sebuah sifat yang menandakan bahwa sesuatu itu dapat dimanfaatkan pada masa kini dengan tidak mempengaruhi secara signifikan manfaat di masa mendatang. Terakhir, nilai visi ”sejahtera” mengandung makna bahwa masyarakat dapat hidup secara layak di wilayah Kabupaten Belitung.

Dari penjelasan visi RPJPD diatas terlihat ada keselarasan dengan visi RPJMD dimana ‘ekonomi berkeadilan’ dapat diartikan sebagai kemandirian masyarakat sehingga dapat memenuhi akses seluruh sumber daya dan menjadi produktif, optimal dan terpadu yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.

5.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

Misi Kesatu	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.
Misi Kedua	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.
Misi Ketiga	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penjelasan Misi:

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan

sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompettitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Disamping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 memiliki 3 (tiga) bangunan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Belitung, yaitu sebagai berikut :

a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah.
c. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan

Ketiga misi RPJPD diatas terlihat saling berkesinambungan dengan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana sudah dijabarkan

sebelumnya. Pada misi kesatu RPJMD yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dapat diartikan seperti dalam misi kedua RPJPD, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para *stakeholder* lainnya dalam pembangunan daerah. Demikian juga dengan misi kedua RPJMD yang mengedepankan pada pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Sementara itu, misi ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah sudah mencakup misi satu dan misi tiga dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah jelas mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

5.3 Tujuan

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sapai lima tahun. Berdasarkan visi dan misi serta analisis isu strategis ditetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

b. Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan

c. Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Kesatu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Tujuan Kedua	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

5.4 Sasaran

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Untuk pencapaian :

a. Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu : Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran Kedua	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.
Sasaran Keempat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

b. Tujuan Kesatu pada Misi Kedua : Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
Sasaran Kedua	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional.
Sasaran Ketiga	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

c. Tujuan Kesatu pada Misi Ketiga : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi,akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan.
Sasaran Kedua	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro.
Sasaran Ketiga	Meningkatnya pengembangan pariwisata.
Sasaran Keempat	Meningkatnya investasi.
Sasaran Kelima	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan.

d. Tujuan Kedua pada Misi Ketiga : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan.
Sasaran Kedua	Meningkatnya pengelolaan sampah.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran di atas digambarkan dalam Tabel 5.

TABEL 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BELITUNG

VISI : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	70,93	71,69	71,87	71,97	71,99	72,01	72,01
				Angka Kemiskinan	7,56	7,1	6,85	6,6	6,35	6,0	6,0
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,44	70,54	70,60	70,65	70,71	70,77	70,77
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,11	8,14	8,15	8,16	8,18	8,19	8,19
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	12.910	13.298	13.496	13.671	13.862	14.049	14.049
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Status Desa "Maju"	10	15	20	25	30	35	35
2.	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	BB	BB
			Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB
			Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesional ASN	62%	76%	77%	78%	79%	81%	81%
			Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	76,81	80	83	85	87	88	88

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,29	5,50	5,63	5,71	5,83	5,90	5,90
			Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	467.571	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
			Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	26,19%	27,21%	27,31%	27,41%	27,52%	27,62%	27,62%
			Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)	55.550.754	72.215.980	93.880.774	122.045.006	158.658.507	206.256.059	206.256.059
				Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)	973.000.000	1.118.950.000	1.286.792.500	1.479.811.375	1.701.783.081	1.957.050.000	1.957.050.000
			Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	981.694	1.225.191	1.780.878	2.519.187	3.507.975	5.023.529	5.023.529
			Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	35,18%	41,89%	46,25%	51,45%	58,39%	64,90%	64,90%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,18	60,78	62,73	64,19	65,28	66,10	66,10
			Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	57,34	60,13	62,22	63,79	64,97	65,85	65,85
				Indeks Kualitas Udara	89,40	90,80	91,85	92,64	93,23	93,67	93,67
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35,40	38,75	41,26	43,15	44,56	45,62	45,62

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	0,79%	3,10%	4,20%	4,50%	5,50%	6,50%	6,50%

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini akan dirumuskan mengenai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Visi dari Kabupaten Belitung adalah **Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023**. Berikut akan dijabarkan mengenai strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berupa rumusan perencanaan komprehensif berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan perangkat daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta target kinerja RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah, dipisah menjadi 2 (dua), yaitu 1) Perencanaan Strategis, merupakan perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; 2) Perencanaan Operasional, merupakan perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan secara lebih rinci pada tiap urusan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Dalam penentuan alternatif strategi untuk pencapaian setiap indikator sasaran dirumuskan dan diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal. Analisis yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT, dijabarkan dalam tabel berikut ini:

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
INTERNAL	1. Potensi wisata alam yang indah dan berkualitas 2. *Resources Endowments* (alam, budaya, masyarakat) 3. Akses perhubungan udara dan laut yang baik dan mudah (bandara dan pelabuhan berstatus internasional) 4. Letak geografis yang strategis 5. Kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan politik yang aman dan kondusif	1. Degradasi nilai budaya dan moral masyarakat 2. Kreatifitas dan partisipasi masyarakat masih rendah 3. Tingkat pendidikan dan disiplin masih rendah 4. Tata kelola aparatur dan kinerja masih belum optimal 5. Kurangnya fasilitas umum dan hiburan, juga untuk difabel, anak, wanita dan lansia 6. Kurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau 7. Kurangnya fasilitas pendukung pariwisata dan fasilitas keamanan wisatawan 8. Kurangnya atraksi wisata (kuliner, oleh-oleh dan atraksi lainnya) 9. Kurangnya sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan pulau 10. Masih lemahnya jaringan komunikasi untuk penyebaran data dan informasi publik 11. Layanan kesehatan belum berkualitas 12. Terbatasnya sumber air baku 13. Kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang tumpang tindih 14. Ketergantungan bahan pangan dari daerah luar 15. Maraknya penyakit sosial
	Opportunity (Peluang)	**Threat (Ancaman)**
EKSTERNAL	1. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat 2. Berkembangnya wisata MICE dan wisata halal 3. Belitung merupakan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KPPN, KI) 4. Bukan merupakan daerah rawan gempa dan gunung berapi 5. Banyaknya dana desa 6. Pangsa pasar dalam dan luar negeri (MEA), serta pemasaran online 7. Regulasi investasi yang mendukung	1. Meningkatnya permasalahan sosial (penyakit mental, sosial, narkoba, LGBT, kriminalitas, konflik, pengangguran) 2. Banyaknya migrasi penduduk 3. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor 4. Rusaknya kondisi alam, lingkungan dan ekositem (emisi gas rumah kaca, tambang, alih fungsi lahan) 5. Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam (abrasi, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, petir) 6. Maraknya perdagangan online dan *cyber crime* 7. Diberlakukannya perdagangan bebas

Gambar 6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan identifikasi dan analisis SWOT sebagaimana dijabarkan di atas, maka strategi yang dapat dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal wilayah Kabupaten Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi kepala daerah dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

VISI : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung 2023

Misi / Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan		
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
		2. Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat
		3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Meningkatkan akses pendidikan
	3. Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Perluasan kesempatan kerja
		6. Mengurangi beban pengeluaran
	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	7. Meningkatkan partisipasi masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan		
Tujuan 1 Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	5. Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		9. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		10. Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah
	6. Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	11. Meningkatkan kapabiliitas dan integritas aparatur
	7. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		
Tujuan 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	8. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
	9. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
		15. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya

Misi / Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
	10. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	16. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro
	11. Meningkatnya investasi	17. Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri
	12. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		19. Pemenuhan kebutuhan air baku
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20. Meningkatkan pengelolaan kuallits lingkungan hidup
	14. Meningkatnya pengelolaan sampah	21. Meningkatkan pengelolaan persampahan

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, rumusan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

STRATEGI 1 : Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat ini, yaitu dengan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang saling terintegrasi, sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati yaitu Program Sehati (Sistem Pelayanan Terintegrasi) dan Program Pelandok (Pencet Telepon dan Dokter Langsung Bergerak). Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat ternasuk didalamnya pelayanan kesehatan ibu diharapkan akan berdampak terhadap penurunan Angka Kematian Ibu salah satunya melalui Program AMBONG (Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Mengandung).

STRATEGI 2 : Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga, dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri serta berperan aktif mewujudkan kesehatan masyarakat. Pola

perilaku hidup bersih dan sehat ini diarahkan pada pengurangan kawasan kumuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman. Selain itu juga peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat berdampak pada penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk dan *stunting* sebagai pengimplementasian Program AMBONG (Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Mengandung). Strategi ini juga diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat daam berolahraga sehingga dapat tercapai peningkatan prestasi olahraga dengan semakin intensifnya pembinaan sesuai program kepala daerah SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga).

STRATEGI 3 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif dalam laju pertumbuhan penduduk, ketika laju pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali. Laju pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya penekanan jumlah penduduk. Adanya peningkatan kuantitas penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk. Pemerintah sebagai *policy maker* harus berupaya untuk membuat berbagai kebijakan yang diturunkan menjadi berbagai program Keluarga Berencana.

STRATEGI 4 : Meningkatkan akses pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam suatu Negara. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung suatu Negara untuk maju. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususunya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia. Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan menigkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah. Selain itu juga meningkatkan akreditasi sekiolah dan kualitas SDM pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada penguatan karakter dan akhlak. Dengan mutu

pendidikan pendidikan yang baik, diharapkan dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing.

STRATEGI 5 : Perluasan kesempatan kerja

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung. Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Belitung, karena mampu menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Perluasan kesempatan kerja diarahkan melalui peningkatan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata, serta pemberdayaan sosial masyarakat miskin.

STRATEGI 6 : Mengurangi beban pengeluaran

Kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Masih tingginya kemiskinan di Kabupaten merupakan fenomena yang harus segera diatasi supaya kesejahteraan masyarakat terwujud. Kemiskinan terjadi disebabkan karena masih rendahnya tingkat keterampilan msayarakat, sulitnya mendapatkan akses pelayanan publik yang layak serta masih tingginya pengeluaran masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pengeluaran beban masyarakat miskin ini diarahkan untuk memenuhi jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu. Hal ini mengakomodir salah satu dari 16 (enam belas) program inovatif kepala daerah, yaitu program SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga). Serta meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan untuk meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.

STRATEGI 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasi masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dan tidak bisa diabaikan dalam pembangunan daerah. Tingginya peran serta masyarakat dapat mewujudkan tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini diarahkan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, serta meningkatkan peran kelembagaan di desa untuk mengakomodir program kepala daerah, yaitu Program KEMINANGAN (Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan).

STRATEGI 8 : Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

STRATEGI 9 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud jika telah ada keselarasan dalam perencanaan pembangunan baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ini diarahkan pada mulai diterapkannya *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah serta mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam satu teknologi informasi.

STRATEGI 10 : Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

STRATEGI 11 : Meningkatkan kapabilitas dan integritas aparatur

Masih kurangnya integritas dan kompetensi profesional aparatur menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. SDM aparatur merupakan pelaku pelayanan publik. SDM aparatur yang kurang profesional dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur ini diarahkan pada optimalisasi kinerja pegawai berbasis teknologi, penataan manajemen sumber daya aparatur.

STRATEGI 12 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik. Sebagai upaya pengimplementasian Program BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah) meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Selain itu perlu meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan (Belitung Satu Data), meningkatkan pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen, serta menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik ini, juga perlu meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang saling terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi sebagai bentuk implementasi Program TERINDAK (Tanah Teregister, Integrasi dan Akuntabel). Selain itu juga adanya pembinaan terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

STRATEGI 13 : Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan

Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan Kabupaten Belitung. Keragaman budaya dan potensi wisata yang ada perlu didukung dengan pengelolaan dan fasilitas penunjang yang optimal. Ditetapkannya Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan bahkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan pariwisata supaya dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing pariwisata ini diarahkan pada pengembangan destinasi,

pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Potensi Geopark yang dimiliki Kabupaten Belitung juga perlu untuk lebih dioptimalkan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati, pengembangan pariwisata di Belitung juga diarahkan pada pengembangan Desa Wisata sesuai dengan pontensi desanya masing-masing (TUSENA). Selain itu juga dengan meningkatkan ekonomi kreatif guna mendukung pariwisata dan peningkatan kompetensi SDM pariwisata. Pengelolaan museum maritime juga perlu ditingkatkan.

STRATEGI 14 : Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan

Upaya meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan perlu mendapat perhatian dari pemerintah diarahkan pada usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, adanya perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu perlu adanya penguatan kelembagaan pertanian dalam hal produksi, distribusi dan pemasaran. Mutu produksi pertanian juga harus diperhatikan, serta perlu adanya pengelolaan pasca panen sebagi bentuk implementasi Program GANGAN (Garansi Hasil Panen Komoditi Gabungan). Strategi ini juga diarahkan pada pengembangan produksi pertanian di kawasan prioritas nasional Selat Nasik. Selain itu strategi ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan pertanian sehingga mampu memberi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

STRATEGI 15 : Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, berdampak pada belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ini diarahkan pada pembibitan budidaya laut selain produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Serta juga memperhatikan pengembangan usaha dan daya saing produk hasil perikanan dan produksi perikanan di kawasan prioritas nasional Selat Nasik.

STRATEGI 16 : Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro

Koperasi dan usaha mikro telah terbukti sebagai dasar ekonomi yang kuat ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi. Melihat beberapa permasalahan di Kabupaten Belitung mengenai belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha mikro, maka

strategi ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta pada usaha mikro. Selain itu upaya untuk menumbuhkembangkan produktivitas Indutri Kecil Menengah (IKM) dan sentra-sentra industri kecil yang mendukung kepariwisataan. Sehingga koperasi-koperasi yang telah ada tersebut menjadi mandiri.

STRATEGI 17 : Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri

Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan berdampak pada belum optimalnya nilai investasi di Kabupaten Belitung. Tata kelola perdagangan, industri dan pasar yang belum optimal juga berdampak pada pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan industri. Strategi peningkatan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri ini diarahkan pada menyiapkan potensi, promosi, kerjasama dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan program kepala daerah, yaitu Program ILAK (Insentif Langsung untuk Kemajuan) dan Program KETARAP (Keterpaduan Antar Rakyat Antar Pengusaha). Selain itu meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi dan informasi. Serta pengembangan kawasan industri sesuai penetapannya, sehingga dapat menjadi peluang usaha baru yang cukup menguntungkan. Pelaksanaan investasi daerah itu juga perlu ditingkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauannya.

STRATEGI 18 : Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah

Kabupaten Belitung merupakan kabupaten kepulauan, masih kurangnya kualitas sarana prasarana konektivitas antar pulau dan antar wilayah yang memadai masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian pemerintah. Strategi ini diarahkan pada peningkatan konektivitas pulau, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata dan infrastruktur marina, penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan, pengelolaan jalan baik hibah jalan daerah, jalan non status maupun standar jalan. Selain itu percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang dan pemenuhan penerangan jalan umum sesuai program Bupati dan Wakil Bupati , yaitu program BETARE (Belitung Terang Benderang). Pembangunan infrastruktur tersebut tetap harus memperhatikan aturan tata ruang ruang. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana prasarana bangunan layanan publik, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik lainnya, terutama yang mendukung

pengembangan pariwisata, antara lain sarana transportasi publi yang terintegrasi dan terjamin keselamatannya.

STRATEGI 19 : Pemenuhan kebutuhan air baku

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berimplikasi pada penggunaan air yang juga semaki tinggi. Selain kuantitas, kebutuhan akan kualitas air juga ikut meningkat. Oleh karena itu perlu menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas. Pemenuhan kebutuhan air baku ini diarahkan pada peningkatan legalitas dan pengelolaan sumber air baku sebagai implementasi dari Program PUKAT (Program Air Bersih untuk Masyarakat).

STRATEGI 20 : Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu strategis tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia. Di Kabupaten Belitung khususnya, pengelolaan lingkungan hidup menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Terlebih lagi Kabupaten Belitung merupakan destinasi pariwisata. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup ini diarahkan pada tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

STRATEGI 22 : Meningkatkan pengelolaan persampahan

Meningkatnya volume timbulan sampah, terutama di daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan perumusan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberi arahan kepada pemerintah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan tersebut kemudian disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahunnya untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Sehingga akan lebih jelas dalam menuangkan

RPJMD ke dalam RKPD dengan penekanan pada fokus atau tema setiap tahunnya. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Belitung berdasarkan pentahapan setiap tahun dapat dilihat pada gambar di bawah berikut.



Gambar 6.2
Tema Pembangunan Kabupaten Belitung 2019 – 2023

Supaya lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya. Arah kebijakan dari masing-masing strategi yang telah dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

VISI : MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
T.1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu
		1.2 Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat	1. Meningkatkan Desa *Open Defecation Free (ODF)* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) 2. Pengurangan kawasan kumuh 3. Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi 5. Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular 6. Penurunan kasus gizi buruk dan *stunting* 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga 8. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga
		1.3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Menurunkan jumlah perkawinan usia muda 2. Meningkatkan program Keluarga Berencana (KB)
	S2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2.1 Meningkatkan akses pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah 2. Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP) 3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal 4. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan 6. Meningkatkan pemerataan sebaran guru
	S3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1 Perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatkan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin
		3.2 Mengurangi beban pengeluaran	1. Pemenuhan jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin 2. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi 3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS 4. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial
	S4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	4.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender 2. Meningkatkan peran kelembagaan di desa
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
T1. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	S1. Terciptanya birokrasi yang bersih, akutabel dan transparan	1.1 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi 2. Meningkatkan tata kelola asset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi 3. Menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah
		1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Menerapkan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.3 Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatkan pembinaan, peringatan dini dan maajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	S2.Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur	1. Meningkatkan kinerja pegawai berbasis teknologi 2. Penataan manajemen sumber daya aparatur
	S3. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan publik 5. Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa 6. Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 7. Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik 8. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat 9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan 10. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 11. Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			12. Meningkatkan pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen 13. Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting
Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
T1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	S1. Meningkatnya pengembangan pariwisata	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata 2. Meningkatkan pengelolaan Geopark Belitung dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat 3. Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desa 4. Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata 5. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata 6. Pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya 7. Meningkatkan pengelolaan museum maritim
	S2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	2.1 Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian 2. Mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik 3. Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi 4. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 5. Penguatan kelembagaan pertanian
		2.2 Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan 3. Pengembangan pembibitan budidaya laut

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik
	S3. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri 2. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro
	S4. Meningkatnya investasi	Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri	1. Meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif 2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi 3. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah 4. Penataan peruntukan kawasan industri 5. Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan 6. Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan
	S5. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	5.1 Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah	1. Meningkatkan konektivitas antar pulau 2. Mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata 3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur marina 4. Meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan 5. Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHD) 6. Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang 7. Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			8. Meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional 9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya 10. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang 11. Meningkatkan keselamatan transportasi 12. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi
		5.2 Pemenuhan kebutuhan air baku	1. Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber air baku
T2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	S1. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	S2. Meningkatnya pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3. Meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan 4. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan 5. Meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R 6. Mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat

Setiap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu, sehingga pencapaian arah kebijakan secara logis dapat ditentukan. Serta dapat ditentukan juga kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Tahapan pelaksanaan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3

Pentahapan Pelaksanaan Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sistem pelayanan terintegrasi					
	2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu					
Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat	1. Meningkatkan Desa *Open Defecation Free (ODF)* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS)					
	2. Pengurangan kawasan kumuh					
	3. Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman					
	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi					
	5. Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular					
	6. Penurunan kasus gizi buruk dan *stunting*					
	7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga					
	8. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga					
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Menurunkan jumlah perkawinan usia muda					
	2. Meningkatkan program Keluarga Berencana (KB)					
Meningkatkan akses pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	2. Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP)					
	3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal					
	4. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak					
	5. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan					
	6. Meningkatkan pemerataan sebaran guru					
Perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata					
	2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin					
Mengurangi beban pengeluaran	1. Pemenuhan jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin					
	2.Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi					
	3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS					
	4. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial					
Meningkatkan partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender					
	2. Meningkatkan peran kelembagaan di desa					
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi					
	2. Meningkatkan tata kelola aset dan					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi					
	3. Menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah					
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Menerapkan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah					
	2. Mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi					
Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatkan pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)					
	3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah					
Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur	1. Meningkatkan kinerja pegawai berbasis teknologi					
	2. Penataan manajemen sumber daya aparatur					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik					
	2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik					
	3. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
	4. Meningkatkan pelayanan publik					
	5. Meningkatkan pembinaan					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	perencanaan dan pengelolaan keuangan desa					
	6. Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi					
	7. Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik					
	8. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat					
	9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan					
	10. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan					
	11. Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan					
	12. Meningkatkan pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen					
	13. Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting					
Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata					
	2. Meningkatkan pengelolaan Geopark Belitung dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	3. Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desa					
	4. Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata					
	5. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata					
	6. Pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya					
	7. Meningkatkan pengelolaan museum maritim					
Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian					
	2. Mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik					
	3. Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi					
	4. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan					
	5. Penguatan kelembagaan pertanian					
Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya					
	2. Peningkatan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan					
	3. Pengembangan pembibitan budidaya laut					
	4. Mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik					
Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi					

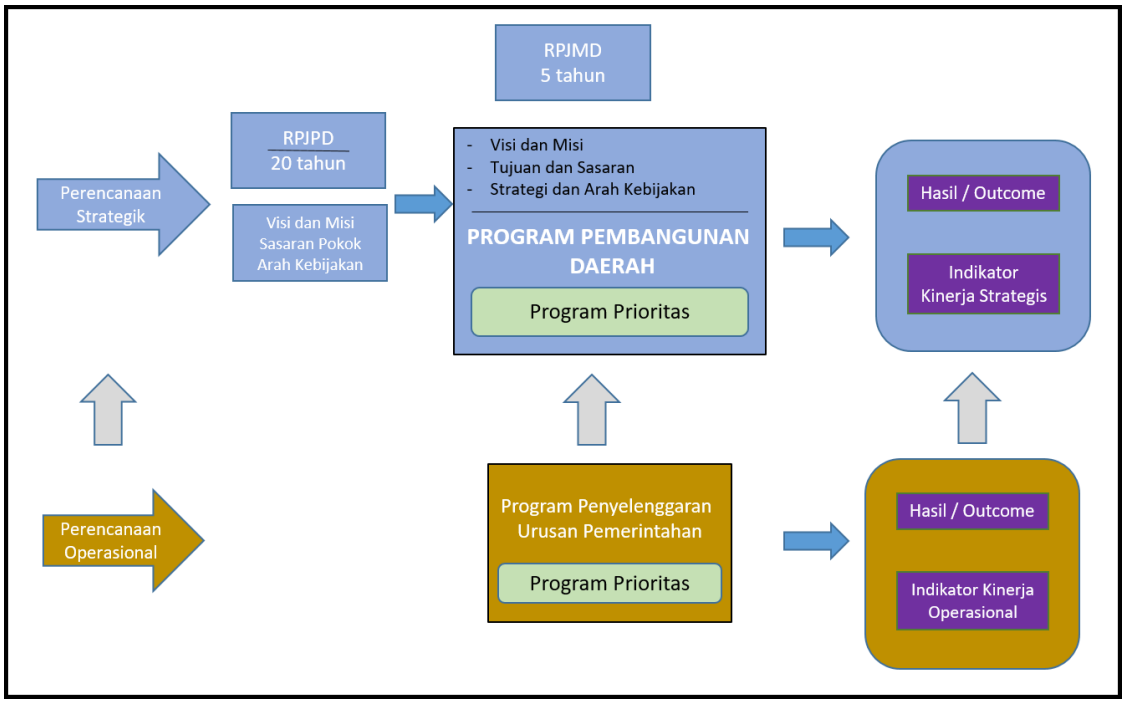
Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	menuju koperasi mandiri					
	2. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro					
Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri	1. Meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif					
	2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi dan informasi					
	3. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah					
	4. Penataan peruntukan kawasan industri					
	5. Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan					
	6. Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan					
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah	1. Meningkatkan konektivitas antar pulau					
	2. Mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata					
	3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur marina					
	4. Meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan					
	5. Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	6. Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang					
	7. Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten					
	8. Meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional					
	9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya					
	10. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang					
	11. Meningkatkan keselamatan transportasi					
	12. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi					
Pemenuhan kebutuhan air baku	1. Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber air baku					
Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					
Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara					
	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan					
	3. Meningkatkan perencanaan pengeloaan persampahan					
	4. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan					

Strategi	Arah Kebijakan	Tema 2019	Tema 2020	Tema 2021	Tema 2022	Tema 2023
	5. Meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R					
	6. Mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat					

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dengan pendekatan *holistik-tematik, integratif* dan *spasial,* merupakan program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dan erat kaitannya dengan visi dan misi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang dielaborasi dalam visi, misi dan 16 (enam belas) program inovatif kepala daerah. Program prioritas pembangunan daerah mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:



Gambar 6.3 Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam implementasinya program pembangunan daerah ini dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Belitung

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	**Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan**															
T1	**Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**70,93**	**71,69**		**71,87**		**71,97**		**71,99**		**72,01**		**72,01**		
		Angka Kemiskinan	**7,56**	**7,1**		**6,85**		**6,6**		**6,35**		**6,0**		**6,0**		
S1	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Angka Harapan Hidup**	**70,44**	**70,54**		**70,60**		**70,65**		**70,71**		**70,77**		**70,77**		
P1	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terintegrasinya layanan kesehatan	belum tersedia	20%	483.900	40%	716.105	60%	823.521	80%	848.226	100%	856.709	100%	3.728.461	Dinas Kesehatan
P2	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi Madya	33,33%	33,33%	28.376.661	66,67%	75.627.015	100%	64.439.367	100%	66.372.548	100%	66.820.500	100%	301.636.090	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	98%	100%	21.893.859	100%	25.560.900	100%	29.395.035	100%	30.276.886	100%	30.579.655	100%	137.706.335	Dinas Kesehatan
P3	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Terakreditasi paripurna	27%			100%	122.384.491	100%	140.742.165	100%	143.557.008	100%	144.274.793	100%	550.958.457	Dinas Kesehatan
P4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	76,08%			78%	13.698.890	79%	13.497.029	80%	13.901.940	81%	14.040.959	81%	55.138.818	Dinas PUPR
P5	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase jalan lingkungan yang tertangani	belum tersedia			29,85%	15.181.660	44,78%	16.011.225	59,70%	15.491.562	74,63%	15.569.020	74,63%	62.253.467	Dinas PUPR
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	60,14%			61,30%	1.664.900	61,87%	1.748.145	62,45%	1.775.569	63,02%	1.780.325	63,02%	6.968.939	Dinas PUPR
		Persentase pengolahan air limbah permukiman	52,80%			54%	1.237.500	55%	1.361.250	56%	1.402.088	57%	1.411.250	57%	5.412.088	Dinas PUPR
P6	Program Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Persentase Luasan kawasan kumuh	51,28%			15,39%	3.510.000	7,95%	4.250.000	4,44%	4.377.500	0	4.421.275	0	16.558.775	Dinas PUPR
P7	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA	22%	18%	107.238	36%	45.498	55%	50.000	73%	52.500	91%	53.025	91%	308.260	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase (%)Tingkat Keamanan Pangan	100%	100%		100%	29.770	100%	35.000	100%	36.700	100%	37.067	100%	138.537	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P8	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penanganan Penyakit Menular	100%			100%	2.373.840	100%	1.355.977	100%	1.396.657	100%	1.410.623	100%	6.537.098	Dinas Kesehatan
		Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%			100%	764.063	100%	799.684	100%	823.674	100%	831.911	100%	3.219.333	Dinas Kesehatan
P9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,72%			100%	493.044	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%	4.493.462	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,87%			100%	455.000	100%	460.000	100%	473.800	100%	478.538	100%	1.867.338	Dinas Kesehatan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,18%			100%	305.000	100%	350.750	100%	361.273	100%	364.885	100%	1.381.908	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Balita	75,76%	100%	3.188.324	100%	230.000	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%	1.042.094	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%			100%	245.000	100%	281.750	100%	290.203	100%	293.105	100%	1.110.057	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75,29%			100%	150.000	100%	172.500	100%	177.675	100%	179.452	100%	679.627	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Siaga Aktif	62,15%			100%	834.883	100%	920.740	100%	948.363	100%	957.846	100%	3.661.832	Dinas Kesehatan
P10	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,99%			8,19%	1.606.980	7,79%	1.750.980	6,99%	1.803.509	6,50%	1.821.544	6,50%	6.983.014	DPPKBPMD
		Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	22%			21,20%	1.558.890	20,80%	1.770.900	20,40%	1.824.027	20%	1.842.267	20%	6.996.084	DPPKBPMD
		Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	20%			19%	227.205	18,50%	325.000	18%	334.750	17,50%	338.098	17,50%	1.225.053	DPPKBPMD
S2	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**	**Rata-rata Lama Sekolah**	**8,11**	**8,14**		**8,15**		**8,16**		**8,18**		**8,19**		**8,19**		
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	61,43%	62,93%	4.585.585	64,43%	8.622.778	65,93%	9.310.755	67,43%	9.590.078	68,93%	9.685.979	68,93%	41.795.174	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	119,17%	100%	93.132.775	100%	8.255.619	100%	8.255.619	100%	8.503.288	100%	8.562.300	100%	126.709.601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96,64%	97,64%		97,44%	28.538.467	97,84%	28.822.625	98,24%	29.687.304	98,64%	29.781.225	98,64%	116.829.620	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,10%	100%		100%	15.522.932	100%	15.522.932	100%	15.988.619	100%	16.075.621	100%	63.110.103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	81,69%	82,09%		82,49%	11.202.509	82,89%	12.120.717	83,29%	12.484.339	83,69%	12.576.200	83,69%	48.383.765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P3	Program Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	16,67%	33,33%	4.222.480	50%	6.589.811	66,67%	7.118.988	83,33%	7.332.557	100%	7.356.892	100%	32.620.728	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi	60,63%	65,03%	6.336.470	70,03%	812.850	75,03%	1.094.135	80,03%	1.126.959	85,03%	1.138.229	85,03%	4.172.173	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pesentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	75,05%	78,05%		81,03%	120.400	84,05%	132.440	87,02%	136.413	89,03%	137.777	89,03%	527.031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	85%	88%	52.860	90%	275.000	93%	390.000	96%	401.700	97,50%	405.717	97,50%	1.525.277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
S3	**Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**	**Pengeluaran per kapita (dalam ribu)**	**12.910**	**13.298**		**13.496**		**13.671**		**13.862**		**14.049**		**14.049**		
P1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	30,30%			32%	82.248	35%	95.000	37%	100.200	40%	101.202	40%	378.650	Dinas KUKMPTK
		Persentase Peluang Kerja Mandiri/berwirausaha	15%			17%	429.226	20%	500.000	22%	520.000	25%	525.200	25%	1.974.426	Dinas KUKMPTK
P2	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	belum tersedia			100%	2.495.300	100%	3.495.300	100%	3.600.159	100%	3.636.161	100%	13.226.920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	95%	100%	750.580	100%	1.033.747	100%	764.866	100%	787.812	100%	795.690	100%	4.132.694	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	tidak terjadi bencana	100%		100%	836.466	100%	744.028	100%	766.348	100%	774.012	100%	3.120.854	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P4	Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	20%			40%	206.275	60%	157.500	80%	162.225	100%	163.847	100%	689.847	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	88,28%			87,38%	924.653	86,93%	980.132	86,48%	1.009.536	86,03%	1.019.631	86,03%	3.933.952	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif	75%			85%	1.565.678	90%	1.659.618	95%	1.759.195	100%	1.776.787	100%	6.761.278	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
P6	Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni	100%			100%	100000	100%	150.000	100%	154.500	100%	154.500	100%	559.000	Dinas PUPR

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
P7	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100%	712.802	100%	784.082	100%	807.605	100%	815.681	100%	3.120.170	BPBD
S4	**Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan**	**Status desa"Maju"**	**10**	**15**		**20**		**25**		**30**		**35**		**35**		
P1	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Belum Tersedia			Memuaskan	931.739	Memuaskan	459.600	Memuaskan	473.388	Memuaskan	478.122	Memuaskan	2.342.849	DPPKBPMD
		Persentase ketersediaan data dan informasi desa (Profil Desa) yang mutakhir	46,94%			71,43%	81.600	100%	81.600	100%	84.048	100%	84.888	100%	332.136	DPPKBPMD
		Persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	97,62%			100%	151.520	100%	151.520	100%	156.066	100%	157.626	100%	616.732	DPPKBPMD
P2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase kelembagaan desa aktif	98,93%	99,07%	930.620	99,20%	1.365.063	99,53%	1.517.463	99,87%	1.562.986	100%	1.578.616	100%	6.954.748	DPPKBPMD
		Persentase hasil TTG yang diterapkan di masyarakat	27,27%	28,57%		29,73%	223.370	30,77%	223.370	32,50%	230.071	37,50%	232.372	37,50%	909.183	DPPKBPMD
		Persentase BUMDesa aktif tiap desa	69,05%	76,19%		83,33%	102.160	90,48%	102.160	97,62%	105.225	100%	106.277	100%	415.822	DPPKBPMD
II	**Misi II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**															
T2	**Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B**	**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		
S5	**Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**	**Opini BPK**	**WDP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	**CC**	**CC**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		
P1	Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan berlaku	100%	100%	1.465.567	100%	866.967	100%	918.985	100%	946.555	100%	964.728	100%	5.162.802	BPKAD
P2	Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait	100%	100%	237.410	100%	237.410	100%	251.655	100%	259.204	100%	263.980	100%	1.249.659	BPKAD

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
P3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	160.541	100%	177.245	100%	187.880	100%	193.516	100%	196.228	100%	915.410	BPKAD
P4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	92,31%	92,31%	1.397.395	92,31%	1.361.675	100%	1.443.376	100%	1.486.677	100%	1.511.729	100%	7.200.851	BPKAD
P5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,46%			16,22%	1.704.938	16,36%	1.772.550	16,49%	1.825.727	16,62%	1.860.425	16,62%	7.163.640	BPPRD
P6	Program Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99,65%			100%	170.000	100%	215.000	100%	221.450	100%	225.471	100%	831.921	BPPRD
P7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	78%	100%	789.940	100%	666.515	100%	730.167	100%	752.071	100%	774.634	100%	3.713.327	BAPPEDA
P8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan program perencanaan daerah	78%	100%	139.990	100%	165.800	100%	186.302	100%	191.891	100%	197.648	100%	881.630	BAPPEDA
P9	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan program perencanaan daerah	78%	100%	405.050	100%	414.700	100%	429.700	100%	442.591	100%	455.869	100%	2.147.910	BAPPEDA
P10	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan program perencanaan daerah	78%	100%	301.735	100%	262.225	100%	280.460	100%	288.874	100%	297.540	100%	1.430.834	BAPPEDA

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
P11	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kabupaten	20,28%	70%	1.408.437	75%	1.410.752	80%	1.551.827	90%	1.624.557	90%	1.640.803	90%	7.636.376	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB	10%			100%	109.705	100%	120.676	100%	126.721	100%	130.523	100%	487.625	Inspektorat
		Persentase pelanggaran pegawai	0%			0%	403.400	0%	443.740	0%	453.290	0%	466.889	0%	1.767.319	Inspektorat
P12	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat daerah yang menyusun pelaporan LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	57.200	100%	60.632	100%	62.451	100%	64.324	100%	244.607	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat daerah yang menyusun LPPD sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	52.610	100%	55.767	100%	57.440	100%	59.163	100%	224.979	Sekretariat Daerah
S6	**Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional**	**Indeks Profesionalitas ASN**	**62%**	**76%**		**77%**		**78%**		**79%**		**81%**		**81%**		
P1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	50%	59,82%	4.303.481	61,57%	1.256.600	63,32%	1.331.996	65,07%	1.371.956	66,82%	1.413.115	66,82%	9.677.147	BKPSDM
		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi manajerial	67,58%	69,18%		72%	3.374.663	75%	3.577.143	78%	3.684.457	80%	3.794.991	80%	14.431.254	BKPSDM
		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional	78,15%	80%		83%	2.209.865	85%	2.342.457	87%	2.412.731	90%	2.485.113	90%	9.450.165	BKPSDM
P2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penilaian prestasi Kerja ASN tepat Waktu	95%	100%	2.933.779	100%	12.350	100%	12.700	100%	13.081	100%	13.473	100%	2.985.383	BKPSDM
		Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapat layanan, perlndungan dan penghargaan	100%	100%		100%	1.382.594	100%	1.465.549	100%	1.509.516	100%	1.554.801	100%	5.912.459	BKPSDM
P3	Program Penataan Manajemen SDM Aparatur	Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	90,65%			100%	630.000	100%	65.500	100%	67.465	100%	69.489	100%	832.454	BKPSDM
		Persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya	100%			100%	1.037.480	100%	1.099.729	100%	1.132.721	100%	1.155.375	100%	4.425.305	BKPSDM
P4	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	225.000	100%	225.000	100%	228.000	100%	232.000	100%	910.000	Semua Perangkat Daerah

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
S7	**Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	76,81	80		83		85		87		88		88		
P1	Program Penataan Kelembagaan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya	100%	100%	22.800	100%	273.385	100%	277.450	100%	285.774	100%	288.631	100%	1.148.040	Sekretariat Daerah
P2	Program Layanan Pengadaan barang dan Jasa	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%			100%	3.199.510	100%	3.519.461	100%	3.617.890	100%	3.654.069	100%	13.990.930	Sekretariat Daerah
P3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	100%	479.730	100%	328.135	100%	332.140	100%	342.170	100%	345.592	100%	1.827.767	Sekretariat Daerah
P4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase (%) Pelayanan Administrasi Kependudukan	88%	80%	1.913.540										1.913.540	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%			81%	908.772	83%	957.873	84%	986.609	86%	996.475	86%	3.849.729	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase capaian pencatatan sipil	92%			94%	144.305	94%	170.680	95%	175.800	95%	177.558	95%	668.344	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase pemanfaatan data	100%			100%	365.445	100%	415.545	100%	428.011	100%	432.291	100%	1.641.293	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
P5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	25%	50%	1.297.175	65%	9.451.650	80%	9.864.242	90%	10.211.093	90%	10.231.700	90%	41.055.860	Dinas Komunikasi dan Informatika
P6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani	Belum tersedia			90%	54.000	90%	56.000	90%	57.680	90%	58.257	90%	225.937	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	40%	40%	296.520	60%	1.228.796	80%	1.235.796	90%	1.272.870	90%	1.285.599	90%	5.319.580	Dinas Komunikasi dan Informatika
P7	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik daerah	Belum tersedia			70%	344.940	80%	375.880	90%	387.156	90%	398.771	90%	1.506.747	Dinas Komunikasi dan Informatika
P8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	belum tersedia			100%	984.563	100%	1.083.019	100%	1.115.510	100%	1.126.664,98	100%	4.309.757	BPBD

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	belum tersedia			100%	398.135	100%	437.949	100%	451.087	100%	455.598	100%	1.742.768	BPBD
P9	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	421.500	100%	4.932.130	100%	5.425.343	100%	5.588.103	100%	5.643.984	100%	22.011.061	SATPOL PP (Tahun 2019), BPBD (Tahun 2020-2023)
P10	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase layanan keamanan dan ketertiban	100%			100%	3.181.001	100%	3.499.101	100%	3.604.074	100%	3.640.115	100%	13.924.291	Satpol PP
		Persentase Penegakan PERDA	100%			100%	782.116	100%	860.328	100%	886.137	100%	894.999	100%	3.423.580	Satpol PP
P11	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	79,84%			87,50%	542.173	90%	608.279	92,50%	626.527	95%	645.323	95%	2.422.302	Kecamatan
P12	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	62%	78%	247.238	88%	1.336.000	92%	1.985.000	96%	2.005.100	100%	2.025.151	100%	7.598.489	Dinas KUKMPTK
		Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya	100%	100%		100%	134.350	100%	145.000	100%	147.100	100%	148.571	100%	575.021	Dinas KUKMPTK
P13	Program Peningkatan Ketesediaan dan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan	5,59%	14,69%	141.009	35,66%	225.301	56,64%	330.000	77,62%	346.800	100%	350.268	100%	1.393.377	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92,56	93,00		94,00	106.587	95,00	144.000	96,00	150.800	97,00	152.308	97,00	553.695	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
III	**Misi III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**															
T3	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5,29**	**5,50**		**5,63**		**5,71**		**5,83**		**5,90**		**5,90**		
S8	**Meningkatnya pengembangan pariwisata**	**Jumlah kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)**	467.571	500.000		600.000		700.000		800.000		1.000.000		1.000.000		
P1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan kualitas daya tarik wisata	67%	73%	10.948.021	79%	14.902.519	86%	16.877.676	93%	17.384.006	100%	17.557.846	100%	77.670.069	Dinas Pariwisata
P2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%			100%	6.143.576	100%	7.152.174	100%	7.366.739	100%	7.440.406	100%	28.102.895	Dinas Pariwisata
P3	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata	Persentase peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	belum tersedia			80%	859.960	80%	945.956	80%	974.335	80%	984.078	80%	3.764.329	Dinas Pariwisata
P4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase komunitas pelaku ekonomi kreatif yang dibina	50%	50%	1.896.778	56,25%	2.231.830	63,50%	2.811.194	68,75%	2.895.529	75%	2.924.485	100%	12.759.815	Dinas Pariwisata

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
P5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai budaya yang berkembang	80%	82%	1.139.360	84%	13.793.171	86%	4.148.850	88%	4.273.316	90%	4.316.049	90%	27.670.745	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S9	**Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan**	**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)**	**26,19%**	**27,21%**		**27,31%**		**27,41%**		**27,52%**		**27,62%**		**27,62%**		
P1	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Pangan Strategis (Ton Gabah Kering Giling) (Padi)	2.386	2.436	410.891	2.605	319.656	2.723	410.000	2.841	422.300	2.960	434.969	2.960	1.997.816	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi Tanaman Pangan Lokal (Ton)	1.520	1.596	76.840	1.672	127.000	1.748	134.620	1.824	138.659	1.900	142.818	1.900	619.937	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi tanaman Hortikultura (Ton)	1.193	1.236	356.000	1.279	621.007	1.322	658.267	1.365	678.015	1.408	698.355	1.408	3.011.644	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Mutu Produk Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (jumlah produk)	4			8	209.000	10	210.000	12	216.300	14	222.789	14	858.089	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P2	Program Pengembangan Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton)	8,1			8,9	383.665	9,3	430.000	9,8	442.900	10,3	456.187	10,3	1.712.752	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produk Olahan Hasil Tanaman Perkebunan (Jenis)	2			4	143.750	5	152.375	6	156.946	7	161.655	7	614.726	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P3	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	100%	100%	256.155										256.155	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase pelayanan penyakit hewan	100%	100%	150.180										150.180	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	2 Kelompok	1 Kelompok	78.655										78.655	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Populasi ternak besar sapi	1.751	1.773	49.650	1.800	42.400	1.827	50.000	1.854	51.500	1.882	53.045	1.882	246.595	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Populasi ternak ayam	2.958.901	3.106.846	325.130	3.262.188	558.293	3.425.298	591.791	3.596.563	609.545	3.776.391	627.831	3.776.391	2.712.590	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
P4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan	Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	5.000	6.200	389.635	8.000	1.011.225	10.250	1.120.000	12.000	1.153.600	13.250	1.171.623	13.250	4.846.083	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi bibit kultur jaringan yang berkualitas	3.000	3.000	138.575											Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)	43	49	170.921	55	313.405	60	350.000	65	360.500	65	371.315	65	1.566.141	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P5	Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelembagaan Kelompok Tani "Madya"	0	0		2	355.900	3	377.254	4	388.572	5	392.457	15	1.514.183	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) "Profesional"	0	0		2	45.950	3	60.000	4	61.800	5	62.418	14	230.168	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Luas Areal Tanam Padi (Ha)	425	0		465	955.675	485	976.500	505	1.005.795	525	1.015.853	525	3.953.823	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
P6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase sawah yang terairi irigasi	53,79%	54,26%	8.527.500	54,72%	8.430.051	55,19%	7.847.030	55,65%	7.982.441	56,58%	8.008.792	56,58%	40.795.814	Dinas PUPR
P7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	65.723	66.381	3.310.504	67.044	5.387.112	67.715	5.710.339	68.392	5.881.649	69.076	5.940.465	69.076	26.230.069	Dinas Perikanan
		Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun)	10,71%			10,92%	1.225.000	11,03%	1.135.000	11,14%	1.169.050	11,26%	1.180.741	11,26%	4.709.791	Dinas Perikanan
P8	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya (Ton /tahun)	207,2	211	1.062.064	215	1.201.200	219	1.270.000	223	1.308.100	227	1.321.181	227	6.162.545	Dinas Perikanan
		Peningkatan produksi benih yang berkualitas	3,78%			8,70%	1.080.000	13,60%	1.144.800	16,20%	1.179.144	21,21%	1.190.935	21,21%	4.594.879	Dinas Perikanan
S10	**Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro**	**Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)**	55.550.754	72.215.980		93.880.774		122.045.006		156.658.507		206.256.609		206.256.609		
		Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)	973.000.000	1.118.950.000		1.286.792.500		1.479.811.375		1.701.783.081		1.957.050.000		1.957.050.000		
P1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Penumbuhan usaha mikro	17.596			17.898	99.960	18.048	120.500	18.198	127.730	18.348	131.562	18.348	479.752	Dinas KUKMPTK
		Persentase (%) usaha mikro yang omsetnya meningkat	42%			52%	399.350	57%	575.311	62%	609.830	67%	628.125	67%	2.212.615	Dinas KUKMPTK
P2	Program Pengembangan Koperasi	Persentase (%) Koperasi aktif	70%			80%	594.705	85%	640.000	90%	668.400	95%	688.452	95%	2.591.557	Dinas KUKMPTK
P3	Program Peningkatan Akses Permodalan	Persentase (%) pertumbuhan produk Usaha Mikro	18%	20%	751.070										751.070	Dinas KUKMPTK
P4	Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang dibangun	14%	42%	10.544.500	56%	1.629.235	70%	1.850.000	84%	1.905.500	100%	1.924.555	100%	17.853.790	Dinas KUKMPTK

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
P5	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Pasar Representatif (Persentase pasar memenuhi standar)	20%			60%	6.350.000	75%	6.635.000	85%	6.825.000	100%	6.893.250	100%	26.703.250	Dinas KUKMPTK
S11	**Meningkatnya investasi**	**Nilai investasi (juta rupiah)**	981.694	1.225.191		1.780.878		2.519.187		3.507.975		5.023.529		5.023.529		
P1	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	Peningkatan jumlah investor	87	100	877.915	120	1.222.950	144	1.285.200	174	1.323.756	214	1.363.469	214	6.073.290	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P2	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	87,21%	88%	38.305	88%	443.784	88%	497.660	90%	527.520	90%	543.345	90%	2.050.613	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P3	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase (%) kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal	80%			100%	30.000	100%	32.000	100%	33.920	100%	34.938	100%	130.858	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
P4	Program Penataan Struktur Industri	Persentase (%) penataan struktur industri	0%	20%	459.975	40%	164.025	60%	300.000	80%	302.000	100%	305.020	100%	1.531.020	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.155	2.195	255.130	2.235	543.663	2.275	865.000	2.315	890.950	2.355	899.860	2.355	3.454.602	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
		Tingkat kepatuhan pelaku Industri Kecil dan Menengah	22,59%	23%	19.000	23,1%	30.000	24%	60.000	25%	61.800	26%	62.418	26%	233.218	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Terpenuhinya syarat pembentukan sentra IKM	12,50%	25%	329.350	50%	14.600	75%	44.000	100%	45.320	0	0	100%	433.270	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
		Jumlah sentra IKM	0	0	0	1	3.613.410	0	0	0	0	1	4.100.000	2	7.713.410	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
S12	**Meningkatnya infrastruktur kewilayahan**	**Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan**	35,18%	41,89%		46,25%		51,45%		58,39%		64,90%		64,90%		
P1	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76%			76%	108.389.250	76%	144.338.136	76%	145.214.179	76%	145.311.279	76%	543.252.844	Dinas PUPR
P2	Program Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani	5,23%	6,52%	1.683.935	26,50%	1.000.000	46,50%	1.122.320	66,60%	1.155.990	86,60%	1.167.549	86,60%	6.129.794	Dinas PUPR
P3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	Persentase drainase dalam kondisi baik	34,33%	46,85%	4.354.094	59,35%	7.050.000	71,85%	10.200.000	84,35%	10.306.000	96,85%	10.337.290	96,85%	42.247.384	Dinas PUPR
P4	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen tata ruang	1	2	648.620	3	2.000.000	3	1.200.000	2	1.272.000	3	1.275.100	13	6.395.720	Dinas PUPR
		Dokumen tata ruang yang telah di Perdakan	1	0		1	80.000	1	95.000	1	100.700	0	-	4	275.700	Dinas PUPR
P5	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang	80%	80%	330.664										330.664	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	belum tersedia			100%	75.000	100%	80.000	100%	82.400	100%	83.224	100%	320.624	Dinas PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	belum tersedia			100%	350.000	100%	453.000	100%	466.590	100%	471.256	100%	1.740.846	Dinas PUPR
P6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	32,12%	39,03%	23.228.607	54,26%	11.903.860	67,83%	12.618.092	82,00%	12.975.817	98,35%	13.005.575	98,35%	73.731.950	Dinas Perhubungan
		Persentase pemenuhan Penerangan Jalan Umum sesuai standar	17,98%	20,29%		22,60%	9.500.000	24,91%	10.070.000	27,23%	10.324.200	29,54%	10.427.442	29,54%	40.321.642	Dinas Perhubungan
P7	Program Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi	Persentase penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas	50%	42%	1.320.173	34%	1.535.445	26%	1.612.217	18%	1.773.095	10%	1.790.826	10%	8.031.756	Dinas Perhubungan
P8	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan trayek dalam kabupaten	12,50%			100%	30.422.360	100%	32.247.702	100%	33.182.564	100%	33.475.890	100%	129.328.516	Dinas Perhubungan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp (dalam ribu)	Target	Rp	
P9	Program Pengembangan Transportasi Laut	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	13,81%	100%	600.000	100%	40.514.558	100%	42.945.431	100%	43.233.750	100%	43.785.600	100%	171.079.339	Dinas Perhubungan
P10	Program Pengelolaan Sumber Air Baku	Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik	Belum tersedia			12%	728.000	17%	810.800	23%	835.124	28%	843.475	28%	3.217.399	Dinas PUPR
T4	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**58,18**	**60,78**		**62,73**		**64,19**		**65,28**		**66,10**		**66,10**		
S13	**Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan**	**Indeks Kualitas Air**	**57,34**	**60,13**		**62,22**		**63,79**		**64,97**		**65,85**		**65,85**		
		Indeks Kualitas Udara	**89,40**	**90,80**		**91,85**		**92,64**		**93,23**		**93,67**		**93,67**		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**35,40**	**38,75**		**41,26**		**43,15**		**44,56**		**45,62**		**45,62**		
P1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	34,10%	39%	1.598.736	44%	2.178.105	49%	2.423.589	54%	2.496.297	59%	2.521.260	59%	11.217.987	Dinas Lingkungan Hidup
		Sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat kabupaten	23	26		29	119.190	32	131.109	35	135.042	38	136.393	38	521.734	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%	25.158	100%	27.674	100%	28.504	100%	28.789	100%	110.125	Dinas Lingkungan Hidup
P2	Program Pengembangan dan Penataan Taman	Persentase taman terkelola	90%	100%	2.392.740	100%	2.250.000	100%	7.200.000	100%	5.416.000	100%	4.806.478	100%	22.065.218	Dinas PUPR
S14	**Meningkatnya pengelolaan sampah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan**	**0,79%**	**3,10%**		**4,20%**		**4,50%**		**5,50%**		**6,50%**		**6,50%**		
P1	Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang ditangani	30,84%			40%	6.710.894	45%	7.381.983	50%	7.603.443	55%	7.679.477	55%	29.375.798	Dinas Lingkungan Hidup
		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	4			14	1.000.800	17	1.100.880	20	1.133.906	23	1.145.245	23	4.380.832	Dinas Lingkungan Hidup
					261.143.860		**708.503.475**		**769.722.770**		**783.799.246**		**792.357.387**		**3.309.051.691**	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

Kabupaten Belitung

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
2	**Belanja**					
2.1	**Belanja Tidak Langsung**					
2.1.1	Belanja Pegawai	402.209.279.538.94	412.264.511.527	422.571.124.316	433.135.402.423	443.963.787.484
2.1.3	Belanja Subsidi	1.177.401.000	1.189.175.010	1.201.066.760	1.213.077.428	1.225.208.202
2.1.4	Belanja Hibah	15.667.692.000	16.626.554.750	17.644.099.901	18.723.918.815	49.869.822.647
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	113.237.655.000	135.885.186.000	163.062.223.200	195.674.667.840	234.809.601.408
2.1.8	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**535.492.027.538,94**	**569.175.427.287,81**	**607.699.014.176,82**	**651.978.591.506,26**	**733.111.520.990,60**
2.2	**Belanja Langsung**					
2.2.1	Belanja Pegawai	76.014.330.335	77.663.841.303	79.349.146.660	81.071.023.142	82.830.264.344
2.2.2	Belanja Barang	345.348.191.798,05	381.420.049.722	421.257.696.765	460.172.714.700	478.398.866.576
2.2.3	Belanja Modal	342.996.418.778	349.856.347.154	356.853.474.097	368.990.543.579	376.370.354.450
	Jumlah Belanja Langsung	**764.358.940.911,06**	**808.940.238.179,17**	**857.460.317.521,66**	**910.234.281.420,27**	**937.599.487.370.07**
	Jumlah Belanja	**1.299.850.968.450,00**	**1.378.115.665.466,98**	**1.465.159.331.698,48**	**1.562.212.872.926,53**	**1.670.711.006.360,67**

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Belitung

(1)				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1				**Urusan Wajib**															
1	01			**Terkait Pelayanan Dasar**															
1	01	01		**Pendidikan**				**109.061.229**		**85.893.646**		**90.111.649**		**92.750.999**		**93.294.679**			
1	01	01	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	61,43%	62,93%	4.585.585	64,43%	8.622.778	65,93%	9.310.755	67,43%	9.590.078	68,93%	9.685.979	68,93%	41.795.174	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				93.132.775		63.519.526		64.721.892		66.663.549		66.995.346		355.033.089	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	119,17%	100%	93.132.775	100%	8.255.619	100%	8.255.619	100%	8.503.288	100%	8.562.300	100%		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96,64%	97,64%		97,44%	28.538.467	97,84%	28.822.625	98,24%	29.687.304	98,64%	29.781.225	98,64%		
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100,10%	100%		100%	15.522.932	100%	15.522.932	100%	15.988.619	100%	16.075.621	100%		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	81,69%	82,09%		82,49%	11.202.509	82,89%	12.120.717	83,29%	12.484.339	83,69%	12.576.200	83,69%		
1	01	01	03	Program Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	16,67%	33,33%	4.222.480	50%	6.589.811	66,67%	7.118.988	83,33%	7.332.557	100%	7.356.892	100%	32.620.728	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	04	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6.336.470		933.250		1.226.575		1.263.372		1.276.006		11.035.673	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi	60,63%	65,03%	6.336.470	70,03%	812.850	75,03%	1.094.135	80,03%	1.126.959	85,03%	1.138.229	85,03%		
					Pesentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	75,05%	78,05%		81,03%	120.400	84,05%	132.440	87,02%	136.413	89,03%	137.777	89,03%		
1	01	01	05	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	85%	88%	52.860	90%	275.000	93%	390.000	96%	401.700	97,50%	405.717	97,50%	1.525.277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	06	Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	belum tersedia	100%	58.500	100%	2.495.300	100%	3.495.300	100%	3.600.159	100%	3.636.161	100%	13.285.420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	31.448	100%	1.558.931	100%	1.814.824	100%	1.830.269	100%	1.848.572	100%	7.084.044	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	560.610	100%	967.150	100%	1.090.415	100%	1.109.127	100%	1.120.218	100%	4.847.520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%			100%	649.400	100%	649.900	100%	659.397	100%	665.991	100%	2.624.688	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40.000									100%	40.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	175.000	100%	182.500	100%	187.975	100%	189.855	100%	735.330	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	107.500	100%	110.500	100%	112.815	100%	113.943	100%	444.758	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	30.500									100%	30.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**		**Kesehatan**				**171.718.872**		**239.932.473**		**250.716.310**		**256.830.378**		**258.465.124**			
1	01	02	01	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terintegrasinya layanan kesehatan	belum tersedia	20%	483.900	40%	716.105	60%	823.521	80%	848.226	100%	856.709	100%	3.728.461	Dinas Kesehatan
1	01	02	02	Program Upaya Pelayanan Kesehatan				50.270.520		101.187.915		93.834.402		96.649.434		97.400.155		439.342.425	Dinas Kesehatan
					Puskesmas terakreditasi Madya	33,33%	33,33%	28.376.661	66,67%	75.627.015	100%	64.439.367	100%	66.372.548	100%	66.820.500	100%		
					Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	98%	100%	21.893.859	100%	25.560.900	100%	29.395.035	100%	30.276.886	100%	30.579.655	100%		
1	01	02	03	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terselenggaranya pelayanan kesehatan BLUD	27%	70%	44.716.355									70%	44.716.355	Dinas Kesehatan

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
1	01	02	04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	27%	70%	33.747.911									70%	33.747.911	Dinas Kesehatan
1	01	02	05	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Terakreditasi paripurna	27%			100%	122.384.491	100%	140.742.165	100%	143.557.008	100%	144.274.793	100%	550.958.457	Dinas Kesehatan
1	01	02	06	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat dan Perbekalan kesehatan yang cukup	100%	100%	3.187.139									100%	3.187.139	Dinas Kesehatan
1	01	02	07	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33%	100%	2.803.753									100%	2.803.753	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	20%													
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%													
					Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	91%													
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV	60,96%													
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	33,51%													
					Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	68,2%													
					Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Filariasis	100%													
1	01	02	08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						3.137.904		2.155.661		2.220.331		2.242.534		9.756.430	Dinas Kesehatan
					Persentase Penanganan Penyakit Menular	100%			100%	2.373.840	100%	1.355.977	100%	1.396.657	100%	1.410.623	100%		
					Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%			100%	764.063	100%	799.684	100%	823.674	100%	831.911	100%		
1	01	02	09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				3.188.324		2.712.927		2.714.740		2.796.183		2.824.144		14.236.318	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,72%	100%	3.188.324	100%	493.044	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%		
					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,87%			100%	455.000	100%	460.000	100%	473.800	100%	478.538	100%		
					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,18%			100%	305.000	100%	350.750	100%	361.273	100%	364.885	100%		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Pelayanan Kesehatan Balita	75,76%			100%	230.000	100%	264.500	100%	272.435	100%	275.159	100%		
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%			100%	245.000	100%	281.750	100%	290.203	100%	293.105	100%		
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75,29%			100%	150.000	100%	172.500	100%	177.675	100%	179.452	100%		
					Persentase Desa Siaga Aktif	62,15%			100%	834.883	100%	920.740	100%	948.363	100%	957.846	100%		
1	**01**	**02**	**10**	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	100%	100%	5.681.285									100%	5.681.285	Dinas Kesehatan
1	**01**	**02**	**11**	Program Pengawasan Makanan dan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan yang laik higienis sanitasi	36,3%	100%	171.255									100%	171.255	Dinas Kesehatan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	6.698.289	100%	5.021.095	100%	5.474.259	100%	5.638.487	100%	5.694.872	100%	28.527.002	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	14.787.079	100%	2.525.183	100%	2.703.961	100%	2.785.080	100%	2.812.931	100%	25.614.234	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	30.000	100%	53.253	100%	55.241	100%	56.898	100%	57.467	100%	252.860	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	5.943.063									100%	5.943.063	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	2.068.530	100%	2.068.530	100%	2.130.586	100%	2.151.892	100%	8.419.538	Dinas Kesehatan
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	125.070	100%	143.831	100%	148.145	100%	149.627	100%	566.673	Dinas Kesehatan
1	**01**	**03**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**161.835.938**		**169.758.331**		**212.567.545**		**212.203.660**		**211.957.477**			
1	**01**	**03**	**01**	Program Pembinaan dan Pengembangan Air Minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan air minum	76,08%	77%	19.910.472									77%	19.910.472	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**03**	**02**	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	76,08%			78%	13.698.890	79%	13.497.029	80%	13.901.940	81%	14.040.959	81%	55.138.818	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
1	01	03	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Persentase Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	52.8%	53%	2.130.000									53%	2.130.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	04	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman						18.084.060		19.120.620		18.669.219		18.760.595		74.634.494	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Persentase jalan lingkungan yang tertangani	belum tersedia			29,85%	15.181.660	44,78%	16.011.225	59,70%	15.491.562	74,63%	15.569.020	74,63%		
					Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	60,14%			61,30%	1.664.900	61,87%	1.748.145	62,45%	1.775.569	63,02%	1.780.325	63,02%		
					Persentase pengolahan air limbah permukiman	52,80%			54%	1.237.500	55%	1.361.250	56%	1.402.088	57%	1.411.250	57%		
1	01	03	05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase sawah yang terairi irigasi	53,79%	54,26%	8.527.500	54,72%	8.430.051	55,19%	7.847.030	55,65%	7.982.441	56,58%	8.008.792	56,58%	40.795.814	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	06	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang memenuhi standar	76%	76%	69.414.181									76%	69.414.181	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	07	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76%			76%	108.389.250	76%	144.338.136	76%	145.214.179	76%	145.311.279	76%	543.252.844	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	08	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan	480 km	480 km	42.145.262									480 km	42.145.262	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan	100 m	100 m										100 m		
1	01	03	09	Program Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani	5,23%	6,52%	1.683.935	26,50%	1.000.000	46,50%	1.122.320	66,60%	1.155.990	86,60%	1.167.549	86,60%	6.129.794	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	Persentase drainase dalam kondisi baik	34,33%	46,85%	4.354.094	59,35%	7.050.000	71,85%	10.200.000	84,35%	10.306.000	96,85%	10.337.290	96,85%	42.247.384	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	11	Program Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan	Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/Gedung Negara	100%	100%	5.886.030									100%	5.886.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	03	12	Program Pengembangan dan Penataan Bangunan						5.175.000		3.790.000		3.903.060		3.924.481		16.792.541	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar	10,56%			17,40%	825.000	20,60%	1.190.000	23,80%	1.225.060	27,00%	1.230.281	27,00%		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	10%			15%	500.000	20%	600.000	25%	618.000	30%	622.100	30%		
					Terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara	100%			100%	3.850.000	100%	2.000.000	100%	2.060.000	100%	2.072.100	100%		
1	**01**	**03**	**13**	Program Perencanaan Tata Ruang				648.620		2.080.000		1.295.000		1.372.700		1.275.100		6.671.420	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Dokumen tata ruang	1	2		3	2.000.000	3	1.200.000	2	1.272.000	3	1.275.100	13		
					Dokumen tata ruang yang telah di Perdakan	1	0		1	80.000	1	95.000	1	100.700	0	0	4		
1	**01**	**03**	**14**	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang				330.664		425.000		533.000		548.990		554.480		2.392.134	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terkendalinya pemanfaatan ruang	80%	80%	330.664									80%		
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	belum tersedia	100%		100%	75.000	100%	80.000	100%	82.400	100%	83.224	100%		
					Ketaatan terhadap RTRW	belum tersedia	100%		100%	350.000	100%	453.000	100%	466.590	100%	471.256	100%		
1	**01**	**03**	**15**	Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi				235.997		260.000		269.500		277.585		280.361		1.323.443	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).	100%	100%	235.997									100%		
					Persentase Tenaga Terampil bersertifikat Konstruksi	21,17%			53%	260.000	68%	269.500	84%	277.585	100%	280.361	100%		
1	**01**	**03**	**16**	Program Pengelolaan Sumber Air Baku	Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik	Belum tersedia			12%	728.000	17%	810.800	23%	835.124	28%	843.475	28%	3.217.399	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**03**	**17**	Program Pengembangan dan Penataan Taman	Persentase taman terkelola	90%	100%	2.392.740	100%	2.250.000	100%	7.200.000	100%	5.416.000	100%	4.806.478	100%	22.065.218	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**03**	**18**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan	100%	100%	1.295.200									100%	1.295.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.427.700	100%	1.132.100	100%	1.254.200	100%	1.291.826	100%	1.304.744	100%	6.410.570	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.266.542	100%	863.580	100%	1.088.510	100%	1.121.165	100%	1.132.377	100%	5.472.174	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	28.000	100%	53.000	100%	55.000	100%	56.650	100%	57.217	100%	249.867	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	149.000									100%	149.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	95.000	100%	100.000	100%	103.000	100%	104.030	100%	402.030	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	44.400	100%	46.400	100%	47.792	100%	48.270	100%	186.862	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**04**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**19.483.497**		**3.610.000**		**4.400.000**		**4.532.000**		**4.575.775**			
1	01	04	01	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Permukiman	100%	100%	19.483.497									100%	19.483.497	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	04	02	Program Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Persentase Luasan kawasan kumuh	51,28%			15,39%	3.510.000	7,95%	4.250.000	4,44%	4.377.500	0	4.421.275	0	16.558.775	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	01	04	03	Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni	100%			100%	100.000	100%	150.000	100%	154.500	100%	154.500	100%	559.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**01**	**05**		**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				**11.404.575**		**19.630.973**		**21.449.080**		**22.092.553**		**22.313.478**			
1	01	05	01	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100%	712.802	100%	784.082	100%	807.605	100%	815.681	100%	3.120.170	BPBD
1	01	05	02	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	2.498.863									100%	2.498.863	SATPOLPP
1	01	05	03	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase tingkat pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	290.509									100%	290.509	SATPOLPP

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
1	01	05	04	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana						1.382.698		1.520.968		1.566.597		1.582.263		6.052.525	BPBD
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	belum tersedia			100%	984.563	100%	1.083.019	100%	1.115.510	100%	1.126.665	100%		
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	belum tersedia			100%	398.135	100%	437.949	100%	451.087	100%	455.598	100%		
1	01	05	05	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	421.500	100%	4.932.130	100%	5.425.343	100%	5.588.103	100%	5.643.984	100%	22.011.061	SATPOL PP (Tahun 2019), BPBD (Tahun 2020-2023)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%			100%	2.170.147	100%	2.387.162	100%	2.458.777	100%	2.483.364	100%	9.499.450	BPBD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%			100%	340.265	100%	464.292	100%	478.220	100%	483.002	100%	1.765.779	BPBD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%			100%	297.250	100%	297.250	100%	306.168	100%	309.229	100%	1.209.897	BPBD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%											100%	-	BPBD
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	125.250	100%	125.250	100%	129.008	100%	130.298	100%	509.805	BPBD
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	21.000	100%	21.000	100%	21.630	100%	21.846	100%	85.476	BPBD
1	01	05	06	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	94,79%	100%	432.551									100%	432.551	SATPOLPP
1	01	05	07	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						3.963.117		4.359.429		4.490.212		4.535.114		17.347.871	SATPOLPP

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Persentase layanan keamanan dan ketertiban	100%			100%	3.181.001	100%	3.499.101	100%	3.604.074	100%	3.640.115	100%		
					Persentase Penegakan PERDA	100%			100%	782.116	100%	860.328	100%	886.137	100%	894.999	100%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	5.680.581	100%	4.062.504	100%	4.368.754	100%	4.499.817	100%	4.544.815	100%	23.156.472	SATPOLPP
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	882.321	100%	696.410	100%	766.051	100%	789.033	100%	796.923	100%	3.930.737	SATPOLPP
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	689.450	100%	688.150	100%	688.150	100%	708.795	100%	715.882	100%	3.490.427	SATPOLPP
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	498.800									100%	498.800	SATPOLPP
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	218.250	100%	218.250	100%	224.798	100%	227.045	100%	888.343	SATPOLPP
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	SATPOLPP
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	21.000	100%	23.100	100%	23.793	100%	24.031	100%	91.924	SATPOLPP
1	**01**	**06**		**Sosial**				**4.118.591**		**8.457.650**		**5.790.833**		**6.014.347**		**6.074.490**			
1	**01**	**06**	**01**	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				750.580		1.870.212		1.508.893		1.554.160		1.569.702		7.253.548	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	95%	100%	750.580	100%	1.033.747	100%	764.866	100%	787.812	100%	795.690	100%		
					Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	tidak terjadi bencana	100%		100%	836.466	100%	744.028	100%	766.348	100%	774.012	100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan					Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
1	01	06	02	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	70,66%	100%	890.840									100%	890.840	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	01	06	03	Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin						1.130.928		1.137.632		1.171.761		1.183.479		4.623.799	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	20%			40%	206.275	60%	157.500	80%	162.225	100%	163.847	100%		
					Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	88,28%			87,38%	924.653	86,93%	980.132	86,48%	1.009.536	86,03%	1.019.631	86,03%		
1	01	06	04	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif	75%			85%	1.565.678	90%	1.659.618	95%	1.759.195	100%	1.776.787	100%	6.761.278	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	01	06	05	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan	80%	100%	1.274.350									100%	1.274.350	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	643.369	100%	566.848	100%	618.890	100%	637.457	100%	643.831	100%	3.110.395	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	462.952	100%	3.108.184	100%	650.000	100%	669.500	100%	676.195	100%	5.566.831	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	16.500	100%	24.000	100%	24.000	100%	24.720	100%	24.967	100%	114.187	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	70.000									100%	70.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	125.000	100%	125.000	100%	128.750	100%	130.038	100%	508.788	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	66.800	100%	66.800	100%	68.804	100%	69.492	100%	271.896	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**			**Tidak Terkait Pelayanan Dasar**															
1	**02**	**01**		**Tenaga Kerja**				**572.754**		**664.474**		**813.000**		**845.200**		**853.652**			
1	**02**	**01**	**01**	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	20%	66.280	100%	153.000	100%	218.000	100%	225.000	100%	227.250	100%	889.530	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**01**	**02**	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						511.474		595.000		620.200		626.402		2.353.076	Dinas KUKMPTK
					Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	30,30%			32%	82.248	35%	95.000	37%	100.200	40%	101.202	40%		
					Persentase Peluang Kerja Mandiri/berwirausaha	15%			17%	429.226	20%	500.000	22%	520.000	25%	525.200	25%		
1	**02**	**01**	**03**	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan kesempatan kerja	100%	100%	506.474									100%	506.474	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**02**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**856.063**		**1.032.279**		**1.094.497**		**1.135.344**		**1.146.698**			
1	**02**	**02**	**01**	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status KLA (Kabupaten Layak Anak) Pratama	Deklarasi	Pratama		Pratama	314.835	Pratama	333.725	Pratama	351.749	Pratama	355.266	Pratama	1.355.576	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**	**02**	**02**	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pelayanan perempuan dan anak	100%	100%	206.559									100%	206.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**	**02**	**03**	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan	100%	100%	355.075									100%	355.075	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**02**	**02**	**04**	Program Perlindungan Perempuan dan Anak						349.498		370.749		381.872		385.690		1.487.809	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,9%			5,7%	201.700	5,5%	200.200	5,3%	206.206	5,2%	208.268	5,2%		
					Persentase penanganan anak korban kekerasan	100%			100%	147.798	100%	170.549	100%	175.666	100%	177.422	100%		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
1	02	02	05	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Partisipasi perempuan dalam pembangunan	51%	70%	294.430									70%	294.430	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindundan Anak
1	02	02	06	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan						367.946		390.023		401.723		405.741		1.565.433	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
					Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50%			52%	227.241	53%	240.875	54%	248.102	55%	250.583	55%		
					Partisipasi angkatan kerja perempuan	20%			25%	140.705	27%	149.147	29%	153.622	30%	155.158	30%		
1	**02**	**03**		**Pangan**				**314.847**		**407.155**		**559.000**		**586.800**		**592.668**			
1	02	03	01	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan				107.238		75.268		85.000		89.200		90.092		446.797	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA	22,22%	18,18%	107.238	36,36%	45.498	54,55%	50.000	72,73%	52.500	90,91%	53.025	90,91%		
					Persentase (%)Tingkat Keamanan Pangan	100%	100%		100%	29.770	100%	35.000	100%	36.700	100%	37.067	100%		
1	02	03	02	Program Peningkatan Ketesediaan dan Distribusi Pangan				207.610		331.887		474.000		497.600		502.576		2.013.673	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase ketersediaan cadangan pangan	5,59%	14,69%	207.610	35,66%	225.301	56,64%	330.000	77,62%	346.800	100%	350.268	100%		
					Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92,56	93,00		94,00	106.587	95,00	144.000	96,00	150.800	97,00	152.308	97,00		
1	**02**	**04**		**Pertanahan**				**3.700.000**		**83.290**		**83.290**		**86.656**		**87.523**			
1	02	04	01	Program Penataan Wilayah dan Batas	Persentase penegasan batas wilayah dalam kabupaten (kecamatan)	belum tersedia			25%	46.575	50%	46.575	75%	48.730	100%	49.217	100%	191.097	Bagian Pemerintahan
1	02	04	02	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100%	100%	3.700.000									100%	3.700.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	02	04	03	Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pemenuhan kebutuhan lahan pelayanan publik	belum tersedia			20%	36.715	20%	36.715	20%	37.926	20%	38.305	80%	149.661	Bagian Pemerintahan
1	**02**	**05**		**Lingkungan Hidup**				**11.744.137**		**11.924.034**		**13.234.801**		**13.631.845**		**13.768.163**			
1	02	05	01	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				1.598.736		2.322.453		2.582.372		2.659.843		2.686.442		11.849.846	Dinas Lingkungan Hidup

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	34,10%	39%	1.598.736	44%	2.178.105	49%	2.423.589	54%	2.496.297	59%	2.521.260	59%		
					Sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat kabupaten	23	26		29	119.190	32	131.109	35	135.042	38	136.393	38		
					Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%	25.158	100%	27.674	100%	28.504	100%	28.789	100%		
1	**02**	**05**	**02**	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ketersediaan Informasi mengenai status lingkungan hidup daerah	0	2 Dokumen	225.020									2 Dokumen	225.020	Dinas Lingkungan Hidup
1	**02**	**05**	**03**	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase (%) penanganan sampah per hari	30,84%	35%	6.987.515									35%	6.987.515	Dinas Lingkungan Hidup
1	**02**	**05**	**04**	Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan						7.711.694		8.482.863		8.737.349		8.824.723		33.756.629	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase jumlah sampah yang ditangani	30,84%			40%	6.710.894	45%	7.381.983	50%	7.603.443	55%	7.679.477	55%		
					Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	4			14	1.000.800	17	1.100.880	20	1.133.906	23	1.145.245	23		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	841.900	100%	800.875	100%	940.963	100%	969.191	100%	978.883	100%	4.531.812	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.862.466	100%	595.912	100%	735.503	100%	757.568	100%	765.143	100%	4.716.591	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	18.500	100%	89.600	100%	89.600	100%	92.288	100%	93.211	100%	383.199	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	200.000									100%	200.000	Dinas Lingkungan Hidup

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	200.000	100%	200.000	100%	206.000	100%	208.060	100%	814.060	Dinas Lingkungan Hidup
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	203.500	100%	203.500	100%	209.605	100%	211.701	100%	828.306	Dinas Lingkungan Hidup
1	**02**	**06**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**3.387.810**		**3.030.943**		**3.426.556**		**3.529.353**		**3.564.646**			
1	**02**	**06**	**01**	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.913.540		1.418.522		1.544.098		1.590.421		1.606.325		8.072.906	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase (%) Pelayanan Administrasi Kependudukan	88%	80%	1.913.540									80%		
					Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%			81%	908.772	83%	957.873	84%	986.609	86%	996.475	86%		
					Persentase capaian pencatatan sipil	92%			94%	144.305	94%	170.680	95%	175.800	95%	177.558	95%		
					Persentase pemanfaatan data	100%			100%	365.445	100%	415.545	100%	428.011	100%	432.291	100%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	853.643	100%	769.750	100%	923.500	100%	951.205	100%	960.717	100%	4.458.815	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	484.128	100%	622.671	100%	738.958	100%	761.127	100%	768.738	100%	3.375.621	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	16.500	100%	43.000	100%	43.000	100%	44.290	100%	44.733	100%	191.523	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	110.000									100%	110.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	102.000	100%	102.000	100%	105.060	100%	106.111	100%	415.171	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	75.000	100%	75.000	100%	77.250	100%	78.023	100%	305.273	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**07**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**1.389.100**		**2.855.452**		**2.535.713**		**2.611.784**		**2.637.902**			
1	02	07	01	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						1.164.859		692.720		713.502		720.637		3.291.717	DPPKBPMD
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Belum Tersedia			Memuaskan	931.739	Memuaskan	459.600	Memuaskan	473.388	Memuaskan	478.122	Memuaskan		
					Persentase ketersediaan data dan informasi desa (Profil Desa) yang mutakhir	46,94%			71,43%	81.600	100%	81.600	100%	84.048	100%	84.888	100%		
					Persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	97,62%			100%	151.520	100%	151.520	100%	156.066	100%	157.626	100%		
1	02	07	02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya fungsi dan peran serta masyarakat	100%	100%	309.060									100%	309.060	DPPKBPMD
1	02	07	03	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase (%) pembinaan pengelolaan keuangan desa	85,60%	100%	149.420									100%	149.420	DPPKBPMD
1	02	07	04	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				930.620		1.690.593		1.842.993		1.898.282		1.917.265		8.279.752	DPPKBPMD
					Persentase kelembagaan desa aktif	98,93%	99,07%	930.620	99,20%	1.365.063	99,53%	1.517.463	99,87%	1.562.986	100%	1.578.616	100%		
					Persentase hasil TTG yang diterapkan di masyarakat	27,27%	28,57%		29,73%	223.370	30,77%	223.370	32,50%	230.071	37,50%	232.372	37,50%		
					Persentase BUMDesa aktif tiap desa	69,05%	76,19%		83,33%	102.160	90,48%	102.160	97,62%	105.225	100%	106.277	100%		
1	**02**	**08**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**4.362.565**		**4.808.651**		**5.438.081**		**5.601.223**		**5.657.236**			
1	02	08	01	Program Keluarga Berencana	Peserta KB Aktif Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	82,04%	80%	1.287.250									80%	1.287.250	DPPKBPMD
1	02	08	02	Program Peningkatan Pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi implant dan pelayanan KB medis operatif	75,46%	82%	1.377.329									82%	1.377.329	

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
1	02	08	03	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang Mempunyai Tenaga Pendamping	81 Kelompok	81 Kelompok	30.000									81 Kelompok	30.000	
1	02	08	04	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD	49 orang 206 orang	49 orang 206 orang	402.325									49 orang 206 orang	402.325	
1	02	08	05	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	28 Kel	33 Kel	43.155									33 Kel	43.155	
1	02	08	06	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						3.393.075		3.846.880		3.962.286		4.001.909		15.204.151	DPPKBPMD
					Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,99%			8,19%	1.606.980	7,79%	1.750.980	6,99%	1.803.509	6,50%	1.821.544	6,50%		
					Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	22%			21,20%	1.558.890	20,80%	1.770.900	20,40%	1.824.027	20%	1.842.267	20%		
					Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	20%			19%	227.205	18,50%	325.000	18%	334.750	17,50%	338.098	17,50%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	697.226	100%	661.996	100%	800.280	100%	824.288	100%	832.531	100%	3.816.321	DPPKBPMD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	392.580	100%	603.580	100%	640.921	100%	660.149	100%	666.750	100%	2.963.980	DPPKBPMD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	18.000	100%	22.500	100%	22.500	100%	23.175	100%	23.407	100%	109.582	DPPKBPMD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	80.000									100%	80.000	DPPKBPMD
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	90.000	100%	90.000	100%	92.700	100%	93.627	100%	366.327	DPPKBPMD
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	DPPKBPMD

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	37.500	100%	37.500	100%	38.625	100%	39.011	100%	152.636	DPPKBPMD
				Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	24.700									100%	24.700	DPPKBPMD
1	**02**	**09**		**Perhubungan**				**33.307.081**		**96.917.085**		**102.682.483**		**104.860.003**		**105.889.616**			
1	**02**	**09**	**01**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi				23.228.607		21.403.860		22.688.092		23.300.017		23.433.017		114.053.592	Dinas Perhubungan
					Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	32,12%	39,03%	23.228.607	54,26%	11.903.860	67,83%	12.618.092	82,00%	12.975.817	98,35%	13.005.575	98,35%		
					Persentase pemenuhan Penerangan Jalan Umum sesuai standar	17,98%	20,29%		22,60%	9.500.000	24,91%	10.070.000	27,23%	10.324.200	29,54%	10.427.442	29,54%		
1	**02**	**09**	**02**	Program Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi	Persentase penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas	50%	42%	1.320.173	34%	1.535.445	26%	1.612.217	18%	1.773.095	10%	1.790.826	10%	8.031.756	Dinas Perhubungan
1	**02**	**09**	**03**	Program Peningkatan Kelayakan Alat Transportasi	Persentase (%) Kendaraan Motor Wajib Uji	72,50%	100%	479.421									100%	479.421	Dinas Perhubungan
1	**02**	**09**	**04**	Program Peningkatan Pelayanan Moda Transportasi	Jumlah Pelayanan Moda Transportasi	12,50%	100%	2.894.550									100%	2.894.550	Dinas Perhubungan
1	**02**	**09**	**05**	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan trayek dalam kabupaten	12,50%			100%	30.422.360	100%	32.247.702	100%	33.182.564	100%	33.475.890	100%	129.328.516	Dinas Perhubungan
1	**02**	**09**	**06**	Program Pengembangan Transportasi Laut	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	13,81%	100%	600.000	100%	40.514.558	100%	42.945.431	100%	43.233.750	100%	43.785.600	100%	171.079.339	Dinas Perhubungan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.686.675	100%	1.587.385	100%	1.716.754	100%	1.819.759	100%	1.837.957	100%	8.648.530	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.795.856	100%	1.056.702	100%	1.075.512	100%	1.140.043	100%	1.151.443	100%	7.219.556	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	91.800	100%	153.500	100%	153.500	100%	155.500	100%	157.055	100%	711.355	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	200.000									100%	200.000	Dinas Perhubungan

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	200.000	100%	200.000	100%	211.000	100%	213.110	100%	824.110	Dinas Perhubungan
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	43.275	100%	43.275	100%	44.275	100%	44.718	100%	175.543	Dinas Perhubungan
1	**02**	**10**		**Komunikasi dan Informatika**				**4.712.372**		**11.922.516**		**12.560.018**		**12.986.227**		**13.034.586**			
1	02	10	01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kelancaran diseminasi, informasi dan pendistribusian informasi daerah	80%	100%	1.857.687									100%	1.857.687	DISKOMINFO
1	02	10	02	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	25%	50%	1.297.175	65%	9.451.650	80%	9.864.242	90%	10.211.093	90%	10.231.700	90%	41.055.860	DISKOMINFO
1	02	10	03	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				296.520		1.282.796		1.291.796		1.330.550		1.343.855		5.545.517	DISKOMINFO
					Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani	Belum tersedia			90%	54.000	90%	56.000	90%	57.680	90%	58.257	90%		
					Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	40%	40%	296.520	60%	1.228.796	80%	1.235.796	90%	1.272.870	90%	1.285.599	90%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	646.815	100%	626.300	100%	755.730	100%	778.402	100%	786.186	100%	3.593.433	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	421.675	100%	314.020	100%	400.500	100%	412.515	100%	416.640	100%	1.965.350	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	12.500	100%	52.250	100%	52.250	100%	53.818	100%	54.356	100%	225.173	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	170.000									100%	170.000	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	125.000	100%	125.000	100%	127.500	100%	128.775	100%	506.275	DISKOMINFO

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	DISKOMINFO
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	70.500	100%	70.500	100%	72.350	100%	73.074	100%	286.424	DISKOMINFO
1	**02**	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**				**13.836.640**		**4.208.293**		**4.877.595**		**5.053.997**		**5.167.507**			
1	02	11	01	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	Persentase (%)pertumbuhan usaha mikro	6,26%	1,00%	549.510									1,00%	549.510	Dinas KUKMPTK
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Koperasi dan UKM Mandiri	16%	16%	358.000									16%	358.000	Dinas KUKMPTK
1	02	11	02	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro						499.310		695.811		737.560		759.686		2.692.367	Dinas KUKMPTK
					Penumbuhan usaha mikro	17.596			17.898	99.960	18.048	120.500	18.198	127.730	18.348	131.562	18.348		
					Persentase (%) usaha mikro yang omsetnya meningkat	42%			52%	399.350	57%	575.311	62%	609.830	67%	628.125	67%		
1	02	11	03	Program Pembinaan Koperasi	Persentase (%) koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40%	50%	434.255									50%	434.255	Dinas KUKMPTK
1	02	11	04	Program Pengembangan Koperasi	Persentase (%) Koperasi aktif	70%			80%	594.705	85%	640.000	90%	668.400	95%	688.452	95%	2.591.557	Dinas KUKMPTK
1	02	11	05	Program Peningkatan Akses Permodalan	Persentase (%) pertumbuhan produk Usaha Mikro	18%	20%	751.070									20%	751.070	Dinas KUKMPTK
1	02	11	06	Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang dibangun	14%	42%	10.544.500	56%	1.629.235	70%	1.850.000	84%	1.905.500	100%	1.924.555	100%	17.853.790	Dinas KUKMPTK
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	810.218	100%	957.413	100%	1.090.780	100%	1.123.503	100%	1.157.209	100%	5.139.123	Dinas KUKMPTK
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	278.087	100%	427.130	100%	500.504	100%	515.519	100%	530.985	100%	2.252.225	Dinas KUKMPTK

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	19.000	100%	26.000	100%	26.000	100%	26.780	100%	27.583	100%	125.363	Dinas KUKMPTK
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	52.000									100%	52.000	Dinas KUKMPTK
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	40.000	100%	40.000	100%	41.200	100%	42.436	100%	163.636	Dinas KUKMPTK
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas KUKMPTK
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	34.500	100%	34.500	100%	35.535	100%	36.601	100%	141.136	Dinas KUKMPTK
3	01	05	33	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	30.000									100%	30.000	Dinas KUKMPTK
1	**02**	**12**		**Penanaman Modal**				**10.183.143**		**3.035.955**		**3.307.680**		**3.447.490**		**3.550.914**			
1	**02**	**12**	**01**	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	Peningkatan jumlah investor	87	100	877.915	120	1.222.950	144	1.285.200	174	1.323.756	214	1.363.469	214	6.073.290	DPMPTSPP
1	**02**	**12**	**02**	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	87,21%	88%	38.305	88%	443.784	88%	497.660	90%	527.520	90%	543.345	90%	2.050.613	DPMPTSPP
1	**02**	**12**	**03**	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase (%) kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal	80%			100%	30.000	100%	32.000	100%	33.920	100%	34.938	100%	130.858	DPMPTSPP
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	616.950	100%	593.550	100%	720.600	100%	743.836	100%	766.151	100%	3.441.087	DPMPTSPP
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	8.529.973	100%	560.671	100%	585.720	100%	620.863	100%	639.489	100%	10.936.716	DPMPTSPP
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	18.000	100%	23.000	100%	23.000	100%	24.380	100%	25.111	100%	113.491	DPMPTSPP
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	92.000									100%	92.000	DPMPTSPP

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	159.000	100%	159.000	100%	168.540	100%	173.596	100%	660.136	DPMPTSPP
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	DPMPTSPP
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	3.000	100%	4.500	100%	4.675	100%	4.815	100%	16.990	DPMPTSPP
1	**02**	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**				**9.605.847**		**64.687.435**		**34.247.369**		**35.274.790**		**35.641.317**			
				Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	100	100	949.798									100	949.798	DISPORA
1	02	13	01	Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah kelompok olahraga masyarakat aktif	20			30	5.413.425	35	5.954.768	40	6.133.411	45	6.194.745	45	23.696.348	DISPORA
1	02	13	02	Program Peningkatan Prestasi Olahraga						43.921.640		13.534.048		13.940.069		13.999.060		85.394.817	DISPORA
					Jumlah atlet berprestasi yang aktif	1.013			1.137	7.318.313	1.194	6.051.548	1.254	6.233.094	1.317	6.255.380	1317		
					Jumlah pelatih bersertifikasi yang aktif	532			587	200.000	616	200.000	647	206.000	679	208.060	679		
					Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	60%			75%	36.403.327	80%	7.282.500	85%	7.500.975	90%	7.535.620	90%		
1	02	13	03	Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi/ Nasional	60	70	3.829.340									70	3.829.340	DISPORA
1	02	13	05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang terbangun/dipelihara	100%	85%	1.018.705									85%	1.018.705	DISPORA
1	02	13	06	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				2.327.901		12.068.791		12.838.709		13.223.870		13.421.700		53.880.971	DISPORA
					Persentase Organisasi Kepemudaan yang Dibina	50%	80%	2.327.901									80%		
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	85%			85%	11.734.631	90%	12.438.709	95%	12.811.870	100%	13.006.700	100%		
					Persentase wirausaha pemula	75%			80%	334.160	85%	400.000	85%	412.000	90%	415.000	90%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	839.330	100%	962.943	100%	1.070.903	100%	1.103.030	100%	1.125.170	100%	5.101.376	DISPORA

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	379.629	100%	1.342.429	100%	476.692	100%	490.993	100%	505.723	100%	3.195.465	DISPORA
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	13.500	100%	37.500	100%	37.250	100%	38.368	100%	39.519	100%	166.136	DISPORA
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	75.000									100%	75.000	DISPORA
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	185.000	100%	185.000	100%	190.550	100%	196.267	100%	756.817	DISPORA
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	DISPORA
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	755.708	100%	150.000	100%	154.500	100%	159.135	100%	1.219.343	DISPORA
				Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	162.645									100%	162.645	DISPORA
1	**02**	**14**		**Statistik**				**107.000**		**344.940**		**375.880**		**387.156**		**398.771**			
1	02	14	01	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	70%	75%	107.000									75%	107.000	DISKOMINFO
1	02	14	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik daerah	Belum tersedia			70%	344.940	80%	375.880	90%	387.156	90%	398.771	90%	1.506.747	DISKOMINFO
1	**02**	**15**		**Persandian**				**138.480**		**126.500**		**128.000**		**131.840**		**135.795**			
1	02	15	01	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	20%	30%	111.740									30%	111.740	DISKOMINFO
1	02	15	02	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				26.740		126.500		128.000		131.840		135.795		548.875	DISKOMINFO
					Persentase layanan persandian sesuai standar keamanan informasi	60%	60%		70%	75.500	80%	76.000	90%	78.280	90%	80.628	90%		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Tingkat kematangan keamanan informasi	Level II	Level II	26.740	Level III	51.000	Level III+	52.000	Level IV	53.560	Level IV	55.167	Level IV		
1	**02**	**16**		**Kebudayaan**				**2.599.960**		**13.793.171**		**4.148.850**		**4.273.316**		**4.316.049**			
1	**02**	**16**	**01**	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai budaya yang berkembang	80%	82%	1.139.360	84%	13.793.171	86%	4.148.850	88%	4.273.316	90%	4.316.049	90%	27.670.745	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
1	**02**	**16**	**02**	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya	80%	100%	1.237.085									100%	1.237.085	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
1	**02**	**16**	**03**	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya	80%	90%	223.515									90%	223.515	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
1	**02**	**17**		**Perpustakaan**				**1.614.569**		**3.433.984**		**3.749.890**		**3.862.387**		**3.901.011**			
1	**02**	**17**	**01**	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca				418.860		2.119.182		2.273.498		2.341.703		2.365.120		9.518.363	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah pemustaka per tahun	332.661	333.611	418.860	339.861	1.440.053	343.501	1.526.456	347.101	1.572.249	350.701	1.587.972	350.701		
					Jumlah koleksi buku yang dipinjam	89.811	91.711		93.611	679.130	95.511	747.042	97.411	769.454	99.311	777.148	99.311		
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan	Persentase meningkatnya SDM perpustakaan	100%	100%	90.790									100%	90.790	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengolah, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengolahan bahan perpustakaan	100%	100%	244.493									100%	244.493	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	535.580	100%	573.100	100%	710.400	100%	731.712	100%	739.029	100%	3.289.821	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	206.846	100%	587.902	100%	610.692	100%	629.013	100%	635.303	100%	2.669.756	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	13.000	100%	40.800	100%	40.800	100%	42.024	100%	42.444	100%	179.068	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	95.000									100%	95.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	110.000	100%	110.000	100%	113.300	100%	114.433	100%	447.733	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	3.000	100%	4.500	100%	4.635	100%	4.681	100%	16.816	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	**02**	**18**		**Kearsipan**				**344.293**		**295.388**		**324.927**		**344.422**		**354.755**			
1	02	18	01	Program Pembinaan, Penataan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Daerah	Persentase tercapainya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	30%	40%	344.293									40%	344.293	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	02	18	02	Program Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	30%			50%	295.388	65%	324.927	75%	344.422	85%	354.755	85%	1.319.492	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2				**Urusan Pilihan**															
2	**01**	**01**		**Kelautan dan Perikanan**				**8.782.230**		**10.198.812**		**10.718.639**		**11.040.198**		**11.180.645**			
2	01	01	01	Program Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun)	10,71%	10,82%	1.025.636									10,82%	1.025.636	Dinas Perikanan
2	01	01	02	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				3.310.504		6.612.112		6.845.339		7.050.699		7.121.206		30.939.859	Dinas Perikanan
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	65.723	66.381	3.310.504	67.044	5.387.112	67.715	5.710.339	68.392	5.881.649	69.076	5.940.465	69.076		
					Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun)	10,71%			10,92%	1.225.000	11,03%	1.135.000	11,14%	1.169.050	11,26%	1.180.741	11,26%		
2	01	01	03	Program Pengembangan Perikanan Budidaya				1.062.064		2.281.200		2.414.800		2.487.244		2.512.116		10.757.424	Dinas Perikanan
					Produksi Perikanan budidaya (Ton /tahun)	207,2	211	1.062.064	215	1.201.200	219	1.270.000	223	1.308.100	227	1.321.181	227		
					Peningkatan produksi benih yang berkualitas	3,78%			8,70%	1.080.000	13,60%	1.144.800	16,20%	1.179.144	21,21%	1.190.935	21,21%		
2	01	01	04	Program Peningkatan Kualitas Pembenihan Ikan	Ketersediaan benih ikan yang berkualitas (ekor/tahun)	1.999.268	2.000.000	1.218.363									2.000.000	1.218.363	Dinas Perikanan
2	01	01	05	Program Pengembangan Usaha dan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan (Ton/tahun)	8.452	8.500	783.050									8.500	783.050	Dinas Perikanan

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	851.911	100%	788.200	100%	910.000	100%	937.300	100%	965.419	100%	4.452.830	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	394.203	100%	349.000	100%	380.000	100%	391.400	100%	403.142	100%	1.917.745	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	22.500	100%	38.000	100%	38.000	100%	39.140	100%	40.314	100%	177.954	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	104.000									100%	104.000	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	65.000	100%	65.000	100%	66.950	100%	68.959	100%	265.909	Dinas Perikanan
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	65.300	100%	65.500	100%	67.465	100%	69.489	100%	267.754	Dinas Perikanan
2	**01**	**02**		**Pariwisata**				**23.510.604**		**27.031.426**		**29.956.053**		**30.854.735**		**31.161.288**			
2	01	02	01	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan kualitas daya tarik wisata	67%	73%	10.948.021	79%	14.902.519	86%	16.877.676	93%	17.384.006	100%	17.557.846	100%	77.670.069	Dinas Pariwisata
2	01	02	02	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Komponen Pemasaran Pariwisata.	100%	100%	5.847.005									100%	5.847.005	Dinas Pariwisata
2	01	02	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%			100%	6.143.576	100%	7.152.174	100%	7.366.739	100%	7.440.406	100%	28.102.895	Dinas Pariwisata
2	01	02	04	Program Pengembangan SDM Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemahaman SDM Pariwisata	belum tersedia	80%	1.231.863									80%	1.231.863	Dinas Pariwisata
2	01	02	05	Program Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	Frekuensi Koordinasi Kemitraan Usaha Pariwisata	belum tersedia	2 kali	204.600									2 kali	204.600	Dinas Pariwisata
2	01	02	06	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata	Persentase peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	belum tersedia			80%	859.960	80%	945.956	80%	974.335	80%	984.078	80%	3.764.329	Dinas Pariwisata
2	01	02	07	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan	persentase SDM/ kelembagaan yang mendapatkan pembinaan	belum tersedia	100%	308.510									100%	308.510	Dinas Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan					Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
2	01	02	08	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase komunitas pelaku ekonomi kreatif yang dibina	50%	50%	1.896.778	56,25%	2.231.830	63,50%	2.811.194	68,75%	2.895.529	75%	2.924.485	100%	12.759.815	Dinas Pariwisata
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.416.885	100%	1.168.252	100%	1.307.274	100%	1.346.492	100%	1.355.762	100%	6.594.666	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.518.743	100%	1.514.290	100%	650.780	100%	670.303	100%	675.183	100%	5.029.299	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	53.200	100%	34.000	100%	34.000	100%	35.020	100%	36.071	100%	192.291	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	75.000									100%	75.000	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	161.000	100%	161.000	100%	165.830	100%	170.805	100%	658.635	Dinas Pariwisata
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Pariwisata
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	16.000	100%	16.000	100%	16.480	100%	16.652	100%	65.132	Dinas Pariwisata
2	**01**	**03**		**Pertanian**				**6.547.264**		**7.331.674**		**8.071.782**		**8.313.935**		**8.475.807**			
2	**01**	**03**	**01**	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura				843.731		1.276.663		1.412.887		1.455.273		1.498.932		6.487.485	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produksi Tanaman Pangan Strategis (Ton Gabah Kering Giling) (Padi)	2.386	2.436	410.891	2.605	319.656	2.723	410.000	2.841	422.300	2.960	434.969	2.960		
					Produksi Tanaman Pangan Lokal (Ton)	1.520	1.596	76.840	1.672	127.000	1.748	134.620	1.824	138.659	1.900	142.818	1.900		
					Produksi tanaman Hortikultura (Ton)	1.193	1.236	356.000	1.279	621.007	1.322	658.267	1.365	678.015	1.408	698.355	1.408		
					Peningkatan Mutu Produk Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (jumlah produk)	4			8	209.000	10	210.000	12	216.300	14	222.789	14		
2	**01**	**03**	**02**	Program Pengembangan Perkebunan	Produksi Lada	4793,40 ton	2.112 ton	330.925									2.112 ton	330.925	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produksi Karet	1416,16 ton	6 ton										6 ton		
					Produksi Tanaman Kopi	1200 ton	67 ton										67 ton		
					Kelengkapan persyaratan teknis dan non teknis perusahaan besar sawit	100%	100%										100%		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
2	01	03	03	Program Pengembangan Tanaman Perkebunan						527.415		582.375		599.846		617.842		2.327.478	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton)	8,1			8,9	383.665	9,3	430.000	9,8	442.900	10,3	456.187	10,3		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Produk Olahan Hasil Tanaman Perkebunan (Jenis)	2			4	143.750	5	152.375	6	156.946	7	161.655	7		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	01	03	04	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan				859.770		600.693		641.791		661.045		680.876		3.444.175	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	100%	100%	256.155									256.155		
					Persentase pelayanan penyakit hewan	100%	100%	150.180									150.180		
					Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	2 Kelompok	1 Kelompok	78.655									78.655		
					Jumlah Populasi ternak besar sapi	1.751	1.773	49.650	1.800	42.400	1.827	50.000	1.854	51.500	1.882	53.045	1.882		
					Jumlah Populasi ternak ayam	2.958.901	3.106.846	325.130	3.262.188	558.293	3.425.298	591.791	3.596.563	609.545	3.776.391	627.831	3.776.391		
2	01	03	05	Program Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penemuan kasus penyakit hewan menular	100%	100%		100%	454.495	100%	520.000	100%	535.600	100%	551.668	100%	2.061.763	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	01	03	06	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan				699.131		1.324.630		1.470.000		1.514.100		1.542.938		6.550.799	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	5.000	6.200	389.635	8.000	1.011.225	10.250	1.120.000	12.000	1.153.600	13.250	1.171.623	13.250		
					Produksi bibit kultur jaringan yang berkualitas	3.000	3.000	138.575									3.000		
					Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)	43	49	170.921	55	313.405	60	350.000	65	360.500	65	371.315	65		
2	01	03	07	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	Kelancaran peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan ketersediaan data base mendukung pengembangan prasarana sarana pertanian Jumlah kelembagaan petani	100%, 1 dok, 323 poktan	100% 1 dok 334 poktan	1.845.380									100% 1 dok 334 poktan	1.845.380	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
2	**01**	**03**	**08**	Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian						1.357.525		1.413.754		1.456.167		1.470.728		5.698.174	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Kelas Kelembagaan Kelompok Tani "Madya"	0			2	355.900	3	377.254	4	388.572	5	392.457	15		
					Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) "Profesional"	0			2	45.950	3	60.000	4	61.800	5	62.418	14		
					Peningkatan Luas Areal Tanam Padi (Ha)	425			465	955.675	485	976.500	505	1.005.795	525	1.015.853	525		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	995.110	100%	955.089	100%	1.119.000	100%	1.152.570	100%	1.164.096	100%	5.385.865	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	811.717	100%	538.189	100%	615.000	100%	633.450	100%	639.785	100%	3.238.141	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	61.500	100%	34.250	100%	34.250	100%	35.278	100%	35.630	100%	200.908	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	90.000									100%	90.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	90.000	100%	90.000	100%	92.700	100%	93.627	100%	366.327	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	172.725	100%	172.725	100%	177.907	100%	179.686	100%	703.043	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**01**	**04**		**Perdagangan**				**1.220.372**		**7.820.350**		**8.765.000**		**8.977.200**		**9.066.972**			
2	**01**	**04**	**01**	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				247.238		1.470.350		2.130.000		2.152.200		2.173.722		8.173.510	Dinas KUKMPTK

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	62%	78%	247.238	88%	1.336.000	92%	1.985.000	96%	2.005.100	100%	2.025.151	100%		
					Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya	100%	100%		100%	134.350	100%	145.000	100%	147.100	100%	148.571	100%		
2	01	04	02	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah pasar Representatif	1	2	973.134									2	973.134	Dinas KUKMPTK
2	01	04	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Pasar Representatif (Persentase pasar memenuhi standar)	20%			60%	6.350.000	75%	6.635.000	85%	6.825.000	100%	6.893.250	100%	26.703.250	Dinas KUKMPTK
2	**01**	**05**		**Perindustrian**				**1.249.650**		**4.365.698**		**1.269.000**		**1.300.070**		**5.367.298**			
2	01	05	01	Program Penataan Struktur Industri	Persentase (%) penataan struktur industri	0%	20%	459.975	40%	164.025	60%	300.000	80%	302.000	100%	305.020	100%	1.531.020	DPMPTSPP
2	01	05	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				274.130		573.663		925.000		952.750		962.278		3.687.820	DPMPTSPP
					Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.155	2.195	255.130	2.235	543.663	2.275	865.000	2.315	890.950	2.355	899.860	2.355		
					Tingkat kepatuhan pelaku Industri Kecil dan Menengah	22,59%	23%	19.000	23,1%	30.000	24%	60.000	25%	61.800	26%	62.418	26%		
2	01	05	03	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial				329.350		3.628.010		44.000		45.320		4.100.000		8.146.680	DPMPTSPP
					Terpenuhinya syarat pembentukan sentra IKM	12,50%	25%	329.350	50%	14.600	75%	44.000	100%	45.320	0	0	100%		
					Jumlah sentra IKM	0	0	0	1	3.613.410	0	0	0	0	1	4.100.000	2		
2	01	05	04	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase (%) tingkat pengapdosian teknologi industri	20%	25%	186.195									25%	186.195	DPMPTSPP
2	**01**	**06**		**Transmigrasi**															
3				**Fungsi Penunjang Urusan**															
3	**01**	**01**		**Perencanaan**				**3.588.976**		**5.015.411**		**4.901.969**		**5.049.028**		**5.159.124**			
3	01	01	01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	78%	100%	789.940	100%	666.515	100%	730.167	100%	752.071	100%	774.634	100%	3.713.327	BAPPEDA

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	01	02	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan program perencanaan daerah	78%	100%	139.990	100%	165.800	100%	186.302	100%	191.891	100%	197.648	100%	881.630	BAPPEDA
3	01	01	03	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan program perencanaan daerah	78%	100%	405.050	100%	414.700	100%	429.700	100%	442.591	100%	455.869	100%	2.147.910	BAPPEDA
3	01	01	04	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan program perencanaan daerah	78%	100%	301.735	100%	262.225	100%	280.460	100%	288.874	100%	297.540	100%	1.430.834	BAPPEDA
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.047.571	100%	1.063.365	100%	1.200.702	100%	1.236.723	100%	1.273.824	100%	5.822.184	BAPPEDA
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	710.350	100%	1.965.915	100%	1.597.747	100%	1.645.680	100%	1.655.728	100%	7.575.420	BAPPEDA
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	20.350	100%	113.000	100%	113.000	100%	116.390	100%	117.829	100%	480.569	BAPPEDA
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	163.990									100%	163.990	BAPPEDA
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	315.330	100%	315.330	100%	324.790	100%	334.534	100%	1.289.983	BAPPEDA
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	BAPPEDA
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	48.562	100%	48.562	100%	50.019	100%	51.519	100%	198.662	BAPPEDA
3	**01**	**02**		**Keuangan**				**10.851.188**		**9.601.927**		**10.253.851**		**10.561.467**		**10.789.544**			

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	02	01	Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan berlaku	100%	100%	1.465.567	100%	866.967	100%	918.985	100%	946.555	100%	964.728	100%	5.162.802	BPKAD
3	01	02	02	Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait	100%	100%	237.410	100%	237.410	100%	251.655	100%	259.204	100%	263.980	100%	1.249.659	BPKAD
3	01	02	03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	160.541	100%	177.245	100%	187.880	100%	193.516	100%	196.228	100%	915.410	BPKAD
3	01	02	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	92,31%	92,31%	1.397.395	92,31%	1.361.675	100%	1.443.376	100%	1.486.677	100%	1.511.729	100%	7.200.851	BPKAD
3	01	02	05	Program Tertib Administrasi Barang Tidak Bergerak	Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang bersertifikat	44,18%	50,06%	582.250									50,06%	582.250	BPKAD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.848.000	100%	1.735.602	100%	1.757.300	100%	1.810.019	100%	1.864.320	100%	9.015.241	BPKAD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	677.076	100%	1.171.676	100%	1.185.920	100%	1.221.498	100%	1.258.143	100%	5.514.312	BPKAD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	24.500	100%	24.500	100%	25.000	100%	25.750	100%	26.523	100%	126.273	BPKAD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	85.000									100%	85.000	BPKAD
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	85.000	100%	85.000	100%	87.550	100%	90.177	100%	347.727	BPKAD
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	85.722									100%	85.722	BPKAD
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	3.000	100%	4.000	100%	4.120	100%	4.244	100%	15.364	BPKAD

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	02	06	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku	100%	100%	1.182.157									100%	1.182.157	BPPRD
3	01	02	07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,46%			16,22%	1.704.938	16,36%	1.772.550	16,49%	1.825.727	16,62%	1.860.425	16,62%	7.163.640	BPPRD
3	01	02	08	Program Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99,65%			100%	170.000	100%	215.000	100%	221.450	100%	225.471	100%	831.921	BPPRD
3	01	02	09	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase (%) pembinaan pengelolaan pendapatan daerah	40,79%	97%	124.925									97%	124.925	BPPRD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.743.835	100%	1.385.344	100%	1.555.196	100%	1.601.852	100%	1.629.908	100%	7.916.135	BPPRD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.127.410	100%	607.670	100%	780.090	100%	803.493	100%	817.392	100%	4.136.055	BPPRD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	10.000	100%	9.500	100%	9.500	100%	9.785	100%	10.079	100%	48.864	BPPRD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	89.400									100%	89.400	BPPRD
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	58.400	100%	58.400	100%	60.152	100%	61.957	100%	238.909	BPPRD
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	BPPRD
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	3.000	100%	4.000	100%	4.120	100%	4.244	100%	15.364	BPPRD
3	**01**	**03**		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**				**8.677.827**		**11.930.261**		**12.021.783**		**12.378.686**		**12.735.695**			
3	01	03	01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.303.481		6.841.128		7.251.596		7.469.144		7.693.218		33.558.566	BKPSDM

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	50%	59,82%	4.303.481	61,57%	1.256.600	63,32%	1.331.996	65,07%	1.371.956	66,82%	1.413.115	66,82%		BKPSDM
					Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi manajerial	67,58%	69,18%		72%	3.374.663	75%	3.577.143	78%	3.684.457	80%	3.794.991	80%		
					Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional	78,15%	80%		83%	2.209.865	85%	2.342.457	87%	2.412.731	90%	2.485.113	90%		
3	**01**	**03**	**02**	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				2.933.779		1.394.944		1.478.249		1.522.597		1.568.274		8.897.843	BKPSDM
					Persentase penilaian prestasi Kerja ASN tepat Waktu	95%	100%	2.933.779	100%	12.350	100%	12.700	100%	13.081	100%	13.473	100%		
					Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapat layanan, perlndungan dan penghargaan	100%	100%		100%	1.382.594	100%	1.465.549	100%	1.509.516	100%	1.554.801	100%		
3	**01**	**03**	**03**	Program Penataan Manajemen SDM Aparatur						1.667.480		1.165.229		1.200.186		1.224.864		5.257.758	BKPSDM
					Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	90,65%			100%	630.000	100%	65.500	100%	67.465	100%	69.489	100%		
					Persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya	100,00%			100%	1.037.480	100%	1.099.729	100%	1.132.721	100%	1.155.375	100%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	943.180	100%	844.800	100%	944.800	100%	973.144	100%	1.002.338	100%	4.708.262	BKPSDM
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	466.387	100%	886.684	100%	886.684	100%	913.285	100%	940.683	100%	4.093.722	BKPSDM
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	21.000	100%	59.400	100%	59.400	100%	61.182	100%	63.017	100%	263.999	BKPSDM
3	**01**	**03**	**05**	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	225.000	100%	225.000	100%	228.000	100%	232.000	100%	910.000	BKPSDM
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	BKPSDM

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	10.825	100%	10.825	100%	11.150	100%	11.300	100%	44.100	BKPSDM
3	**01**	**04**		**Penelitian dan Pengembangan**				**467.277**		**469.470**		**494.335**		**509.165**		**518.251**			
3	**01**	**04**	**01**	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	467.277									100%	467.277	BAPPEDA
					Persentase (%) ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	100%	100%										100%		BAPPEDA
3	**01**	**04**	**02**	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase (%) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah	100%			100%	469.470	100%	494.335	100%	509.165	100%	518.251	100%	1.991.221	BAPPEDA
3	**01**	**05**		**Fungsi lainnya**				**68.795.679**		**100.834.709**		**80.255.108**		**82.612.871**		**83.841.620**			
3	**01**	**05**	**02**	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						109.810		116.399		119.891		123.487		469.586	Sekretariat Daerah
					Persentase Perangkat daerah yang menyusun pelaporan LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	57.200	100%	60.632	100%	62.451	100%	64.324	100%		
					Persentase Perangkat daerah yang menyusun LPPD sesuai aturan dan tepat waktu	100%			100%	52.610	100%	55.767	100%	57.440	100%	59.163	100%		
3	**01**	**05**	**03**	Program Penataan Kelembagaan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya	100%	100%	22.800	100%	273.385	100%	277.450	100%	285.774	100%	288.631	100%	1.148.040	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**04**	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100%	707.800									100%	707.800	Sekretariat Daerah
3	**01**	**05**	**05**	Program Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial						4.989.400		5.007.550		5.108.333		5.159.416		20.264.699	Sekretariat Daerah
					Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%			100%	4.989.400	100%	5.007.550	100%	5.108.333	100%	5.159.416	100%		

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	05	06	Program Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase cakupan informasi pemerintah kabupaten melalui media informasi	100%			100%	1.928.825	100%	2.080.325	100%	2.105.275	100%	2.126.328	100%	8.240.753	Sekretariat Daerah
3	01	05	07	Program Layanan Pengadaan barang dan Jasa	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%			100%	3.199.510	100%	3.519.461	100%	3.617.890	100%	3.654.069	100%	13.990.930	Sekretariat Daerah
3	01	05	08	Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase pengendalian pembangunan Perangkat Daerah yang realisasi fisik 100% dan keuangannya diatas 80%	85%			95%	22.300	95%	35.000	95%	36.000	95%	36.360	95%	129.660	Sekretariat Daerah
3	01	05	09	Program Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah	data belum tersedia			100%	80.200	100%	269.200	100%	272.100	100%	274.821	100%	896.321	Sekretariat Daerah
3	01	05	10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	100%	479.730	100%	328.135	100%	332.140	100%	342.170	100%	345.592	100%	1.827.767	Sekretariat Daerah
3	01	05	11	Program Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah	90%	100%	214.100									100%	214.100	Sekretariat Daerah
3	01	05	12	Program Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah	Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah	90%			100%	318.080	100%	483.080	100%	499.875	100%	504.874	100%	1.805.909	Sekretariat Daerah
3	01	05	13	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	persentase pembinaaan kehidupan sosial keagamaan	100%	100%	725.650									100%	725.650	Sekretariat Daerah
3	01	05	14	Program Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah	data belum tersedia			100%	1.162.110	100%	1.253.375	100%	1.318.740	100%	1.331.927	100%	5.066.152	Sekretariat Daerah
3	01	05	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik	50%	75%	5.656.043	80%	16.757.900	90%	1.797.000	100%	1.802.350	100%	1.820.374	100%	27.833.666	Sekretariat Daerah
3	01	05	16	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama						87.585		89.105		91.979		92.899		361.568	Sekretariat Daerah
					Persentase rumusan kebijakan pemerintahan umum, otonomi daerah dan pertanahan daerah	data belum tersedia			67%	60.605	67%	61.205	67%	63.100	100%	63.731	100%		
					Jumlah rumusan kerjasama pemerintah daerah	19			25	26.980	30	27.900	35	28.879	40	29.168	40		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	7.420.502	100%	5.689.266	100%	5.742.500	100%	5.914.775	100%	5.973.923	100%	30.740.965	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	6.282.675	100%	9.578.665	100%	7.297.776	100%	7.516.710	100%	7.591.877	100%	38.267.703	Sekretariat Daerah

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	67.250	100%	125.000	100%	125.000	100%	128.750	100%	130.038	100%	576.038	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	303.400									100%	303.400	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	303.400	100%	303.400	100%	312.502	100%	315.627	100%	1.234.929	Sekretariat Daerah
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	62.335									100%	62.335	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	149.250	100%	149.250	100%	153.728	100%	155.265	100%	607.492	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase penyebarluasan informasi potensi daerah	100%	100%	302.450									100%	302.450	Sekretariat Daerah
3	01	05	17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	100%	100%	21.188.025	100%	19.535.825	100%	20.707.975	100%	21.350.721	100%	21.564.228	100%	104.346.774	Sekretariat DPRD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	1.729.220	100%	1.727.720	100%	1.880.760	100%	1.954.231	100%	1.973.773	100%	9.265.704	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.422.364	100%	1.059.344	100%	1.120.500	100%	1.154.300	100%	1.165.843	100%	5.922.351	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	402.800	100%	99.900	100%	99.900	100%	102.395	100%	103.419	100%	808.414	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	150.000									100%	150.000	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	300.000	100%	300.000	100%	305.000	100%	314.150	100%	1.219.150	Sekretariat DPRD
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	14.500									100%	14.500	Sekretariat DPRD

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	10.000	100%	10.000	100%	10.500	100%	10.815	100%	41.315	Sekretariat DPRD
3	01	05	18	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase jumlah aparatur pengawasan yang lulus diklat dan bersertifikasi	100%	100%	149.500									100%	149.500	Inspektorat
3	01	05	19	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.408.437		1.923.857		2.116.243		2.204.568		2.238.214		9.891.319	Inspektorat
					Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kabupaten	20,28%	70%	1.408.437	75%	1.410.752	80%	1.551.827	90%	1.624.557	90%	1.640.803	90%		
					Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB	10%			100%	109.705	100%	120.676	100%	126.721	100%	130.523	100%		
					Persentase pelanggaran pegawai	0%			0%	403.400	0%	443.740	0%	453.290	0%	466.889	0%		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	632.633	100%	650.763	100%	815.839	100%	848.659	100%	874.119	100%	3.822.013	Inspektorat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	311.870	100%	811.987	100%	817.250	100%	841.768	100%	850.185	100%	3.633.060	Inspektorat
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	19.500	100%	50.195	100%	50.195	100%	51.701	100%	53.252	100%	224.843	Inspektorat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	238.975									100%	238.975	Inspektorat
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	414.255	100%	414.255	100%	426.683	100%	439.483	100%	1.694.676	Inspektorat
3	01	05	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	Inspektorat
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	12.810	100%	12.810	100%	13.194	100%	13.590	100%	52.404	Inspektorat

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
3	01	05	20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	100%	100%	136.485									100%	136.485	KECAMATAN
						100%	100%	85.735									100%	85.735	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	10.100									100%	10.100	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	7.400									100%	7.400	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	17.200									100%	17.200	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	16.050									100%	16.050	KECAMATAN SELAT NASIK
3	01	05	21	Program Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat	100%	100%	6.532.536									100%	6.532.536	KECAMATAN
						100%	100%	4.028.153									100%	1.484.301	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	495.318									100%	495.318	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	571.483									100%	571.483	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	592.535									100%	592.535	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	845.048									100%	845.048	KECAMATAN SELAT NASIK
3	01	05	22	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan	Desa/kelurahan taat administrasi	79,84%	80,84%	607.835									80,84%	607.835	KECAMATAN

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
						79,84%	80,84%	418.960									80,84%	418.960	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						79,84%	80,84%	43.653									80,84%	43.653	KECAMATAN BADAU
						79,84%	80,84%	41.735									80,84%	41.735	KECAMATAN SIJUK
						79,84%	80,84%	49.488									80,84%	49.488	KECAMATAN MEMBALONG
						79,84%	80,84%	54.000									80,84%	54.000	KECAMATAN SELAT NASIK
3	**01**	**05**	**23**	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan						6.905.325		7.401.381		7.623.422		7.759.193		29.689.321	KECAMATAN
					Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	145.418	87,50%	168.559	91,50%	173.616	92,50%	175.352	92,50%		KECAMATAN
					Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	91.155	87,50%	96.624	91,50%	99.523	92,50%	100.518	92,50%		KECAMATAN TANJUNGPANDAN
					Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	10.750	87,50%	12.000	91,50%	12.360	92,50%	12.484	92,50%		KECAMATAN BADAU
					Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	10.000	87,50%	10.600	91,50%	10.918	92,50%	11.027	92,50%		KECAMATAN SIJUK
					Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	13.513	87,50%	28.135	91,50%	28.979	92,50%	29.269	92,50%		KECAMATAN MEMBALONG
					Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten	61%	78%		85%	20.000	87,50%	21.200	91,50%	21.836	92,50%	22.054	92,50%		KECAMATAN SELAT NASIK
					Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Tanjungpandan)	40	45		50	1.779.683	55	1.886.463	60	1.943.057	65	1.962.488	65		KECAMATAN TANJUNGPANDAN

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
					Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Badau)	60	65		70	503.658	70	571.900	75	589.057	80	594.948	80		KECAMATAN BADAU
					Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Sijuk)	70	75		80	485.000	85	514.100	90	529.523	90	534.818	90		KECAMATAN SIJUK
					Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Membalong)	23	22		36	608.878	22	721.500	36	743.145	22	750.576	22		KECAMATAN MEMBALONG
					Jumlah prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kecamatan Selat Nasik)	28	28		28	612.000	28	648.720	28	668.182	28	674.863	28		KECAMATAN SELAT NASIK
					Persentase Sarana dan Prasarana lingkungan kelurahan dalam kondisi baik (Kecamatan Tanjungpandan)	Belum ada data	15%		20%	2.770.690	25%	2.890.138	30%	2.976.842	45%	3.066.147	45%		KECAMATAN TANJUNGPANDAN
3	**01**	**05**	**24**	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	79,84%			87,50%	542.173	90%	608.279	92,50%	626.527	95%	645.323	95%	2.422.302	KECAMATAN
						79,84%			87,50%	327.770	90%	332.429	92,50%	342.402	95%	352.674	95%		KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						79,84%			87,50%	37.003	90%	58.300	92,50%	60.049	95%	61.850	95%		KECAMATAN BADAU
						79,84%			87,50%	76.000	90%	77.100	92,50%	79.413	95%	81.795	95%		KECAMATAN SIJUK
						79,84%			87,50%	56.900	90%	98.150	92,50%	101.095	95%	104.127	95%		KECAMATAN MEMBALONG
						79,84%			87,50%	44.500	90%	42.300	92,50%	43.569	95%	44.876	95%		KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	3.555.467	100%	3.461.082	100%	3.234.442	100%	3.331.475	100%	3.431.420	100%	17.013.885	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	362.348	100%	320.988	100%	422.850	100%	435.536	100%	448.602	100%	1.990.323	KECAMATAN BADAU

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
						100%	100%	386.550	100%	351.250	100%	453.500	100%	467.105	100%	481.118	100%	2.139.523	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	363.309	100%	328.399	100%	463.499	100%	477.404	100%	491.726	100%	2.124.337	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	321.832	100%	310.000	100%	414.000	100%	426.420	100%	439.213	100%	1.911.465	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.416.388	100%	11.027.383	100%	3.749.993	100%	3.862.493	100%	3.978.368	100%	24.034.624	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	195.555	100%	269.555	100%	270.500	100%	278.615	100%	286.973	100%	1.301.198	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	245.340	100%	302.850	100%	303.100	100%	312.193	100%	321.559	100%	1.485.042	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	279.860	100%	254.160	100%	275.030	100%	283.281	100%	291.779	100%	1.384.110	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	756.500	100%	518.000	100%	429.500	100%	442.385	100%	455.657	100%	2.602.042	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	90.230	100%	166.400	100%	166.400	100%	171.392	100%	176.534	100%	770.956	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	10.500	100%	15.500	100%	16.500	100%	16.995	100%	17.505	100%	77.000	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	12.500	100%	20.000	100%	21.000	100%	21.630	100%	22.279	100%	97.409	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	11.000	100%	27.000	100%	28.000	100%	28.840	100%	29.705	100%	124.545	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	10.000	100%	35.000	100%	36.000	100%	37.080	100%	38.192	100%	156.272	KECAMATAN SELAT NASIK

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	80.000									100%	80.000	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	112.000									100%	112.000	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	30.000									100%	30.000	KECAMATAN SIJUK
						100%	100%	20.000									100%	20.000	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	50.000									100%	50.000	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	237.500	100%	251.100	100%	258.633	100%	266.392	100%	1.013.625	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%			100%	30.000	100%	55.000	100%	56.650	100%	58.350	100%	200.000	KECAMATAN BADAU
						100%			100%	50.000	100%	52.000	100%	53.560	100%	55.167	100%	210.727	KECAMATAN SIJUK
						100%			100%	33.445	100%	40.500	100%	41.715	100%	42.966	100%	158.626	KECAMATAN MEMBALONG
						100%			100%	50.000	100%	52.000	100%	53.560	100%	55.167	100%	210.727	KECAMATAN SELAT NASIK
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	80.000									100%	80.000	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%	100%	10.000									100%	10.000	KECAMATAN BADAU
						100%	100%	10.000									100%	10.000	KECAMATAN SIJUK

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
						100%	100%	10.000									100%	10.000	KECAMATAN MEMBALONG
						100%	100%	10.000									100%	10.000	KECAMATAN SELAT NASIK
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	238.950	100%	243.950	100%	251.269	100%	258.807	100%	992.975	KECAMATAN TANJUNGPANDAN
						100%			100%	35.000	100%	45.000	100%	46.350	100%	47.741	100%	174.091	KECAMATAN BADAU
						100%			100%	83.800	100%	84.000	100%	86.520	100%	89.116	100%	343.436	KECAMATAN SIJUK
						100%			100%	35.673	100%	85.375	100%	87.936	100%	90.574	100%	299.558	KECAMATAN MEMBALONG
						100%			100%	118.000	100%	119.000	100%	122.570	100%	126.247	100%	485.817	KECAMATAN SELAT NASIK
3	**01**	**05**	**25**	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	100%	1.030.133	100%	885.000	100%	935.122	100%	963.176	100%	992.071	100%	4.805.501	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**26**	Program Penguatan Kewaspadaan	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100%	100%	410.225	100%	453.000	100%	498.300	100%	513.249	100%	528.646	100%	2.403.420	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**27**	Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya	Persentase terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya	100%	100%	488.925	100%	268.000	100%	294.800	100%	303.644	100%	312.753	100%	1.668.122	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**28**	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	Persentase peran partai politik dalam pembangunan	100%	100%	341.450	100%	602.000	100%	662.200	100%	682.066	100%	693.221	100%	2.980.937	KESBANGPOL
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	496.300	100%	473.000	100%	620.300	100%	638.909	100%	641.376	100%	2.869.885	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	338.854	100%	538.000	100%	549.750	100%	566.243	100%	583.230	100%	2.576.076	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	12.000	100%	58.800	100%	59.000	100%	60.770	100%	62.593	100%	253.163	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	50.000									100%	50.000	KESBANGPOL

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	Target	Rp. (dalam ribu rupiah)	
				Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan	100%			100%	50.000	100%	50.000	100%	51.500	100%	53.045	100%	204.545	KESBANGPOL
3	**01**	**05**	**01**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	100%	100%	10.000									100%	10.000	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	40.000	100%	40.000	100%	41.200	100%	42.436	100%	163.636	KESBANGPOL
				TOTAL				**714.090.428**		**935.454.351**		**945.330.568**		**964.671.126**		**975.676.075**			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu Tahun2018 – 2023. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran dan memenuhi kriteria kekhususan (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), rasional (*relevant*), batas waktu pencapaian (*time bond*), bersifat terus menerus meningkatkan kualitas kinerja (*continuously improve*).Selain untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, indikator kinerja juga merupakan instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas ditetapkan indikator kinerja daerah sebagai berikut :

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung

No	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,87	71,97	71,99	72,01
2	Angka Kemiskinan	7,1	6,85	6,6	6,35	6,0
3	Angka Harapan Hidup	70,54	70,60	70,65	70,71	70,77
4	Rata-rata Lama Sekolah	8,14	8,15	8,16	8,18	8,19
5	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	13.298	13.496	13.671	13.862	14.049
6	Status Desa “Maju”	15	20	25	30	35
7	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB
8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	CC	B	BB	BB	BB
10	Indeks Profesionalitas ASN	76%	77%	78%	79%	81%
11	Survey Kepuasan Masyarakat	80	83	85	87	88
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,50	5,63	5,71	5,83	5,90
13	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
14	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	27,21%	27,31%	27,41%	27,52%	27,62%
15	Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)	72.215.980.	93.880.774	122.045.006	156.658.507	206.256.609

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Nilai Omset Usaha mikro (ribu rupiah)	1.118.950.000	1.266.792.500	1.479.811.375	1.701.783.081	1.957.050.000
17	Nilai investasi (juta rupiah)	1.225.191	1.780.878	2.519.187	3.507.975	5.023.529
18	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	41,89%	46,25%	51,45%	58,39%	64,90%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,78	62,73	64,19	65,28	66,10
20	Indeks Kualitas Air	60,13	62,22	63,79	64,97	65,85
21	Indeks Kualitas Udara	90,80	91,85	92,64	93,23	93,67
22	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38,75	41,26	43,15	44,56	45,62
23	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	3,10%	4,20%	4,50%	5,50%	6,50%

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kesejahteraan Masyarakat							
	1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya							
	1. PDRB kabupaten :							
	a. Atas dasar harga berlaku (milyar rupiah).	8.738,2	10.058,2	10.733,2	11.407,8	12.082,4	12.757,1	12.757,1
	b. Atas dasar harga konstan (milyar rupiah).	5.969,5	6.457,6	6.714,9	6.972,4	7.229,7	7.487,1	7.487,1
	2. Laju inflasi (%).	2,72	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
	3. Pendapatan per Kapita (ribu rupiah)	47.902	53.797	56.765	59.732	62.700	65.667	65.667

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Pelayanan Umum									
	Layanan Urusan Wajib									
	1.	Pendidikan								
		1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	61,43%	62,93%	64,43%	65,93%	67,43%	68,93%	68,93%
		2.	APK SD (Laki-laki dan Perempuan)	119,17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	APM SD (Laki-laki dan Perempuan)	96,64%	97,64%	97,44%	97,84%	98,24%	98,64%	98,64%
		4.	APK SMP (Laki-laki dan Perempuan)	100,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	APM SMP (Laki-laki dan Perempuan)	81,69%	82,09%	82,49%	82,89%	83,29%	83,69%	83,69%
		6.	Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi	16,67%	33,33%	50%	66,67%	83,33%	100%	100%
		7.	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi	60,63%	65,03%	70,03%	75,03%	80,03%	85,03%	85,03%
		8.	Pesentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi	75,05%	78,05%	81,03%	84,05%	87,02%	89,03%	89,03%
		9.	Persentase(%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	85%	88%	90%	93%	96%	97,50%	97,50%
		10.	Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	Belum tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.	Kesehatan								
		1.	Terintegrasinya layanan kesehatan	Belum tersedia	20%	40%	60%	80%	100%	100%
		2.	Puskesmas terakreditasi madya	33.33%	33.33%	66.67%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Terakreditasi paripurna	27%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Persentase Penanganan Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		7.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		8.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		9.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		10.	Pelayanan Kesehatan Balita	75,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		11.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		13.	Persentase Desa Siaga	62,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		1.	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	76.08%	77%	78%	79%	80%	81%	81%
		2.	Persentase jalan lingkungan yang tertangani	Belum tersedia		29,85%	44,78%	59,70%	74,63%	74,63%
		3.	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	60,14%	60,72%	61,30%	61,87%	62,45%	63,02%	63,02%
		4.	Persentase pengolahan air limbah pemukiman	52,80%	53%	54%	55%	56%	57%	57%
		5.	Persentase sawah yang terairi irigasi	53.79%	54.26%	54.72%	55.19%	55.65%	56.58%	56.58%
		6.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
		7.	Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani	5.23%	6.52%	26.50%	46.50%	66.60%	86.60%	86.60%
		8.	Persentase drainase dalam kondisi baik	34.33%	46.85%	59.35%	71.85%	84.35%	96.85%	96.85%
		9	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi standa	10.56%	14.20%	17.40%	20.60%	23.80%	27,0%	27,0%
		10.	Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	10%	12%	15%	20%	25%	30%	30%
		11.	Terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12.	Dokumen tata ruang	1	1	1	1	1	1	1
		13.	Dokumen tata ruang yang telah di Perdakan	1	0	1	1	1	0	0
		14.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	Belum tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		15.	Ketaatan terhadap RTRW	Belum tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		16.	Persentase Tenaga Terampil bersertifikat Konstruksi	21,17%	36,94%	53%	68%	84%	100%	100%
		17.	Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik	Belum tersedia	6%	12%	17%	23%	28%	28%
		18.	Persentase taman terkelola	Belum tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
		1	Persentase Luasan kawasan kumuh	51,28%	22%	15,39%	7,95%	4,44%	0	0
		2.	Jumlah warga negara korban bencana yang mendapat rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
		1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Belum tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Persentase layanan keamanan dan ketertiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Sosial								
		1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Tidak terjadi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
		4.	Persentase penduduk miskin desil 1, 2 dan 3	88,28%	87,83%	87,38%	86,93%	86,48%	86,03%	86,03%
		5.	Persentase PSKS aktif	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	7	Tenaga Kerja								
		1.	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	30,30%	31%	32%	35%	37%	40%	40%
		3.	Persentase Peluang Kerja Mandiri/berwirausaha	15%	16%	17%	20%	22%	25%	25%
	8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
		1.	Status KLA (Kabupaten Layak Anak) Pratama	Deklarasi	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
		2.	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5,9%	5,8%	5,7%	5,5%	5,3%	5,2%	5,2%
		3.	Persentase penanganan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50%	51%	52%	53%	54%	55%	55%
		5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	20%	22%	25%	27%	29%	30%	30%

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	9	Pangan								
		1.	Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA	22%	18%	36%	55%	73%	91%	91%
		2.	Persentase (%)Tingkat Keamanan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase ketersediaan cadangan pangan	5,59%	14.69%	35.66%	56.64%	77.62%	100%	100%
		4.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	92,56%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	97,00%
	10	Pertanahan								
		1.	Persentase penegasan batas wilayah dalam kabupaten (kecamatan)	Belum tersedia	0	25%	50%	75%	100%	100%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan lahan pelayanan public	Belum tersedia	0	20%	20%	20%	20%	20%
	11	Lingkungan Hidup								
		1.	Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	34.10%	39%	44%	49%	54%	59%	59%
		2.	Sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat kabupaten	23	26	29	32	35	38	38
		3.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Persentase jumlah sampah yang ditangani	30,84%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
		5.	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	4	11	14	17	20	23	23
	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
		1.	Persentase capaian pendaftaran penduduk	77%	79%	81%	83%	84%	86%	86%
		2.	Persentase capaian pencatatan sipil	92%	93%	94%	94%	95%	95%	95%
		3.	Persentase pemanfaatan data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
		1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Belum tersedia	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
		2.	Persentase ketersediaan data dan informasi desa (Profil Desa) yang mutakhir	46.94%	61.22%	71.43%	100%	100%	100%	100%
		3.	Persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	97.62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Persentase kelembagaan desa aktif	98.93%	99.07%	99.20%	99.53%	99.87%	100%	100
		5.	Persentase hasil TTG yang diterapkan di masyarakat	27.27%	28.57%	29.73%	30.77%	32.50%	37.50%	37.50%

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	6.	Persentase BUMDesa aktif tiap desa		69.05%	76.19%	83.33%	90.48%	97.62%	100%	100%
	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1.	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		8.99%	8.59%	8.19%	7.79%	6.99%	6.50%	6.50%
	2.	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		22%	21.60%	21.20%	20.80%	20.40%	20%	20%
	3.	Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		20%	19.50%	19%	18.50%	18%	17.50%	17.50%
	15	Perhubungan								
	1.	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar		32.12%	39.03%	54.26%	67.83%	82%	98.35%	98.35%
	2.	Persentase pemenuhan Penerangan Jalan Umum sesuai standar		17.98%	20.29%	22.60%	24.91%	27.23%	29.54%	29.54%
	3.	Persentase penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas		50%	42%	34%	26%	18%	10%	10%
	4.	Persentase pemenuhan kebutuhan trayek dalam kabupaten		12.50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.	Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar		13.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16	Komunikasi dan Informatika								
	1.	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi		25%	45%	65%	80%	90%	90%	90%
	2.	Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani		Belum tersedia	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	3.	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan		40%	40%	60%	80%	90%	90%	90%
	17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
	1.	Penumbuhan usaha mikro		17,596	17,748	17,898	18,048	18,198	18,348	18,348
	2.	Persentase (%) usaha mikro yang omsetnya meningkat		42%	47%	52%	57%	62%	67%	67%
	3.	Persentase (%) Koperasi aktif		70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
	4.	Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang dibangun		14%	42%	56%	70%	84%	100%	100%
	18	Penanaman Modal								
	1.	Peningkatan jumlah investor		87	100	120	144	174	214	214
	2.	Indeks kepuasan masyarakat		87.21%	88%	88%	88%	90%	90%	90%

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3.	Persentase (%) kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal.	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	19	Kepemudaan dan Olahraga								
		1.	Jumlah kelompok olahraga masyarakat aktif	20	25	30	35	40	45	45
		2.	Jumlah atlet berprestasi yang aktif	1013	1083	1137	1194	1254	1317	1317
		3.	Jumlah pelatih bersertifikasi yang aktif	532	559	587	616	647	679	679
		4.	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	60%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
		5.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	85%	85%	85%	90%	95%	100%	100%
		6.	Persentase wirausaha pemula	75%	80%	80%	85%	85%	90%	90%
	20	Statistik								
		1.	Persentase pemanfaatan data statistik daerah	Belum tersedia	60%	70%	80%	90%	90%	90%
	21	Kebudayaan								
		1.	Persentase nilai budaya yang berkembang	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
	Layanan Urusan Pilihan									
	1	Kelautan dan Perikanan								
		1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	65,723	66,381	67,044	67,715	68,392	69,076	69,076
		2.	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun)	10.71%	10.82%	10.92%	11.03%	11.14%	11.26%	11.26%
		3.	Produksi Perikanan budidaya (Ton /tahun)	207.2	211	215	219	223	227	227
		4.	Peningkatan produksi benih yang berkualitas	3.78%	6.09%	8.70%	13.60%	16.20%	21.21%	21.21%
	2	Pariwisata								
		1.	Persentase peningkatan kualitas daya tarik wisata	67%	73%	79%	86%	93%	100%	100%
		2	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	Belum tersedia	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		4.	Persentase komunitas pelaku ekonomi kreatif yang dibina	50%	50%	56,25%	63,50%	68,75%	75%	100%
	3	Pertanian								
		1.	Produksi Tanaman Pangan Strategis (Ton Gabah Kering Giling) (Padi)	2.386	2.436	2.605	2.723	2.841	2.960	2.960
		2.	Produksi Tanaman Pangan Lokal (Ton)	1.520	1.596	1.672	1.748	1.824	1.900	1.900
		3.	Produksi tanaman Hortikultura (Ton)	1.193	1.236	1.279	1.322	1.365	1.408	1.408

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			4.	Peningkatan Mutu Produk Olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura (jumlah produk)	4	6	8	10	12	14	14
			5.	Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton)	8.1	8.5	8.9	9.3	9.8	10.3	10.3
			6.	Produk Olahan Hasil Tanaman Perkebunan (jenis)	2	3	4	5	6	7	7
			7.	Jumlah Populasi ternak besar sapi	1751	1773	1800	1827	1854	1882	1882
			9.	Jumlah Populasi ternak ayam	2.958.901	3.106.846	3.262.188	3.425.298	3.596.563	3.776.391	3.776.391
			10.	Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	5.000	6.200	8.000	10.250	12.000	13.250	13.250
			11.	Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)	43	49	55	60	65	65	65
			12.	Peningkatan Kelas Kelembagaan Kelompok Tani "Madya"	0	1	2	3	4	5	5
			13.	Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) "Profesional"	0	1	2	3	4	5	5
			14.	Peningkatan Luas Areal Tanam Padi (Ha)	425	445	465	485	505	525	525
		4	Perdagangan								
			1.	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar	62%	78%	88%	92%	96%	100%	100%
			2.	Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Pasar Representatif (Persentase pasar memenuhi standar)	20%	40%	60%	75%	85%	100%	100%
		5	Perindustrian								
			1.	Persentase (%) Penataan Struktur Industri	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
			2.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2.155	2.195	2.235	2.275	2.315	2.355	2.355
			3.	Tingkat kepatuhan pelaku Industri Kecil dan Menengah	22,59%	23%	23,1%	24%	25%	26%	26%
			4.	Terpenuhinya syarat pembentukan sentra IKM	12.50%	25%	37.50%	50%	62.50%	75%	75%
			5.	Jumlah sentra IKM	0	0	1	0	0	1	2
		Penunjang Urusan Pemerintahan									
		1.	Perencanaaan								
			1.	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan program perencanaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3.	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan program perencanaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4.	Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Pemerintahan dengan program perencanaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Keuangan								
			1.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4.	Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	92,31%	92,31%	92,31%	100%	100%	100%	100%
			5.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,46%		16,22%	16,36%	16,49%	16,62%	16,62%
			6.	Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	99,65%		100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan								
			1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	50%	59,82%	61,57%	63,32%	65,07%	66,82%	66,82%
			2.	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi manajerial	67,58%	69,18%	72%	75%	78%	80%	80%
			3.	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional	78,15%	80%	83%	85%	87%	90%	90%
			4.	Persentase penilaian prestasi Kerja ASN tepat Waktu	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5.	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapat layanan, perlndungan dan penghargaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6.	Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	90,65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7.	Persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Penelitian dan Pengembangan								
			1.	Persentase (%) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5.	Penunjang Lainnya								
			1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kabupaten	20,28%	70%	75%	80%	90%	90%	90%
			2.	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB	10%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase pelanggaran pegawai	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			4.	Persentase Perangkat daerah yang menyusun pelaporan LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5.	Persentase Perangkat daerah yang menyusun LPPD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6.	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7.	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8.	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			9.	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	79,84%		87,50%	90%	92,50%	95%	95%

BAB IX

PENUTUP

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjabarkan visi dan misi dan program Kepala Daerah. Dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Belitung selama periode 2018-2023 yang sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan provinsi, dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dukungan seluruh *stake holder* pengampu pembangunan dan seluruh masyarakat Kabupaten Belitung.

Dengan Visi " Mewujudkan ekonomi yang berkadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023", merupakan langkah – langkah pemerintah Kabupaten Belitung untuk mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung yaitu "Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraaan masyarakat".

.

